



Katalog BPS: 9199017

Edisi 60
Mei 2015

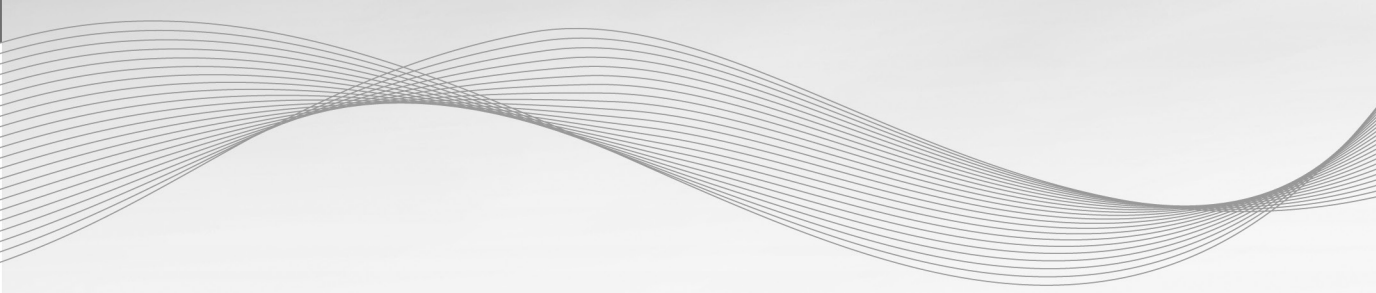
Laporan Bulanan **Data Sosial Ekonomi**



BADAN PUSAT STATISTIK

Edisi 60
Mei 2015

Laporan Bulanan
Data Sosial Ekonomi



Laporan Bulanan

Data Sosial Ekonomi

Mei 2015

ISSN: 2087-930X

Katalog BPS: 9199017

No. Publikasi: 03220.1505

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xxiv + 185 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Direktorat Statistik Distribusi

Direktorat Neraca Produksi

Direktorat Statistik Harga

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata

Direktorat Neraca Pengeluaran

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Direktorat Statistik Industri

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Dicetak dan Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik, 2015

HEADLINES

1. Inflasi

Pada April 2015 terjadi inflasi sebesar 0,36 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar -0,08 persen dan tingkat inflasi April 2015 terhadap April 2014 (tahun ke tahun) sebesar 6,79 persen.

2. Pertumbuhan PDB

- Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 (*y-on-y*) tumbuh 4,71 persen melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,14 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 dibanding triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 0,18 persen (*q-to-q*).

3. Ekspor

- Nilai ekspor Maret 2015 sebesar US\$13,71 miliar, naik 12,63 persen jika dibanding ekspor Februari 2015 dan turun 9,75 persen dibanding ekspor Maret 2014.
- Nilai ekspor nonmigas Maret 2015 mencapai US\$11,72 miliar yang terdiri dari produk hasil pertanian US\$0,47 miliar, hasil industri pengolahan US\$9,34 miliar, serta hasil tambang dan lainnya US\$1,91 miliar.

4. Impor

- Nilai impor Maret 2015 sebesar US\$12,58 miliar, naik 9,29 persen dibanding impor Februari 2015 dan turun 13,39 persen jika dibanding impor Maret 2014.
- Nilai impor menurut golongan penggunaan barang Maret 2015 mencakup barang konsumsi sebesar US\$0,93 miliar, bahan baku/penolong US\$9,31 miliar, dan barang modal US\$2,34 miliar.

5. Kependudukan

- Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa penduduk Indonesia Juni 2014 berjumlah 252.164,8 ribu orang.
- Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2014 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda.

6. Ketenagakerjaan

- Pada Februari 2015, jumlah penganggur sebesar 7,4 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,81 persen.

- Dalam setahun terakhir (Februari 2014–Februari 2015), jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 2,7 juta orang.

7. Upah Buruh

- Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Maret 2015 naik masing-masing sebesar 0,26 persen dan 0,73 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, serta upah nominal bulanan buruh industri naik 1,11 persen dari triwulan III-2014 ke triwulan IV-2014.
- Upah riil harian buruh tani Maret 2015 turun sebesar 0,21 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, upah riil harian buruh bangunan Maret 2015 naik 0,56 persen dibanding upah riil bulan sebelumnya, dan upah riil bulanan buruh industri triwulan IV-2014 turun sebesar 3,23 persen dibanding triwulan III-2014.

8. Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Pedesaan dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

- NTP April 2015 turun 1,37 persen dibanding Maret 2015.
- Pada April 2015, terjadi inflasi pedesaan sebesar 0,21 persen.
- NTUP April 2015 turun 1,58 persen dibanding Maret 2015.

9. Harga Pangan

- Rata-rata harga beras April 2015 sebesar Rp12.458,00 per kg, turun 4,82 persen dari bulan sebelumnya.
- Harga cabai rawit turun 8,87 persen; cabai merah turun 3,74 persen; telur ayam ras turun 1,43 persen sedangkan gula pasir naik 3,02 persen dan daging ayam ras naik 1,02 persen.

10. a. Indeks Harga Produsen

Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan) pada triwulan I-2015 naik 1,09 persen terhadap triwulan IV-2014 (*q-to-q*). Sedangkan terhadap triwulan I-2014 (*y-on-y*) naik 2,41 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

- IHPB Umum Nonmigas April 2015 naik sebesar 0,17 persen dibanding bulan sebelumnya.
- Pada Maret 2015 IHPB Umum naik sebesar 0,75 persen dibanding bulan sebelumnya.

11. Indeks Tendensi Bisnis dan Konsumen

- Kondisi bisnis triwulan I-2015 menurun dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 96,30). Tingkat optimisme pelaku bisnis lebih rendah dibandingkan triwulan IV-2014 (nilai ITB sebesar 104,07).
- Kondisi bisnis triwulan II-2015 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 109,65). Tingkat optimisme pelaku bisnis diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I-2015 (nilai ITB sebesar 96,30).
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2015 sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITK sebesar 100,87). Tingkat optimisme konsumen lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITK sebesar 106,72).
- Kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2015 diperkirakan meningkat (nilai ITK diperkirakan 107,91). Tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2015 (nilai ITK sebesar 100,87).

12. Produksi Tanaman Pangan Angka Sementara (ASEM) Tahun 2014

- Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 0,45 juta ton (0,63 persen) dibandingkan tahun 2013.
- Produksi jagung tahun 2014 sebanyak 19,03 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 0,52 juta ton (2,81 persen) dibandingkan tahun 2013.
- Produksi kedelai tahun 2014 sebanyak 953,96 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 173,96 ribu ton (22,30 persen) dibandingkan tahun 2013.

13. Industri

- Pertumbuhan produksi industri pengolahan/manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan I-2015 naik 5,05 persen dibanding triwulan I-2014 (*y-on-y*), dan mengalami penurunan 0,71 persen dari triwulan IV-2014 (*q-to-q*).
- Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan I-2015 naik 5,65 persen dibanding triwulan I-2014 (*y-on-y*), dan juga mengalami pertumbuhan 0,64 persen dari triwulan IV-2014 (*q-to-q*).

14. Pariwisata

- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Januari–Maret 2015 mencapai 2,30 juta kunjungan atau naik 3,51 persen dibandingkan dengan kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2014.
- TPK Hotel Berbintang Maret 2015 mencapai 49,13 persen atau turun 2,16 poin dibanding TPK Maret 2014.

- Sementara itu, rata-rata TPK hotel berbintang selama Januari–Maret 2015 tercatat sebesar 47,94 persen, turun 1,22 poin dibandingkan rata-rata TPK pada periode yang sama tahun 2014.

15. Transportasi

- Jumlah penumpang angkutan udara domestik Maret 2015 naik 8,35 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang angkutan udara internasional Maret 2015 naik 11,86 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Maret 2015 naik 6,41 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
- Jumlah penumpang kereta api Maret 2015 naik 19,64 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

16. Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran

Jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebanyak 27,73 juta orang (10,96 persen), berkurang 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen). Sementara untuk ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Rasio pada September 2014 tercatat sebesar 0,41.

17. Produksi Hortikultura

- Produksi cabai besar pada tahun 2013 sebesar 1,013 juta ton.
- Produksi cabai rawit pada tahun 2013 sebesar 0,714 juta ton.
- Produksi bawang merah pada tahun 2013 sebesar 1,011 juta ton.

18. a. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2014

Biaya produksi per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Sedangkan nilai produksinya masing-masing adalah sebesar Rp17,2 juta; Rp10,2 juta; Rp12,0 juta; dan Rp9,0 juta.

b. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan Jeruk Tahun 2014

- Biaya produksi usaha tanaman cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 masing-masing mencapai Rp52,1 juta; Rp34,0 juta; dan Rp67,2 juta.
- Biaya produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri dan yang ditebaskan tahun 2014 masing-masing mencapai Rp5,4 juta dan Rp5,7 juta.

- c. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014**
Rata-rata biaya produksi usaha setahun per hektar untuk komoditas kelapa sawit sebesar Rp9,7 juta (57,05 persen dari total nilai produksi); karet sebesar Rp9,2 juta (71,54 persen dari total nilai produksi); dan tebu Rp24,2 juta (77,98 persen dari total nilai produksi).
- d. Struktur Ongkos Usaha Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Ras Petelur, dan Ayam Ras Pedaging Tahun 2014.**
- Biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen).
 - Biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen).
 - Biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen).
 - Biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).
- e. Struktur Ongkos Usaha Perikanan Tahun 2014**
- Biaya produksi per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen terhadap nilai produksi); Rp4,2 juta (71,91 persen terhadap nilai produksi); dan Rp3,2 juta (44,16 persen terhadap nilai produksi).
 - Biaya produksi per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor dan perahu motor tempel masing-masing sebesar Rp4,1 juta (66,54 persen terhadap nilai produksi) dan Rp436 ribu (53,71 persen terhadap nilai produksi).
- f. Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jati, Mahoni, Sengon Tahun 2014**
Biaya produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, dan sengon masing-masing Rp0,9 juta; Rp1,2 juta; dan Rp0,8 juta atau masing-masing sebesar 10,20 persen; 19,30 persen; dan 20,71 persen terhadap nilai produksi.
- g. Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan Tahun 2014**
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan

dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2014 sebesar 3,61 dalam skala 0 sampai 5. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2013 (3,63) namun lebih tinggi dibandingkan capaian 2012 (3,55).
- Nilai IPAK selama ini termasuk dalam kategori “Anti Korupsi”. Kategorisasi nilai indeks adalah: 0–1,25 termasuk dalam kategori “Sangat Permisif Terhadap Korupsi”, nilai 1,26–2,50 termasuk dalam kategori “Permisif”, nilai 2,51–3,75 termasuk dalam kategori “Anti Korupsi”, dan nilai 3,76–5,00 termasuk dalam kategori “Sangat Anti Korupsi”.
- Indeks terhadap kebiasaan masyarakat menunjukkan naik dari tahun 2013 ke 2014, dari 3,66 menjadi 3,71. lalu indeks untuk pengalaman layanan publik tertentu turun dari 3,76 menjadi 3,64, dan indeks pengalaman layanan lainnya turun dari 3,25 menjadi 3,20.
IPAK 2014 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan lebih tinggi (3,71) dibanding di wilayah perdesaan (3,51).
- IPAK 2014 di kalangan laki-laki sedikit lebih tinggi (3,64) dibanding di kalangan perempuan (3,59).
- IPAK masyarakat dengan usia kurang dari 60 tahun lebih tinggi dibanding IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas. IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,54, sedangkan usia kurang dari 60 tahun berkisar 3,63.
- Pendidikan kemungkinan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan diikuti semakin tinggi IPAK, atau semakin tinggi pendidikan semakin anti korupsi. IPAK 2014 untuk masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,52, SLTA sebesar 3,85 dan di atas SLTA sebesar 4,01.

20. Perdagangan Komoditas Strategis 2014

Alur distribusi perdagangan terpanjang minyak goreng dan susu bubuk berada di Jawa Timur; terigu di DKI Jakarta; dan garam di Sumatera Barat. Sedangkan Alur distribusi perdagangan yang terpendek minyak goreng di Maluku; terigu dan garam di Kepulauan Riau; dan susu bubuk di Bali.

21. Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 sebesar 68,28 pada skala 0–100. Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia.

22. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

- Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa¹, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.
- Sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.
- Terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005².
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) bervariasi antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

23. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Februari 2015

- Rupiah terdepresiasi 0,76 persen terhadap dolar Amerika.
- Rupiah terdepresiasi 0,35 persen terhadap dolar Australia.
- Rupiah terdepresiasi 0,18 persen terhadap yen Jepang.
- Rupiah terapresiasi 3,28 persen terhadap euro.

¹ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat.

² Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

KATA PENGANTAR

Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi ini diterbitkan setiap awal bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data dan informasi yang dimuat tetap mengikuti perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan, tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Indonesia.

Buku ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Buku Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Edisi Mei 2015 ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan inflasi (s.d. April 2015), perkembangan triwulanan pertumbuhan ekonomi (s.d. triwulan I-2015), ekspor-impor (s.d. Maret 2015), perkembangan tahunan penduduk (s.d. Juni 2014), ketenagakerjaan (s.d. Februari 2015), upah buruh (s.d. Maret 2015), nilai tukar petani dan harga pangan (s.d. April 2015), harga produsen (s.d. triwulan I-2015) dan harga perdagangan besar (s.d. April 2015), perkembangan triwulanan indeks tendensi bisnis dan konsumen (s.d. triwulan I-2015), produksi tanaman pangan (angka sementara tahun 2014), perkembangan triwulanan indeks produksi industri (s.d. triwulan I-2015), pariwisata dan transportasi (s.d. Maret 2015), data kemiskinan (September 2014), struktur ongkos usaha pertanian dan survei kehutanan 2014, indeks perilaku anti korupsi Indonesia 2014, perdagangan komoditas strategis 2014, Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2014, serta Nilai Tukar Eceran Rupiah Maret 2015.

Lebih lanjut, keseluruhan data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan statistik resmi (*official statistics*) yang menjadi rujukan resmi bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Apabila masih diperlukan data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, dipersilahkan melihat publikasi BPS lainnya atau melalui *website* BPS: <http://www.bps.go.id>.

Jakarta, 5 Mei 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suryamin, M.Sc.

DAFTAR ISI

<i>HEADLINES</i>	iii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xxi
FOKUS PERHATIAN	1
I. INFLASI APRIL 2015	15
II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I-2015	20
III. EKSPOR MARET 2015	33
IV. IMPOR MARET 2015	38
V. KEPENDUDUKAN JUNI 2014	45
VI. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2015	51
VII. UPAH BURUH MARET 2015	57
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN APRIL 2015	60
IX. HARGA PANGAN APRIL 2015	67
X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN I-2015 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR APRIL 2015	74
XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN I-2015	82
XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA SEMENTARA (ASEM) 2014	90
XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN I-2015	94
XIV. PARIWISATA MARET 2015	99
XV. TRANSPORTASI NASIONAL MARET 2015	103
XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN SEPTEMBER 2014	106
XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2013	113
XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014	118
XIX. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2014	132
XX. PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2014	136

XXI. INDEKS KEBAHAGIAAN 2014	139
XXII. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014	144
XXIII. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH MARET 2015.....	161
XXIV. SUPLEMEN: METODOLOGI	165

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota April 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	17
Tabel 1.2	Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi April 2015 Menurut Komponen Perubahan Harga (2012=100)	17
Tabel 1.3	Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen).....	18
Tabel 1.4	Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)	18
Tabel 1.5	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Februari–Maret 2015 (persen).....	19
Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)	21
Tabel 2.2	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah).....	22
Tabel 2.3	Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2014, Triwulan IV-2014 dan Triwulan I-2015 (persen).....	24
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen)	25
Tabel 2.5	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran (triliun rupiah).....	26
Tabel 2.6	Struktur PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2014, Triwulan IV-2014 dan Triwulan I-2015 (persen).....	26
Tabel 2.7	Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)	27
Tabel 2.8	Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan I-2015 (persen).....	28
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2014 (persen).....	29
Tabel 2.10	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2014 (triliun rupiah)	30
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2012–2014 (persen).....	31
Tabel 2.12	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2012–2014 (triliun rupiah).....	32
Tabel 2.13	PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2014.....	32
Tabel 3.1	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$).....	34

Tabel 3.2	Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$) Triwulanan 2014–2015	35
Tabel 3.3	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)	35
Tabel 3.4	Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)	36
Tabel 3.5	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2013–2015 (FOB: juta US\$)	36
Tabel 4.1	Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya Januari–Maret 2014 dan 2015	40
Tabel 4.2	Perkembangan Impor Indonesia Maret 2014–Maret 2015	40
Tabel 4.3	Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya Januari–Maret 2014 dan 2015	41
Tabel 4.4	Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang Januari–Maret 2015	41
Tabel 4.5	Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang Januari–Maret 2014 dan 2015	42
Tabel 4.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2014–Maret 2015 (Nilai CIF: Juta US\$)	42
Tabel 4.7	Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari–Maret 2015 (juta US\$)	43
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Indonesia, Maret 2014–Maret 2015 (miliar US\$).....	43
Tabel 4.9	Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Maret 2015	44
Tabel 5.1	Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014 (ribu orang)	45
Tabel 5.2	Demografi Penduduk Indonesia, 2014.....	50
Tabel 6.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2013–2015 (juta orang)	51
Tabel 6.2	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2013–2015 (juta orang).....	53
Tabel 6.3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 2013–2015 (juta orang).....	54
Tabel 6.4	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (juta orang)	54

Tabel 6.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (persen).....	55
Tabel 6.6	Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 2014–2015	56
Tabel 7.1	Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah) Maret 2013–Maret 2015.....	58
Tabel 7.2	Upah Nominal dan Upah Riil Buruh Industri Per Bulan (rupiah), 2013–2014	59
Tabel 8.1	Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100).....	62
Tabel 8.2	Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran April 2013–April 2015	65
Tabel 8.3	Tingkat Inflasi Perdesaan April 2015, Tahun Kalender 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	65
Tabel 8.4	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya, April 2015 (2012=100)	66
Tabel 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, April 2014–April 2015	68
Tabel 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air serta Perubahannya, April 2014–April 2015	70
Tabel 9.3	Rata-Rata Harga Beras di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>), April 2014–April 2015.....	71
Tabel 9.4	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok April 2014–April 2015 (rupiah)	72
Tabel 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor Triwulan I-2015	74
Tabel 10.2	Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor Triwulan I-2015.....	77
Tabel 10.3	Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia Februari–April 2015, (2010=100)	78
Tabel 10.4	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar April 2015 (2010=100)	79
Tabel 10.5	Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia April 2015 Menurut Jenis Bangunan (2010=100).....	80

Tabel 11.1	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2015 Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha	83
Tabel 11.2	Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2015 dan Perkiraan Triwulan II-2015 Menurut Sektor.....	84
Tabel 11.3	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2014 dan Triwulan I-2015 Menurut Variabel Pembentuk	86
Tabel 11.4	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2015 Menurut Variabel Pembentuk	88
Tabel 11.5	Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I-2014–Triwulan I-2015 dan Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan II-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi	89
Tabel 12.1	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2012–2014	91
Tabel 12.2	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut <i>Subround</i> , 2012–2014	91
Tabel 12.3	Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija, 2012–2014	93
Tabel 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2013–2015 (persen) 2010=100	95
Tabel 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2012–2015 (persen) 2010=100	95
Tabel 13.3	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan I-2015 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	96
Tabel 13.4	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan Triwulan I-2013–Triwulan I-2015 (persen).....	98
Tabel 13.5	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan I-2015 Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)	98
Tabel 14.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Maret 2014–Maret 2015	102
Tabel 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi Maret 2014–Maret 2015	105
Tabel 16.1	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2014–September 2014	107

Tabel 16.2	Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2014.....	108
Tabel 16.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2014–September 2014.....	109
Tabel 16.4	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2014	111
Tabel 16.5	Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah, Maret–September 2014	112
Tabel 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan Tahun 2011–2013	114
Tabel 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan Tahun 2011–2013	115
Tabel 17.3	Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton) Menurut Wilayah dan Triwulan Tahun 2011–2013	117
Tabel 18.1	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014	118
Tabel 18.2	Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014	119
Tabel 18.3	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014	120
Tabel 18.4	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014	121
Tabel 18.5	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014	121
Tabel 18.6	Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditebaskan 2014	122
Tabel 18.7	Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014	123
Tabel 18.8	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014.....	124
Tabel 18.9	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014	126
Tabel 18.10	Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014	127

Tabel 18.11 Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014.....	128
Tabel 18.12 Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014.....	129
Tabel 18.13 Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014.....	130
Tabel 19.1 Nilai IPAK Tahun 2012–2014.....	133
Tabel 19.2 Indeks Menurut Sumber Keterangan, Tahun 2013–2014.....	133
Tabel 19.3 IPAK Menurut Wilayah, 2013–2014.....	134
Tabel 19.4 IPAK Menurut Jenis Kelamin, 2013–2014.....	134
Tabel 19.5 IPAK Menurut Umur, 2013–2014.....	135
Tabel 19.6 IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2013–2014.....	135
Tabel 20.1 Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Menurut Komoditi dan Fungsi Kelembagaan 2014.....	138
Tabel 21.1 Indeks Kebahagiaan Menurut Karakteristik Demografi dan Ekonomi 2013 dan 2014.....	141
Tabel 21.2 Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi, 2014.....	143
Tabel 22.1 Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014.....	149
Tabel 22.2 Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014.....	150
Tabel 22.3 IKG Desa Menurut Provinsi, 2014.....	151

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 82 Kota, 2013–2015.....	15
Grafik 1.2	Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2014–2015	19
Grafik 2.1	Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2014 s.d Triwulan I-2015 (persen).....	20
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha_Triwulan I-2015 (persen).....	21
Grafik 2.3	Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2015 (persen).....	25
Grafik 2.4	Peranan Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2015 (persen)	27
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2012–2014 (persen).....	29
Grafik 3.1	Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)_Maret 2013–Maret 2015	33
Grafik 4.1	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)_Maret 2014–Maret 2015	38
Grafik 4.2	Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)_Januari–Maret 2014 dan 2015	39
Grafik 5.1	Piramida Penduduk Indonesia, 2014	46
Grafik 5.2	Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2014	47
Grafik 5.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971-2014.....	48
Grafik 6.1	Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur 2013–2015 (juta orang)	52
Grafik 7.1	Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan Maret 2013– Maret 2015.....	57
Grafik 8.1	Nilai Tukar Petani (NTP), April 2014–April 2015 (2012=100).....	60
Grafik 8.2	Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)_April 2014–April 2015 (2012=100)	61
Grafik 8.3	Inflasi Perdesaan, April 2013–April 2015	64
Grafik 9.1	Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas_April 2014–April 2015.....	67
Grafik 9.2	Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas April 2014–April 2015	69

Grafik 9.3	Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok_Maret 2014–April 2015 (rupiah)	73
Grafik 10.1	Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor_Triwulan I-2012 s.d. Triwulan I-2015	75
Grafik 10.2	Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia_April 2012–April 2015	79
Grafik 10.3	Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan November 2014–April 2015	81
Grafik 11.1	Indeks Tendensi Bisnis ¹ Triwulan I-2010–Triwulan I-2015 dan_Perkiraan Triwulan II-2015	85
Grafik 11.2	Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2015_Tingkat Nasional dan Provinsi	87
Grafik 11.3	Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2015_Tingkat Nasional dan Provinsi.....	88
Grafik 12.1	Perkembangan Produksi Padi, 2011–2014	90
Grafik 12.2	Pola Panen Padi, 2012–2014	92
Grafik 13.1	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (<i>y-on-y</i>)_Triwulan II-2013–Triwulan I-2015.....	94
Grafik 13.2	Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (<i>y-on-y</i>)_Triwulan I-2013–Triwulan I-2015.....	97
Grafik 14.1	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk Maret 2013–Maret 2015	99
Grafik 14.2	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Maret 2013–Maret 2015	101
Grafik 15.1	Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi_Maret 2014–Maret 2015	103
Grafik 16.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah_Maret 2014–September 2014	106
Grafik 16.2	Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah,_Maret 2014–September 2014	110
Grafik 17.1	Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa_Tahun 2011–2013.....	113
Grafik 17.2	Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa_Tahun 2011–2013.....	115

Grafik 17.3 Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2011–2013.....	117
Grafik 18.1 Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014	129
Grafik 18.2 Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014.....	131
Grafik 18.3 Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014.....	131
Grafik 20.1 Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Indonesia	136
Grafik 21.1 Indeks Kebahagiaan Indonesia, 2013 dan 2014.....	139
Grafik 21.2 Tingkat Kepuasan Hidup Terhadap 10 Aspek Kehidupan, 2013 dan 2014	140
Grafik 22.1 Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014	144
Grafik 22.2 Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014.....	145
Grafik 22.3 Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014.....	146
Grafik 22.4 Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014.....	146
Grafik 22.5 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama	147
Grafik 22.6 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik.....	147
Grafik 22.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih	148
Grafik 22.8 Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014	152
Grafik 23.1 Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR (Maret dibanding Februari M.IV)	164
Grafik 23.2 Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR.....	164



FOKUS PERHATIAN

1. Pada April 2015 terjadi inflasi sebesar 0,36 persen

Pada April 2015 terjadi inflasi sebesar 0,36 persen. Dari 82 kota, tercatat 72 kota mengalami inflasi dan 10 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,31 persen dengan IHK 132,54 dan terendah terjadi di Cilacap sebesar 0,02 persen dengan IHK 120,76 sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 0,69 persen dengan IHK 112,66 dan terendah terjadi di Sukabumi dan Kendari sebesar 0,03 persen dengan IHK masing-masing 119,06 dan 114,62. Inflasi April 2015 sebesar 0,36 persen lebih tinggi dibanding kondisi April 2014 yang mengalami deflasi 0,02 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar -0,08 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2015 terhadap April 2014) sebesar 6,79 persen.

2. Triwulan I-2015 perekonomian Indonesia tumbuh 4,71 persen

Indonesia triwulan I-2015 dibanding triwulan I-2014 (*y-on-y*) tumbuh 4,71 persen melambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 2,32 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 10,53 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didukung oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan PMTB. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,01 persen dan diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,36 persen.

Sementara bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2015 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,18 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang tumbuh ekspansif sebesar 14,63 persen. Pertumbuhan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya seperti Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 3,06 persen

dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 2,24 persen. Namun pertumbuhan ini tidak mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi triwulan I-2015 disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar seperti Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor. Sementara dari sisi pengeluaran, ekonomi triwulan I-2015 didorong oleh peningkatan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,11 persen. Sementara komponen-komponen lainnya menunjukkan penurunan.

3. Nilai ekspor Indonesia Maret 2015 mencapai US\$13,71 miliar, turun 9,75 persen (*year-on-year*)

Nilai ekspor Indonesia Maret 2015 mencapai US\$13,71 miliar, turun 9,75 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year*), sementara jika dibanding ekspor Februari 2015 naik 12,63 persen. Nilai ekspor nonmigas Maret 2015 mencapai US\$11,72 miliar atau naik 12,50 persen dibanding ekspor nonmigas Februari 2015. Ekspor migas pada Maret 2015 mencapai US\$1,99 miliar atau naik 13,43 persen dibanding bulan sebelumnya. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Maret 2015 turun sebesar 8,00 persen dibanding ekspor nonmigas hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2014, dan ekspor nonmigas hasil tambang dan lainnya turun 12,03 persen, sementara ekspor nonmigas hasil pertanian naik 3,99 persen.

4. Nilai impor Indonesia Maret 2015 sebesar US\$12,58 miliar, turun sebesar 13,39 persen (*year-on-year*)

Nilai impor Indonesia Maret 2015 sebesar US\$12,58 miliar, atau naik sebesar 9,29 persen dibanding impor Februari 2015, dan turun 13,39 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor nonmigas Maret 2015 sebesar US\$10,31 miliar atau naik 5,32 persen dibanding Februari 2015. Sementara impor migas Maret 2015 tercatat sebesar US\$2,27 miliar, naik 31,89 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai impor nonmigas terbesar Maret 2015 adalah golongan barang mesin dan peralatan

mekanik dengan nilai US\$2,04 miliar, atau naik 14,86 persen dibanding Februari 2015 (US\$1,78 miliar). Negara pemasok barang impor nonmigas terbesar Januari-Maret 2015 ditempati oleh Tiongkok (US\$7,46 miliar) dengan pangsa 24,37 persen.

5. Jumlah penduduk Indonesia Juni 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang

Hasil proyeksi penduduk Indonesia keadaan Juni 2014 menunjukkan penduduk Indonesia berjumlah 252.164,8 ribu orang terdiri dari 126.715,2 ribu orang laki-laki dan 125.449,6 ribu orang perempuan. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk 2010-2014 sekitar 1,40 persen per tahun.

6. Pada Februari 2015, penduduk yang bekerja pada Sektor Industri meningkat 6,43 persen dibandingkan Februari 2014

Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, penduduk yang bekerja meningkat terutama pada Sektor Industri sebanyak 1,0 juta orang (6,43 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03 persen), dan Sektor Perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,25 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan Sektor Pertanian sebanyak 710 ribu orang (1,74 persen), Sektor Lainnya sebanyak 200 ribu orang (10,36 persen), dan Sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi sebanyak 140 ribu orang (2,63 persen).

7. Upah nominal harian buruh tani dan buruh bangunan Maret 2015 masing-masing sebesar Rp46.180,00 dan Rp79.657,00, sedangkan upah nominal bulanan buruh industri triwulan IV-2014 sebesar Rp2.177.400,00.

Secara nasional, rata-rata upah nominal buruh tani pada Maret 2015 sebesar Rp46.180,00, naik 0,26 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, dan secara riil turun sebesar 0,21 persen. Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Maret 2015 tercatat Rp79.657,00, naik 0,73 persen dibanding upah nominal bulan sebelumnya, sedangkan secara riil naik sebesar 0,56 persen. Sementara rata-rata upah nominal bulanan buruh industri pada triwulan IV-2014 sebesar Rp2.177.400,00, naik 1,11 persen

dibanding upah nominal triwulan sebelumnya, sedangkan secara riil turun sebesar 3,23 persen.

8. Nilai Tukar Petani (NTP) April 2015 tercatat 100,14, turun 1,37 persen dibanding Maret 2015, inflasi perdesaan sebesar 0,21 persen dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) turun sebesar 1,58 persen dibanding Maret 2015.

NTP April 2015 tercatat 100,14 atau turun sebesar 1,37 persen dibanding NTP Maret 2015 sebesar 101,53. Penurunan NTP bulan ini disebabkan turunnya NTP di empat subsektor yaitu Tanaman Pangan sebesar 3,44 persen, Tanaman Hortikultura 1,02 persen, Tanaman Perkebunan Rakyat 0,40 persen, dan Perikanan 0,43 persen. Sebaliknya, Sub sektor Peternakan naik sebesar 0,11 persen.

Pada April 2015 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,21 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 120,13. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 22 provinsi dan deflasi perdesaan di 11 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,98 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Lampung sebesar 0,02 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,59 persen, sedangkan deflasi perdesaan terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,01 persen.

Pada April 2015 terjadi penurunan NTUP sebesar 1,58 persen. Hal ini karena penurunan It (1,07 persen), sebaliknya indeks BPBBM naik (0,52 persen). Penurunan NTUP disebabkan oleh turunnya empat subsektor penyusun NTUP yaitu Tanaman Pangan (3,63 persen), Tanaman Hortikultura (1,38 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,60 persen), dan Perikanan (1,13 persen), sebaliknya Subsektor Peternakan naik sebesar 0,05 persen.

9. Rata-rata harga beras pada April 2015 sebesar Rp12.458,00 per kg, turun 4,82 persen

Rata-rata harga beras pada April 2015 sebesar Rp12.458,00 per kg, turun 4,82 persen dari bulan sebelumnya. Harga beras pada April 2015 (tahun ke tahun)

naik 10,12 persen, lebih tinggi dari inflasi periode yang sama (6,79 persen). Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain cabai rawit (8,87 persen); cabai merah (3,74 persen); telur ayam ras (1,43 persen) sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain gula pasir (3,02 persen) dan daging ayam ras (1,02 persen).

10. a. Indeks Harga Produsen (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan) pada triwulan I-2015 naik 1,09 persen terhadap triwulan IV-2014 (*q-to-q*). Sedangkan terhadap triwulan I-2014 (*y-on-y*) naik 2,41 persen

Indeks Harga Produsen (IHP) gabungan (Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan) mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen pada triwulan I-2015 (*q-to-q*). Kenaikan terjadi pada IHP Sektor Pertanian (1,89 persen) dan IHP Sektor Industri Pengolahan (1,99 persen), sedangkan IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 6,19 persen.

Dibandingkan terhadap triwulan I-2014 (*y-on-y*), IHP naik 2,41 persen. IHP Sektor Pertanian dan IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 6,35 persen dan 4,82 persen. Sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian turun sebesar 17,30 persen.

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nonmigas April 2015 naik sebesar 0,17 persen dari bulan sebelumnya

IHPB Umum Nonmigas April 2015 naik sebesar 0,17 persen dari bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu 1,43 persen dan terkecil terjadi pada Kelompok Barang Ekspor Nonmigas, yaitu 0,18 persen. Kelompok Barang Impor Nonmigas naik 0,40 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian naik 0,27 persen, sedangkan Sektor Industri turun sebesar 0,20 persen. Dibandingkan bulan sebelumnya, IHPB Umum Maret 2015 naik 0,75 persen. Kenaikan IHPB terbesar terjadi pada Sektor Industri sebesar 1,05 persen. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi

April 2015 naik 0,09 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada Kelompok Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal sebesar 0,18 persen.

11. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2015 sebesar 96,30 dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2015 sebesar 100,87

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) pada triwulan I-2015 sebesar 96,30, berarti kondisi bisnis menurun dari triwulan sebelumnya, hal ini karena adanya penurunan pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 95,06), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 95,13), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 97,83). Pada triwulan II-2015 kondisi bisnis diprediksi meningkat dari triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 109,65).

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional pada triwulan I-2015 sebesar 100,87 artinya kondisi ekonomi konsumen sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh rendahnya pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi dan tingkat konsumsi yang juga sedikit meningkat. Sedikit meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 13 provinsi (39,39 persen) meskipun terjadi penurunan kondisi ekonomi konsumen di 20 provinsi lainnya. Provinsi yang memiliki ITK tertinggi pada triwulan I-2015 adalah Provinsi Jawa Barat (ITK sebesar 104,43), sedangkan terendah adalah Provinsi Riau (ITK sebesar 90,72). Pada triwulan II-2015 kondisi ekonomi konsumen diprediksi akan meningkat (ITK sebesar 107,91). Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan mendatang terjadi di semua provinsi di Indonesia.

12. Produksi padi tahun 2014 (ASEM 2014) sebanyak 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 0,63 persen dibanding tahun 2013

Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,83 juta ton GKG, mengalami penurunan sebesar 0,45 juta ton (0,63 persen) dibandingkan tahun 2013. Penurunan produksi padi terjadi karena penurunan luas panen seluas 41,61 ribu hektar (0,30 persen) dan produktivitas sebesar 0,17 kuintal/hektar (0,33 persen). Dibandingkan tahun 2013, produksi jagung tahun 2014 naik sebanyak 0,52 juta

ton (2,81 persen) yang disebabkan oleh kenaikan luas panen seluas 16,51 ribu hektar (0,43 persen) dan produktivitas sebesar 1,15 kuintal/hektar (2,37 persen). Produksi kedelai tahun 2014 meningkat sebanyak 173,96 ribu ton (22,30 persen) dibandingkan tahun 2013 yang disebabkan adanya peningkatan luas panen seluas 64,23 ribu hektar (11,66 persen) dan produktivitas sebesar 1,35 kuintal/hektar (9,53 persen).

13. Pertumbuhan produksi IBS naik 5,05 persen dan IMK naik 5,65 persen pada triwulan I-2015 (*year-on-year*)

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) triwulan I-2015 naik 5,05 persen dibanding triwulan I-2014 (*year-on-year*) dan mengalami penurunan 0,71 persen dari triwulan IV-2014 (*q-to-q*). Pertumbuhan bulanan produksi IBS pada Maret 2015 naik 3,73 persen dari Februari 2015 (*m-to-m*), Februari 2015 turun 2,78 persen dari Januari 2015, dan Januari 2015 turun 1,08 persen dari Desember 2014. Pertumbuhan produksi industri mikro dan kecil (IMK) triwulan I-2015 naik 5,65 persen dibanding triwulan I-2014 (*y-on-y*), dan juga mengalami kenaikan 0,64 persen dari triwulan IV-2014 (*q-to-q*).

14. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Maret 2015 mencapai 789,6 ribu kunjungan, naik 3,13 persen dibanding Maret 2014

Jumlah kunjungan wisman Maret 2015 mencapai 789,6 ribu kunjungan atau naik 3,13 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan yang sama tahun 2014. Demikian pula jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2015, jumlah kunjungan wisman naik sebesar 0,37 persen. Sekitar 37,33 persen dari jumlah kunjungan wisman pada Maret 2015 datang melalui Bandara Ngurah Rai, Bali.

Sementara itu, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi pada Maret 2015 mencapai 49,13 persen atau mengalami penurunan 2,16 poin dibandingkan TPK Maret 2014.

15. Jumlah penumpang angkutan udara domestik Maret 2015 mencapai 5,1 juta orang, naik 12,26 persen (*year-on-year*)

Pada Maret 2015, jumlah penumpang angkutan udara domestik mencapai 5,1 juta orang atau naik 12,26 persen (*year-on-year*), angkutan udara internasional turun 5,55 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 2,57 persen, dan penumpang kereta api naik 19,40 persen. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angkutan udara domestik naik 8,35 persen, angkutan udara internasional naik 11,86 persen, penumpang pelayaran dalam negeri naik 6,41 persen, dan penumpang kereta api naik 19,64 persen.

16. Jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebanyak 27,73 juta orang (10,96 persen), berkurang 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen)

Selama periode Maret 2014–September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,51 juta orang pada Maret 2014 menjadi 10,36 juta orang pada September 2014), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,40 juta orang (dari 17,77 juta orang pada Maret 2014 menjadi 17,37 juta orang pada September 2014). Sementara untuk ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Rasio pada September 2014 tercatat sebesar 0,41.

17. Produksi cabai besar sebesar 1,013 juta ton, cabai rawit sebesar 0,714 juta ton dan bawang merah sebesar 1,011 juta ton

Produksi cabai besar segar dengan tangkai tahun 2013 sebesar 1,013 juta ton. Dibandingkan tahun 2012, terjadi kenaikan produksi sebesar 58,52 ribu ton (6,13 persen). Produksi cabai rawit segar dengan tangkai tahun 2013 sebesar 0,714 juta ton. Dibandingkan tahun 2012, terjadi kenaikan produksi sebesar 11,25 ribu ton (1,60 persen). Produksi bawang merah tahun 2013 sebesar 1,011 juta ton. Dibandingkan tahun 2012, produksi meningkat sebesar 46,55 ribu ton (4,83 persen).

18. a. Biaya produksi per musim tanam per hektar padi sawah sebesar 12,7 juta dengan komponen terbesar upah pekerja dan jasa pertanian sebesar 48,23 persen

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai masing-masing adalah sebesar Rp12,7 juta; Rp7,8 juta; Rp9,1 juta; dan Rp9,1 juta. Komponen terbesar dari total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah, padi ladang, jagung, dan kedelai adalah untuk upah pekerja dan jasa pertanian yang masing-masing adalah sebesar 48,23 persen (Rp6,1 juta); 62,36 persen (Rp4,9 juta); 44,93 persen (Rp4,1 juta); dan 44,82 persen (Rp4,1 juta) dari total biaya.

b. Biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta

Total biaya produksi usaha per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri untuk tanaman cabai merah Rp52,1 juta; tanaman cabai rawit Rp34,0 juta; tanaman bawang merah Rp67,2 juta; tanaman jeruk Rp5,4 juta. Persentase biaya produksi terbesar adalah upah pekerja, yaitu untuk cabai merah sebesar 47,74 persen; cabai rawit sebesar 54,85 persen; dan tanaman jeruk sebesar 32,07 persen. Untuk bawang merah persentase biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen.

c. Rata-rata biaya produksi kelapa sawit setahun per hektar mencapai Rp9,7 juta

Pengeluaran paling besar digunakan untuk tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Sedangkan rata-rata biaya usaha perkebunan karet setahun per hektar mencapai Rp9,2 juta dengan pengeluaran paling besar digunakan untuk biaya tenaga kerja sebesar 57,09 persen. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya produksi setahun per hektar mencapai Rp24,2 juta, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran sewa lahan yang mencapai 32,37 persen dari total biaya produksi.

d. Biaya produksi sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen). Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen). Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen).

e. Biaya produksi per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta

Jumlah biaya per hektar budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta; Rp4,2 juta; dan Rp3,2 juta. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit sebesar Rp3,0 juta (41,33 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha bandeng dan udang windu adalah upah pekerja, yaitu sebesar Rp965 ribu (23,21 persen) dan Rp796 ribu (24,73 persen).

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing sebesar Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen).

f. Biaya produksi terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen

Pengeluaran terbesar usaha tanaman jati selama setahun yang lalu adalah upah pekerja, yaitu sebesar 63,99 persen. Upah pekerja usaha untuk

tanaman mahoni sebesar 63,00 persen dan tanaman sengon sebesar 59,00 persen.

g. Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga

Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan sebanyak 8,64 juta rumah tangga. Sebesar 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan dan hanya 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah. Sebesar 37,35 persen rumah tangga di sekitar kawasan hutan melakukan pemungutan hasil hutan/menangkap satwa liar. Dari rumah tangga di sekitar kawasan hutan, sebesar 18,51 persen sumber pendapatannya berasal dari memungut hasil hutan/menangkap satwa liar.

19. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2014 sebesar 3,61, turun 0,02 poin

IPAK 2014 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi (3,71) dibanding di wilayah perdesaan (3,51). IPAK 2014 lebih tinggi pada penduduk usia kurang dari 60 tahun dibanding penduduk usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,63, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,64, dan usia 60 tahun ke atas sebesar 3,54. Sementara itu semakin tinggi tingkat pendidikan menunjukkan bahwa lebih tinggi pula nilai IPAK-nya. IPAK 2014 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,52, SLTA sebesar 3,85 dan di atas SLTA sebesar 4,01.

20. Marjin perdagangan minyak goreng 3,86 persen, terigu 5,92 persen, garam 23,82 persen, dan susu bubuk 13,02 persen

Dari Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 (Survei Poldis 2014) didapat informasi bahwa rata-rata rasio MPP minyak goreng adalah sebesar 3,86 persen, terigu 5,92 persen, garam 23,82 persen, dan susu bubuk 13,02 persen. Distribusi perdagangan komoditas tersebut melibatkan dua hingga delapan fungsi kelembagaan usaha perdagangan. Alur distribusi perdagangan terpanjang minyak goreng dan susu bubuk berada di Jawa Timur;

terigu di DKI Jakarta; dan garam di Sumatera Barat. Sedangkan yang terpendek minyak goreng di Maluku; terigu dan garam di Kepulauan Riau; dan susu bubuk di Bali.

21. Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 sebesar 68,28 pada skala 0–100

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 sebesar 68,28 pada skala 0–100. Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Terjadi peningkatan tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia sebesar 3,17 poin dibandingkan tahun 2013 dengan indeks yang hanya sebesar 65,11. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia.

Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

22. Tipologi Wilayah Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014

Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada April 2014 tercatat 82.190 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa³, 8.412 kelurahan dan 69 UPT. Podes juga mencatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota.

1. Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur:
 - Terdapat 10.985 desa/kelurahan (13,37 persen) tidak ada SD (termasuk MI).

³ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

- Terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) tidak ada SLTP.
 - Terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) tidak ada SLTA.
 - Sebanyak 117 kecamatan (1,65 persen) tidak tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu).
 - Sebanyak 1.495 kecamatan (21,13 persen) tidak ada pasar dengan bangunan.
 - Sebanyak 12.659 desa/kelurahan (15,40 persen) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN.
 - Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) tidak ada penerangan di jalan utama desa.
 - Sebanyak 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) dari 80.337 desa/kelurahan yang sarana transportasinya darat, ternyata kondisi jalannya tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.
2. Berdasarkan Podes 2014 teridentifikasi sebanyak 258 desa/kelurahan berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain (desa/kelurahan terdepan), yaitu 62 desa/kelurahan di Nusa Tenggara Timur, 65 desa di Kalimantan Barat, 1 desa di Kalimantan Timur, 81 desa di Kalimantan Utara, dan 49 desa di Papua.
 3. Menurut Podes 2014, terdapat 313 desa/kelurahan (tersebar di 17 provinsi) yang berada di 77 pulau dari sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005⁴.
 4. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0–100 yang dihitung untuk setiap desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG bervariasi

⁴ Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2.000 km² yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional

antar desa dengan rentang antara 6,83 sampai 97,89.

23. Perkembangan Nilai Tukar Eceran Rupiah Februari 2015

a. Rupiah terdepresiasi 0,76 persen terhadap dolar Amerika.

Rupiah terdepresiasi 0,76 persen terhadap dolar Amerika di Maret 2015. Rata-rata kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Amerika di 34 provinsi, tertinggi terjadi pada minggu ketiga Maret 2015 yaitu Rp13.125,80 per dolar Amerika.

b. Rupiah terdepresiasi 0,35 persen terhadap dolar Australia.

Rupiah terdepresiasi 0,35 persen terhadap dolar Australia di Maret 2015. Rata-rata kurs tengah eceran rupiah terhadap dolar Australia di 34 provinsi, tertinggi terjadi pada minggu keempat Maret 2015 yang mencapai Rp10.105,80 per dolar Australia.

c. Rupiah terdepresiasi 0,18 persen terhadap yen Jepang.

Rupiah terdepresiasi 0,18 persen terhadap yen Jepang di Maret 2015. Rata-rata kurs tengah eceran rupiah terhadap yen Jepang di 34 provinsi, tertinggi tercatat pada minggu ketiga Maret 2015 yang mencapai Rp108,25 per yen Jepang.

d. Rupiah terapresiasi 3,28 persen terhadap euro.

Rupiah terapresiasi 3,28 persen terhadap euro di Maret 2015. Rata-rata kurs tengah eceran rupiah terhadap euro di 34 provinsi, tertinggi terjadi pada pertama Maret 2015 yang mencapai Rp14.461,63 per euro.

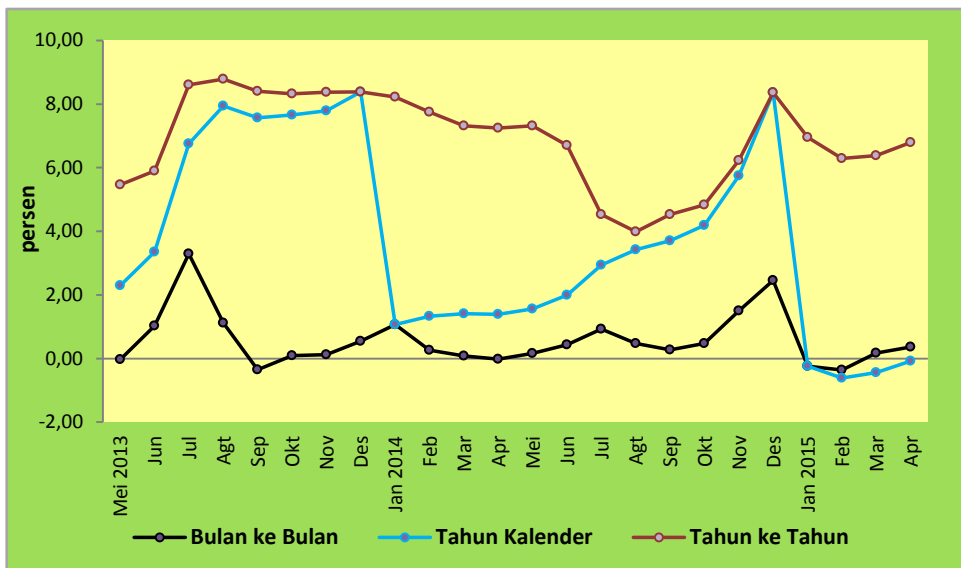
I. INFLASI APRIL 2015

1. Pada April 2015 terjadi inflasi sebesar 0,36 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 118,91. Dari 82 kota, tercatat 72 kota mengalami inflasi dan 10 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar

Pada April 2015 terjadi inflasi sebesar 0,36 persen

1,31 persen dengan IHK 132,54 dan terendah terjadi di Cilacap sebesar 0,02 persen dengan IHK masing-masing 120,76 sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 0,69 persen dengan IHK 112,66 dan terendah terjadi di Sukabumi dan Kendari sebesar 0,03 persen dengan IHK masing-masing 119,06 dan 114,62. Inflasi April 2015 sebesar 0,36 persen lebih tinggi dibanding kondisi April 2014 yang mengalami deflasi 0,02 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar -0,08 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2015 terhadap April 2014) sebesar 6,79 persen.

Grafik 1.1
Tingkat Inflasi Bulan ke Bulan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun
Gabungan 82 Kota, 2013–2015



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga, inflasi umum (*headline inflation*) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,50 persen;

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,22 persen; ; sandang 0,24 persen; kesehatan 0,38 persen; pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,05 persen; transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 1,80 persen dan penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks kelompok bahan makanan 0,79 persen.

3. Dari inflasi 0,36 persen, andil bensin 0,22; andil bawang merah 0,06; andil tarif angkutan dalam kota 0,04; andil bahan bakar rumahtangga dan tarif kereta api masing-masing 0,03; andil gula pasir dan tarif angkutan udara masing-masing 0,02.
4. Inflasi April 2015 sebesar 0,36 persen, angka tersebut lebih tinggi dibanding kondisi April 2014 yang mengalami deflasi 0,02 persen. Inflasi tahun kalender 2015 sebesar -0,08 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2015 terhadap April 2014) sebesar 6,79 persen.
5. Menurut karakteristik perubahan harga, inflasi April 2015 sebesar 0,36 persen dipengaruhi oleh kenaikan indeks pada komponen inti (*core*) 0,24 persen, komponen yang harganya diatur pemerintah (*administered prices*) 1,88 persen dan penurunan indeks pada komponen bergejolak (*volatile*) 0,91 persen.
6. Inflasi April 2015 sebesar 0,36 persen berasal dari sumbangan inflasi komponen inti 0,14 persen, barang/jasa yang harganya diatur pemerintah memberikan sumbangan inflasi 0,37 persen, dan komponen bergejolak memberikan sumbangan deflasi 0,15 persen.
7. Inflasi komponen inti April 2015 sebesar 0,24 persen, tahun kalender 2015 sebesar 1,49 persen, dan tahun ke tahun (April 2015 terhadap April 2014) sebesar 5,04 persen.
8. Pada Maret 2015, Afrika Selatan menjadi negara yang mengalami inflasi tertinggi dibandingkan beberapa negara lain, yaitu 1,40 persen.

Tabel 1.1
Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Gabungan 82 Kota April 2015
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2014	IHK Desember 2014	IHK April 2015	Inflasi April 2015 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2015 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	111,35	119,00	118,91	0,36	-0,08	6,79	0,36
1. Bahan Makanan	116,43	126,76	123,75	-0,79	-2,37	6,29	-0,15
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	112,17	118,84	121,48	0,50	2,22	8,30	0,08
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	109,34	115,55	117,56	0,22	1,74	7,52	0,06
4. Sandang	104,29	106,49	108,12	0,24	1,53	3,67	0,01
5. Kesehatan	107,15	111,00	113,32	0,38	2,09	5,76	0,02
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	106,56	110,37	110,98	0,05	0,55	4,15	0,01
7. Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	114,39	127,27	123,37	1,80	-3,06	7,85	0,33

¹⁾ Persentase perubahan IHK April 2015 terhadap IHK bulan sebelumnya.

²⁾ Persentase perubahan IHK April 2015 terhadap IHK Desember 2014.

³⁾ Persentase perubahan IHK April 2015 terhadap IHK April 2014.

Tabel 1.2
Indeks Harga Konsumen, Tingkat Inflasi, dan Andil Inflasi April 2015
Menurut Komponen Perubahan Harga
(2012=100)

Komponen	IHK April 2014	IHK Desember 2014	IHK April 2015	Inflasi April 2015 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2015 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke tahun (%)	Andil Inflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum	111,35	119,00	118,91	0,36	-0,08	6,79	0,36
Inti	107,52	111,28	112,94	0,24	1,49	5,04	0,14
Harga Diatur Pemerintah	120,37	139,27	136,33	1,88	-2,11	13,26	0,37
Bergejolak	117,03	128,01	124,34	-0,91	-2,87	6,25	-0,15

Tabel 1.3
Tingkat Inflasi Nasional Bulan ke Bulan dan Kalender (persen)

Bulan	Tingkat Inflasi Nasional (bulan ke bulan)						Tingkat Inflasi Nasional (kalender)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	0,84	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24	0,84	0,89	0,76	1,03	1,07	-0,24
Februari	0,30	0,13	0,05	0,75	0,26	-0,36	1,14	1,03	0,81	1,79	1,33	-0,61
Maret	-0,14	-0,32	0,07	0,63	0,08	0,17	0,99	0,70	0,88	2,43	1,41	-0,44
April	0,15	-0,31	0,21	-0,10	-0,02	0,36	1,15	0,39	1,09	2,32	1,39	-0,08
Mei	0,29	0,12	0,07	-0,03	0,16		1,44	0,51	1,15	2,30	1,56	
Juni	0,97	0,55	0,62	1,03	0,43		2,42	1,06	1,79	3,35	1,99	
Juli	1,57	0,67	0,70	3,29	0,93		4,02	1,74	2,50	6,75	2,94	
Agustus	0,76	0,93	0,95	1,12	0,47		4,82	2,69	3,48	7,94	3,42	
September	0,44	0,27	0,01	-0,35	0,27		5,28	2,97	3,49	7,57	3,71	
Oktober	0,06	-0,12	0,16	0,09	0,47		5,35	2,85	3,66	7,66	4,19	
November	0,60	0,34	0,07	0,12	1,50		5,98	3,20	3,73	7,79	5,75	
Desember	0,92	0,57	0,54	0,55	2,46		6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	

Tabel 1.4
Tingkat Inflasi Nasional Tahun ke Tahun (persen)

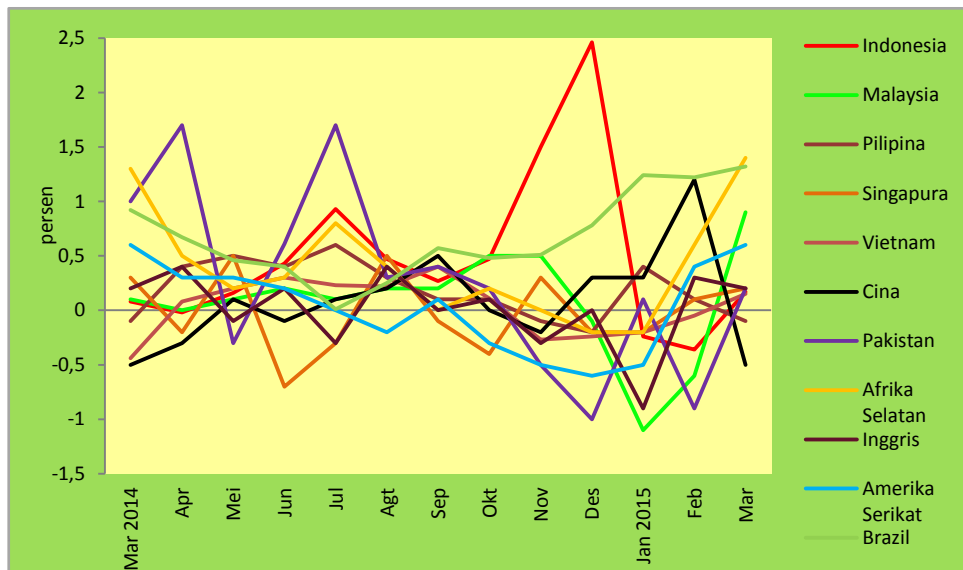
Bulan	2010:2009	2011:2010	2012:2011	2013:2012	2014:2013	2015:2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	3,72	7,02	3,65	4,57	8,22	6,96
Februari	3,81	6,84	3,56	5,31	7,75	6,29
Maret	3,43	6,65	3,97	5,90	7,32	6,38
April	3,91	6,16	4,50	5,57	7,25	6,79
Mei	4,16	5,98	4,45	5,47	7,32	
Juni	5,05	5,54	4,53	5,90	6,70	
Juli	6,22	4,61	4,56	8,61	4,53	
Agustus	6,44	4,79	4,58	8,79	3,99	
September	5,80	4,61	4,31	8,40	4,53	
Oktober	5,67	4,42	4,61	8,32	4,83	
November	6,33	4,15	4,32	8,37	6,23	
Desember	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	

Tabel 1.5
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, Februari–Maret 2015 (persen)

Negara	Bulan ke Bulan		Tahun ke Tahun (<i>Y-on-Y</i>)	
	Februari 2015	Maret 2015	Februari 2015	Maret 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Indonesia	-0,36	0,17	6,29	6,38
2. Malaysia	-0,60	0,90	0,10	0,90
3. Pilipina	0,10	-0,10	2,50	2,40
4. Singapura	0,10	0,20	-0,30	-0,30
5. Vietnam	-0,05	0,15	0,34	0,93
6. Tiongkok	1,20	-0,50	1,40	1,40
7. Pakistan	-0,90	0,20	3,20	2,50
8. Afrika Selatan	0,60	1,40	3,90	4,00
9. Inggris	0,30	0,20	0,00	0,00
10. Amerika Serikat	0,40	0,60	0,00	-0,10
11. Brazil	1,22	1,32	7,70	8,13

Sumber: <http://www.stats.gov.cn>, <http://www.statistics.gov.my>, <http://www.statpak.gov.pk>,
<http://www.census.gov.ph>, <http://www.singstat.gov.sg>, <http://www.gso.gov.vn>,
<http://www.bls.gov>, <http://www.ibge.gov.br>, <http://www.statistics.gov.uk>,
<http://www.statssa.gov.za>, dan www.bloomberg.com

Grafik 1.2
Tingkat Inflasi Beberapa Negara, 2014–2015

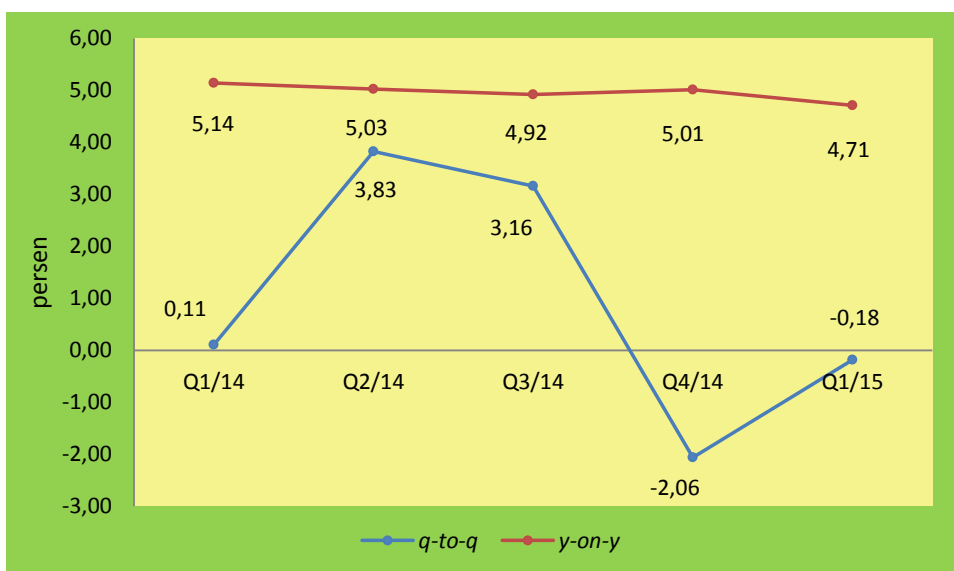


II. PDB DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I-2015

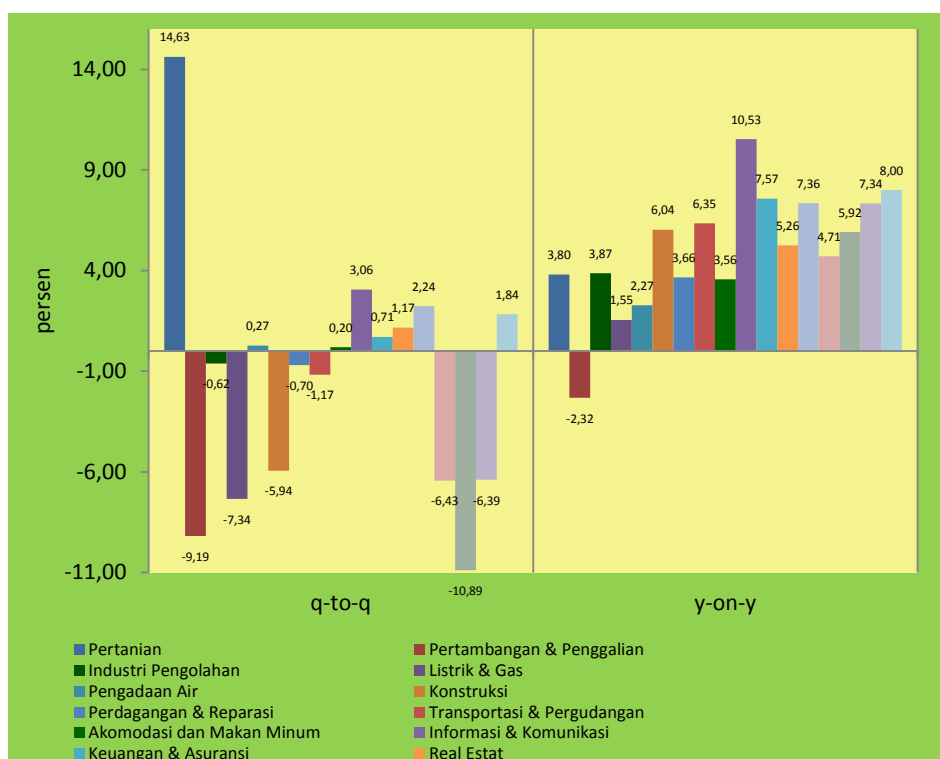
1. Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 dibandingkan triwulan I-2014 (*y-on-y*) tumbuh 4,71 persen dan dibandingkan triwulan IV-2014 (*q-to-q*) mengalami kontraksi sebesar 0,18 persen.
2. Dari sisi produksi, pertumbuhan triwulan I-2015 (*y-on-y*) terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 2,32 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 persen.
3. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi diwarnai oleh faktor musiman Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, khususnya komoditas padi yang mulai memasuki panen raya. Hal ini menyebabkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 14,63 persen. Di samping itu, pertumbuhan juga terjadi pada beberapa lapangan usaha lainnya, seperti Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, dan Jasa Lainnya.

**Triwulan I-2015,
perekonomian Indonesia
tumbuh 4,71 persen**

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Triwulan I-2014 s.d Triwulan I-2015 (persen)



Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Triwulan I-2015 (persen)



Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2015 Terhadap Triw IV-2014 (q-to-q)	Triw I-2015 Terhadap Triw I-2014 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2015 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,63	3,80	0,50
2. Pertambangan dan Penggalian	-9,19	-2,32	-0,22
3. Industri Pengolahan	-0,62	3,87	0,85
4. Pengadaan Listrik dan Gas	-7,34	1,55	0,02
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,27	2,27	0,00
6. Konstruksi	-5,94	6,04	0,57
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,70	3,66	0,50
8. Transportasi dan Pergudangan	-1,17	6,35	0,25

Lapangan Usaha	Triw I-2015 Terhadap Triw IV-2014 (q-to-q)	Triw I-2015 Terhadap Triw I-2014 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Triw I-2015 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	3,56	0,11
10. Informasi dan Komunikasi	3,06	10,53	0,47
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,71	7,57	0,28
12. Real Estat	1,17	5,26	0,16
13. Jasa Perusahaan	2,24	7,36	0,12
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-6,43	4,71	0,16
15. Jasa Pendidikan	-10,89	5,92	0,18
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-6,39	7,34	0,08
17. Jasa lainnya	1,84	8,00	0,13
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	-0,59	4,27	4,16
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	16,39	22,65	0,55
Produk Domestik Bruto	-0,18	4,71	4,71

4. Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2015 mencapai Rp2.724,7 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.157,5 triliun.

Tabel 2.2
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I- 2014	Triw IV- 2014	Triw I- 2015	Triw I- 2014	Triw IV- 2014	Triw I- 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	338,0	316,2	374,6	272,1	246,4	282,5
2. Pertambangan dan Penggalian	262,2	248,2	226,3	191,0	205,4	186,5
3. Industri Pengolahan	530,2	572,4	576,0	450,7	471,1	468,1
4. Pengadaan Listrik dan Gas	26,9	29,2	28,4	22,3	24,5	22,7
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,9	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7
6. Konstruksi	240,4	282,5	271,8	195,0	219,8	206,8
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	333,1	357,5	360,8	280,0	292,3	290,3

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2014	Triw IV-2014	Triw I-2015	Triw I-2014	Triw IV-2014	Triw I-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Transportasi dan Pergudangan	100,2	125,1	127,2	79,8	85,9	84,9
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	78,9	86,6	87,4	63,4	65,5	65,7
10. Informasi dan Komunikasi	89,4	95,2	98,3	92,7	99,4	102,4
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	97,4	107,3	110,0	77,7	83,0	83,6
12. Real Estat	70,4	77,6	80,8	62,8	65,4	66,1
13. Jasa Perusahaan	39,7	43,7	45,4	33,6	35,3	36,1
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	90,1	109,1	99,4	71,0	79,5	74,4
15. Jasa Pendidikan	77,3	98,4	85,8	62,9	74,8	66,7
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	24,8	30,0	28,0	21,5	24,6	23,0
17. Jasa lainnya	38,7	44,0	45,5	32,6	34,5	35,1
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	2 439,6	2 625,0	2 647,7	2 010,8	2 109,1	2 096,6
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	60,3	65,2	77,0	49,7	52,4	60,9
Produk Domestik Bruto	2 499,9	2 690,2	2 724,7	2 060,5	2 161,5	2 157,5

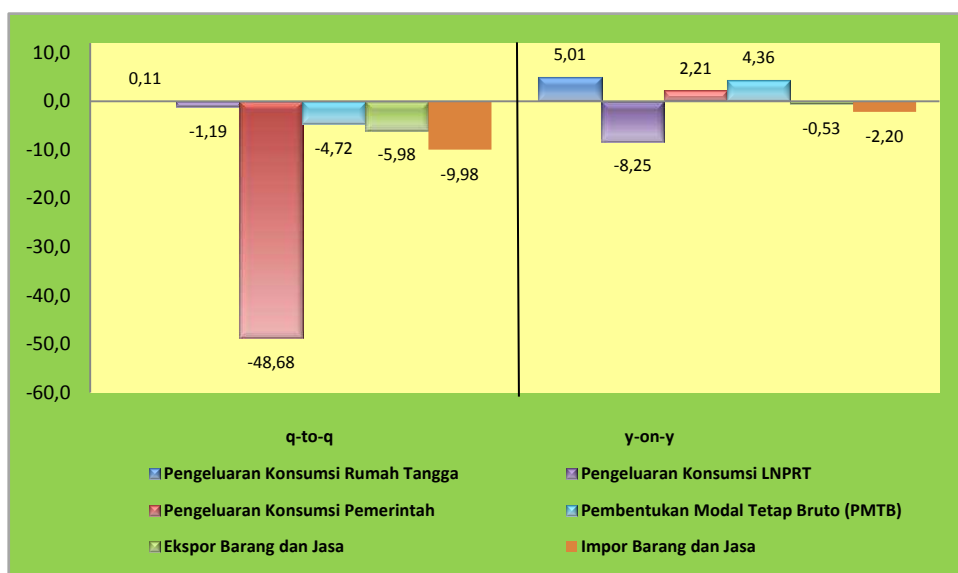
5. Struktur ekonomi Indonesia triwulan I-2015 didorong oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar-Eceran; dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor dengan peran masing-masing sebesar 21,14 persen, 13,75 persen, dan 13,24 persen. Selanjutnya, Konstruksi serta Pertambangan dan Penggalian memiliki peran masing-masing sebesar 9,98 persen dan 8,30 persen.

Tabel 2.3
Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2014, Triwulan IV-2014
dan Triwulan I-2015 (persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2014	Triw IV-2014	Triw I-2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,52	11,76	13,75
2. Pertambangan dan Penggalian	10,49	9,22	8,30
3. Industri Pengolahan	21,21	21,28	21,14
4. Pengadaan Listrik dan Gas	1,08	1,08	1,04
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07
6. Konstruksi	9,61	10,50	9,98
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,32	13,29	13,24
8. Transportasi dan Pergudangan	4,01	4,65	4,67
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,16	3,22	3,21
10. Informasi dan Komunikasi	3,58	3,54	3,61
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	3,99	4,04
12. Real Estat	2,82	2,89	2,96
13. Jasa Perusahaan	1,59	1,63	1,66
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,60	4,06	3,65
15. Jasa Pendidikan	3,09	3,66	3,15
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	1,11	1,03
17. Jasa lainnya	1,55	1,63	1,67
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	97,59	97,58	97,17
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	2,41	2,42	2,83
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00

6. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2015 dibandingkan dengan triwulan I-2014 didukung oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,01 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,36 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2,21 persen. Sementara komponen lainnya mengalami penurunan.

Grafik 2.3
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2015 (persen)



7. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran didukung oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang meningkat sebesar 0,11 persen. Sementara komponen lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw I-2015 Terhadap Triw IV-2014	Triw I-2015 Terhadap Triw I-2014	Sumber Pertumbuhan Triw I-2015 (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,11	5,01	2,75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,19	-8,25	-0,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-48,68	2,21	0,14
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-4,72	4,36	1,40
5. Perubahan Inventori	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	-5,98	-0,53	-0,13
7. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	-9,98	-2,20	-0,51
PDB	-0,18	4,71	4,71

Tabel 2.5
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran
(triliun rupiah)

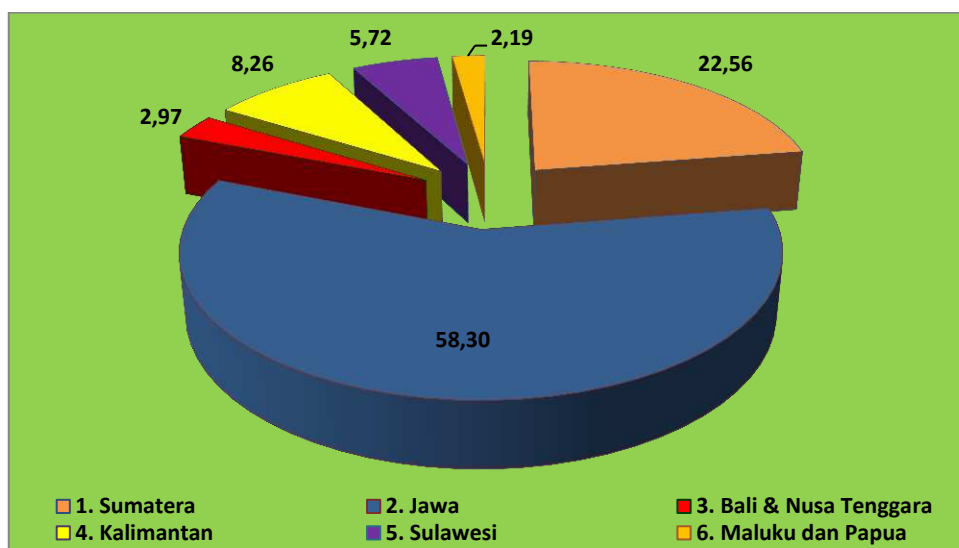
Jenis Pengeluaran	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Triw I-2014	Triw IV-2014	Triw I-2015	Triw I-2014	Triw IV-2014	Triw I-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1 417,6	1 531,4	1 529,1	1 131,5	1 186,8	1 188,1
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	31,5	31,2	30,7	25,8	23,9	23,7
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	165,9	351,1	178,5	130,2	259,4	133,1
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	799,4	924,2	891,1	660,3	723,2	689,1
5. Perubahan Inventori	72,3	-14,5	77,8	54,7	-10,2	55,1
6. Diskrepani Statistik	8,1	-108,8	0,0	35,4	-31,8	38,0
7. Ekspor Barang dan Jasa	625,3	641,7	602,6	501,6	530,7	499,0
8. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	620,1	666,1	585,2	479,1	520,4	468,5
PDB	2 500,0	2 690,2	2 724,7	2 060,5	2 161,5	2 157,5

8. Di sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDB, yaitu 56,12 persen (triwulan I-2015), sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (56,92 persen). Sedangkan kontribusi komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor, Impor dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada triwulan I-2015 masing-masing sebesar 32,70 persen, 22,12 persen, 21,48 persen, dan 6,55 persen.

Tabel 2.6
Struktur PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan I-2014, Triwulan IV-2014 dan Triwulan I-2015 (persen)

Jenis Pengeluaran	Triw I-2014	Triw IV-2014	Triw I-2015
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	56,71	56,92	56,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,26	1,16	1,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,64	13,05	6,55
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	31,98	34,35	32,70
5. Perubahan Inventori	2,89	-0,54	2,85
6. Diskrepani Statistik	0,32	-4,04	0,00
7. Ekspor Barang dan Jasa	25,01	23,85	22,12
8. <u>Dikurangi</u> Impor Barang dan Jasa	24,81	24,76	21,48
PDB	100,00	100,00	100,00

Grafik 2.4
Peranan Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional Triwulan I-2015 (persen)



9. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2015 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,30 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,56 persen, Pulau Kalimantan 8,26 persen, dan Pulau Sulawesi 5,72 persen, dan sisanya 5,16 persen di pulau-pulau lainnya.

Tabel 2.7
Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional (persen)

Wilayah/Pulau	2013	2014	2014		Triw I-2015
			Triw I	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sumatera	23,08	23,17	23,32	22,71	22,56
2. Jawa	57,08	57,38	57,28	57,65	58,30
3. Bali dan Nusa Tenggara	2,81	2,87	2,77	3,00	2,97
4. Kalimantan	9,23	8,71	8,96	8,61	8,26
5. Sulawesi	5,49	5,65	5,43	5,81	5,72
6. Maluku dan Papua	2,31	2,22	2,24	2,22	2,19
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: atas dasar harga berlaku

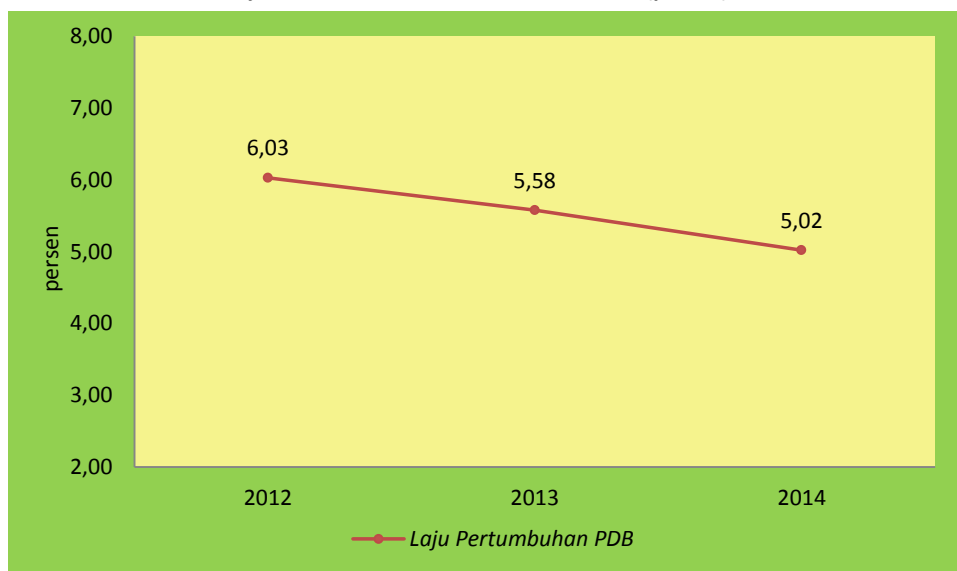
10. Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan I-2015 menurut kelompok provinsi dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi sebesar 53,24 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dengan pertumbuhan *y-on-y* masing-masing sebesar 5,08 persen; 5,18 persen; 4,93 persen; dan 5,54 persen.

Tabel 2.8
Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan I-2015 (persen)

Provinsi	Pertumbuhan			Kontribusi	
	<i>q-to-q</i>	<i>y-on-y</i>	<i>c-to-c</i>	Terhadap Pulau	Terhadap Total 33 Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	0,03	3,53	3,53	100,00	22,56
01. Aceh	-2,83	-1,88	-1,88	5,14	1,16
02. Sumatra Utara	1,61	4,78	4,78	22,00	4,96
03. Sumatra Barat	-0,27	5,46	5,46	7,15	1,61
04. Riau	-3,83	-0,18	-0,18	24,91	5,62
05. Jambi	0,50	5,92	5,92	6,20	1,40
06. Sumatra Selatan	0,56	4,77	4,77	12,78	2,88
07. Bengkulu	0,24	5,44	5,44	1,92	0,43
08. Lampung	6,79	4,91	4,91	9,71	2,19
09. Kep. Bangka Belitung	-0,48	4,10	4,10	2,35	0,53
10. Kepulauan Riau	0,14	7,14	7,14	7,84	1,77
Jawa	0,49	5,17	5,17	100,00	58,30
11. DKI Jakarta	-0,12	5,08	5,08	29,05	16,93
12. Jawa Barat	0,48	4,93	4,93	22,48	13,11
13. Jawa Tengah	2,56	5,54	5,54	14,94	8,71
14. DI Yogyakarta	0,16	4,20	4,20	1,53	0,89
15. Jawa Timur	0,19	5,18	5,18	24,85	14,49
16. Banten	-0,38	5,69	5,69	7,15	4,17
Bali dan Nusa Tenggara	-1,41	8,86	8,86	100,00	2,97
17. Bali	-1,53	6,20	6,20	50,81	1,51
18. Nusa Tenggara Barat	1,21	16,53	16,53	28,06	0,83
19. Nusa Tenggara Timur	-4,83	4,60	4,60	21,13	0,63
Kalimantan	-3,44	1,06	1,06	100,00	8,26
20. Kalimantan Barat	-2,71	4,75	4,75	15,10	1,25
21. Kalimantan Tengah	3,98	7,82	7,82	10,57	0,87
22. Kalimantan Selatan	-4,78	3,92	3,92	14,44	1,19
23. Kalimantan Timur	-4,42	-1,32	-1,32	59,89	4,95
Sulawesi	-2,00	7,32	7,32	100,00	5,72
24. Sulawesi Utara	-12,23	6,42	6,42	12,79	0,73
25. Sulawesi Tengah	2,35	17,76	17,76	16,07	0,92
26. Sulawesi Selatan	0,23	5,23	5,23	49,38	2,82
27. Sulawesi Tenggara	-4,51	5,77	5,77	12,68	0,72
28. Gorontalo	4,13	4,69	4,69	4,33	0,25
29. Sulawesi Barat	-4,26	6,02	6,02	4,76	0,27
Maluku dan Papua	-0,99	3,74	3,74	100,00	2,19
30. Maluku	-1,91	4,08	4,08	13,48	0,30
31. Maluku Utara	0,10	5,27	5,27	10,44	0,23
32. Papua Barat	-1,78	-1,50	-1,50	25,27	0,55
33. Papua	-0,64	5,79	5,79	50,81	1,11

11. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2014 meningkat sebesar 5,02 persen terhadap tahun 2013, terjadi pada semua lapangan usaha ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi 10,02 persen dan terendah di Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,55 persen.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan PDB Tahun 2012–2014 (persen)



12. Pada tahun 2014, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total perekonomian sebesar 21,02 persen diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,38 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,38 persen.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012–2014 (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,59	4,20	4,18	13,37	13,39	13,38
B Pertambangan dan Penggalian	3,02	1,74	0,55	11,61	10,95	9,82
C Industri Pengolahan	5,62	4,49	4,63	21,46	20,98	21,02
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,06	5,23	5,57	1,11	1,04	1,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,34	4,06	3,05	0,08	0,08	0,07
F Konstruksi	6,56	6,11	6,97	9,35	9,51	9,88
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5,40	4,71	4,84	13,21	13,27	13,38

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan	7,11	8,38	8,00	3,64	3,87	4,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,64	6,80	5,91	2,93	3,04	3,14
J	Informasi dan Komunikasi	12,28	10,39	10,02	3,61	3,58	3,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,54	9,09	4,93	3,72	3,87	3,88
L	Real Estat	7,41	6,54	5,00	2,76	2,77	2,79
M,N	Jasa Perusahaan	7,44	7,91	9,81	1,48	1,52	1,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,13	2,38	2,49	3,95	3,90	3,84
P	Jasa Pendidikan	8,22	8,20	6,29	3,14	3,25	3,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,97	7,83	8,01	1,00	1,01	1,03
R,S,T,U	Jasa Lainnya	5,76	6,41	8,92	1,42	1,47	1,56
Nilai Tambah Atas Harga Dasar		5,85	5,21	5,02	97,84	97,50	97,50
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk		15,05	22,10	5,13	2,16	2,50	2,50
Produk Domestik Bruto		6,03	5,58	5,02	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

13. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapai Rp10.542,7 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (tahun 2010) mencapai Rp8.568,1 triliun.

Tabel 2.10
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012–2014 (triliun rupiah)

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 152,3	1 275,0	1 410,7	1 039,4	1 083,2	1 128,5
B	Pertambangan dan Penggalian	1 000,3	1 043,0	1 035,1	771,6	785,0	789,3
C	Industri Pengolahan	1 848,1	1 998,7	2 215,8	1 697,8	1 774,1	1 856,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	95,6	98,7	114,1	84,4	88,8	93,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,6	7,1	7,7	6,3	6,6	6,8
F	Konstruksi	805,2	906,0	1 041,9	728,2	772,7	826,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 138,5	1 263,8	1 410,9	1 067,9	1 118,2	1 172,4
H	Transportasi dan Pergudangan	313,2	368,7	450,6	284,7	308,5	333,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252,6	289,5	330,7	228,2	243,7	258,2
J	Informasi dan Komunikasi	311,4	341,0	368,9	316,3	349,2	384,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	320,5	368,9	408,6	280,9	306,4	321,5
L	Real Estat	237,9	264,3	294,6	229,3	244,2	256,4
M,N	Jasa Perusahaan	127,7	144,6	166,0	116,3	125,5	137,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	340,6	371,2	404,4	282,2	289,0	296,1

Lapangan Usaha		Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
P	Jasa Pendidikan	270,4	309,4	346,6	232,7	251,8	267,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,2	96,7	109,1	78,4	84,5	91,3
R,S,T,U	Jasa Lainnya	122,6	140,3	163,5	115,7	123,1	134,1
Nilai Tambah Atas Harga Dasar		8 429,7	9 286,9	10 279,2	7 560,3	7 954,5	8.354,0
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk		186,0	237,8	263,5	166,8	203,7	214,1
Produk Domestik Bruto		8 615,7	9 524,7	10 542,7	7 727,1	8 158,2	8 568,1

15. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,02 persen ditopang oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,14 persen. Sementara itu, Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh 12,43 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh 1,98 persen, dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 4,12 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dari pertumbuhan tahun lalu lebih disebabkan oleh komponen Ekspor yang tumbuh hanya sebesar 1,02 persen dan Komponen Impor Barang dan Jasa yang tumbuh hanya 2,19 persen.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2012–2014 (persen)

Jenis Pengeluaran		Laju Pertumbuhan ¹			Distribusi ²		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,49	5,38	5,14	55,35	56,20	56,07
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,68	8,18	12,43	1,04	1,09	1,18
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,53	6,93	1,98	9,25	9,50	9,54
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	9,13	5,28	4,12	32,72	32,12	32,57
5	Perubahan Inventori	-	-	-	2,35	1,92	2,08
6	Ekspor Barang dan Jasa	1,61	4,17	1,02	24,59	23,98	23,72
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8,00	1,86	2,19	24,99	24,76	24,48
Diskrepansi Statistik		-	-	-	-0,31	-0,05	-0,68
PDB		6,03	5,58	5,02	100,00	100,00	100,00

¹⁾ Atas dasar harga konstan 2010

²⁾ Atas dasar harga berlaku

16. Pada tahun 2014, PDB dari sisi pengeluaran digunakan untuk memenuhi Konsumsi Rumah Tangga sebesar 56,07 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi Fisik 32,57 persen, Ekspor Barang dan Jasa 23,72 persen, Konsumsi Pemerintah 9,54 persen, dan Konsumsi LNPRT 1,18 persen. Sedangkan untuk penyediaan dari Impor sebesar 23,72 persen.

Tabel 2.12
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Tahun 2012–2014 (triliun rupiah)

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4 768,7	5 352,7	5 911,2	4 195,8	4 421,7	4 649,1
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	89,6	103,9	124,5	81,9	88,6	99,6
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	796,8	905,0	1 005,4	681,8	729,1	743,5
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2 819,0	3 059,8	3 434,1	2 527,7	2 661,3	2 771,0
5 Perubahan Inventori	202,6	183,3	219,0	174,2	149,1	162,9
6 Ekspor Barang dan Jasa	2 119,0	2 283,8	2 501,2	1 945,1	2 026,1	2 046,7
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2 152,9	2 359,2	2 580,5	1 910,3	1 945,9	1 988,5
Diskrepani Statistik	-27,2	-4,5	-72,2	30,9	28,1	83,9
PDB	8 615,7	9 524,7	10 542,7	7 727,1	8 158,2	8 568,1

17. Dalam kurun waktu 2010-2014, PDB per kapita atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp28,8 juta, tahun 2011 sebesar Rp32,4 juta, tahun 2012 sebesar Rp35,1 juta, pada tahun 2013 mencapai Rp38,3 juta, dan pada tahun 2014 mencapai Rp41,8 juta.

Tabel 2.13
PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2010–2014

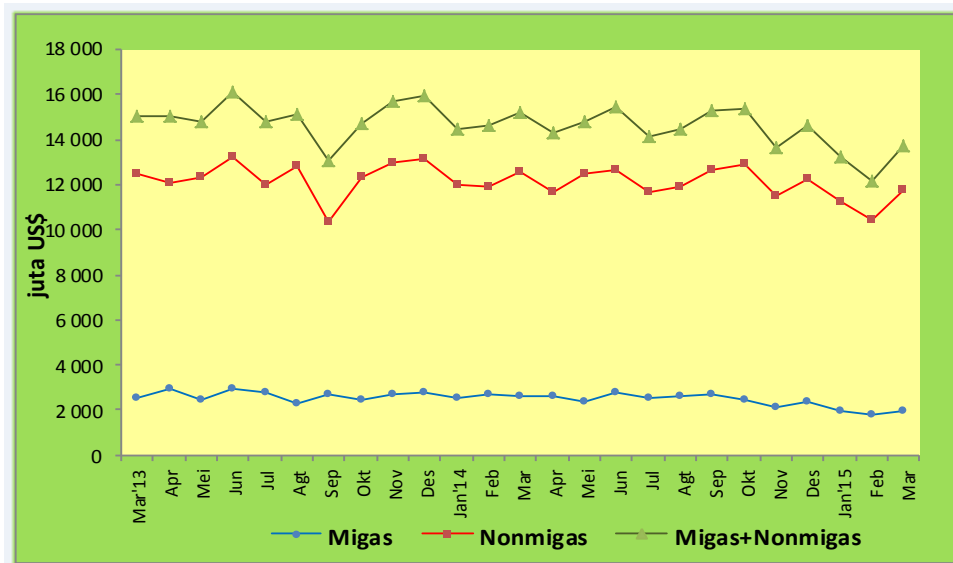
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku					
a. Nilai (juta rupiah)	28,8	32,4	35,1	38,3	41,8
b. Indeks Peningkatan (persen)	-	12,46	14,50	9,04	9,22
c. Nilai (US\$)	3 198,3	3 721,2	3 751,4	3 669,7	3 531,5

III. EKSPOR MARET 2015

1. Nilai ekspor Indonesia Maret 2015 mencapai US\$13,71 miliar, atau naik sebesar 12,63 persen dibanding ekspor Februari 2015. Sementara bila dibanding Maret 2014, ekspor turun sebesar 9,75 persen.

Nilai ekspor Maret 2015 mencapai US\$13,71 miliar, naik 12,63 persen

Grafik 3.1
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia (FOB)
Maret 2013–Maret 2015



2. Ekspor nonmigas Maret 2015 mencapai US\$11,72 miliar, naik 12,50 persen dibanding ekspor nonmigas Februari 2015, sementara turun 6,61 persen dibanding ekspor Maret 2014.
3. Secara kumulatif nilai ekspor Januari–Maret 2015 mencapai US\$39,13 miliar atau turun 11,67 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2014, demikian juga ekspor nonmigas mencapai US\$33,43 miliar atau turun 8,23 persen.
4. Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Maret 2015 terhadap Februari 2015 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US\$324,7 juta (23,61 persen), sedangkan penurunan terbesar terjadi pada nikel sebesar US\$45,9 juta (55,03 persen).

5. Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat Maret 2015 mencapai angka terbesar, yaitu US\$1,33 miliar, disusul Jepang US\$1,28 miliar dan Tiongkok US\$1,11 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 31,69 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar US\$1,22 miliar.
6. Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari–Maret 2015 turun sebesar 8,00 persen dibanding ekspor hasil industri pengolahan periode yang sama tahun 2014, dan ekspor hasil tambang dan lainnya turun 12,03 persen, sedangkan ekspor hasil pertanian naik 3,99 persen.
7. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada periode Januari–Maret 2015 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US\$6,32 miliar (16,14 persen), diikuti Kalimantan Timur sebesar US\$5,23 miliar (13,38 persen) dan Jawa Timur sebesar US\$4,67 miliar (11,93 persen).

Tabel 3.1
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia dan Persentase Perubahannya ($\Delta\%$)

Uraian	2014		2015			Δ (%)			Peran (%) Jan–Mar 2015
	Maret	Jan–Mar	Februari	Maret	Jan–Mar	y-on-y	m-on-m	y-on-y Jan–Mar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Total Ekspor	15 192,6	44 299,0	12 172,8	13 710,8	39 128,5	-9,75	12,63	-11,67	100,00
Migas	2 641,3	7 872,1	1 753,4	1 988,9	5 701,3	-24,70	13,43	-27,58	14,57
-Minyak Mentah	872,9	2 210,2	604,8	773,0	1 859,7	-11,44	27,81	-15,86	4,75
-Hasil Minyak	340,6	914,2	207,3	188,6	607,5	-44,64	-9,02	-33,54	1,55
-Gas	1 427,8	4 747,7	941,3	1 027,3	3 234,1	-28,05	9,14	-31,88	8,27
Nonmigas	12 551,3	36 426,9	10 419,4	11 721,9	33 427,2	-6,61	12,50	-8,23	85,43
-Pertanian	436,5	1 267,0	412,1	467,2	1 317,5	7,03	13,37	3,99	3,37
-Industri Pengolahan	10 063,5	29 262,2	8 456,1	9 343,9	26 921,6	-7,15	10,50	-8,00	68,80
-Pertambangan dan Lainnya	2 051,3	5 897,7	1 551,2	1 910,8	5 188,1	-6,85	23,18	-12,03	13,26

Tabel 3.2
Perkembangan Nilai FOB Ekspor Indonesia (juta US\$)
Triwulanan 2014–2015

Uraian	2014				2015	Perubahan Triwulan (%)				
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		II'14	III'14	IV'14	I'15	I'15
						thd I'14	thd II'14	thd III'14	thd IV'14	thd I'14
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Total Ekspor	44 299,0	44 525,5	43 881,6	43 586,5	39 128,5	0,51	-1,45	-0,67	-10,23	-11,67
Migas	7 872,1	7 813,0	7 717,1	6 929,7	5 701,3	-0,75	-1,23	-10,20	-17,73	-27,58
-Minyak Mentah	2 210,2	2 432,1	2 547,1	2 338,8	1 859,7	10,04	4,73	-8,18	-20,48	-15,86
-Hasil Minyak	914,2	1 024,4	862,0	822,8	607,5	12,06	-15,86	-4,55	-26,16	-33,54
-Gas	4 747,7	4 356,5	4 308,0	3 768,1	3 234,1	-8,24	-1,11	-12,53	-14,17	-31,08
Nonmigas	36 426,9	36 712,5	36 164,5	36 656,8	33 427,2	0,78	-1,49	1,36	-8,81	-8,23
-Pertanian	1 267,0	1 386,5	1 568,6	1 548,5	1 317,5	9,44	13,13	-1,28	-14,91	3,99
-Industri Pengolahan	29 262,2	29 844,0	28 743,3	29 480,3	26 921,6	1,99	-3,69	2,56	-8,68	-8,00
-Pertambangan dan Lainnya	5 897,7	5 482,0	5 852,6	5 628,0	5 188,1	-7,05	6,76	-3,84	-7,82	-12,03

Tabel 3.3
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Beberapa Golongan Barang HS 2 Digit dan Perubahannya (Δ)

Golongan Barang (HS)	Februari 2015	Maret 2015	Δ	Δ%	Januari-Maret			Peran(%) 2015
					2014	2015	Δ%	
					(1)	(2)	(3)	
1. Bahan bakar mineral (27)	1 375,2	1 699,9	324,7	23,61	5 630,4	4 598,6	-18,33	13,76
2 Lemak dan minyak hewan/nabati (15)	1 446,0	1 575,7	129,7	8,97	5 288,1	4 571,2	-13,56	13,67
3. Mesin/peralatan listrik (85)	681,0	748,4	67,4	9,89	2 460,9	2 147,1	-12,75	6,42
4. Perhiasan/permata (71)	538,4	668,4	130,0	24,15	1 301,7	1 975,4	51,75	5,91
5. Kayu, barang dari kayu (44)	297,0	395,9	98,9	33,31	991,8	1 015,7	2,41	3,04
6. Timah (80)	135,9	107,2	-28,7	-21,15	386,6	372,9	-3,53	1,12
7. Besi dan baja (72)	116,3	90,7	-25,6	-22,02	199,3	281,4	41,22	0,84
8. Nikel (75)	83,4	37,5	-45,9	-55,03	217,5	191,6	-11,92	0,57
9. Perangkat optik (90)	57,2	54,5	-2,7	-4,71	214,1	161,4	-24,60	0,48
10. Garam, belerang, kapur (25)	12,2	5,8	-6,4	-52,41	22,0	29,0	31,86	0,09
Total 10 Golongan Barang	4 742,6	5 384,0	641,4	13,52	16 712,4	15 344,3	-8,19	45,90
Lainnya	5 676,8	6 337,9	661,1	11,65	19 714,5	18 082,9	-8,28	54,10
Total Ekspor Nonmigas	10 419,4	11 721,9	1 302,5	12,50	36 426,9	33 427,2	-8,23	100,00

Tabel 3.4
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Tujuan dan Perubahannya (Δ)

Negara Tujuan	Februari 2015	Maret 2015	Δ	$\Delta\%$	Januari-Maret			
					2014	2015	$\Delta\%$	Peran (%) 2015
					(1)	(2)	(3)	(4)
ASEAN	2 063,1	2 391,4	328,3	15,92	7 080,0	6 841,1	-3,37	20,46
1 Singapura	703,9	734,5	30,6	4,35	2 569,0	2 270,3	-11,63	6,79
2 Malaysia	455,1	577,1	122,0	26,80	1 523,4	1 586,3	4,13	4,74
3 Thailand	369,0	423,7	54,7	14,84	1 308,4	1 210,1	-7,51	3,62
ASEAN Lainnya	535,1	656,1	121,0	22,62	1 679,2	1 774,4	5,67	5,31
Uni Eropa	1 239,1	1 219,2	-19,9	-1,61	4 162,1	3 642,0	-12,50	10,89
4 Jerman	195,5	205,4	9,9	5,07	674,4	613,7	-9,00	1,83
5 Belanda	336,5	277,4	-59,2	-17,58	1 013,2	914,7	-9,73	2,74
6 Italia	193,0	191,4	-1,6	-0,85	628,3	537,5	-14,46	1,61
Uni Eropa Lainnya	514,1	545,0	30,9	6,01	1 846,2	1 576,1	-14,63	4,71
Negara Utama Lainnya	5 142,8	5 815,0	672,2	13,07	18 429,7	16 435,0	-10,82	49,17
7 Tiongkok	942,1	1 105,1	163,0	17,30	4 933,8	3 132,5	-36,51	9,37
8 Jepang	1 131,1	1 280,4	149,3	13,20	3 571,7	3 563,8	-0,22	10,66
9 Amerika Serikat	1 188,9	1 329,6	140,7	11,84	3 829,1	3 779,6	-1,29	11,31
10 India	959,3	1 094,9	135,6	14,13	2 759,5	2 955,4	7,10	8,84
11 Australia	197,8	165,1	-32,7	-16,51	1 014,7	547,3	-46,06	1,64
12 Korea Selatan	446,9	492,5	45,6	10,22	1 382,8	1 394,3	0,83	4,17
13 Taiwan	276,7	347,4	70,7	25,54	938,1	1 062,1	13,22	3,18
Total 13 Negara Tujuan	7 395,8	8 224,5	828,7	11,21	26 146,4	23 567,6	-9,86	70,50
Lainnya	3 023,6	3 497,4	473,8	15,67	10 280,5	9 859,6	-4,09	29,50
Total Ekspor Nonmigas	10 419,4	11 721,9	1 302,5	12,50	36 426,9	33 427,2	-8,23	100,00

Tabel 3.5
Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia 2013–2015
(FOB: juta US\$)

Bulan	2013			2014			2015		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jan	2 653,7	12 721,8	15 375,5	2 501,7	11 970,6	14 472,3	1 959,0	11 285,9	13 244,9
Feb	2 567,5	12 448,1	15 015,6	2 729,2	11 904,9	14 634,1	1 753,4	10 419,4	12 172,8
Mar	2 928,3	12 096,3	15 024,6	2 641,3	12 551,3	15 192,6	1 988,9	11 721,9	13 710,8
Apr	2 452,0	12 308,9	14 760,9	2 651,4	11 641,1	14 292,5			
Mei	2 926,3	13 207,1	16 133,4	2 375,7	12 447,9	14 823,6			
Jun	2 800,4	11 958,5	14 758,9	2 786,0	12 623,5	15 409,5			
Jul	2 282,6	12 805,3	15 087,9	2 496,3	11 627,8	14 124,1			
Agt	2 720,5	10 363,2	13 083,7	2 598,2	11 883,5	14 481,7			
Sep	2 414,7	12 292,1	14 706,8	2 622,6	12 653,2	15 275,8			
Okt	2 715,2	12 983,1	15 698,3	2 469,4	12 879,6	15 349,0			
Nov	2 766,9	13 171,7	15 938,6	2 106,9	11 509,3	13 616,2			
Des	3 405,1	13 562,7	16 967,8	2 353,3	12 268,0	14 621,3			
Total	32 633,0	149 918,8	182 551,8	30 331,9	145 960,8	176 292,7	5 701,3	33 427,2	39 128,5

Tabel 3.6
Nilai FOB (juta US\$) Ekspor Indonesia Menurut Provinsi Asal Barang
dan Pelabuhan Muat, Januari–Maret 2015

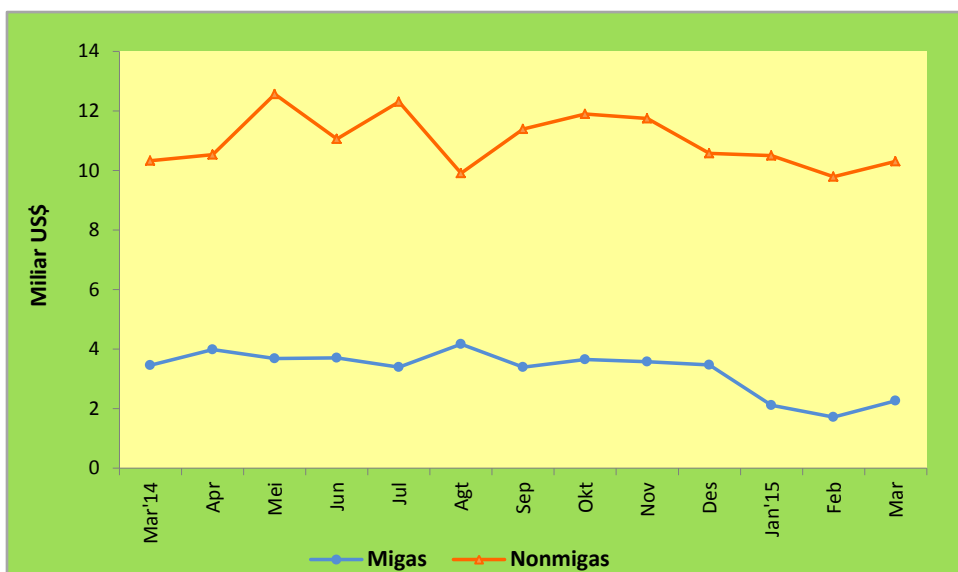
No Urut	Provinsi Asal Barang	Pelabuhan Muat						Total Ekspor		
		Prov Asal Barang			Prov Lain			Nilai	% Kolom	% Baris
		Nilai	% Kolom	% Baris	Nilai	% Kolom	% Baris			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	25,5	0,09	87,51	3,6	0,04	12,49	29,2	0,07	100,00
2	Sumatera Utara	1 792,7	6,23	99,72	5,0	0,05	0,28	1 797,7	4,59	100,00
3	Sumatera Barat	376,4	1,31	97,36	10,2	0,10	2,64	386,6	0,99	100,00
4	Riau	3 824,3	13,28	98,82	45,6	0,44	1,18	3 869,9	9,89	100,00
5	Kepulauan Riau	2 349,0	8,16	100,00	-	-	-	2 349,0	6,00	100,00
6	Jambi	281,7	0,98	34,38	537,8	5,20	65,62	819,5	2,09	100,00
7	Sumatera Selatan	649,3	2,25	96,61	22,8	0,22	3,39	672,0	1,72	100,00
8	Kep. Bangka Belitung	377,4	1,31	95,67	17,1	0,17	4,33	394,5	1,01	100,00
9	Bengkulu	25,4	0,09	59,59	17,2	0,17	40,41	42,6	0,11	100,00
10	Lampung	913,0	3,17	99,17	7,6	0,07	0,83	920,6	2,35	100,00
11	DKI Jakarta	2 948,2	10,24	99,91	2,7	0,03	0,09	2 950,9	7,54	100,00
12	Jawa Barat	191,0	0,66	3,02	6 125,7	59,28	96,98	6 316,8	16,14	100,00
13	Banten	246,3	0,86	10,85	2 024,0	19,59	89,15	2 270,3	5,80	100,00
14	Jawa Tengah	1 291,9	4,49	81,02	302,5	2,93	18,98	1 594,4	4,07	100,00
15	DI Yogyakarta	2,4	0,01	2,97	77,1	0,75	97,03	79,5	0,20	100,00
16	Jawa Timur	4 566,2	15,86	97,80	102,9	1,00	2,20	4 669,1	11,93	100,00
17	Bali	146,2	0,51	65,19	78,1	0,76	34,81	224,3	0,57	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	251,0	0,87	99,56	1,1	0,01	0,44	252,1	0,64	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	4,0	0,01	87,25	0,6	0,01	12,75	4,6	0,01	100,00
20	Kalimantan Barat	129,1	0,45	98,51	2,0	0,02	1,49	131,1	0,33	100,00
21	Kalimantan Tengah	88,2	0,31	26,39	246,1	2,38	73,61	334,3	0,85	100,00
22	Kalimantan Selatan	1 662,1	5,77	97,22	47,6	0,46	2,78	1 709,7	4,37	100,00
23	Kalimantan Timur	4 727,1	16,42	90,32	506,4	4,90	9,68	5 233,5	13,38	100,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	216,8	0,75	79,08	57,3	0,55	20,92	274,1	0,70	100,00
26	Gorontalo	4,6	0,02	96,54	0,2	0,00	3,46	4,8	0,01	100,00
27	Sulawesi Tengah	9,0	0,03	82,01	2,0	0,02	17,99	10,9	0,03	100,00
28	Sulawesi Selatan	309,4	1,07	97,00	9,6	0,09	3,00	318,9	0,82	100,00
29	Sulawesi Barat	-	-	-	53,6	0,52	100,00	53,6	0,14	100,00
30	Sulawesi Tenggara	52,0	0,18	78,69	14,1	0,14	21,31	66,1	0,17	100,00
31	Maluku	3,2	0,01	27,94	8,3	0,08	72,06	11,6	0,03	100,00
32	Maluku Utara	1,3	0,00	63,88	0,7	0,01	36,12	2,0	0,01	100,00
33	Papua	344,2	1,20	100,00	-	-	-	344,2	0,88	100,00
34	Papua Barat	986,9	3,43	99,68	3,1	0,03	0,32	990,0	2,53	100,00
Total Ekspor		28 076,8	100,00	-	10 332,7	100,00	-	39 128,5	100,00	-

IV. IMPOR MARET 2015

1. Nilai impor Indonesia Maret 2015 sebesar US\$12,58 miliar atau naik 9,29 persen dibanding impor Februari 2015. Dibanding impor Maret 2014 turun 13,39 persen.

**Impor Maret 2015
sebesar US\$12,58 miliar
atau naik 9,29 persen**

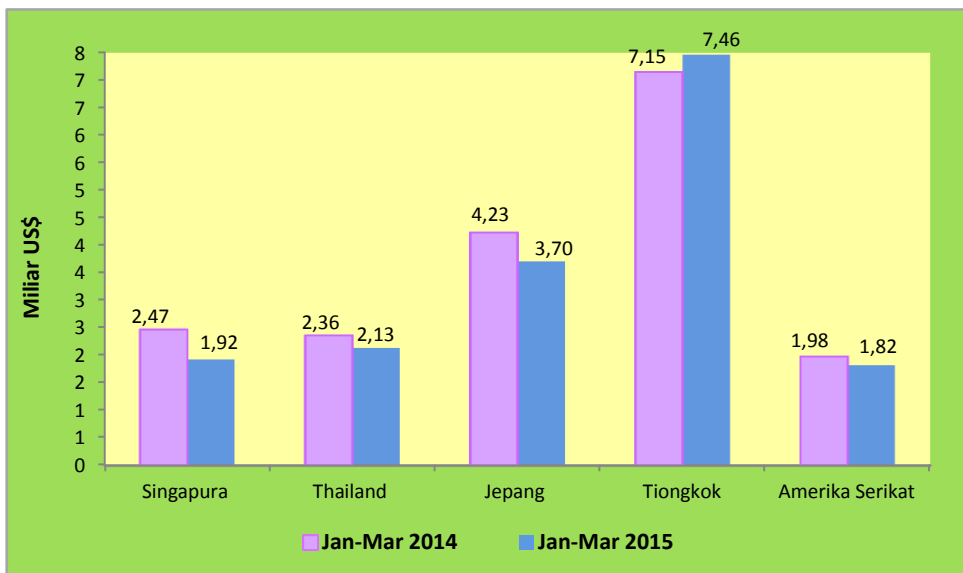
Grafik 4.1
Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Indonesia (CIF)
Maret 2014–Maret 2015



2. Impor nonmigas Maret 2015 sebesar US\$10,31 miliar, naik 5,32 persen dibanding Februari 2015 (US\$9,79 miliar). Selama Januari-Maret 2015 impor nonmigas mencapai US\$ 30,60 miliar atau turun 5,05 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$32,23 miliar).
3. Impor migas Maret 2015 sebesar US\$2,27 miliar, naik 31,89 persen dibanding Februari 2015 (US\$1,72 miliar). Selama Januari-Maret 2015 impor migas mencapai US\$ 6,10 miliar atau turun 44,53 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (US\$11,00 miliar).

4. Nilai impor nonmigas Maret 2015 terbesar adalah golongan barang mesin dan peralatan mekanik dengan nilai US\$2,04 miliar, naik 14,86 persen dibanding Februari 2015. Impor golongan barang tersebut selama Januari-Maret 2015 mencapai US\$5,85 miliar, menurun 6,21 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
5. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar periode Januari-Maret 2015 ditempati Tiongkok 24,37 persen, Jepang 12,10 persen, dan Thailand 6,97 persen. Impor nonmigas dari ASEAN dan Uni Eropa masing-masing 21,09 persen dan 9,15 persen.

Grafik 4.2
Nilai Impor Nonmigas Indonesia dari Lima Negara Utama Asal Barang (CIF)
Januari—Maret 2014 dan 2015



6. Nilai impor selama Januari-Maret 2015 pada golongan barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal mengalami penurunan masing-masing sebesar 14,32 persen, 16,22 persen, dan 10,31 persen dibanding impor periode yang sama tahun sebelumnya.
7. Neraca perdagangan Indonesia Maret 2015 surplus sebesar US\$1,13 miliar.

Tabel 4.1
Ringkasan Perkembangan Nilai Impor Indonesia (Juta US\$) dan Perubahannya
Januari—Maret 2014 dan 2015

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Jan-Mar '15 (%)
	Feb 2015	Mar 2015	Jan-Mar 2014	Jan-Mar 2015	Mar 2015 thd Feb 2015	Jan-Mar 2015 thd Jan-Mar 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total	11 510,1	12 579,2	43 230,6	36 701,9	9,29	-15,10	100,00
Migas	1 719,6	2 268,0	11 002,3	6 102,6	31,89	-44,53	16,63
- Minyak Mentah	487,5	858,3	3 387,6	1 952,7	76,06	-42,36	5,32
- Hasil Minyak	1 063,2	1 237,8	6 765,9	3 664,3	16,42	-45,84	9,98
- Gas	168,9	171,9	848,8	485,6	1,78	-42,79	1,32
Nonmigas	9 790,5	10 311,2	32 228,3	30 599,3	5,32	-5,05	83,37

Tabel 4.2
Perkembangan Impor Indonesia
Maret 2014—Maret 2015

Periode	Nilai CIF (Juta US\$)			Perubahan Terhadap Periode Sebelumnya (%)		
	Migas	Nonmigas	Total Impor	Migas	Nonmigas	Total Impor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014						
Maret	3 994,6	10 529,1	14 523,7	15,55	1,89	5,32
Triwulan I	11 002,3	32 228,3	43 230,6	-5,43	-6,98	-6,59
April	3 692,8	12 562,2	16 255,0	-7,56	19,31	11,92
Mei	3 706,6	11 063,7	14 770,3	0,37	-11,93	-9,13
Juni	3 394,2	12 303,6	15 697,8	-8,43	11,21	6,28
Triwulan II	10 793,0	35 929,5	46 723,0	-1,90	11,48	8,08
Juli	4 173,0	9 908,7	14 081,7	22,95	-19,47	-10,29
Agustus	3 399,3	11 393,9	14 793,2	-18,54	14,99	5,05
September	3 651,6	11 894,5	15 546,1	7,42	4,39	5,09
Triwulan III	11 223,9	33 197,1	44 421,0	3,99	-7,60	-4,93
Oktober	3 577,6	11 750,4	15 328,0	-2,03	-1,21	-1,40
November	3 473,0	10 568,6	14 041,6	-2,92	-10,06	-8,39
Desember	3 389,5	11 045,0	14 434,5	-2,40	4,51	2,80
Triwulan IV	10 440,1	33 364,0	43 804,1	-6,98	0,50	-1,39
Jan-Mar	11 002,3	32 228,3	43 230,6	-5,43	-6,98	-6,59
Jan-Des	43 459,9	134 718,9	178 178,8	-3,99	-4,70	-4,53
2015						
Januari	2 115,0	10 497,6	12 612,6	-37,60	-4,96	-12,62
Februari	1 719,6	9 790,5	11 510,1	-18,70	-6,73	-8,74
Maret	2 268,0	10 311,2	12 579,2	31,89	5,32	9,29
Jan-Mar	6 102,6	30 599,3	36 701,9	-44,53	-5,06	-15,10

Tabel 4.3
Impor Nonmigas Indonesia Beberapa Golongan Barang HS 2 Dijit dan Perubahannya
Januari—Maret 2014 dan 2015

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Mar '15 (%)
	Feb 2015	Mar 2015	Jan-Mar 2014	Jan-Mar 2015	Mar 2015 thd Feb 2015	Jan-Mar '15 thd Jan-Mar '14	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mesin dan peralatan mekanik (84)	1 779,2	2 043,6	6 234,7	5 847,3	14,86	-6,21	19,11
2. Mesin dan peralatan listrik (85)	1 248,2	1 325,3	4 434,3	3 903,8	6,18	-11,96	12,76
3. Kendaraan Bermotor dan bagiannya (87)	475,3	550,4	1 623,6	1 461,6	15,80	-9,98	4,77
4. Kapal Laut dan Bangunan Terapung (89)	39,0	111,5	268,5	230,3	185,90	-14,23	0,75
5. Pupuk (31)	180,9	251,1	365,7	594,0	38,81	62,43	1,94
6. Gula dan Kembang Gula (17)	117,8	93,1	462,6	406,2	-20,97	-12,19	1,33
7. Bijih, Kerak, dan Abu Logam (26)	50,2	25,5	93,8	135,3	-49,20	44,24	0,44
8. Kain Rajutan (60)	118,4	91,8	305,1	327,4	-22,47	7,31	1,07
9. Fulamen Buatan (54)	121,0	93,8	296,9	330,0	-22,48	11,15	1,08
10. Besi dan Baja (72)	632,9	604,7	2 077,4	2 006,9	-4,46	-3,39	6,56
Total 10 Golongan Barang Utama	4 762,9	5 190,8	16 162,6	15 242,8	8,98	-5,69	49,81
Barang Lainnya	5 027,6	5 120,4	16 065,7	15 356,5	1,85	-4,41	50,19
Total Impor Nonmigas	9 790,5	10 311,2	32 228,3	30 599,3	5,32	-5,05	100,00

Tabel 4.4
Impor Negara Tertentu Menurut Golongan Penggunaan Barang
Januari—Maret 2015

Negara	Nilai CIF (Juta US\$)				Persentase thd Total (%)			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (2 s.d. 4)	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total (6 s.d. 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 ASEAN	745,1	7 930,2	1 167,9	9 843,2	7,57	80,57	11,87	100,00
2 Jepang	151,8	2 655,8	905,7	3 713,3	4,09	71,52	24,39	100,00
3 Korea Selatan	98,7	1 888,6	275,4	2 262,7	4,36	83,47	12,17	100,00
4 Tiongkok	607,5	4 470,8	2 464,4	7 542,7	8,05	59,27	32,67	100,00
5 India	41,2	581,9	156,1	779,2	5,29	74,68	20,03	100,00
6 Australia	82,1	988,0	41,9	1 112,0	7,38	88,85	3,77	100,00
7 Selandia Baru	74,8	99,8	6,1	180,7	41,39	55,23	3,38	100,00
8 Amerika Serikat	173,2	1 432,5	221,9	1 827,6	9,48	78,38	12,14	100,00
9 Uni Eropa	291,6	1 614,7	911,8	2 818,1	10,35	57,30	32,36	100,00
10 Lainnya	274,8	6 029,8	317,8	6 622,4	4,15	91,05	4,80	100,00
Total Impor	2 540,8	27 692,1	6 469,0	36 701,9	6,92	75,45	17,63	100,00

Tabel 4.5
Nilai Impor Nonmigas Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang
Januari—Maret 2014 dan 2015

Negara Asal	Nilai CIF (Juta US\$)				Perubahan (%)		Peran thd Total Impor Nonmigas Jan-Mar '15 (%)
	Feb 2015	Mar 2015	Jan-Mar 2014	Jan-Mar 2015	Mar 2015 thd Feb 2015	Jan-Mar '15 thd Jan-Mar '14	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ASEAN	2 053,5	2 233,8	7 229,7	6 452,3	8,78	-10,75	21,09
1 Singapura	583,9	660,3	2 469,3	1 922,7	13,08	-22,14	6,28
2 Thailand	705,8	796,9	2 361,1	2 131,7	12,91	-9,72	6,97
3 Malaysia	387,3	415,8	1 440,7	1 245,5	7,36	-13,55	4,07
ASEAN Lainnya	376,5	360,8	958,6	1 152,4	-4,17	20,22	3,77
Uni Eropa	738,1	1 050,9	3 167,3	2 799,5	42,38	-11,61	9,15
4 Jerman	237,7	346,9	984,2	948,2	45,94	-3,66	3,10
5 Belanda	48,7	55,0	195,9	154,0	12,94	-21,39	0,50
6 Italia	98,2	106,2	448,4	324,3	8,15	-27,68	1,06
Uni Eropa Lainnya	353,5	542,8	1 538,8	1 373,0	53,55	-10,77	4,49
Negara Utama Lainnya	5 728,9	5 780,5	18 249,9	17 521,3	0,90	-3,99	57,26
7 Tiongkok	2 508,4	2 260,7	7 150,2	7 457,3	-9,87	4,29	24,37
8 Jepang	1 237,3	1 291,5	4 232,2	3 702,2	4,38	-12,52	12,10
9 Amerika Serikat	568,1	672,6	1 984,1	1 820,7	18,39	-8,24	5,95
10 Korea Selatan	225,7	280,3	899,7	775,4	24,19	-13,82	2,54
11 Australia	530,2	628,3	1 885,6	1 771,9	18,50	-6,03	5,79
12 Taiwan	380,3	376,3	1 202,3	1 111,9	-1,05	-7,52	3,63
13 India	278,9	270,8	895,8	881,9	-2,90	-1,55	2,88
Total 13 Negara Utama	7 790,5	8 161,6	26 149,5	24 247,7	4,76	-7,27	79,24
Negara Lainnya	2 000,0	2 149,6	6 078,8	6 351,6	7,48	4,49	20,76
Total Impor Nonmigas	9 790,5	10 311,2	32 228,3	30 599,3	5,32	-5,05	100,00

Tabel 4.6
Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari 2014—Maret 2015
(Nilai CIF: Juta US\$)

Bulan	2014				2015			
	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total	Barang Konsumsi	Bahan Baku/ Penolong	Barang Modal	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	985,1	11 302,0	2 629,1	14 916,2	786,3	9 617,9	2 208,1	12 612,3
Februari	898,6	10 552,5	2 339,6	13 790,7	823,7	8 762,9	1 923,5	11 510,1
Maret	1 081,9	11 197,7	2 244,1	14 523,7	930,7	9 311,0	2 337,5	12 579,2
April	1 130,1	12 453,8	2 671,1	16 255,0				
Mei	1 045,6	11 349,7	2 375,0	14 770,3				
Juni	1 152,4	11 947,8	2 597,6	15 697,8				
Juli	841,2	11 108,1	2 132,4	14 081,7				
Agustus	1 165,8	11 129,1	2 498,3	14 793,2				
September	1 168,8	11 756,5	2 620,8	15 546,1				
Oktober	1 028,4	11 581,5	2 718,1	15 328,0				
November	1 026,7	10 737,0	2 277,9	14 041,6				
Desember	1 142,6	11 092,9	2 199,0	14 434,5				
Total	12 667,2	136 208,6	29 303,0	178 178,8	2 540,8	27 692,1	6 469,0	36 701,9
Persentase thd Total (%)	7,11	76,44	16,45	100,00	6,92	75,45	17,63	100,00

Tabel 4.7
Impor Indonesia Menurut Negara Utama Asal Barang, Januari—Maret 2015
 (juta US\$)

Negara Asal Barang	Januari 2015	Februari 2015	Maret 2015	Jan-Mar 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Tiongkok	2 697,3	2 510,6	2 334,7	7 542,6
2 Singapura	1 519,9	1 269,0	1 415,1	4 204,0
3 Jepang	1 175,9	1 241,2	1 296,2	3 713,3
4 Malaysia	719,2	633,2	945,4	2 297,7
5 Korea Selatan	774,6	684,9	803,3	2 262,8
6 Thailand	633,1	712,1	804,1	2 149,2
7 Amerika Serikat	582,4	570,1	675,1	1 827,6
8 Australia	355,2	380,4	376,4	1 111,9
9 Jerman	364,4	238,0	348,2	950,6
10 Vietnam	329,7	310,2	292,0	931,9
11 Taiwan	346,2	288,8	272,7	907,8
12 Saudi Arabia	315,2	199,7	345,6	860,6
13 Brazil	310,1	285,0	234,0	829,1
14 India	270,7	226,8	281,6	779,2
15 Kanada	106,0	198,2	143,8	448,0
Total 15 Negara	10 500,1	9 748,1	10 568,2	30 816,4
Negara Lainnya	2 112,5	1 762,0	2 011,0	5 885,5
Total Impor	12 612,6	11 510,1	12 579,2	36 701,9
Persentase Terhadap Total				
Total 15 Negara	83,25	84,69	84,01	83,96
Negara Lainnya	16,75	15,31	15,99	16,04

Tabel 4.8
Neraca Perdagangan Indonesia, Maret 2014–Maret 2015
 (miliar US\$)

Bulan	Ekspor			Impor			Neraca		
	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total	Migas	Nonmigas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014									
Maret	2,64	12,55	15,19	3,99	10,53	14,52	-1,35	2,02	0,67
April	2,65	11,64	14,29	3,70	12,56	16,26	-1,05	-0,92	-1,97
Mei	2,37	12,45	14,82	3,71	11,06	14,77	-1,34	1,39	0,05
Juni	2,79	12,62	15,41	3,39	12,31	15,70	-0,60	0,31	-0,29
Juli	2,50	11,63	14,13	4,17	9,91	14,08	-1,67	1,72	0,05
Agustus	2,60	11,88	14,48	3,40	11,39	14,79	-0,80	0,49	-0,31
September	2,62	12,66	15,28	3,65	11,89	15,54	-1,03	0,77	-0,26
Oktober	2,47	12,88	15,35	3,58	11,75	15,33	-1,11	1,13	0,02
November	2,11	11,51	13,62	3,47	10,57	14,04	-1,36	0,94	-0,42
Desember	2,35	12,27	14,62	3,39	11,05	14,43	-1,04	1,22	0,19
Jan-Mar	7,87	36,42	44,29	11,00	32,23	43,23	-3,13	4,19	1,06
Jan-Des	30,33	145,96	176,29	43,46	134,72	178,18	-13,13	11,24	-1,88
2015									
Januari	1,96	11,29	13,25	2,11	10,50	12,61	-0,15	0,79	0,64
Februari	1,75	10,42	12,17	1,72	9,79	11,51	0,03	0,63	0,66
Maret	1,99	11,72	13,71	2,27	10,31	12,58	-0,28	1,41	1,13
Jan-Mar	5,70	33,43	39,13	6,10	30,60	36,70	-0,40	2,83	2,43

Tabel 4.9
Ekspor-Impor Beras Indonesia, Triwulan I-2013–Maret 2015

Periode	Ekspor		Impor	
	Berat Bersih (kg)	Nilai FOB (US\$)	Berat Bersih (kg)	Nilai CIF (US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	2 585 718	1 191 376	472 664 654	246 002 090
Triwulan I	174 680	244 309	114 269 033	62 697 096
Triwulan II	561 014	425 064	129 548 175	64 587 922
Triwulan III	131 620	203 161	109 668 226	56 043 208
Triwulan IV	1 718 404	318 842	119 179 220	62 673 864
2014	516 069	759 928	844 163 741	388 178 457
Triwulan I	85 560	169 269	60 796 853	26 870 252
Triwulan II	161 455	264 660	115 480 643	49 336 490
Triwulan III	82 694	123 665	164 561 686	72 532 308
Triwulan IV	186 360	202 334	503 324 559	239 439 407
2015	39 985	51 936	66 900 330	29 241 832
Januari	13 750	19 072	16 675 984	8 317 363
Februari	24 805	32 177	7 912 000	3 136 025
Maret	1 430	687	42 312 346	17 788 444
Triwulan I	39 985	51 936	66 900 330	29 241 832

V. KEPENDUDUKAN JUNI 2014

1. Hasil proyeksi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang. Penduduk laki-laki sebanyak 126.715,2 ribu orang, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 125.449,6 ribu orang. Rasio Jenis Kelamin penduduk Indonesia sebesar 101, artinya diantara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252.164,8 ribu orang

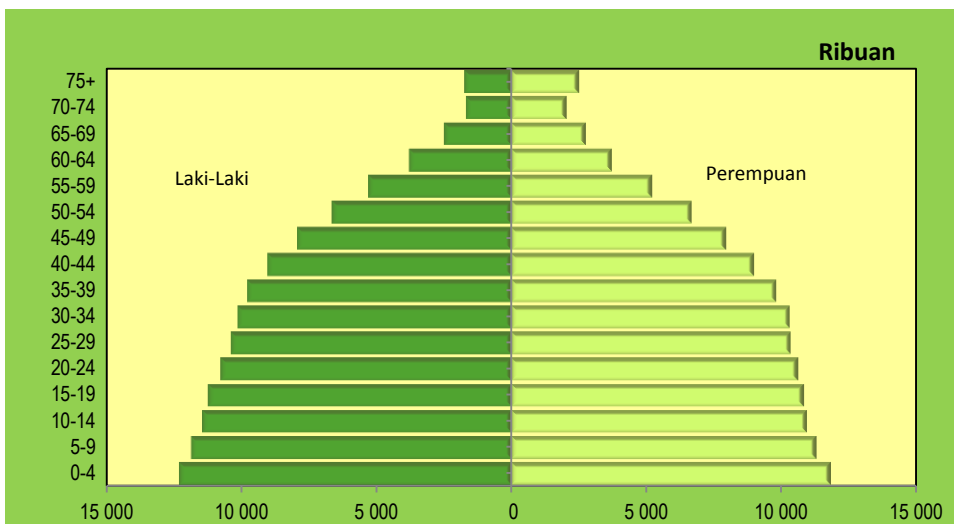
Tabel 5.1
Penduduk Indonesia menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2014
(ribu orang)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12 301,4	11 785,4	24 086,8
5-9	11 857,3	11 252,2	23 109,5
10-14	11 448,3	10 911,9	22 360,2
15-19	11 237,8	10 786,9	22 024,7
20-24	10 768,5	10 583,9	21 352,4
25-29	10 398,2	10 318,1	20 716,3
30-34	10 150,2	10 280,7	20 430,9
35-39	9 802,6	9 784,5	19 587,1
40-44	9 054,2	8 950,5	18 004,7
45-49	7 949,2	7 918,2	15 867,4
50-54	6 650,6	6 663,1	13 313,7
55-59	5 319,6	5 198,5	10 518,1
60-64	3 804,7	3 714,1	7 518,8
65-69	2 500,2	2 753,2	5 253,4
70-74	1 715,0	2 042,0	3 757,0
75+	1 757,4	2 506,4	4 263,8
Total	126 715,2	125 449,6	252 164,8

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

2. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 2014 termasuk tipe *expansive*, dimana sebagian besar penduduk berada pada kelompok umur muda. Grafik 5.1 menunjukkan piramida yang masih lebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah, sedangkan pada bagian atas meruncing.

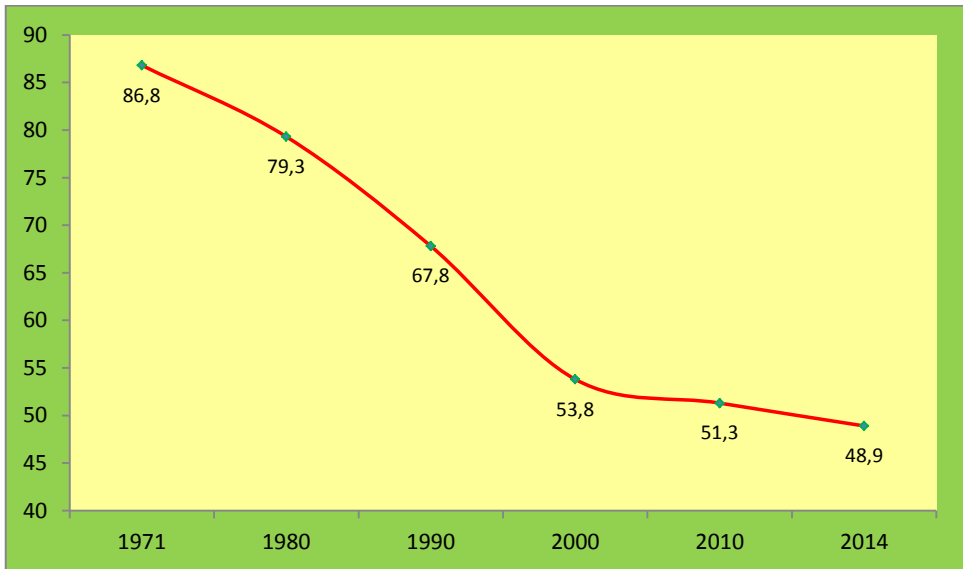
Grafik 5.1
Piramida Penduduk Indonesia, 2014



Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

3. Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971-2014. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara usia penduduk non produktif (penduduk 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Hasil proyeksi penduduk menunjukkan rasio ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 48,9. Angka ini mengandung makna bahwa setiap 100 orang usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sekitar 48 - 49 orang. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio ketergantungan penduduk Indonesia memiliki tren yang menurun. Jika pada tahun 1971 rasio ketergantungan sebesar 86,8, maka pada tahun 2014 kondisinya semakin membaik dengan rasio ketergantungan sebesar 48,9. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan. Era bonus demografi akan mencapai puncaknya pada periode 2025-2030. Pulau dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Bali dan Nusa Tenggara (56,0), dan yang terendah Pulau Jawa (46,3). Tiga provinsi dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (67,5), Sulawesi Tenggara (61,0), dan Maluku (60,4). Sedangkan tiga provinsi dengan rasio ketergantungan terendah adalah DKI Jakarta (39,3), Jawa Timur (44,5), dan Yogyakarta (45,1).

Grafik 5.2
Rasio Ketergantungan Penduduk Indonesia, 1971–2014

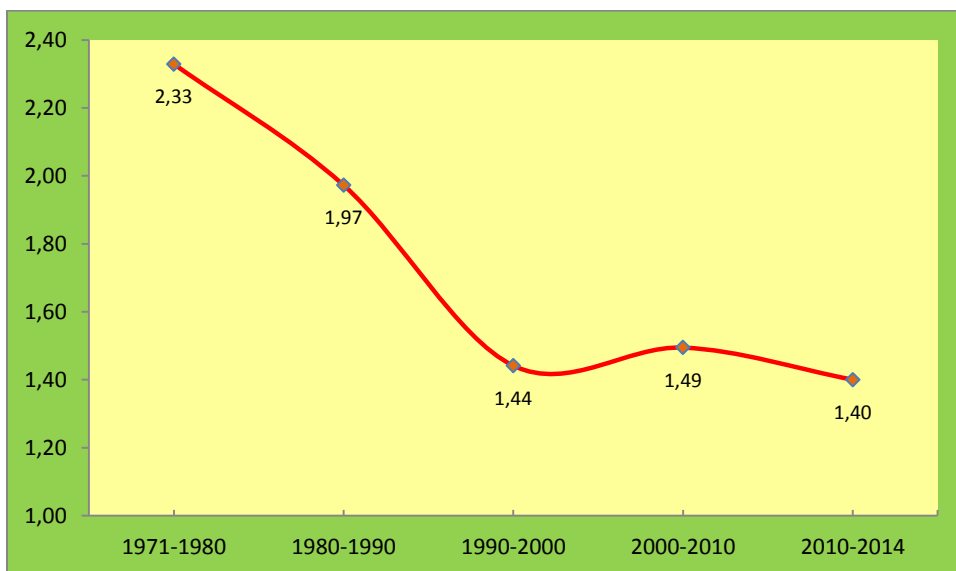


Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan
 Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

4. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010-2014 sebesar 1,40 persen. Dibandingkan dengan periode 1971-1980 (2,33 persen), 1980-1990 (1,97 persen), 1990-2000 (1,44 persen), dan 2000-2010 (1,49 persen), maka laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2014 menunjukkan penurunan.
5. Pulau dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kalimantan, yaitu sebesar 2,09 persen. Lima pulau lainnya secara berurutan Maluku dan Papua (2,07 persen), Sumatera (1,70 persen), Bali dan Nusa Tenggara (1,46 persen), Sulawesi (1,45 persen) serta Jawa (1,17 persen). Menurut provinsi, empat provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Provinsi Kepulauan Riau (3,16 persen), Papua Barat (2,65 persen), Riau (2,64 persen) dan Kalimantan Timur (2,64 persen). Tiga provinsi dengan laju pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Provinsi Jawa Timur (0,69 persen), Jawa Tengah (0,82 persen) dan DKI Jakarta (1,11 persen).

**Laju pertumbuhan
 penduduk Indonesia
 pada tahun 2010-2014
 sebesar 1,40 persen**

Grafik 5.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia, 1971-2014



Sumber : SP1971, SP1980, SP1990, SP2000, SP2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

6. Penduduk Indonesia sebagian besar berdomisili di Pulau Jawa, yaitu sebesar 56,9 persen. Kemudian, secara berturut-turut diikuti Pulau Sumatera (21,6 persen), Sulawesi (7,3 persen), Kalimantan (6,0 persen), Bali dan Nusa Tenggara (5,5 persen) serta Maluku dan Papua (2,7 persen). Menurut provinsi, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan proporsi penduduk terbesar yaitu masing-masing 18,3 persen; 15,3 persen; dan 13,3 persen dari total penduduk Indonesia. Sedangkan provinsi dengan proporsi penduduk terendah adalah Papua Barat, Gorontalo dan Maluku Utara yaitu masing-masing 0,3 persen; 0,4 persen dan 0,5 persen.
7. Kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebesar 132 jiwa per km². Pulau Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya (1.109 per km²), kemudian secara berurutan Pulau Bali dan Nusa Tenggara (190 per km²), Sumatera (113 per km²), Sulawesi (98 per km²), Kalimantan (28 per km²), dan yang paling jarang penduduknya adalah Kepulauan Maluku dan Papua (14 per km²). Kepadatan penduduk menurut provinsi, terpadat di DKI Jakarta (15.173 per km²), Jawa Barat (1.301 per km²) dan Banten (1.211 per

**Kepadatan penduduk
 Indonesia pada tahun
 2014 sebesar 132 jiwa
 per km²**

- km²). Sedangkan tiga provinsi yang terjarang, yaitu Papua Barat (9 per km²), Papua (10 per km²) dan Kalimantan Tengah (16 per km²).
8. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Kepulauan Maluku dan Papua yaitu sebesar 108,0 sedangkan yang terendah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu sebesar 97,7. Tiga provinsi dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu Papua (111,9), Papua Barat (111,5) dan Kalimantan Timur (110,8) sedangkan yang terendah Nusa Tenggara Barat (94,2), Sulawesi Selatan (95,4) dan Jawa Timur (97,4).
 9. Penduduk lanjut usia (lansia) merupakan penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, lansia di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 8,2 persen. Penduduk lansia terbesar terdapat di Pulau Jawa (9,4 persen), kemudian berturut-turut Bali dan Nusa Tenggara (8,3 persen), Sulawesi (7,9 persen), Sumatera (6,5 persen), Kalimantan (5,8 persen) serta Maluku dan Papua (4,2 persen). Menurut provinsi, tiga provinsi dengan penduduk lansia terbesar adalah Yogyakarta (13,2 persen), Jawa Tengah (11,4 persen) dan Jawa Timur (11,2 persen), sedangkan yang terkecil adalah Papua (2,7 persen), Papua Barat (3,8 persen) dan Kepulauan Riau (3,8 persen).
 10. Umur Harapan Hidup adalah kemungkinan umur yang akan dicapai seseorang dari sejak lahir. Hasil proyeksi penduduk tahun 2014 menunjukkan umur harapan hidup penduduk Indonesia sebesar 70,6 tahun. Tiga provinsi dengan umur harapan hidup tertinggi adalah Yogyakarta (74,5 tahun), Kalimantan Timur (73,7 tahun) dan Jawa Tengah (73,5 tahun). Sedangkan tiga provinsi dengan umur harapan hidup terendah adalah Sulawesi Barat (63,6 tahun), Papua (64,9 tahun) dan Nusa Tenggara Barat (65,1 tahun).

**Hasil proyeksi tahun
2014 menunjukkan
umur harapan hidup
penduduk Indonesia
sebesar 70,6 tahun**

Tabel 5.2
Demografi Penduduk Indonesia, 2014

Provinsi	Penduduk (000)		Laju Pertumbuh- an Penduduk 2010-2014 (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin	Rasio Ketergan- tungan	Penduduk Lansia (%)	Umur Harapan Hidup
	2010	2014	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01. Aceh	4 523	4 907	2,06	85	99,7	54,9	6,1	69,6
02. Sumatera Utara	13 029	13 767	1,39	189	99,6	56,6	6,5	68,2
03. Sumatera Barat	4 865	5 132	1,34	122	98,8	55,9	8,6	68,4
04. Riau	5 575	6 188	2,64	71	105,6	52,0	4,6	70,8
05. Kepulauan Riau	1 693	1 917	3,16	234	104,6	49,4	3,8	69,3
06. Jambi	3 108	3 344	1,85	67	104,2	47,9	6,2	70,5
07. Sumatera Selatan	7 482	7 942	1,50	87	103,3	49,9	6,8	69,0
08. Kep. Bangka Belitung	1 230	1 344	2,23	82	108,0	46,4	6,5	69,8
09. Bengkulu	1 722	1 845	1,74	93	104,1	48,4	6,3	68,5
10. Lampung	7 634	8 026	1,26	232	105,3	49,8	7,6	69,8
Sumatera	50 860	54 412	1,70	113	102,4	52,5	6,5	
11. DKI Jakarta	9 640	10 075	1,11	15 173	101,3	39,3	6,2	72,1
12. Jawa Barat	43 227	46 030	1,58	1 301	102,9	48,0	7,8	72,4
13. Banten	10 689	11 705	2,30	1 211	104,1	46,7	5,1	69,2
14. Jawa Tengah	32 444	33 523	0,82	1 022	98,4	48,4	11,4	73,5
15. Yogyakarta	3 468	3 637	1,20	1 161	97,7	45,1	13,2	74,5
16. Jawa Timur	37 566	38 610	0,69	808	97,4	44,5	11,2	70,5
Jawa	137 033	143 580	1,17	1 109	100,2	46,3	9,4	
17. Bali	3 907	4 105	1,24	710	101,4	46,0	10,1	71,3
18. Nusa Tenggara Barat	4 516	4 774	1,40	257	94,2	54,1	7,5	65,1
19. Nusa Tenggara Timur	4 706	5 037	1,71	103	98,2	67,5	7,4	66,0
Bali dan Nusa Tenggara	13 130	13 916	1,46	190	97,7	56,0	8,3	
20. Kalimantan Barat	4 411	4 716	1,68	32	103,9	51,1	6,6	69,9
21. Kalimantan Tengah	2 221	2 440	2,38	16	109,2	46,9	5,0	67,6
22. Kalimantan Selatan	3 643	3 923	1,87	101	102,7	48,8	6,3	67,6
23. Kalimantan Timur	3 576	3 970	2,64	19	110,8	46,7	4,9	73,7
Kalimantan	13 851	15 048	2,09	28	106,2	48,6	5,8	
24. Sulawesi Utara	2 278	2 387	1,17	172	104,2	46,7	9,4	71,0
25. Gorontalo	1 045	1 116	1,65	99	100,4	49,0	6,8	67,1
26. Sulawesi Tengah	2 646	2 831	1,71	46	104,5	50,7	7,1	67,3
27. Sulawesi Selatan	8 060	8 432	1,13	180	95,4	53,5	8,7	69,7
28. Sulawesi Barat	1 165	1 258	1,95	75	100,6	56,7	6,3	63,6
29. Sulawesi Tenggara	2 244	2 448	2,20	64	100,9	61,0	6,2	70,5
Sulawesi	17 437	18 472	1,45	98	99,2	53,0	7,9	
30. Maluku	1 542	1 657	1,82	35	101,8	60,4	6,5	65,1
31. Maluku Utara	1 043	1 139	2,21	36	104,3	59,2	5,3	67,4
32. Papua	2 857	3 091	1,99	10	111,9	48,5	2,7	64,9
33. Papua Barat	765	850	2,65	9	111,5	50,5	3,8	65,2
Maluku dan Papua	6 208	6 737	2,07	14	108,0	53,3	4,2	
Indonesia	238 519	252 165	1,40	132	101,0	48,9	8,2	70,6

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

VI. KETENAGAKERJAAN FEBRUARI 2015

A. Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2015

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2015 sebesar 5,81 persen menurun dibanding TPT Agustus 2014 (5,94 persen), dan meningkat dibandingkan TPT Februari 2014 (5,70 persen).

Jumlah penganggur Februari 2015 sebanyak 7,45 juta orang

Tabel 6.1
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2013–2015
(juta orang)

Jenis kegiatan	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja	123,17	120,17	125,32	121,87	128,30
Bekerja	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85
Penganggur	7,24	7,41	7,15	7,24	7,45
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,15	66,77	69,17	66,60	69,50
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,88	6,17	5,70	5,94	5,81
4. Pekerja tidak penuh	36,39	37,74	36,97	35,77	35,68
Setengah penganggur	13,68	11,00	10,57	9,68	10,04
Paruh waktu	22,71	26,74	26,40	26,09	25,64
Bekerja di bawah 15 jam perminggu	7,21	8,85	7,28	6,69	7,54

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

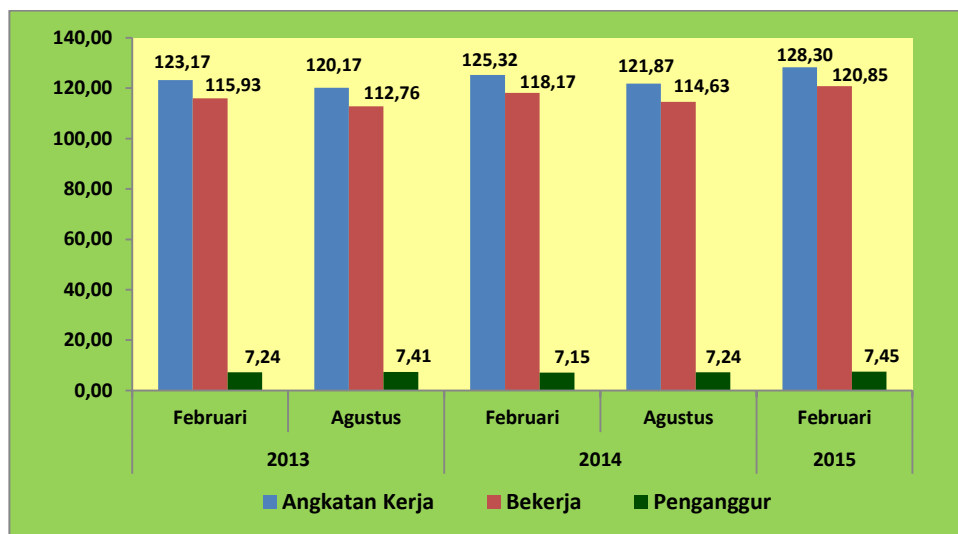
²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Indonesia pada Februari 2015 sebesar 69,50 persen mengalami kenaikan sebesar 2,90 persen jika dibandingkan dengan TPAC Agustus 2014 sebesar 66,60 persen.
3. Pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) pada Februari 2015 sebanyak 35,68 juta orang (29,52 persen) mengalami penurunan dibanding Agustus 2014 sebanyak 35,77 juta orang (31,20 persen).
4. Penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu pada Februari 2015 mencapai 7,54 juta orang (6,24 persen), mengalami kenaikan jika dibandingkan Agustus 2014 sebanyak 6,69 juta orang (5,84 persen).
5. Pada Februari 2015 terdapat 10,04 juta orang (8,31 persen) penduduk bekerja berstatus setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja tidak penuh dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.

B. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran

1. Jumlah kerja Indonesia pada Februari 2015 sebanyak 128,3 juta orang, bertambah sebanyak 6,4 juta orang dibanding Agustus 2014 atau bertambah sebanyak 3,0 juta orang dibanding Februari 2014.

Grafik 6.1
Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Penganggur
2013–2015 (juta orang)



2. Jumlah Penduduk yang bekerja pada Februari 2015 sebanyak 120,8 juta orang, bertambah 6,2 juta orang dibanding keadaan Agustus 2014 atau bertambah 2,7 juta orang dibanding keadaan Februari 2014.
3. Pada Februari 2015, jumlah pengangguran mencapai 7,45 juta orang, mengalami sedikit peningkatan yaitu sebanyak 210 ribu orang dibanding Agustus 2014, dan bertambah sebanyak 300 ribu orang jika dibanding Februari 2014.

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

1. Komposisi lapangan pekerjaan hingga Februari 2015 tidak mengalami perubahan, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Jasa Kemasyarakatan, dan Sektor Industri masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
2. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, penduduk bekerja meningkat terutama pada Sektor Industri sebanyak 1,0 juta orang (6,43 persen), Sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 930 ribu orang (5,03 persen), dan Sektor Perdagangan sebanyak 840 ribu orang (3,25 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebanyak 710 ribu orang (1,74 persen), Sektor Lainnya sebanyak 200 ribu orang (10,36 persen), dan Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebanyak 140 ribu orang (2,63 persen).

Tabel 6.2
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
2013–2015 (juta orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	40,76	39,22	40,83	38,97	40,12
2. Industri	15,00	14,96	15,39	15,26	16,38
3. Konstruksi	6,95	6,35	7,21	7,28	7,72
4. Perdagangan	25,27	24,10	25,81	24,83	26,65
5. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5,29	5,10	5,33	5,11	5,19
6. Keuangan	3,05	2,90	3,19	3,03	3,65
7. Jasa Kemasyarakatan	17,79	18,45	18,48	18,42	19,41
8. Lainnya ³⁾	1,82	1,68	1,93	1,73	1,73
Jumlah	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

³⁾ Lapangan pekerjaan utama pada Sektor Lainnya terdiri dari: Sektor Pertambangan dan Sektor Listrik, Gas, dan Air

D. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

1. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Februari 2015 sebanyak 50,8 juta orang (42,06 persen) bekerja pada kegiatan formal dan 70,0 juta orang (57,94 persen) bekerja pada kegiatan informal.
2. Dalam setahun terakhir (Februari 2014–Februari 2015), penduduk bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap bertambah 70 ribu orang dan penduduk bekerja berstatus buruh/karyawan bertambah sebanyak 3,3 juta orang. Keadaan ini menyebabkan jumlah pekerja formal bertambah sekitar 3,3 juta orang dan persentase pekerja formal naik dari 40,19 persen pada Februari 2014 menjadi 42,06 persen pada Februari 2015.
3. Komponen pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Dalam setahun terakhir (Februari 2014–Februari 2015), pekerja informal berkurang sebanyak 660 ribu orang, dan persentase pekerja informal berkurang dari 59,81 persen pada Februari 2014 menjadi 57,94 persen pada Februari 2015. Penurunan tersebut berasal dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Tabel 6.3
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
2013–2015 (juta orang)

Status Pekerjaan Utama	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Berusaha sendiri	19,50	19,21	20,32	20,49	21,65
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap	19,94	19,34	19,74	19,27	18,80
3. Berusaha dibantu buruh tetap	4,13	3,86	4,14	4,18	4,21
4. Buruh/Karyawan	42,05	41,12	43,35	42,38	46,62
5. Pekerja bebas di pertanian	5,10	5,20	4,74	5,09	5,08
6. Pekerja bebas di nonpertanian	6,46	6,06	6,75	6,41	6,80
7. Pekerja keluarga/tak dibayar	18,75	17,97	19,13	16,81	17,69
Jumlah	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

E. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

1. Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2015 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 54,6 juta orang (45,19 persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 21,5 juta (17,77 persen). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 13,1 juta orang mencakup 3,1 juta orang (2,60 persen) berpendidikan Diploma dan sebanyak 10,0 juta orang (8,29 persen) berpendidikan Universitas.

Tabel 6.4
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (juta orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	55,95	53,81	55,31	53,96	54,61
2. Sekolah Menengah Pertama	20,37	20,56	21,06	20,35	21,47
3. Sekolah Menengah Atas	17,97	17,88	18,91	18,58	19,81
4. Sekolah Menengah Kejuruan	10,34	9,97	10,91	10,52	11,80
5. Diploma I/II/III	3,25	2,93	3,13	2,96	3,14
6. Universitas	8,05	7,61	8,85	8,26	10,02
Jumlah	115,93	112,76	118,17	114,63	120,85

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

2. Perbaikan kualitas penduduk yang bekerja ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) dan meningkatnya penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma dan Universitas). Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja berpendidikan rendah menurun dari

sebanyak 76,4 juta orang (64,63 persen) pada Februari 2014 menjadi 76,1 juta orang (62,96 persen) pada Februari 2015. Sementara penduduk bekerja berpendidikan tinggi meningkat dari 12,0 juta orang (10,14 persen) pada Februari 2014 menjadi 13,1 juta orang (10,89 persen) pada Februari 2015.

F. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan

1. Jumlah pengangguran pada Februari 2015 mencapai 7,4 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, dimana TPT pada Agustus 2014 sebesar 5,94 persen turun menjadi 5,81 persen pada Februari 2015.
2. Pada Februari 2015, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,05 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 8,17 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 3,61 persen.
3. Jika dibandingkan keadaan Agustus 2014, TPT yang mengalami peningkatan yaitu pada tingkat pendidikan Diploma I/II/III, dan SD ke bawah.

Tabel 6.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2013–2015 (persen)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013 ¹⁾		2014 ²⁾		2015
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. SD ke bawah	3,55	3,44	3,69	3,04	3,61
2. Sekolah Menengah Pertama	8,21	7,59	7,44	7,15	7,14
3. Sekolah Menengah Atas	9,45	9,72	9,10	9,55	8,17
4. Sekolah Menengah Kejuruan	7,72	11,21	7,21	11,24	9,05
5. Diploma I/II/III	5,72	5,95	5,87	6,14	7,49
6. Universitas	5,02	5,39	4,31	5,65	5,34
Jumlah	5,88	6,17	5,70	5,94	5,81

¹⁾ Tahun 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk

²⁾ Estimasi ketenagakerjaan sejak 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk

G. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi

1. Pada Februari 2015, TPT tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Utara masing-masing sebesar 9,05 persen dan 8,69 persen sedangkan TPT terendah terjadi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Barat masing-masing sebesar 1,37 persen dan 1,81 persen.
2. Dibanding Agustus 2014, penurunan terbesar untuk persentase tingkat pengangguran terjadi di Provinsi Maluku dengan tingkat penurunan sebesar 3,79 persen, sedangkan

yang mengalami peningkatan terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dengan peningkatan sebesar 2,36 persen.

Tabel 6.6
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi
2014–2015

Provinsi	2014				2015	
	Februari		Agustus		Februari	
	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)	Jumlah (000 orang)	TPT (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	146,7	6,75	191,5	9,02	174,7	7,73
Sumatera Utara	402,4	5,95	390,7	6,23	421,2	6,39
Sumatera Barat	158,2	6,32	151,7	6,50	148,7	5,99
Riau	139,8	4,99	176,8	6,56	199,8	6,72
Jambi	39,3	2,50	79,8	5,08	46,2	2,73
Sumatera Selatan	154,5	3,84	192,9	4,96	202,2	5,03
Bengkulu	15,7	1,62	31,3	3,47	31,3	3,21
Lampung	204,8	5,08	184,8	4,79	139,5	3,44
Kep. Bangka Belitung	17,1	2,67	32,7	5,14	23,2	3,35
Kepulauan Riau	46,9	5,26	58,8	6,69	81,0	9,05
DKI Jakarta	510,4	9,84	429,1	8,47	463,9	8,36
Jawa Barat	1 843,6	8,66	1 775,2	8,45	1 875,9	8,40
Jawa Tengah	965,4	5,45	996,3	5,68	970,6	5,31
DI Yogyakarta	44,0	2,16	67,4	3,33	85,5	4,07
Jawa Timur	832,4	4,02	843,5	4,19	892,0	4,31
Banten	541,0	9,87	484,1	9,07	488,9	8,58
Bali	33,0	1,37	44,1	1,90	33,6	1,37
Nusa Tenggara Barat	123,8	5,30	127,7	5,75	120,1	4,98
Nusa Tenggara Timur	46,9	1,97	73,2	3,26	75,1	3,12
Kalimantan Barat	59,9	2,53	93,7	4,04	113,2	4,78
Kalimantan Tengah	33,8	2,71	38,7	3,24	40,4	3,14
Kalimantan Selatan	81,3	4,03	73,8	3,80	100,0	4,83
Kalimantan Timur	171,1	8,89	133,7	7,38	118,2	7,17
Kalimantan Utara	-	-	-	-	16,6	5,79
Sulawesi Utara	84,2	7,27	80,0	7,54	102,6	8,69
Sulawesi Tengah	41,7	2,92	49,4	3,68	42,6	2,99
Sulawesi Selatan	212,9	5,79	188,8	5,08	218,3	5,81
Sulawesi Tenggara	24,2	2,13	48,1	4,43	42,3	3,62
Gorontalo	12,7	2,44	20,9	4,18	16,3	3,06
Sulawesi Barat	9,6	1,60	12,6	2,08	11,7	1,81
Maluku	48,0	6,59	70,7	10,51	47,8	6,72
Maluku Utara	27,9	5,65	25,5	5,29	28,8	5,56
Papua Barat	15,1	3,70	20,0	5,02	18,8	4,61
Papua	58,8	3,48	57,7	3,44	63,6	3,72
Indonesia	7 147,1	5,70	7 244,9	5,94	7 454,8	5,81

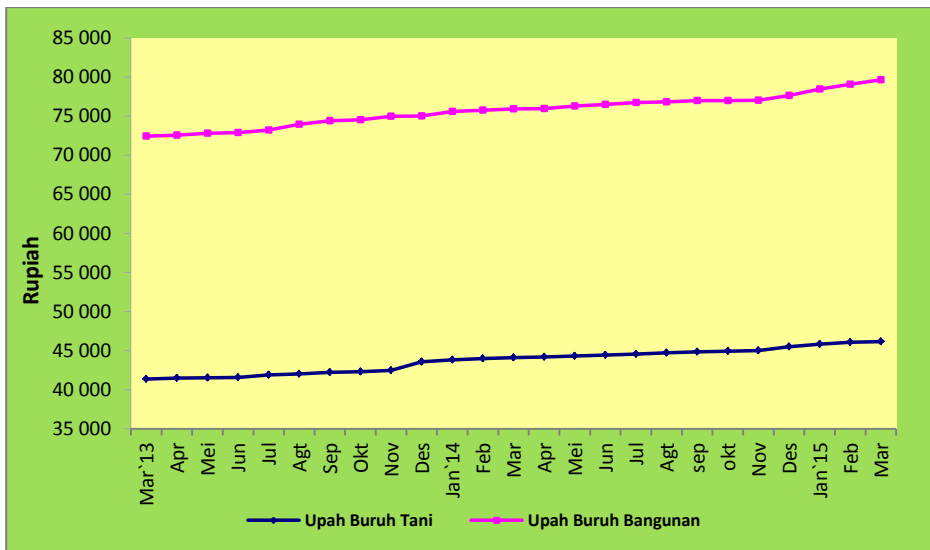
VII. UPAH BURUH MARET 2015

1. Upah Harian Buruh Tani

Secara nasional, rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Maret 2015 naik sebesar 0,26 persen dibanding upah buruh tani bulan sebelumnya, yaitu dari Rp45.059,00 menjadi Rp46.180,00. Secara riil turun sebesar 0,21 persen, yaitu dari Rp38.605,00 menjadi Rp38.522,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh tani pada periode Maret 2015 sebesar Rp46.180,00, naik 0,26 persen

Grafik 7.1
Rata-Rata Upah Nominal Harian Buruh Tani dan Buruh Bangunan
Maret 2013– Maret 2015



2. Upah Buruh Bangunan

Pada Maret 2015, rata-rata upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) naik sebesar 0,73 persen dibanding upah nominal Februari 2015, yaitu dari Rp79.083,00 menjadi Rp79.657,00, sedangkan secara riil naik sebesar 0,56 persen, yaitu dari Rp66.861,00 menjadi Rp67.233,00.

Rata-rata upah nominal harian buruh bangunan pada periode Maret 2015 sebesar Rp79.657,00, naik 0,73 persen

Tabel 7.1
Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani dan Upah Harian Buruh Bangunan (rupiah)
Maret 2013–Maret 2015

Bulan (1)	Upah Buruh Tani (harian)		Upah Buruh Bangunan (harian)	
	Nominal (2)	Riil ¹⁾ (3)	Nominal (4)	Riil ²⁾ (5)
Maret 2013	41 361	27 792	72 462	52 213
April	41 470	27 871	72 588	52 357
Mei	41 518	27 912	72 816	52 537
Juni	41 588	27 795	72 923	52 077
Juli	41 900	27 096	73 253	50 649
Agustus	42 041	26 927	73 972	50 579
September	42 217	27 017	74 414	51 059
Oktober	42 322	27 002	74 569	51 120
November	42 480	27 065	75 006	51 360
Desember	43 562	39 618	75 055	68 344
Januari 2014	43 808	39 383	75 629	68 140
Februari	43 992	39 372	75 772	68 091
Maret	44 125	39 416	75 961	68 206
April	44 212	39 514	75 987	68 242
Mei	44 314	39 516	76 326	68 436
Juni	44 430	39 330	76 535	68 328
Juli	44 569	39 134	76 756	67 896
Agustus	44 717	39 119	76 854	67 665
September	44 833	39 045	76 991	67 601
Oktober	44 924	38 955	77 011	67 305
November	45 026	38 466	77 056	66 348
Desember	45 491	37 839	77 682	65 279
Januari 2015	45 846	38 144	78 484	66 114
Februari	46 059	38 605	79 083	66 861
Maret	46 180	38 522	79 657	67 233

Catatan: ¹⁾ Upah riil = upah nominal/indeks konsumsi rumah tangga pedesaan, mulai Desember 2013 menggunakan tahun dasar (2012=100)

²⁾ Upah riil = upah nominal/IHK umum perkotaan menggunakan tahun dasar (2012=100)

3. Upah Buruh Industri

Rata-rata upah nominal per bulan buruh industri pada triwulan IV-2014 meningkat 1,11 persen dibanding triwulan sebelumnya, yaitu dari Rp2.153.400,00 menjadi Rp2.177.400,00. Secara riil, rata-rata upah buruh industri dari triwulan III-2014 ke triwulan IV-2014 turun sebesar 3,23 persen, yaitu dari Rp1.890.800,00 menjadi Rp1.829.800,00.

Rata-rata upah nominal per bulan buruh industri pada triwulan IV-2014 sebesar Rp2.177.400,00, naik 1,11 persen.

Tabel 7.2
Upah Nominal dan Upah Riil Buruh Industri Per Bulan (rupiah), 2013–2014

Tahun/triwulan		Upah Nominal	Persentase Perubahan	Upah Riil ¹⁾	Persentase Perubahan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
2013	I	1 816 400	12,41	1 750 100	8,31
	II	1 846 500	1,66	1 763 300	0,75
	III	1 859 300	0,69	1 705 900	-3,25
	IV	1 871 700	0,67	1 704 500	-0,08
2014	I	1 962 300	4,84	1 762 000	3,37
	II ^{*)}	2 132 200	8,66	1 903 600	8,04
	III ^{*)}	2 153 400	0,99	1 890 800	-0,67
	IV ^{*)}	2 177 400	1,11	1 829 800	-3,23

Catatan: ^{*)} Angka Sementara.

¹⁾ Upah Riil = Upah Nominal/IHK (2012=100)

Triwulan I menggambarkan kondisi pengupahan pada Maret, triwulan II Juni, triwulan III September, dan triwulan IV Desember.

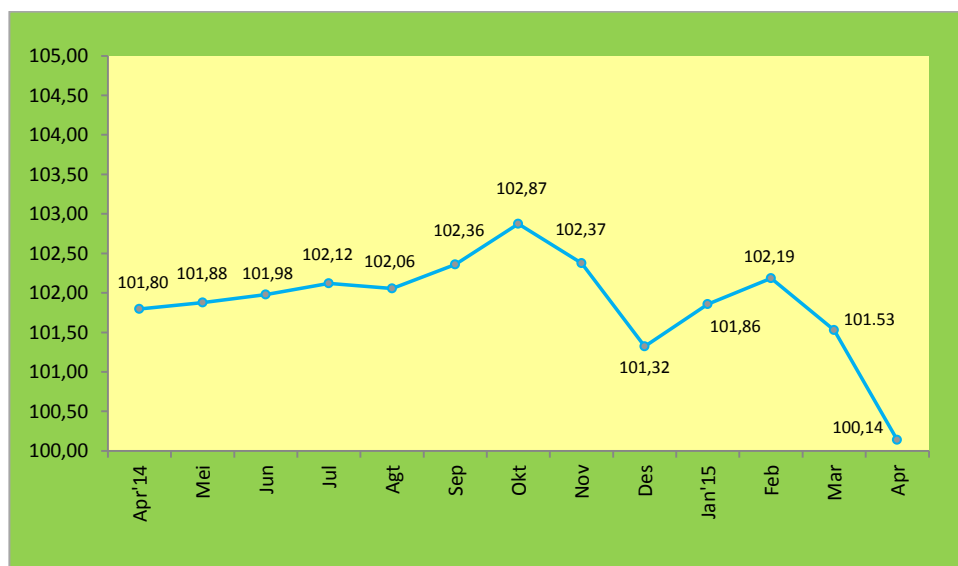
VIII. NILAI TUKAR PETANI, INFLASI PERDESAAN, DAN NILAI TUKAR USAHA RUMAH TANGGA PERTANIAN APRIL 2015

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

1. NTP April 2015 tercatat 100,14 atau turun sebesar 1,37 persen dibanding NTP Maret 2015 sebesar 101,53. Penurunan NTP bulan ini disebabkan turunnya NTP di empat subsektor yaitu Tanaman Pangan sebesar 3,44 persen, Tanaman Hortikultura 1,02 persen, Tanaman Perkebunan Rakyat 0,40 persen, dan Perikanan 0,43 persen. Sebaliknya, Subsektor Peternakan naik sebesar 0,11 persen.

NTP April 2015 turun sebesar 1,37 persen

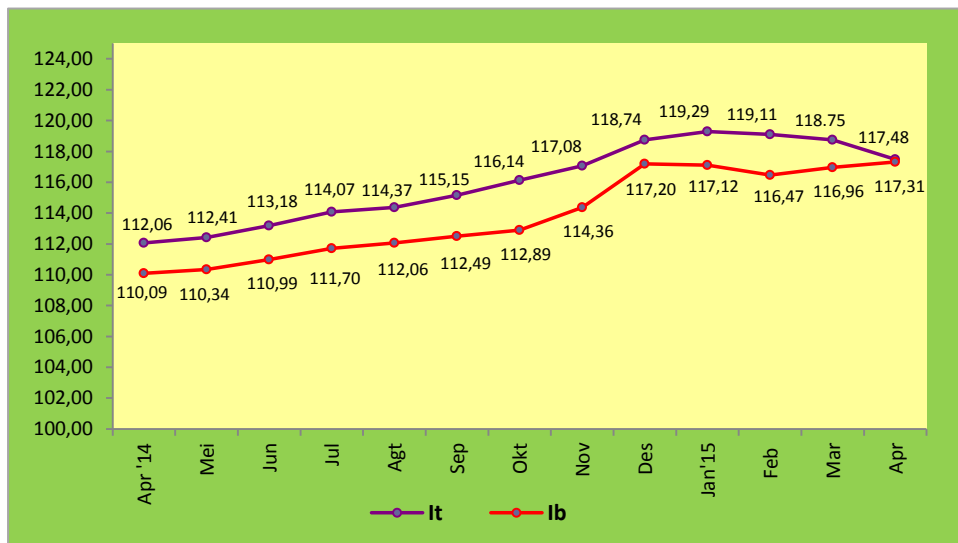
Grafik 8.1
Nilai Tukar Petani (NTP), April 2014–April 2015 (2012=100)



2. Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada April 2015 turun 1,07 persen bila dibanding It pada Maret 2015, yaitu dari 118,75 menjadi 117,48. Penurunan indeks tersebut disebabkan turunnya It di tiga subsektor, yaitu Tanaman Pangan (3,12 persen), Tanaman Hortikultura (0,75 persen), dan Tanaman Perkebunan Rakyat (0,11 persen). Sebaliknya, Subsektor Peternakan dan Perikanan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,36 persen dan 0,06 persen.

- Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) pada April 2015 naik sebesar 0,30 persen dibanding Ib Maret 2015. Kenaikan indeks ini disebabkan naiknya indeks kelompok Konsumsi Rumah Tangga sebesar 0,21 persen dan indeks kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal sebesar 0,52 persen.

Grafik 8.2
Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)
April 2014–April 2015 (2012=100)



- NTP Tanaman Pangan (NTPP) pada April 2015 turun sebesar 3,44 persen dibanding NTPP Maret 2015. Penurunan NTPP disebabkan It Tanaman Pangan turun (3,12 persen), sebaliknya Ib Tanaman Pangan naik (0,33 persen). NTP Tanaman Hortikultura (NTPH) pada April 2015 turun sebesar 1,02 persen dibanding NTPH Maret 2015. Hal ini disebabkan It Tanaman Hortikultura turun (0,75 persen), sebaliknya Ib Tanaman Hortikultura naik (0,27 persen). NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) pada April 2015 turun sebesar 0,40 persen. Penurunan NTPR disebabkan It Tanaman Perkebunan Rakyat turun (0,11 persen), sebaliknya Ib Tanaman Perkebunan Rakyat naik (0,29 persen). NTP Peternakan (NTPT) naik 0,11 persen disebabkan It Peternakan naik (0,36 persen) lebih besar dibandingkan kenaikan Ib Peternakan (0,25 persen). NTP Perikanan (NTNP) turun 0,43 persen disebabkan It Perikanan naik (0,06 persen) lebih kecil dibandingkan kenaikan Ib Perikanan (0,49 persen).

Tabel 8.1
Nilai Tukar Petani Per Subsektor serta Persentase Perubahannya (2012=100)

Subsektor	Maret 2015	April 2015	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gabungan/Nasional			
a. Nilai tukar petani (NTP)	101,53	100,14	-1,37
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	118,75	117,48	-1,07
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	116,96	117,31	0,30
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,88	120,13	0,21
- Indeks BPPBM	111,31	111,89	0,52
Gabungan/Nasional tanpa Perikanan			
a. Nilai tukar petani (NTP)	101,48	100,06	-1,40
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	118,69	117,37	-1,11
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	116,96	117,30	0,29
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,86	120,12	0,22
- Indeks BPPBM	111,28	111,83	0,49
1. Tanaman Pangan			
a. Nilai tukar petani (NTPP)	100,80	97,33	-3,44
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	119,64	115,91	-3,12
- Padi	118,83	113,89	-4,16
- Palawija	121,08	121,15	0,06
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	118,70	119,09	0,33
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	120,08	120,40	0,27
- Indeks BPPBM	114,28	114,88	0,53
2. Tanaman Hortikultura			
a. Nilai tukar petani (NTPH)	101,34	100,30	-1,02
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	119,38	118,49	-0,75
- Sayur-sayuran	117,58	116,59	-0,84
- Buah-buahan	120,70	119,88	-0,68
- Tanaman Obat	117,65	117,55	-0,09
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	117,81	118,13	0,27
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,97	120,15	0,15
- Indeks BPPBM	111,18	111,90	0,64
3. Tanaman Perkebunan Rakyat			
a. Nilai tukar petani (NTPR)	97,46	97,07	-0,40
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	114,25	114,12	-0,11
- Tanaman Perkebunan Rakyat	114,25	114,12	-0,11
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	117,23	117,57	0,29
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,31	119,58	0,23
- Indeks BPPBM	110,75	111,29	0,49

Subsektor	Maret 2015	April 2015	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
4. Peternakan			
a. Nilai tukar petani (NTPT)	106,73	106,85	0,11
b. Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	121,29	121,73	0,36
- Ternak Besar	123,40	123,78	0,30
- Ternak Kecil	119,17	119,55	0,33
- Unggas	117,46	117,59	0,11
- Hasil Ternak	116,82	117,28	0,39
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	113,64	113,93	0,25
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	120,06	120,28	0,18
- Indeks BPPBM	107,85	108,19	0,31
5. Perikanan			
a. Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan (NTNP)	102,35	101,91	-0,43
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan dan pembudidaya ikan (It)	119,72	119,80	0,06
c. Indeks Harga yang Dibayar Nelayan dan pembudidaya ikan (Ib)	116,98	117,55	0,49
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	120,14	120,25	0,09
- Indeks BPPBM	111,61	112,95	1,20
5.1. Perikanan Tangkap			
a. Nilai tukar nelayan (NTN)	106,20	105,18	-0,96
b. Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It)	124,93	124,81	-0,10
- Penangkapan Perairan Umum	124,93	125,08	0,12
- Penangkapan Laut	124,90	124,78	-0,09
c. Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	117,64	118,66	0,87
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	119,68	119,81	0,11
- Indeks BPPBM	114,46	116,91	2,14
5.2. Perikanan Budidaya			
a. Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)	99,56	99,55	-0,01
b. Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya Ikan (It)	115,97	116,18	0,18
- Budidaya Air Tawar	115,24	115,55	0,27
- Budidaya Laut	112,79	113,15	0,32
- Budidaya Air Payau	115,01	115,06	0,04
c. Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya Ikan (Ib)	116,48	116,71	0,20
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	120,48	120,55	0,06
- Indeks BPPBM	109,49	110,01	0,47

BPPBM = Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

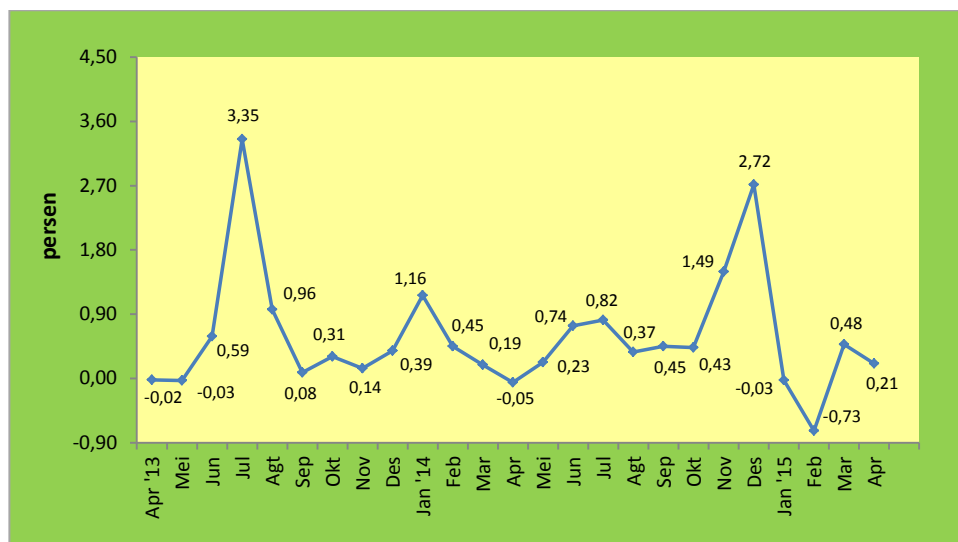
B. Inflasi Perdesaan

1. Pada April 2015 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,21 persen dengan indeks konsumsi rumah tangga 120,13. Pada bulan ini terjadi inflasi perdesaan di 22 provinsi dan deflasi perdesaan di 11 provinsi. Inflasi perdesaan tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan

Pada April 2015 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,21 persen

Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,98 persen, sedangkan inflasi perdesaan terendah terjadi di Provinsi Lampung sebesar 0,02 persen. Deflasi perdesaan terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 0,59 persen, sedangkan deflasi perdesaan terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,01 persen.

Grafik 8.3
Inflasi Perdesaan, April 2013–April 2015



2. Menurut jenis pengeluaran rumah tangga pada April 2015, terjadi kenaikan indeks harga di enam kelompok pengeluaran, yaitu; Makanan Jadi 0,60 persen; Perumahan 0,52 persen; Sandang 0,38 persen; Kesehatan 0,43 persen; Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 0,18 persen, serta Transportasi dan Komunikasi sebesar 2,24 persen. Sedangkan, Bahan Makanan turun sebesar 0,68 persen.
3. Inflasi perdesaan April 2015 sebesar 0,21 persen dipicu oleh naiknya harga komoditas bensin, bawang merah, tomat sayur, bawang putih, dan gula pasir.
4. Tingkat inflasi perdesaan tahun kalender (April 2015 terhadap Desember 2014) masih terjadi deflasi sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi perdesaan *year-on-year* (April 2015 terhadap April 2014) adalah sebesar 7,37 persen.

Tabel 8.2
Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok Pengeluaran
April 2013–April 2015

Bulan	Bahan Makanan	Makanan Jadi	Perumahan	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transportasi dan Komunikasi	Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
April 2013	-0,22	0,26	0,22	0,04	0,14	0,13	0,08	-0,02
Mei	-0,25	0,29	0,14	0,02	0,15	0,16	0,15	-0,03
Juni	0,90	0,34	0,31	0,11	0,28	0,20	0,31	0,59
Juli	4,80	1,10	1,02	0,85	0,76	1,06	9,08	3,35
Agustus	1,25	0,71	0,48	0,56	0,40	0,68	0,90	0,96
September	-0,23	0,47	0,38	0,50	0,36	0,26	0,27	0,08
Oktober	0,31	0,36	0,29	0,26	0,33	0,25	0,26	0,31
November	0,02	0,32	0,31	0,18	0,29	0,08	0,16	0,14
Desember	0,52	0,38	0,33	0,32	0,25	0,04	0,14	0,39
Januari 2014	1,86	0,74	1,10	0,52	0,52	0,25	0,39	1,16
Februari	0,53	0,43	0,51	0,38	0,42	0,22	0,30	0,45
Maret	0,02	0,39	0,35	0,39	0,39	0,21	0,22	0,19
April	-0,48	0,27	0,28	0,21	0,36	0,11	0,09	-0,05
Mei	0,20	0,30	0,31	0,23	0,30	0,11	0,12	0,23
Juni	1,32	0,39	0,33	0,43	0,28	0,19	0,20	0,74
Juli	1,24	0,45	0,41	1,72	0,31	0,81	0,18	0,82
Agustus	0,48	0,36	0,26	0,17	0,33	0,27	0,22	0,37
September	0,48	0,51	0,61	0,08	0,38	0,22	0,33	0,45
Oktober	0,59	0,32	0,47	0,22	0,34	0,25	0,24	0,43
November	1,79	0,47	0,61	0,37	0,59	0,20	4,39	1,49
Desember	3,29	1,10	1,32	1,08	0,80	0,27	7,07	2,72
Januari 2015	0,52	0,88	1,18	0,70	0,83	0,42	-5,22	-0,03
Februari	-1,41	0,44	0,40	0,35	0,48	0,21	-2,68	-0,73
Maret	0,33	0,48	0,46	0,25	0,42	0,13	1,31	0,48
April	-0,68	0,60	0,52	0,38	0,43	0,18	2,24	0,21

Tabel 8.3
Tingkat Inflasi Perdesaan April 2015, Tahun Kalender 2015
Menurut Kelompok Pengeluaran
(2012=100)

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Perdesaan April 2015	Tingkat Inflasi Perdesaan 2015	
	April 2014	Desember 2014	April 2015		Tahun Kalender	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	111,89	120,22	120,13	0,21	-0,08	7,37
1. Bahan Makanan	115,64	126,90	125,32	-0,68	-1,25	8,37
2. Makanan Jadi	108,96	113,29	116,03	0,60	2,42	6,49
3. Perumahan	108,78	113,57	116,51	0,52	2,59	7,11
4. Sandang	108,29	113,01	114,91	0,38	1,68	6,12
5. Kesehatan	106,99	110,60	113,01	0,43	2,18	5,62
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	106,94	109,46	110,49	0,18	0,94	3,32
7. Transportasi dan Komunikasi	113,38	128,39	122,66	2,24	-4,46	8,18

C. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

1. Pada April 2015 terjadi penurunan NTUP sebesar 1,58 persen. Hal ini karena penurunan It (1,07 persen), sebaliknya indeks BPBBM naik (0,52 persen). Penurunan NTUP disebabkan oleh turunnya empat subsektor penyusun NTUP yaitu Tanaman Pangan (3,63 persen), Tanaman Hortikultura (1,38 persen), Tanaman Perkebunan Rakyat (0,60 persen), dan Perikanan (1,13 persen), sebaliknya Subsektor Peternakan naik sebesar 0,05 persen.
2. Dari 33 provinsi yang dihitung NTUP-nya, 31 provinsi mengalami penurunan dan 2 provinsi mengalami kenaikan. Kenaikan NTUP tertinggi pada April 2015 terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 0,70 persen, sebaliknya penurunan NTUP terbesar terjadi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 2,81 persen.

Tabel 8.4
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian per Subsektor dan Persentase Perubahannya,
April 2015 (2012=100)

Subsektor	Maret 2015	April 2015	Persentase Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman Pangan	104,69	100,89	-3,63
2. Tanaman Hortikultura	107,37	105,89	-1,38
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	103,16	102,54	-0,60
4. Peternakan	112,45	112,51	0,05
5. Perikanan	107,27	106,06	-1,13
a. Tangkap	109,14	106,75	-2,19
b. Budidaya	105,92	105,61	-0,29
Nasional	106,68	105,00	-1,58

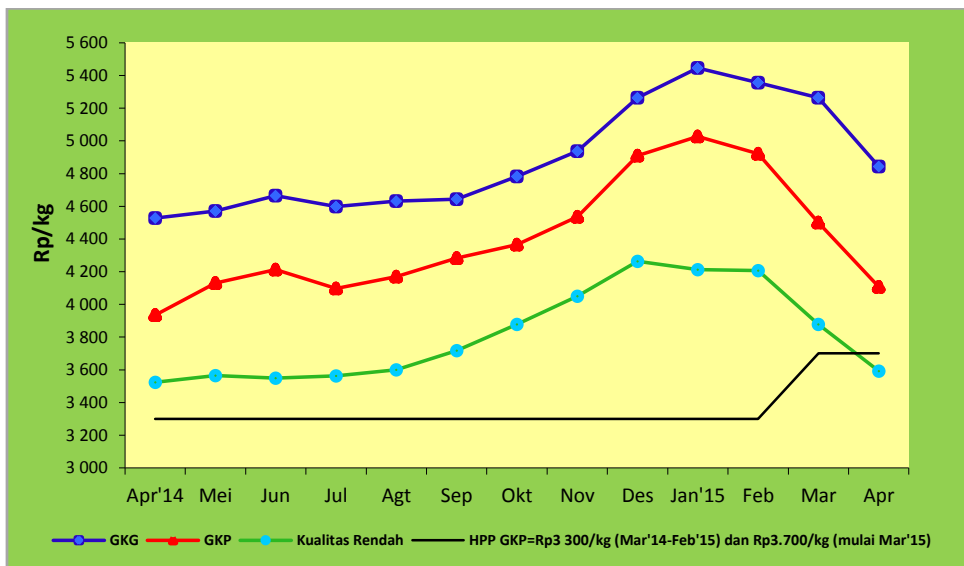
IX. HARGA PANGAN APRIL 2015

A. Harga Gabah dan Beras di Penggilingan

- Selama April 2015, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di petani turun 8,74 persen menjadi Rp4.106,73 per kg dan di penggilingan turun 8,78 persen menjadi Rp4.187,27 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.

Panen raya, harga GKP di petani April 2015 sebesar Rp4.106.73 per kg turun 8,74 persen

Grafik 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas April 2014–April 2015



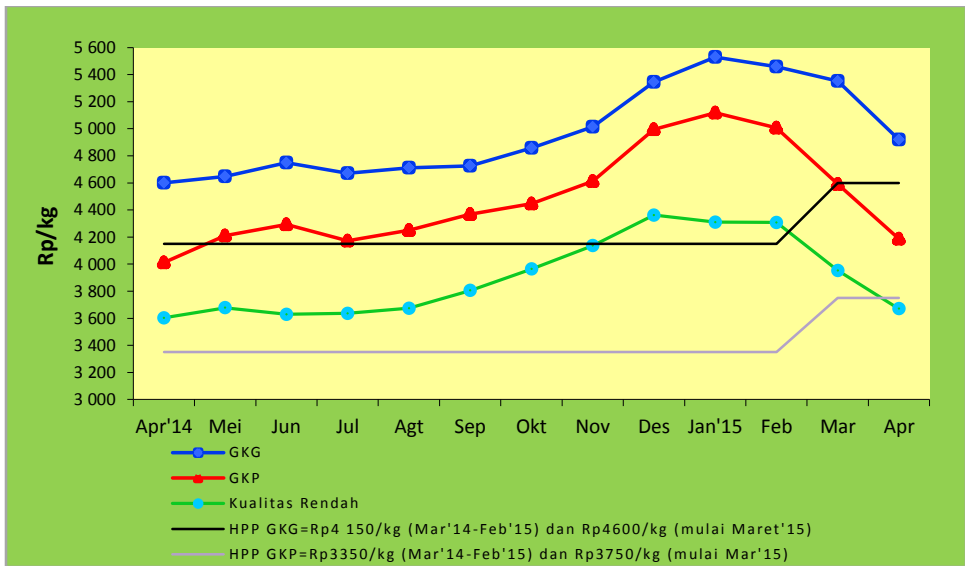
- Pada bulan yang sama, harga tertinggi di tingkat petani senilai Rp9.000,00 per kg dan di tingkat penggilingan Rp9.181,00 per kg. Sedangkan harga terendah di tingkat petani dan penggilingan masing-masing Rp2.800,00 per kg dan Rp2.875,00 per kg. Harga tertinggi di tingkat petani dan penggilingan berasal dari GKP varietas Siam Mayang yang terjadi di Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas (Kalimantan Tengah). Sementara itu, harga terendah di tingkat petani dan penggilingan berasal dari gabah kualitas rendah varietas Ciherang yang terjadi di Kecamatan Brang Bea, Kabupaten Sumbawa Barat (Nusa Tenggara Barat).

Tabel 9.1
Rata-Rata Harga Gabah di Petani Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, April 2014–April 2015

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014 Apr	19,08	3 935,73	-4,81	12,57	4 528,88	-5,47	25,71	3 524,33	-3,73
Mei	18,22	4 130,49	4,95	12,62	4 572,07	0,95	26,51	3 564,91	1,15
Jun	18,11	4 213,83	2,02	12,67	4 664,43	2,02	25,86	3 549,68	-0,43
Jul	19,24	4 097,92	-2,75	12,79	4 597,59	-1,43	26,94	3 562,06	0,35
Agt	18,81	4 170,35	1,77	12,70	4 630,94	0,73	26,07	3 600,67	1,08
Sep	18,44	4 282,54	2,69	12,48	4 643,25	0,27	25,50	3 717,56	3,25
Okt	18,49	4 364,75	1,92	12,54	4 782,74	3,00	26,37	3 877,30	4,30
Nov	18,82	4 535,02	3,90	12,78	4 936,49	3,21	26,33	4 050,71	4,47
Des	18,03	4 910,51	8,28	12,43	5 264,16	6,64	25,31	4 264,54	5,28
2015 Jan	17,86	5 027,89	2,39	12,48	5 447,14	3,48	26,03	4 212,30	-1,22
Feb	18,35	4 922,52	-2,10	12,60	5 357,00	-1,65	27,20	4 206,68	-0,13
Mar	19,66	4 499,83	-8,59	12,67	5 264,01	-1,74	26,07	3 878,92	-7,79
Apr	19,32	4 106,73	-8,74	12,61	4 842,69	-8,00	26,35	3 592,24	-7,39
Perubahan (%) Apr'15 thd Apr'14			4,34			6,93			1,93

- Rata-rata harga GKG di petani selama April 2015 turun 8,00 persen menjadi Rp4.842,69 per kg, sedangkan di penggilingan turun 8,07 persen menjadi Rp4.920,26 per kg dibandingkan harga gabah kualitas yang sama bulan lalu. Demikian pula harga gabah kualitas rendah di petani dan penggilingan mengalami penurunan masing-masing 7,39 persen menjadi Rp3.592,24 per kg dan 7,17 persen menjadi Rp3.670,00 per kg.
- Selama Periode April 2014–April 2015 di tingkat petani, rata-rata harga tertinggi untuk kualitas GKP dan GKG, masing-masing Rp5.027,89 per kg dan Rp5.447,14 per kg terjadi pada Januari 2015, sedangkan untuk gabah kualitas rendah Rp4.264,54 per kg terjadi pada Desember 2014. Sebaliknya, rata-rata harga terendah pada GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah terjadi pada April 2014, masing-masing Rp3.935,73 per kg, Rp4.528,88 per kg, dan Rp3.524,33 per kg.

Grafik 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas
April 2014–April 2015



5. Pada periode April 2014–April 2015, di tingkat penggilingan rata-rata harga tertinggi untuk kualitas GKP dan GKG, masing-masing Rp5.118,31 per kg dan Rp5.528,47 per kg terjadi pada Januari 2015, sedangkan untuk gabah kualitas rendah Rp4.362,54 terjadi pada Desember 2014. Rata-rata harga terendah di tingkat penggilingan pada GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah terjadi pada April 2014, masing-masing Rp4.010,54 per kg, Rp4.600,34 per kg, dan Rp3.602,75 per kg.
6. Dibandingkan April 2014, rata-rata harga GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah di tingkat petani pada April 2015 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,34 persen, 6,93 persen, dan 1,93 persen. Di tingkat penggilingan rata-rata harga GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah pada April 2015 juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,41 persen, 6,95 persen, dan 1,87 persen dibandingkan April 2014.
7. Berdasarkan 2.357 observasi pada transaksi penjualan gabah di 22 provinsi selama April 2015, masih didominasi transaksi penjualan GKP sebanyak 1.536 observasi (65,17 persen), gabah kualitas rendah sebanyak 731 observasi (31,01 persen), dan GKG sebanyak 90 observasi (3,82 persen). Dari sejumlah observasi tersebut, terdapat 23,24 persen kasus harga GKP di tingkat petani dan 22,57 persen kasus harga GKG dan GKP di tingkat penggilingan berada di bawah HPP.

Tabel 9.2
Rata-Rata Harga Gabah di Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Air
serta Perubahannya, April 2014–April 2015

Tahun/ Bulan	GKP			GKG			Rendah		
	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Air (%)	Rata- Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014 Apr	19,08	4 010,54	-4,75	12,57	4 600,34	-5,65	25,71	3 602,75	-3,44
Mei	18,22	4 209,36	4,96	12,62	4 648,51	1,05	26,51	3 677,69	2,08
Jun	18,11	4 293,51	2,00	12,67	4 750,45	2,19	25,86	3 629,31	-1,32
Jul	19,24	4 171,76	-2,84	12,79	4 671,93	-1,65	26,94	3 635,71	0,18
Agt	18,81	4 249,30	1,86	12,70	4 712,52	0,87	26,07	3 674,50	1,07
Sep	18,44	4 369,26	2,82	12,48	4 724,66	0,26	25,50	3 805,19	3,56
Okt	18,49	4 445,98	1,76	12,54	4 857,39	2,81	26,37	3 963,57	4,16
Nov	18,82	4 611,82	3,73	12,78	5 013,64	3,22	26,33	4 135,83	4,35
Des	18,03	4 995,31	8,32	12,43	5 344,22	6,59	25,31	4 362,54	5,48
2015 Jan	17,86	5 118,31	2,46	12,48	5 528,47	3,45	26,03	4 309,61	-1,21
Feb	18,35	5 007,01	-2,17	12,60	5 458,93	-1,26	27,20	4 307,31	-0,05
Mar	19,66	4 590,26	-8,32	12,67	5 352,36	-1,95	26,07	3 953,42	-8,22
Apr	19,32	4 187,27	-8,78	12,61	4 920,26	-8,07	26,35	3 670,00	-7,17
Perubahan (%)									
Apr'15 thd Apr'14			4,41			6,95			1,87

8. Pada April 2015 rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan sebesar Rp8.794,25 per kg turun sebesar 7,03 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan sebesar Rp8.597,64 per kg turun sebesar 7,53 persen. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan sebesar Rp8.250,71 per kg turun sebesar 6,83 persen.
9. Dibandingkan dengan April 2014, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada bulan April 2015 untuk kualitas premium naik 11,04 persen, kualitas medium naik 9,80 persen dan kualitas rendah naik 8,28 persen.

Pada April 2015 harga beras medium di penggilingan sebesar Rp8.597,64 per kg, turun 7,53 persen

Tabel 9.3
Rata-Rata Harga Beras di Tingkat Penggilingan Menurut Kelompok Kualitas dan Kadar Beras Patah (*Broken*), April 2014–April 2015

Tahun/ Bulan	Premium			Medium			Rendah		
	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)	Rata-Rata Harga (Rp/kg)	Perubah- an (%)	Kadar Beras Patah (<i>Broken</i>) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2014 Apr	7 919,93	- 3,33	7,42	7 830,32	- 3,14	15,19	7 619,57	- 5,53	23,43
Mei	8 009,43	1,13	7,37	7 805,76	- 0,31	15,73	7 680,06	0,79	23,44
Jun	8 167,57	1,97	7,45	7 797,08	- 0,11	15,41	7 706,25	0,34	23,70
Jul	8 228,30	0,74	7,49	7 939,00	1,82	15,17	7 623,30	- 1,08	23,60
Agt	8 329,47	1,23	7,20	8 009,58	0,89	15,43	7 736,84	1,49	23,42
Sep	8 310,51	- 0,23	6,86	8 125,93	1,45	15,36	7 557,46	- 2,32	23,43
Okt	8 396,86	1,04	6,91	8 126,34	0,01	15,57	7 693,15	1,80	23,38
Nov	8 555,14	1,88	7,16	8 372,84	3,03	15,20	7 962,07	3,50	23,12
Des	9 018,39	5,41	7,21	8 992,57	7,40	15,17	8 412,28	5,65	23,23
2015 Jan	9 242,85	2,49	7,14	9 222,01	2,55	15,46	8 765,83	4,20	23,44
Feb	9 358,23	1,25	7,11	9 252,01	0,33	15,70	8 838,16	0,83	23,60
Mar	9 459,49	1,08	7,12	9 298,25	0,50	15,55	8 855,47	0,20	23,65
Apr	8 794,25	- 7,03	7,08	8 597,64	- 7,53	15,57	8 250,71	- 6,83	23,38
Perubahan (%) Apr'15 thd Apr'14		11,04			9,80			8,28	

Keterangan: Premium: Maksimum beras patah (*Broken*) s.d. 10%
 Medium: Beras patah (*Broken*) 10,1% - 20%
 Rendah: Beras patah (*Broken*) 20,1% - 25%

B. Harga Eceran Beberapa Bahan Pokok

1. Secara nasional, rata-rata harga beras pada April 2015 turun 4,82 persen dibanding Maret 2015. Dibandingkan April 2014, harga beras naik 10,12 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun ke tahun periode yang sama sebesar 6,79 persen. Artinya, pemilik beras (pedagang, petani, konsumen, BULOG, dan industri berbahan baku beras) mengalami kenaikan nilai riil sebesar 3,33 persen. Penurunan tertinggi terjadi di Mataram (18 persen) dan Depok (15 persen).

Rata-rata harga beras April 2015 sebesar Rp12.458,00 per kg, turun 4,82 persen

- Harga cabai rawit turun 8,87 persen dibanding Maret 2015 atau turun 36,39 persen bila dibanding April 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Maumere (41 persen) dan Gorontalo (38 persen). Harga cabai merah turun 3,74 persen dibanding Maret 2015 atau naik 1,31 persen bila dibanding April 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Banjarmasin (36 persen) dan Gorontalo (33 persen). Harga telur ayam ras turun 1,43 persen dibanding Maret 2015 atau naik 10,98 persen dibanding April 2014. Penurunan tertinggi terjadi di Watampone (20 persen) dan Tarakan (14 persen).
- Harga gula pasir naik 3,02 persen dibanding Maret 2015 atau naik 3,24 dibandingkan April 2014. Kenaikan tertinggi terjadi di Tegal (12 persen) dan Tembilahan (10 persen). Harga daging ayam ras naik 1,02 persen dibanding Maret 2015 atau naik 3,50 dibandingkan April 2014. Kenaikan tertinggi terjadi di Lubuklinggau (19 persen) dan Bengkulu (17 persen).
- Komoditas lain seperti daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu, dan ikan kembung perubahannya relatif rendah.

Tabel 9.4
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
April 2014–April 2015 (rupiah)

Bulan	Beras (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Daging Sapi (kg)	Susu		Gula Pasir (kg)	Tepung Terigu (kg)	Cabai Rawit (kg)	Cabai Merah (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Ikan Kembung (kg)
				Daging Kental Manis (385 gram)	Minyak Goreng (liter)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
April'14	11 313	32 435	92 313	9 385	13 735	11 806	7 758	44 338	22 555	16 187	27 915
Mei	11 219	34 284	91 861	9 457	13 817	11 738	7 750	26 443	19 210	17 142	28 060
Juni	11 259	36 050	91 686	9 515	13 853	11 738	7 773	23 212	18 200	18 172	27 642
Juli	11 321	36 483	94 767	9 578	13 925	11 731	7 790	23 168	18 715	18 565	28 305
Agustus	11 390	37 173	94 445	9 584	13 947	11 669	7 792	24 878	18 996	18 285	28 766
September	11 433	37 526	93 501	9 620	13 915	11 608	7 831	24 507	23 948	18 199	28 424
Oktober	11 522	33 905	93 454	9 627	13 879	11 595	7 803	27 803	33 652	17 671	28 458
November	11 691	33 474	93 473	9 639	13 911	11 630	7 794	46 011	48 785	17 636	28 566
Desember	12 210	34 043	94 324	9 670	13 950	11 637	7 800	61 843	61 874	18 599	29 137
Januari'15	12 444	36 515	94 758	9 689	13 919	11 632	7 850	52 134	46 573	20 496	29 650
Februari	12 802	35 682	94 777	9 694	13 895	11 722	7 850	34 539	28 102	20 016	29 760
Maret	13 089	33 231	95 033	9 728	13 910	11 831	7 852	30 947	23 738	18 225	29 510
April	12 458	33 570	95 299	9 752	13 820	12 188	7 854	28 202	22 850	17 964	29 312
April'15 thd Maret'15	-4,82	1,02	0,28	0,25	-0,65	3,02	0,02	-8,87	-3,74	-1,43	-0,67
April'15 thd April'14 (dalam persen)	10,12	3,50	3,23	3,91	0,62	3,24	1,24	-36,39	1,31	10,98	5,00

Grafik 9.3
Harga Eceran Beberapa Komoditas Bahan Pokok
Maret 2014–April 2015 (rupiah)



X. INDEKS HARGA PRODUSEN TRIWULAN I-2015 DAN INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR APRIL 2015

A. INDEKS HARGA PRODUSEN

Indeks Harga Produsen (IHP) triwulan I-2015, sebesar 127,16 naik 1,09 persen dibandingkan IHP triwulan IV-2014 sebesar 125,79 (*q-to-q*). IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan sebesar 6,19 persen, sebaliknya IHP Sektor Pertanian dan IHP Sektor Industri Pengolahan naik masing-masing sebesar 1,89 persen dan 1,99 persen. Adapun IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan I-2015 sebesar 123,13 naik 0,16 persen dibandingkan IHP triwulan IV-2014 sebesar 122,94 (*q-to-q*). Perubahan IHP triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 (*y-on-y*) sebesar 2,41 persen, yaitu dari 124,17 pada triwulan I-2014 menjadi 127,16 pada triwulan I-2015. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh naiknya indeks atau inflasi harga produsen pada Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan, masing-masing sebesar 6,35 persen dan 4,82 persen. Sebaliknya Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami deflasi (*y-on-y*) sebesar 17,30 persen. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 (*y-on-y*) mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen, yaitu dari 121,21 pada triwulan I-2014 menjadi 123,13 pada triwulan I-2015.

Pada triwulan I-2015 terjadi inflasi harga produsen sebesar 1,09 persen

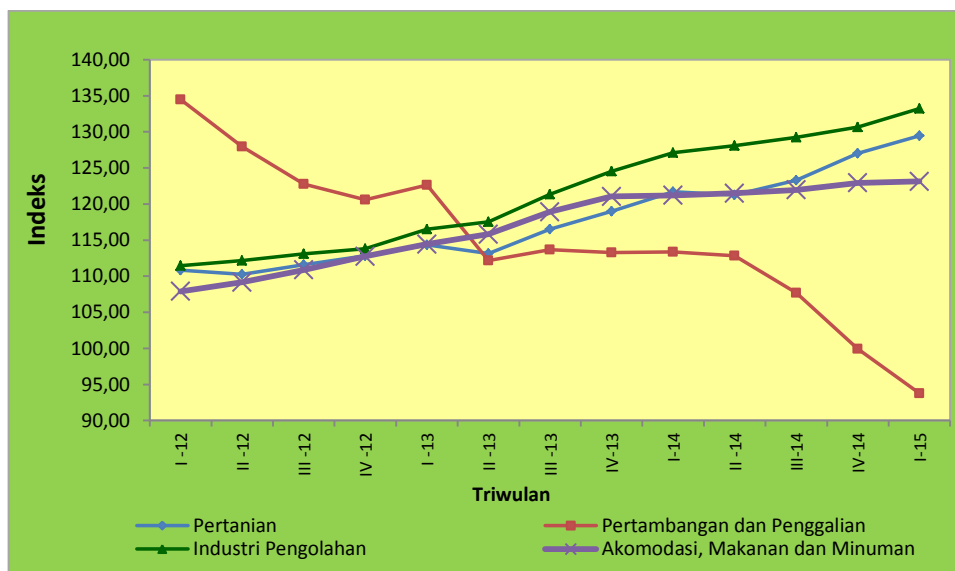
Tabel 10.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Sektor Triwulan I-2015

Sektor	IHP Triw I-2014	IHP Triw IV-2014	IHP Triw I-2015	Inflasi Harga Produsen (<i>q-to-q</i>) ¹ (%)		Inflasi Harga Produsen (<i>y-on-y</i>) ² (%)	
				Triw IV-2014	Triw I-2015	Triw I-2014	Triw I-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gabungan (1+2+3)	124,17	125,79	127,16	0,53	1,09	3,18	2,41
1. Pertanian	121,71	127,04	129,44	3,06	1,89	6,78	6,35
2. Pertambangan dan Penggalian	113,28	99,94	93,76	-7,20	-6,19	-11,77	-17,30
3. Industri Pengolahan	127,10	130,64	133,23	1,10	1,99	4,89	4,82
4. Akomodasi, Makanan dan Minuman	121,21	122,94	123,13	0,81	0,16	1,56	1,59

Keterangan: ¹ Inflasi Produsen (*q-to-q*) adalah persentase perubahan IHP triwulan t terhadap triwulan t-1

² Inflasi Produsen (*y-on-y*) adalah persentase perubahan IHP triwulan t-2015 terhadap triwulan t-2014

Grafik 10.1
Indeks Harga Produsen (2010=100) Menurut Sektor
Triwulan I-2012 s.d. Triwulan I-2015



1. Sektor Pertanian

IHP Sektor Pertanian pada triwulan I-2015 naik 1,89 persen (*q-to-q*), yaitu dari 127,04 pada triwulan IV-2014 menjadi 129,44 pada triwulan I-2015. Kenaikan IHP Sektor Pertanian pada triwulan I-2015 didominasi oleh kenaikan Subsektor Kehutanan sebesar 3,20 persen, diikuti oleh Subsektor Tanaman Bahan Makanan sebesar 2,72 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 1,74 persen. Apabila dibandingkan dengan triwulan I-2014, Sektor Pertanian pada triwulan I-2015 juga mengalami inflasi harga produsen (*y-on-y*) sebesar 6,35 persen, yaitu dari 121,71 pada triwulan I-2014 menjadi 129,44 pada triwulan I-2015. Subsektor Tanaman Bahan Makanan merupakan penyebab utama kenaikan IHP pada periode tersebut yaitu sebesar 8,75 persen, diikuti oleh Subsektor Kehutanan dan Subsektor Perikanan masing-masing sebesar 7,40 persen dan 6,58 persen.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

IHP Sektor Pertambangan dan Penggalian pada triwulan I-2015 sebesar 93,76 mengalami penurunan 6,19 persen, dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya sebesar 99,94 (*q-to-q*). Deflasi harga produsen pada sektor ini dipengaruhi oleh turunnya IHP pada Subsektor Pertambangan sebesar 8,75 persen. Sedangkan IHP Subsektor Penggalian naik sebesar 3,84 persen. IHP Sektor Pertambangan dan

Penggalian triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 (*y-on-y*) mengalami penurunan sebesar 17,30 persen, yaitu dari 113,38 pada triwulan I-2014 menjadi 93,76 pada triwulan I-2015. Deflasi harga produsen pada Sektor Pertambangan dan Penggalian dipengaruhi oleh turunnya IHP Subsektor Pertambangan sebesar 22,66 persen.

3. Sektor Industri Pengolahan

Pada triwulan I-2015, IHP Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan sebesar 1,99 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 130,64 pada triwulan IV-2014 menjadi 133,23 pada triwulan I-2015 (*q-to-q*). Penyebab kenaikan terjadi pada beberapa subsektor, terutama pada Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung, dan Pakan Ternak (5,42 persen); Subsektor Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak (3,32 persen); dan Subsektor Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia, dan Barang dari Bahan Kimia (3,19 persen). Sedangkan untuk Subsektor Pengilangan Minyak Bumi dan Gas mengalami penurunan sebesar 2,56 persen. Dibandingkan triwulan I-2014, perubahan IHP Sektor Industri Pengolahan pada triwulan I-2015 (*y-on-y*) mengalami kenaikan (4,82 persen) dari 127,10 menjadi 133,23. Perubahan IHP disebabkan terutama oleh kenaikan IHP pada Subsektor Industri Penggilingan Padi, Tepung, dan Pakan Ternak (10,53 persen); Subsektor Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia, dan Barang dari Bahan Kimia (10,46 persen); dan Subsektor Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan (8,70 persen).

4. Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman

IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman pada triwulan I-2015 sebesar 123,13 mengalami kenaikan 0,16 persen dibandingkan IHP pada triwulan sebelumnya yang sebesar 122,94 (*q-to-q*). Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan IHP Subsektor Makanan dan Minuman sebesar 0,20 persen terhadap triwulan IV-2014. Sedangkan IHP Subsektor Akomodasi mengalami penurunan 0,10 persen dibandingkan triwulan IV-2014. IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 (*y-on-y*) naik sebesar 1,59 persen, yaitu dari 121,21 menjadi 123,13. Hal ini diakibatkan oleh Inflasi Harga Produsen Subsektor Makanan dan Minuman sebesar 1,74 persen dan Subsektor Akomodasi sebesar 0,67 persen.

Tabel 10.2
Indeks Harga Produsen (2010=100) dan Inflasi Harga Produsen Menurut Subsektor
Triwulan I-2015

Sektor/Subsektor	IHP Triw I- 2014	IHP Triw IV- 2014	IHP Triw I- 2015	Inflasi Harga Produsen (q-to-q) ¹ (%)		Inflasi Harga Produsen (y-on-y) ² (%)	
				Triw IV- 2014	Triw I- 2015	Triw I- 2014	Triw I- 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian	121,71	127,04	129,44	3,06	1,89	6,78	6,35
1. Tanaman Bahan Makanan	127,47	134,95	138,62	5,85	2,72	8,49	8,75
2. Perkebunan	119,13	119,47	119,65	-0,16	0,14	4,47	0,43
3. Peternakan	114,68	119,97	121,41	1,11	1,20	4,95	5,87
4. Perikanan	116,11	121,64	123,75	1,51	1,74	6,85	6,58
5. Kehutanan	125,81	130,93	135,12	1,58	3,20	5,21	7,40
Pertambangan dan Penggalian	113,38	99,94	93,76	-7,20	-6,19	-11,77	-17,30
1. Pertambangan	111,51	94,51	86,24	-9,37	-8,75	-15,60	-22,66
2. Penggalian	123,32	128,96	133,91	2,45	3,84	7,27	8,58
Industri Pengolahan	127,10	130,64	133,23	1,10	1,99	4,89	4,82
1. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-Buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak	131,91	132,48	136,89	-1,55	3,32	2,93	3,77
2. Industri Susu dan Makanan Dari Susu	108,93	111,50	113,68	0,44	1,96	4,02	4,37
3. Industri Penggilingan Padi, Tepung dan Pakan Ternak	130,03	136,33	143,72	4,27	5,42	7,94	10,53
4. Industri Makanan Lainnya	120,78	124,80	127,01	0,99	1,77	5,83	5,15
5. Industri Minuman dan Rokok	124,80	129,98	132,84	1,33	2,20	6,52	6,44
6. Industri Pemintalan dan Pertununan Tekstil	123,04	123,87	126,01	0,97	1,73	2,21	2,42
7. Industri Pakaian Jadi dan Alas Kaki	141,00	146,28	148,66	1,72	1,63	5,00	5,44
8. Industri Kayu Gergajian dan Olahan	150,31	154,20	156,28	0,89	1,35	5,87	3,97
9. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Cetakan	120,73	131,10	131,24	1,52	0,10	12,83	8,70
10. Industri Pupuk	126,47	128,64	129,59	1,16	0,74	2,97	2,47
11. Industri Kimia Dasar, Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	130,18	139,34	143,79	2,99	3,19	11,15	10,46
12. Pengilangan Minyak Bumi dan Gas	132,54	130,20	126,86	0,21	-2,56	-1,90	-4,29
13. Industri Karet, Plastik, dan Hasil-Hasilnya	113,28	113,17	114,78	-0,26	1,42	1,97	1,33
14. Industri Barang Mineral Bukan Logam	132,95	140,85	141,38	0,48	0,38	8,49	6,34
15. Industri Logam Dasar	107,42	112,47	113,11	2,19	0,57	5,00	5,30
16. Industri Barang-Barang dari Logam	112,84	116,46	118,73	0,83	1,95	4,29	5,23
17. Industri Mesin, Listrik, Elektronik, dan Perlengkapannya	127,64	131,27	134,58	1,18	2,52	4,67	5,44
18. Industri Alat Angkutan	124,68	126,55	127,67	0,33	0,88	3,46	2,40
19. Industri Perabot Rumah Tangga dan Barang Lainnya	137,40	140,73	143,70	1,28	2,10	4,07	4,58
Akomodasi, Makanan dan Minuman	121,21	122,94	123,13	0,81	0,16	1,56	1,59
20. Akomodasi	137,23	138,29	138,14	0,49	-0,10	-0,28	0,67
21. Makanan dan Minuman	118,86	120,69	120,93	0,86	0,20	1,87	1,74

Keterangan: ¹ Inflasi Produsen (q-to-q) adalah persentase perubahan IHP triwulan t terhadap triwulan t-1

² Inflasi Produsen (y-on-y) adalah persentase perubahan IHP triwulan t-2015 terhadap triwulan t-2014

B. INDEKS HARGA PERDAGANGAN BESAR (IHPB)

1. Pada April 2015, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 0,17 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada Sektor Pertanian, yaitu 1,43 persen dan terkecil pada Kelompok Barang Ekspor Nonmigas sebesar 0,18 persen.

Pada April 2015 IHPB tanpa impor migas dan ekspor migas naik sebesar 0,17 persen

Pada Maret 2015 IHPB Umum naik sebesar 0,75 persen dibandingkan IHPB Umum bulan sebelumnya. Kenaikan IHPB terbesar terjadi pada Sektor Industri sebesar 1,05 persen, sedangkan yang terendah adalah Sektor Pertanian 0,47 persen. Kelompok Barang Impor naik 0,66 persen, Kelompok Barang Ekspor naik 0,55 persen, sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian turun 1,02 persen.

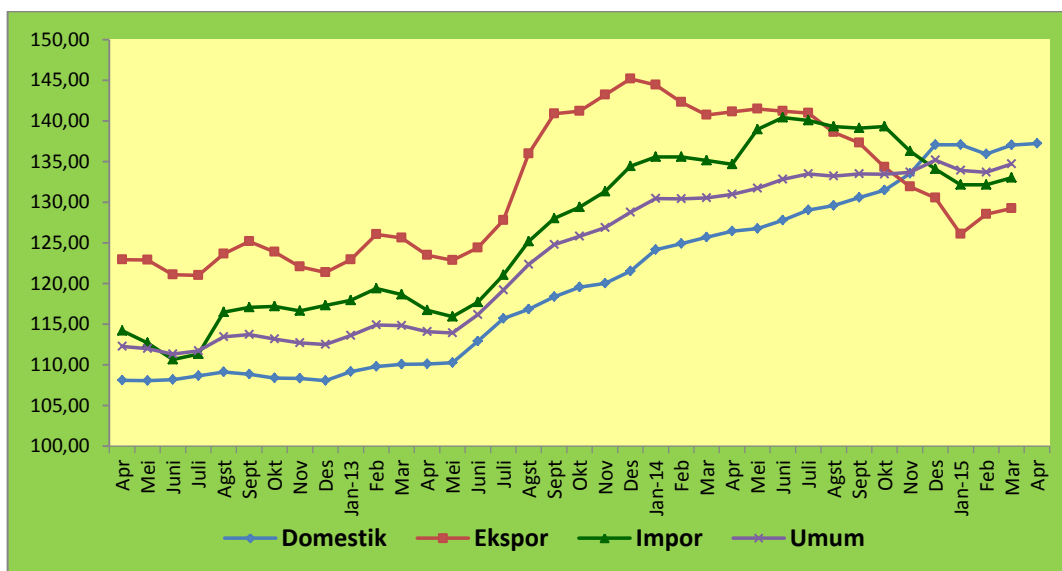
Tabel 10.3
Perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar, Indonesia
Februari–April 2015, (2010=100)

Sektor/Kelompok	Februari 2015	Maret 2015	April 2015	Perubahan	
				Maret 2015 terhadap Februari 2015 (%)	April 2015 terhadap Maret 2015 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	203,50	204,45	207,38	0,47	1,43
2. Pertambangan dan Penggalian	121,50	120,26	120,59	-1,02	0,27
3. Industri	126,80	128,13	127,88	1,05	-0,20
Domestik	135,91	137,04	137,21	0,83	0,12
4. Impor Nonmigas	127,53	128,54	129,06	0,80	0,40
Impor	132,14	133,00		0,66	
5. Ekspor Nonmigas	133,87	135,42	135,66	1,16	0,18
Ekspor	128,53	129,24		0,55	
Umum Nonmigas	134,28	135,46	135,70	0,88	0,17
Umum	133,69	134,69		0,75	

Tabel 10.4
Tingkat Inflasi Perdagangan Besar April 2015 (2010=100)

Sektor/Kelompok	IHPB				Perubahan April terhadap Maret 2015	Tingkat Inflasi Perdagangan Besar	
	April 2014	Desember 2014	Maret 2015	April 2015		Tahun Kalender 2015	Year- on- Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	162,03	216,79	204,45	207,38	1,43	-4,34	27,99
2. Pertambangan dan Penggalian	120,30	120,78	120,26	120,59	0,27	-0,16	0,24
3. Industri	121,51	126,25	128,13	127,88	-0,20	1,29	5,24
4. Impor Nonmigas	118,46	125,91	128,54	129,06	0,40	2,50	8,95
5. Ekspor Nonmigas	128,28	133,69	135,42	135,66	0,18	1,47	5,75
Umum Nonmigas	125,53	134,77	135,46	135,70	0,17	0,69	8,10

Grafik 10.2
Indeks Harga Perdagangan Besar Indonesia
April 2012–April 2015



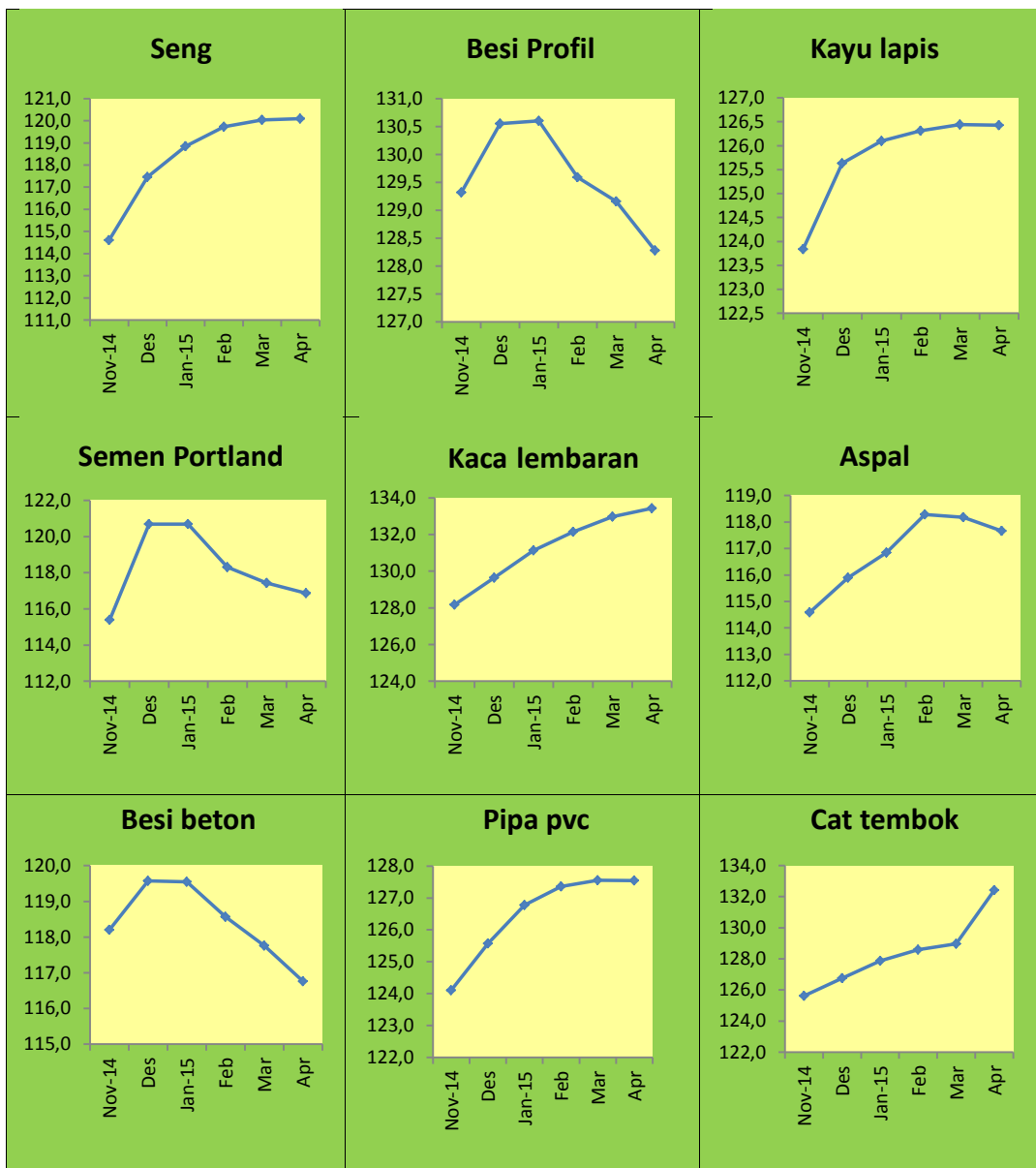
2. IHPB Kelompok Bahan Bangunan/Konstruksi yang terdiri dari lima jenis bangunan/konstruksi pada April 2015 naik sebesar 0,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada jenis Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal sebesar 0,18 persen.

Tabel 10.5
Tingkat Inflasi Konstruksi Indonesia April 2015
Menurut Jenis Bangunan (2010=100)

Jenis Bangunan	April 2014	Desember 2014	Maret 2015	April 2015	Perubahan April terhadap Maret 2015	Tingkat Inflasi	
						Tahun Kalender 2015	Year-on-Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bangunan Tempat Tinggal dan Bukan Tempat Tinggal	121,41	128,07	129,48	129,71	0,18	1,28	6,84
Bangunan Pekerjaan Umum untuk Pertanian	118,90	125,89	126,65	126,72	0,06	0,66	6,58
Pekerjaan Umum untuk Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan	117,99	123,21	124,33	124,27	-0,04	0,86	5,32
Bangunan dan Instalasi Listrik, Gas, Air Minum, dan Komunikasi	119,95	125,55	127,39	127,44	0,04	1,51	6,24
Bangunan Lainnya	119,02	125,38	126,17	126,22	0,04	0,67	6,05
Konstruksi Indonesia	120,08	126,26	127,58	127,70	0,09	1,14	6,34

3. IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi (seng, kaca lembaran, dan cat tembok) pada April 2015 naiknya dibandingkan bulan sebelumnya kecuali kayu lapis, aspal, pipa pvc, semen portland, besi beton, dan besi profil. Kenaikan tertinggi terjadi pada cat tembok sebesar 2,68 persen dan terendah pada seng sebesar 0,05 persen. Komoditi lain, yaitu kaca lembaran naik 0,34 persen. Sedangkan besi beton turun 0,85 persen, besi profil turun 0,68 persen, semen portland turun 0,48 persen, aspal turun 0,44 persen, serta kayu lapis dan pipa pvc masing-masing turun 0,01 persen.

Grafik 10.3
Indeks Harga Beberapa Bahan Bangunan November 2014–April 2015



XI. INDEKS TENDENSI BISNIS DAN KONSUMEN TRIWULANAN I-2015

A. INDEKS TENDENSI BISNIS (ITB)

A.1. ITB TRIWULAN I-2015

1. Secara umum kondisi bisnis di Indonesia pada triwulan I-2015 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dengan nilai ITB sebesar 96,30. Pelaku bisnis di Indonesia pada triwulan I-2015 lebih pesimis dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITB sebesar 104,07).
2. Penurunan kondisi bisnis pada triwulan I-2015 terjadi pada 10 lapangan usaha, sedangkan 7 lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan kondisi bisnis. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan kondisi bisnis tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (nilai ITB sebesar 106,75), diikuti oleh lapangan usaha Jasa Keuangan (nilai ITB sebesar 105,14), Informasi dan Komunikasi (nilai ITB sebesar 104,87), Real Estat (nilai ITB sebesar 102,34), Pengadaan Air (nilai ITB sebesar 102,16), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (nilai ITB sebesar 102,11), dan lapangan usaha Jasa Pendidikan (nilai ITB sebesar 100,16). Penurunan kondisi bisnis terendah terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan (Nilai ITB sebesar 87,16).
3. Kondisi bisnis pada triwulan I-2015 menurun karena adanya penurunan pendapatan usaha (nilai indeks sebesar 95,06), penggunaan kapasitas produksi/usaha (nilai indeks sebesar 95,13), dan rata-rata jumlah jam kerja (nilai indeks sebesar 97,83). Penurunan terendah untuk pendapatan usaha terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan (nilai ITB sebesar 86,33).

Kondisi bisnis triwulan I-2015 menurun dengan nilai Indeks Tendensi Bisnis (ITB) sebesar 96,30

Tabel 11.1
Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2015
Menurut Variabel Pembentuk dan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk ITB Triwulan I-2015			ITB Triwulan I-2015
	Pendapatan Usaha	Penggunaan Kapasitas Produksi/ Usaha	Rata-Rata Jumlah Jam Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	–	106,75	–	106,75
2. Pertambangan dan Penggalian	92,13	62,92	93,26	87,16
3. Industri Pengolahan	86,33	85,66	94,76	89,95
4. Pengadaan Listrik dan Gas	98,10	100,62	98,39	98,70
5. Pengadaan Air	104,17	102,41	100,38	102,16
6. Konstruksi	95,93	98,26	97,25	96,95
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	96,19	98,05	99,11	97,84
8. Transportasi dan Pergudangan	98,68	84,03	93,15	93,48
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	98,50	95,55	99,11	98,22
10. Informasi dan Komunikasi	103,89	100,18	107,67	104,87
11. Jasa Keuangan	105,80	108,14	103,33	105,14
12. Real Estat	104,76	103,09	100,00	102,34
13. Jasa Perusahaan	94,69	98,96	104,05	99,64
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	98,08	99,23	98,08	98,29
15. Jasa Pendidikan	102,04	98,70	99,22	100,16
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102,41	102,83	101,55	102,11
17. Jasa Lainnya	100,00	94,67	91,28	95,13
Total	95,06	95,13	97,83	96,30

A.2. PERKIRAAN ITB TRIWULAN II-2015

- Selain pada triwulan berjalan, indeks komposit persepsi pengusaha mengenai kondisi bisnis dan perekonomian secara umum pada triwulan mendatang juga dihitung. Nilai ITB triwulan II-2015 diprediksi sebesar 109,65, artinya secara

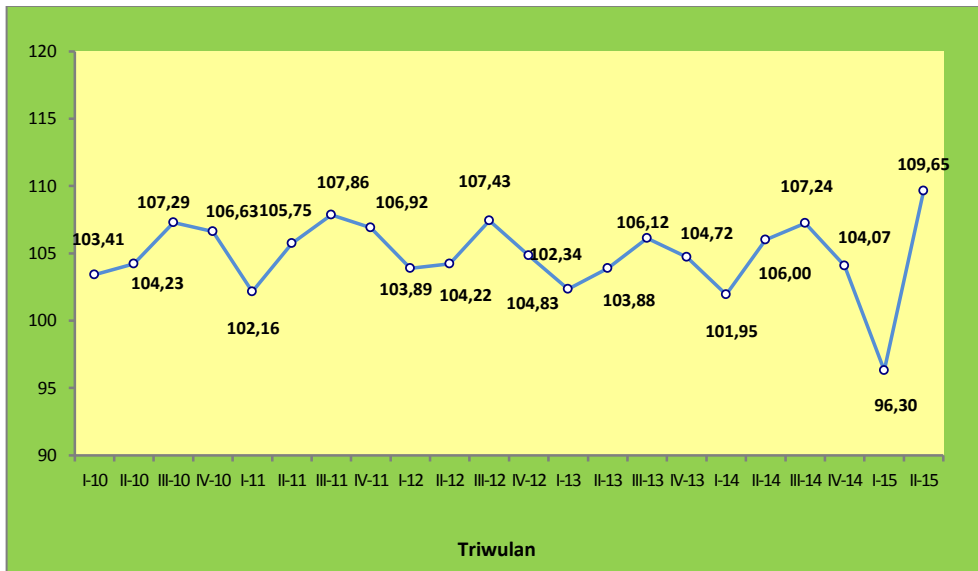
Kondisi bisnis pada triwulan II-2015 diprediksi meningkat (ITB 109,65)

umum kondisi bisnis pada triwulan II-2015 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan I-2015. Tingkat optimisme pelaku bisnis dalam melihat potensi bisnis pada triwulan II-2015 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2015 (nilai ITB sebesar 96,30). Peningkatan kondisi bisnis pada triwulan II-2015 terjadi di semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (nilai ITB sebesar 96,00). Lapangan usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan diperkirakan mengalami peningkatan bisnis tertinggi dengan nilai indeks sebesar 106,75.

Tabel 11.2
Indeks Tendensi Bisnis (ITB) Triwulan I-2015 dan
Perkiraan Triwulan II-2015 Menurut Sektor

Kategori Lapangan Usaha	Variabel Pembentuk Perkiraan ITB Triwulan I-2015				Perkiraan ITB Triwulan II-2015
	Order dari Dalam Negeri	Order dari Luar Negeri	Harga Jual Produk	Order Barang Input	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	116,01	103,57	125,30	-	115,73
19. Pertambangan dan Penggalian	98,41	89,81	92,13	98,78	96,00
20. Industri Pengolahan	115,28	97,80	112,39	111,89	110,77
21. Pengadaan Listrik dan Gas	110,40	-	121,05	103,09	109,68
22. Pengadaan Air	102,22	-	114,33	104,76	106,05
23. Konstruksi	110,51	-	112,81	107,97	109,94
24. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	114,09	95,61	114,51	110,00	109,80
25. Transportasi dan Pergudangan	-	-	109,03	-	109,03
26. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	108,10	-	108,10
27. Informasi dan Komunikasi	-	-	104,44	-	104,44
28. Jasa Keuangan	-	-	112,22	-	112,22
29. Real Estat	-	-	114,29	-	114,29
30. Jasa Perusahaan	-	-	116,05	-	116,05
31. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	113,08	-	113,08
32. Jasa Pendidikan	-	-	107,02	-	107,02
33. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	107,07	-	107,07
34. Jasa Lainnya	-	-	111,07	-	111,07
Total	113,41	97,90	113,31	109,75	109,65

Grafik 11.1
Indeks Tendensi Bisnis¹ Triwulan I-2010–Triwulan I-2015 dan
Perkiraan Triwulan II-2015



Keterangan:

- ¹⁾ ITB berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:
- a. Nilai ITB < 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.
 - b. Nilai ITB = 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.
 - c. Nilai ITB > 100, menunjukkan kondisi bisnis pada triwulan berjalan lebih baik (meningkat) dibanding triwulan sebelumnya.
- ²⁾ Angka perkiraan ITB triwulan II-2015.

B. INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)

B.1. ITK TRIWULAN I-2015

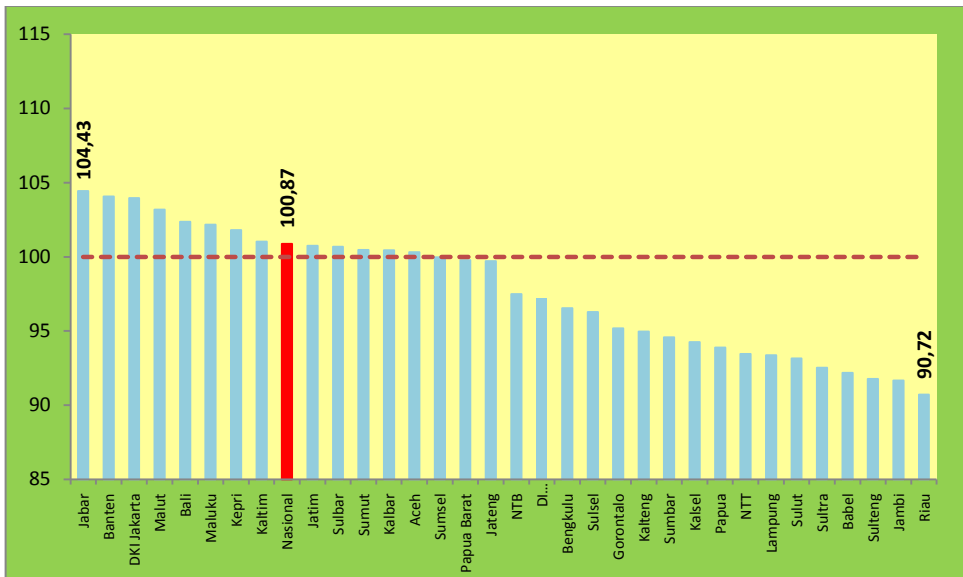
1. Indeks Tendensi Konsumen (ITK) merupakan indeks komposit persepsi rumah tangga mengenai kondisi ekonomi konsumen dan perilaku konsumsi terhadap situasi perekonomian pada triwulan berjalan. Nilai ITK nasional pada triwulan I-2015 sebesar 100,87, artinya kondisi ekonomi konsumen sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh rendahnya pengaruh kenaikan harga (Inflasi) terhadap tingkat konsumsi dan tingkat konsumsi yang juga sedikit meningkat, meskipun diikuti oleh penurunan pendapatan. Tingkat optimisme konsumen lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (nilai ITK sebesar 107,62).
2. Sedikit meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional terjadi karena adanya peningkatan kondisi ekonomi konsumen di 13 provinsi (39,39 persen), meskipun terjadi penurunan kondisi ekonomi konsumen di 20 provinsi lainnya. Provinsi yang memiliki nilai ITK tertinggi adalah Jawa Barat (nilai ITK sebesar 104,43). Sementara provinsi Riau tercatat memiliki nilai ITK terendah, yaitu sebesar 90,72.

Kondisi ekonomi konsumen triwulan I-2015 meningkat (ITK 100,87)

Tabel 11.3
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan IV-2014 dan Triwulan I-2015
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	ITK Triw IV-2014	ITK Triw I-2015
(1)	(2)	(3)
Pendapatan rumah tangga	106,10	96,63
Pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi	106,32	109,00
Tingkat konsumsi bahan makanan, makanan jadi di restoran/rumah makan, dan bukan makanan (pakaian, perumahan, pendidikan, transportasi, komunikasi, kesehatan, dan rekreasi)	112,96	100,65
Indeks Tendensi Konsumen	107,62	100,87

Grafik 11.2
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan I-2015
Tingkat Nasional dan Provinsi



B.2. PERKIRAAN ITK TRIWULAN II-2015

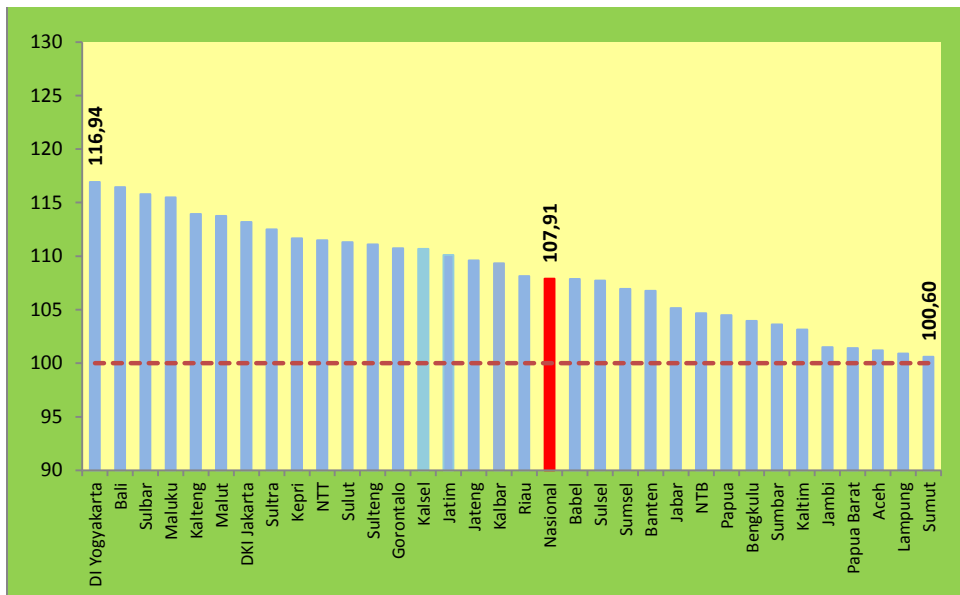
- Selain triwulan berjalan, indeks komposit persepsi rumah tangga mengenai kondisi ekonomi konsumen dan perilaku konsumsi pada triwulan mendatang juga diperkirakan. Nilai ITK nasional pada triwulan II-2015 diperkirakan sebesar 107,91, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Tingkat optimisme konsumen mendatang diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2015 (nilai ITK sebesar 100,87).
- Perkiraan meningkatnya kondisi ekonomi konsumen terjadi di semua provinsi di Indonesia, dimana 18 provinsi diantaranya (54,54 persen) diperkirakan memiliki nilai indeks diatas nasional. Provinsi yang memiliki perkiraan nilai ITK tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta (nilai ITK sebesar 116,94) dan terendah di Provinsi Sumatera Utara (nilai ITK sebesar 100,60).

Kondisi ekonomi konsumen triwulan II-2015 diprediksi meningkat (ITK 107,91)

Tabel 11.4
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2015
Menurut Variabel Pembentuk

Variabel Pembentuk	Perkiraan ITK Triw II-2015
(1)	(2)
Perkiraan pendapatan rumah tangga	112,13
Rencana pembelian barang-barang tahan lama (elektronik, perhiasan, perangkat komunikasi, meubelair, peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, tanah, rumah), rekreasi, dan pesta/hajatan	100,49
Indeks Tendensi Konsumen	107,91

Grafik 11.3
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Triwulan II-2015
Tingkat Nasional dan Provinsi



Tabel 11.5
Indeks Tendensi Konsumen¹⁾ Triwulan I-2014–Triwulan I-2015 dan
Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan II-2015 Tingkat Nasional dan Provinsi

No.	Provinsi	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
		I-2014	II-2014	III-2014	IV-2014	I-2015	II-2015 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Aceh	107,22	101,09	107,18	105,77	100,33	101,21
2.	Sumatera Utara	113,28	107,68	114,27	105,69	100,48	100,60
3.	Sumatera Barat	111,58	114,54	108,91	106,14	94,58	103,63
4.	R i a u	110,69	108,39	114,69	101,96	90,72	108,14
5.	J a m b i	105,66	106,20	114,68	104,81	91,66	101,50
6.	Sumatera Selatan	107,69	106,71	112,65	102,78	99,97	106,95
7.	Bengkulu	107,63	109,13	113,23	106,26	96,54	103,95
8.	Lampung	108,16	108,92	112,64	106,41	93,38	100,91
9.	Kep. Bangka Belitung	105,13	102,86	108,89	105,15	92,19	107,88
10.	Kep. R i a u	110,46	110,30	113,18	107,29	101,80	111,66
11.	DKI Jakarta	117,56	114,58	118,75	109,93	103,97	113,20
12.	Jawa Barat	112,42	111,07	113,72	107,09	104,43	105,15
13.	Jawa Tengah	112,53	110,43	116,00	106,02	99,71	109,60
14.	D.I. Yogyakarta	118,18	109,13	115,89	108,03	97,18	116,94
15.	Jawa Timur	111,84	105,68	115,99	110,23	100,75	110,10
16.	Banten	115,41	120,45	116,09	107,83	104,07	106,77
17.	B a l i	114,98	113,29	111,90	113,13	102,36	116,45
18.	Nusa Tenggara Barat	111,57	110,27	111,54	108,11	97,50	104,66
19.	Nusa Tenggara Timur	100,51	103,47	103,74	106,20	93,45	111,49
20.	Kalimantan Barat	114,80	116,74	112,27	107,29	100,44	109,35
21.	Kalimantan Tengah	106,64	104,32	112,33	105,54	94,98	113,95
22.	Kalimantan Selatan	111,47	102,92	109,41	103,32	94,25	110,68
23.	Kalimantan Timur	119,52	116,64	118,79	111,73	101,03	103,15
24.	Sulawesi Utara	100,49	100,84	107,16	108,91	93,15	111,32
25.	Sulawesi Tengah	106,29	104,06	112,79	108,16	91,78	111,09
26.	Sulawesi Selatan	111,13	104,98	110,67	108,19	96,29	107,73
27.	Sulawesi Tenggara	103,71	107,35	114,21	108,69	92,52	112,50
28.	Gorontalo	106,42	107,00	111,25	105,50	95,18	110,75
29.	Sulawesi Barat	104,82	103,37	111,30	104,57	100,69	115,78
30.	Maluku	116,85	109,05	115,41	102,23	102,18	115,49
31.	Maluku Utara	111,00	105,99	113,85	103,28	103,19	113,76
32.	Papua Barat	106,47	107,27	110,02	108,71	99,77	101,40
33.	Papua	108,99	109,48	107,21	111,62	93,88	104,49
Indonesia		110,03	110,76	112,44	107,62	100,87	107,91

Keterangan:

- ¹⁾ *ITK berkisar antara 0 sampai dengan 200, dengan indikasi sebagai berikut:*
- a. *Nilai ITK < 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.*
 - b. *Nilai ITK = 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan tidak mengalami perubahan (stagnan) dibanding triwulan sebelumnya.*
 - c. *Nilai ITK > 100, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.*
- ²⁾ *Angka perkiraan ITK triwulan II-2015.*

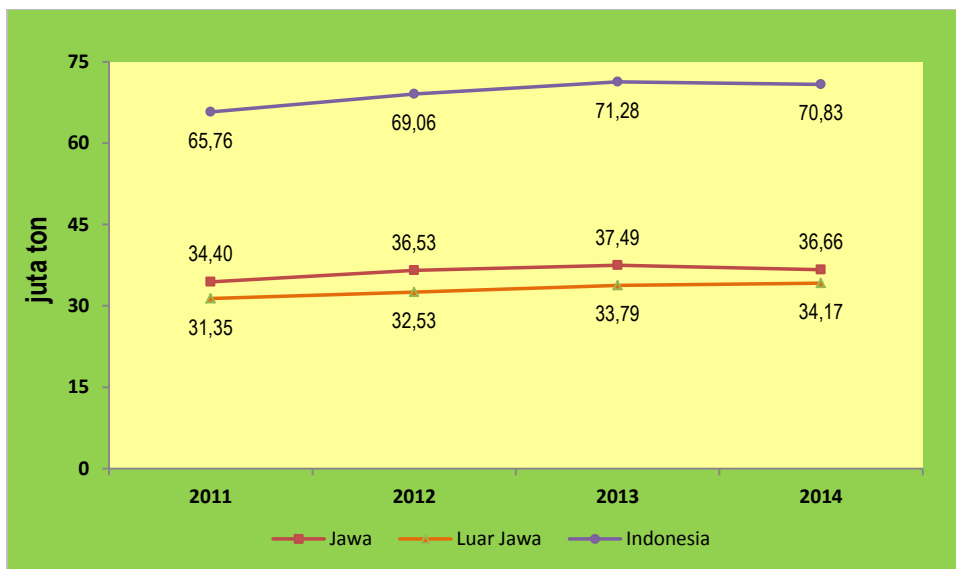
XII. PRODUKSI TANAMAN PANGAN ANGKA SEMENTARA (ASEM) 2014

A. PADI

1. Produksi padi tahun 2014 (ASEM) sebanyak 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami penurunan sebesar 0,45 juta ton (0,63 persen) dibandingkan tahun 2013. Penurunan produksi padi tahun 2014 terjadi di Pulau Jawa sebesar 0,83 juta ton, sedangkan produksi padi di luar Pulau Jawa mengalami kenaikan sebanyak 0,39 juta ton. Penurunan produksi terjadi karena penurunan luas panen seluas 41,61 ribu hektar (0,30 persen) dan produktivitas sebesar 0,17 kuintal/hektar (0,33 persen).

Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,83 juta ton GKG atau turun 0,63 persen dibandingkan tahun 2013

Grafik 12.1
Perkembangan Produksi Padi, 2011–2014 ¹⁾



Keterangan: 1) Tahun 2014 adalah ASEM

Tabel 12.1
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Wilayah, 2012–2014

URAIAN	2012	2013	2014 (ASEM)	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Jawa	6 185 521	6 467 073	6 400 230	281 552	4,55	- 66 843	-1,03
- Luar Jawa	7 260 003	7 368 179	7 393 410	108 176	1,49	25 231	0,34
- Indonesia	13 445 524	13 835 252	13 793 640	389 728	2,90	- 41 612	-0,30
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Jawa	59,05	57,98	57,28	-1,07	-1,81	-0,70	-1,21
- Luar Jawa	44,81	45,85	46,22	1,04	2,32	0,37	0,81
- Indonesia	51,36	51,52	51,35	0,16	0,31	-0,17	-0,33
c. Produksi (ton)							
- Jawa	36 526 663	37 493 020	36 658 918	966 357	2,65	- 834 102	-2,22
- Luar Jawa	32 529 463	33 786 689	34 172 835	1 257 226	3,86	386 146	1,14
- Indonesia	69 056 126	71 279 709	70 831 753	2 223 583	3,22	- 447 956	-0,63

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

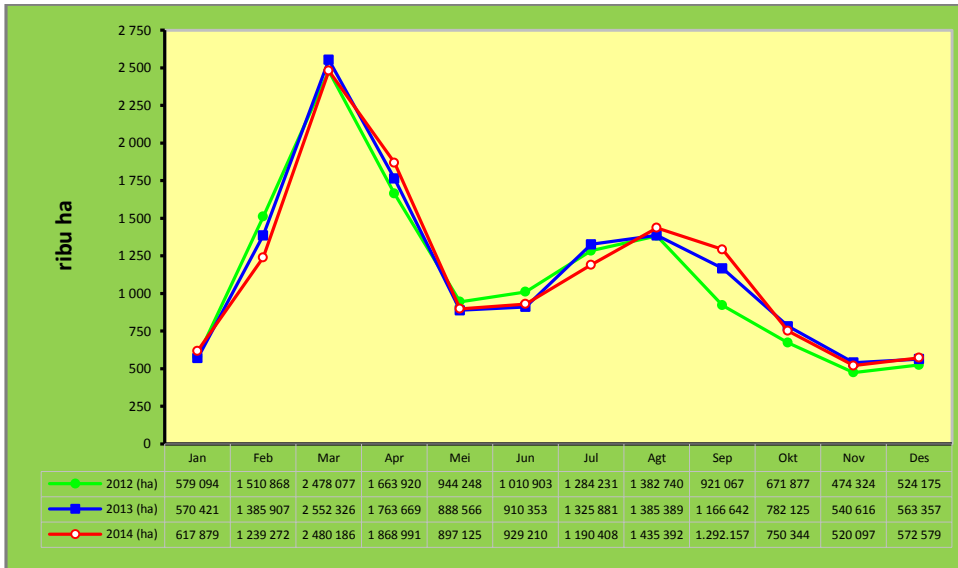
Tabel 12.2
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Subround, 2012–2014

URAIAN	2012	2013	2014 (ASEM)	Perkembangan			
				2012–2013		2013–2014	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a. Luas Panen (ha)							
- Januari–April	6 231 959	6 272 323	6 206 328	40 364	0,65	- 65 995	-1,05
- Mei–Agustus	4 622 122	4 510 189	4 452 135	- 111 933	-2,42	- 58 054	-1,29
- September–Desember	2 591 443	3 052 740	3 135 177	461 297	17,80	82 437	2,70
- Januari–Desember	13 445 524	13 835 252	13 793 640	389 728	2,90	- 41 612	-0,30
b. Produktivitas (ku/ha)							
- Januari–April	51,56	51,65	50,87	0,09	0,17	-0,78	-1,51
- Mei–Agustus	50,93	50,92	51,10	-0,01	-0,02	0,18	0,35
- September–Desember	51,64	52,13	52,66	0,49	0,95	0,53	1,02
- Januari–Desember	51,36	51,52	51,35	0,16	0,31	-0,17	-0,33
c. Produksi (ton)							
- Januari–April	32 132 657	32 398 677	31 570 685	266 020	0,83	- 827 992	-2,56
- Mei–Agustus	23 540 426	22 967 655	22 752 522	- 572 771	-2,43	- 215 133	-0,94
- September–Desember	13 383 043	15 913 377	16 508 546	2 530 334	18,91	595 169	3,74
- Januari–Desember	69 056 126	71 279 709	70 831 753	2 223 583	3,22	- 447 956	-0,63

Keterangan: Kualitas produksi padi adalah Gabah Kering Giling (GKG)

2. Pola panen padi pada periode Januari–Desember tahun 2014 relatif sama dengan pola panen tahun 2013 dan tahun 2012. Puncak panen padi pada periode Januari–Desember tahun 2014, 2013, dan 2012 terjadi pada Maret.

Grafik 12.2
Pola Panen Padi, 2012–2014



B. JAGUNG

1. Produksi Produksi jagung tahun 2014 sebanyak 19,03 juta ton pipilan kering, mengalami kenaikan sebanyak 0,52 juta ton (2,81 persen) dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi jagung tersebut terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebanyak 0,06 juta ton dan 0,46 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan luas panen seluas 16,51 ribu hektar (0,43 persen) dan produktivitas sebesar 1,15 kuintal/hektar (2,37 persen).

Produksi jagung tahun 2014 sebanyak 19,03 juta ton pipilan kering, naik 2,81 persen dibandingkan tahun 2013

C. KEDELAI

1. Produksi kedelai tahun 2014 sebanyak 953,96 ribu ton biji kering, meningkat sebanyak 173,96 ribu ton (22,30 persen) dibandingkan tahun 2013. Peningkatan produksi kedelai tersebut terjadi di Pulau Jawa sebanyak 100,20 ribu ton

Produksi kedelai tahun 2014 diperkirakan sebanyak 953,96 ribu ton biji kering atau naik 22,30 persen dibandingkan tahun 2013

dan di luar Pulau Jawa sebanyak 73,76 ribu ton. Peningkatan produksi kedelai terjadi karena kenaikan luas panen seluas 64,23 ribu hektar (11,66 persen) dan kenaikan produktivitas sebesar 1,35 kuintal/hektar (9,53 persen).

Tabel 12.3
Perkembangan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Palawija, 2012–2014

Uraian	Satuan	2012	2013	2014 (ASEM)	Perkembangan				
					2012–2013		2013–2014		
					Absolut	%	Absolut	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1. Jagung									
-Luas Panen	ha	3 957 595	3 821 504	3 838 015	- 136 091	-3,44	16 511	0,43	
-Produktivitas	ku/ha	48,99	48,44	49,59	-0,55	-1,12	1,15	2,37	
-Produksi (pipilan kering)	ton	19 387 022	18 511 853	19 032 677	- 875 169	-4,51	520 824	2,81	
2. Kedelai									
-Luas Panen	ha	567 624	550 793	615 019	- 16 831	-2,97	64 226	11,66	
-Produktivitas	ku/ha	14,85	14,16	15,51	-0,69	-4,65	1,35	9,53	
-Produksi (biji kering)	ton	843 153	779 992	953 956	- 63 161	-7,49	173 964	22,30	
3. Kacang Tanah									
-Luas Panen	ha	559 538	519 056	499 079	- 40 482	-7,23	- 19 977	-3,85	
-Produktivitas	ku/ha	12,74	13,52	12,79	0,78	6,12	-0,73	-5,40	
-Produksi (biji kering)	ton	712 857	701 680	638 258	- 11 177	-1,57	- 63 422	-9,04	
4. Kacang Hijau									
-Luas Panen	ha	245 006	182 075	207 802	- 62 931	-25,69	25 727	14,13	
-Produktivitas	ku/ha	11,60	11,24	11,77	-0,36	-3,10	0,53	4,72	
-Produksi (biji kering)	ton	284 257	204 670	244 516	- 79 587	-28,00	39 846	19,47	
5. Ubi Kayu									
-Luas Panen	ha	1 129 688	1 065 752	1 003 293	- 63 936	-5,66	- 62 459	-5,86	
-Produktivitas	ku/ha	214,02	224,60	233,81	10,58	4,94	9,21	4,10	
-Produksi (umbi basah)	ton	24 177 372	23 936 921	23 458 128	- 240 451	-0,99	- 478 793	-2,00	
6. Ubi Jalar									
-Luas Panen	ha	178 295	161 850	156 677	- 16 445	-9,22	- 5 173	-3,20	
-Produktivitas	ku/ha	139,29	147,47	152,03	8,18	5,87	4,56	3,09	
-Produksi (umbi basah)	ton	2 483 460	2 386 729	2 382 025	- 96 731	-3,90	- 4 704	-0,20	

XIII. PERTUMBUHAN PRODUKSI INDUSTRI MANUFAKTUR TRIWULAN I-2015

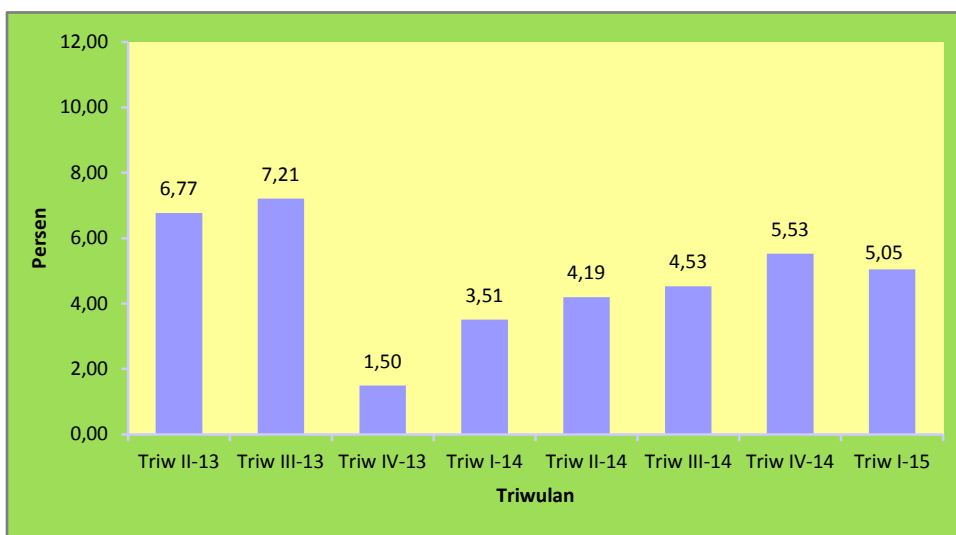
A. Industri Manufaktur Besar dan Sedang (IBS)

- Pertumbuhan IBS triwulan I-2015 naik sebesar 5,05 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 5,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2013, triwulan III-2014 naik sebesar 4,53 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2013, triwulan II-2014 naik sebesar 4,19 persen (*y-on-y*) dari triwulan II-2013, triwulan I-2014 naik 3,51 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2013, triwulan IV-2013 naik sebesar 1,50 persen (*y-on-y*) dari triwulan IV-2012, dan triwulan III-2013 naik sebesar 7,21 persen (*y-on-y*) dari triwulan III-2012.

Pertumbuhan produksi IBS triwulan I-2015 naik sebesar 5,05 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2014

Grafik 13.1

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (*y-on-y*) Triwulan II-2013–Triwulan I-2015



- Pertumbuhan produksi IBS triwulan I-2015 turun sebesar 0,71 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 1,68 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2014, triwulan III-2014 naik sebesar 2,04 persen (*q-to-q*) dari triwulan II-2014, triwulan II-2014 turun sebesar 1,97 persen (*q-to-q*) dari triwulan I-2014, triwulan I-2014 turun sebesar 0,25 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2013, dan triwulan IV-2013 naik sebesar 1,91 persen (*q-to-q*) dari triwulan III-2013.

3. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan I-2015 (*y-on-y*) adalah industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang naik 13,01 persen, industri peralatan listrik yang naik sebesar 10,13 persen, serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia yang naik 9,75 persen.
4. Pertumbuhan produksi IBS tertinggi pada triwulan I-2015 (*q-to-q*) adalah industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang naik 7,67 persen, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia naik 5,41 persen, dan industri karet, barang dari karet dan plastik naik 4,12 persen.
5. Pertumbuhan produksi IBS *m-to-m* Januari dan Februari 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,08 persen dan 2,78 persen. Sedangkan pada Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,73 persen.

Tabel 13.1
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan 2013–2015 (persen)
2010=100

Tahun	<i>q-to-q</i>				<i>y-on-y</i>				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	-2,20	1,31	0,51	1,91	8,99	6,77	7,21	1,50	6,01
2014	-0,25	1,97	2,04	1,59	3,51	4,19	4,53	5,44	4,74
2015	-0,71				5,05				

Tabel 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Bulanan 2012–2015 (persen)
2010=100

Bulan	<i>y-on-y</i>			<i>m-to-m</i>		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	10,86	2,99	5,36*)	-0,18	-0,03	-1,08*)
Februari	6,32	3,82	3,05**)	-1,41	-0,61	-2,78**)
Maret	9,88	3,74	6,72***)	0,24	0,17	3,73***)
April	6,89	2,74		1,37	0,39	
Mei	3,23	3,79		1,45	2,48	
Juni	6,77	6,07		-2,10	0,05	
Juli	12,49	1,54		1,71	-2,64	
Agustus	6,16	5,96		-1,65	2,63	
September	7,21	9,77		2,64	6,34	
Oktober	-0,10	5,35		1,45	-2,64	
November	1,82	4,76		-1,57	-2,12	
Desember	2,83	6,47		0,99	2,64	

Catatan:

- *) Angka Sementara
- **) Angka Sangat Sementara
- ***) Angka Sangat Sangat Sementara

Tabel 13.3
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulan I-2015
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

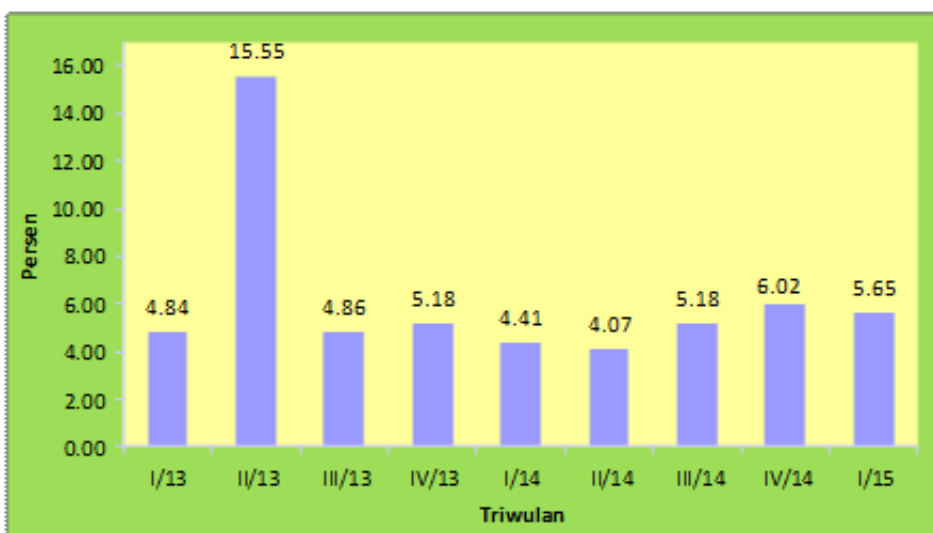
KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	-2,06	7,08
11	Minuman	-3,26	6,32
12	Pengolahan Tembakau	-3,15	3,83
13	Tekstil	-0,30	-0,25
14	Pakaian Jadi	-3,06	-3,00
15	Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki	-3,56	5,07
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya	-4,38	0,88
17	Kertas dan Barang dari Kertas	2,61	-4,04
18	Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	-0,97	8,64
20	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	5,41	9,75
21	Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional	7,67	4,98
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	4,12	-3,94
23	Barang Galian Bukan Logam	-6,64	6,18
24	Logam Dasar	-0,14	9,20
25	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-0,87	13,01
26	Komputer, Barang Elektronik, dan Optik	1,77	-2,59
27	Peralatan Listrik	-4,47	10,13
28	Mesin dan Perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya	-2,20	-2,22
29	Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	-3,26	8,92
30	Alat Angkutan Lainnya	-3,29	-2,53
31	Furnitur	3,76	2,95
32	Pengolahan Lainnya	-1,50	3,96
33	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1,02	5,61
Industri Manufaktur Besar dan Sedang		-0,71	5,05

B. Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK)

1. Pertumbuhan produksi IMK triwulan I-2015 naik sebesar 5,65 persen (*y-on-y*) dari triwulan I-2014, triwulan IV-2014 naik sebesar 6,02 persen dari triwulan IV-2013, triwulan III-2014 naik sebesar 5,18 persen dari triwulan III-2013, dan triwulan II-2014 naik sebesar 4,07 persen dari triwulan II-2013.

**Pertumbuhan produksi
 IMK triwulan I-2015 naik
 5,65 persen dari triwulan I-
 2014**

Grafik 13.2
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan (y-on-y)
Triwulan I-2013–Triwulan I-2015



- Pertumbuhan Produksi IMK triwulan I-2015 naik 0,64 persen (*q-to-q*) dari triwulan IV-2014, triwulan IV-2014 naik 2,39 persen dari triwulan III-2014, triwulan III-2014 turun 3,43 persen dari triwulan II-2014, triwulan II-2014 naik 6,17 persen dari triwulan I-2014, dan triwulan I-2014 naik 0,99 persen dari triwulan IV-2013.
- Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan I-2015 (*y-on-y*) adalah Industri Kertas dan Barang dari Kertas naik 25,32 persen, Industri Minuman naik 20,14 persen, serta Industri Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan naik 16,11 persen.
- Pertumbuhan Produksi IMK tertinggi pada triwulan I-2015 (*q-to-q*) adalah Industri Kertas dan Barang dari Kertas naik 8,54 persen, Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia naik 2,78 persen, serta Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman naik 2,75 persen.

Tabel 13.4
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulanan
Triwulan I-2013–Triwulan I-2015 (persen)

Tahun	q-to-q				y-on-y				Total
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2013	1,74	6,52	-4,45	1,58	4,84	15,55	4,86	5,18	7,51
2014	0,99	6,17	-3,43	2,39	4,41	4,07	5,18	6,02	4,91
2015	0,64				5,65				

Tabel 13.5
Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan I-2015
Menurut Jenis Industri Manufaktur KBLI 2-digit (persen)

KBLI	Jenis Industri Manufaktur	Pertumbuhan	
		q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Makanan	2,00	9,46
11	Minuman	2,62	20,14
12	Pengolahan tembakau	-0,90	-58,34
13	Tekstil	0,54	11,47
14	Pakaian jadi	0,40	7,71
15	Kulit, barang dari kulit dan alas kaki	-1,26	-0,20
16	Kayu, barang dari kayu dan gabus (kecuali furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya)	1,07	-0,60
17	Kertas dan barang dari kertas	8,54	25,32
18	Percetakan dan reproduksi media rekaman	2,75	3,70
20	Bahan kimia dan barang dari bahan kimia	2,78	8,79
21	Farmasi, obat kimia dan obat tradisional	1,06	-3,88
22	Karet, barang dari karet dan plastik	-0,36	-7,70
23	Barang galian bukan logam	-2,23	-4,98
24	Logam dasar	0,57	-3,88
25	Barang logam, bukan mesin & peralatannya	-1,24	-6,26
26	Komputer, barang elektronik dan optik	-3,53	-6,87
27	Peralatan listrik	-2,04	11,39
28	Mesin dan perlengkapan ytdl (yang tidak termasuk dalam lainnya)	1,88	3,49
29	Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	1,45	8,41
30	Alat angkutan lainnya	-2,25	-4,21
31	Furnitur	-0,29	10,87
32	Pengolahan lainnya	2,73	-2,24
33	Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	2,36	16,11
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil		0,64	5,65

XIV. PARIWISATA MARET 2015

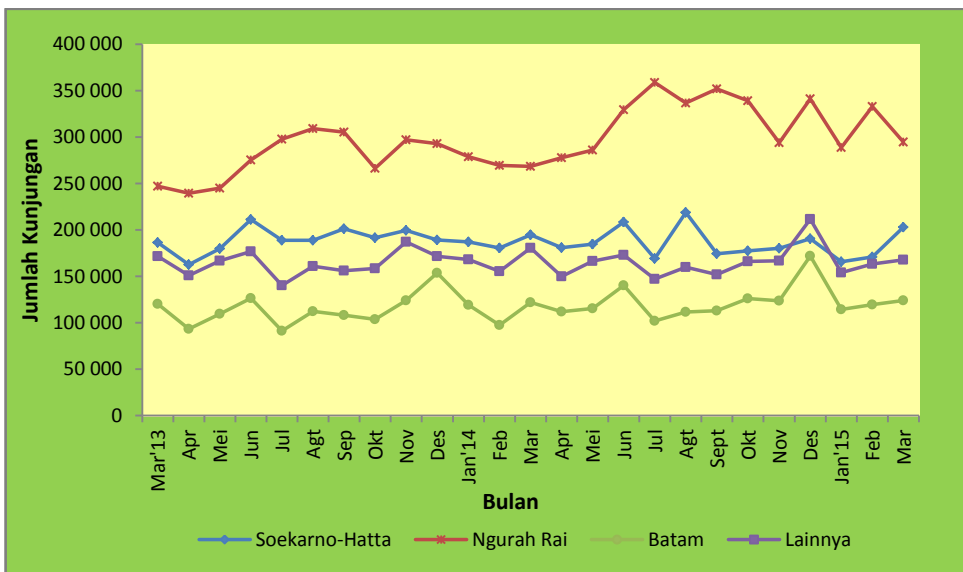
A. Wisatawan Mancanegara (Wisman)

1. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama Januari–Maret 2015 mencapai 2,30 juta kunjungan atau naik 3,51 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada periode yang sama tahun 2014 yang tercatat sebanyak 2,22 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisman Maret 2015 naik sebesar 3,13 persen dibanding Maret 2014, yaitu dari 765,6 ribu kunjungan menjadi 789,6 ribu

Jumlah kunjungan wisman Januari–Maret 2015 mencapai 2,30 juta kunjungan atau naik 3,51 persen dibanding periode yang sama tahun 2014

kunjungan. Demikian pula jika dibandingkan dengan Februari 2015, jumlah kunjungan wisman Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen. Pada Maret 2015, jumlah kunjungan wisman melalui 19 pintu masuk utama naik sebesar 2,06 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman Maret 2014, namun mengalami penurunan sebesar 0,49 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Grafik 14.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Pintu Masuk
Maret 2013–Maret 2015



2. Jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai, Bali pada Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 9,81 persen dibandingkan Maret 2014, yaitu dari 268,4 ribu kunjungan menjadi 294,8 ribu kunjungan. Namun, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali mengalami penurunan sebesar 11,50 persen.
3. Dari sekitar 789,6 ribu kunjungan wisman yang datang ke Indonesia pada Maret 2015, sebanyak 16,07 persen diantaranya dilakukan oleh wisman berkebangsaan Singapura, diikuti oleh wisman Malaysia (14,63 persen), Tionghoa (11,58 persen), Australia (10,88 persen), dan Jepang (5,42 persen).

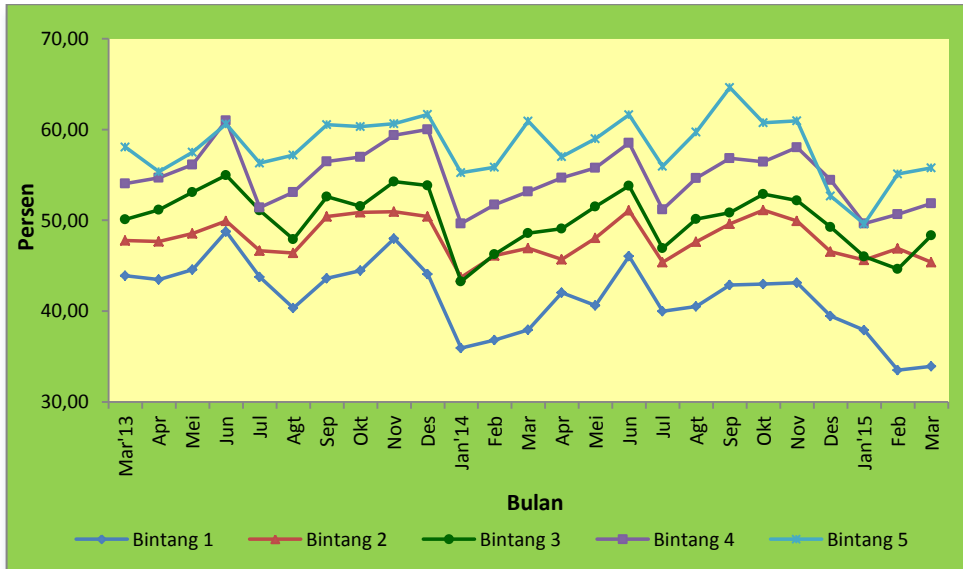
B. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Lama Menginap Tamu Hotel Berbintang

1. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di 27 provinsi selama Januari–Maret 2015 rata-rata mencapai 47,94 persen yang berarti terjadi penurunan 1,22 poin dibandingkan rata-rata TPK hotel berbintang pada periode yang sama tahun sebelumnya. TPK Maret 2015 mencapai 49,13 persen atau mengalami penurunan sebesar 2,16 poin dibandingkan TPK hotel berbintang pada Maret 2014. Namun, jika dibandingkan bulan sebelumnya, TPK Maret 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,54 poin.

**TPK Hotel Berbintang
Maret 2015 mencapai
49,13 persen atau
turun 2,16 poin
dibanding TPK Maret
2014**

2. Naik turunnya angka TPK tidak selalu mencerminkan kinerja di sektor perhotelan. Angka TPK hanya menggambarkan rata-rata tingkat hunian di masing-masing hotel tanpa memperhatikan adanya perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel. Kinerja sektor perhotelan tidak hanya diukur dari besaran TPK tetapi juga harus memperhatikan perkembangan jumlah usaha dan kamar hotel yang siap dijual atau dipasarkan.

Grafik 14.2
Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang Rata-rata 27 Provinsi di Indonesia, Maret 2013–Maret 2015



3. TPK Hotel Berbintang di Bali pada Maret 2015 sebesar 54,50 persen atau turun sebesar 5,37 poin dibandingkan TPK Maret 2014. Demikian pula jika dibandingkan dengan bulan Februari 2015, TPK Maret 2015 di Bali mengalami penurunan sebesar 5,53 poin.
4. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang selama Maret 2015 mencapai 1,96 hari yang berarti tidak terjadi kenaikan dibandingkan rata-rata lama menginap selama Maret 2014. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada Maret 2015 turun sebesar 0,02 hari, yaitu dari 1,98 hari menjadi 1,96 hari.

Tabel 14.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel
Berbintang, dan Rata-Rata Lama Menginap Tamu Maret 2014–Maret 2015

Bulan/ Tahun	Wisman Nasional		Wisman Bali (Ngurah Rai)		TPK 27 Prov. (%)		TPK Bali (%)		Lama Menginap Tamu (hari)	
	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Jumlah Kunjungan	Peru- bahan (%)	Rata- Rata	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- bahan (poin)	Rata- Rata	Peru- Bahan (hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2014	9 435 411	7,19	3 731 735	15,11	51,84	-0,66	60,34	-0,38	1,99	0,06
Jan-Mar	2 221 352	10,07	816 470	14,42	49,16	0,14	59,00	0,37	2,01	0,07
Maret	765 607	8,96	268 418	-0,35	51,29	2,48	59,87	0,74	1,96	0,01
April	726 332	-5,13	277 925	3,54	51,33	0,04	61,28	1,41	2,06	0,10
Mei	752 363	3,58	285 965	2,89	52,72	1,39	61,01	-0,27	1,99	-0,07
Juni	851 475	13,17	329 654	15,28	55,40	2,68	62,10	1,09	1,86	-0,13
Juli	777 210	-8,72	358 907	8,87	49,09	-6,31	61,40	-0,70	2,10	0,24
Agustus	826 821	6,38	336 628	-6,21	52,02	2,93	62,07	0,67	2,01	-0,09
September	791 296	-4,30	352 017	4,57	54,21	2,19	63,87	1,80	2,02	0,01
Oktober	808 767	2,21	339 200	-3,64	54,29	0,08	62,83	-1,04	1,98	-0,04
November	764 461	-5,48	293 858	-13,37	54,45	0,16	61,36	-1,47	1,96	-0,02
Desember	915 334	19,74	341 111	16,08	50,13	-4,32	51,07	-10,29	1,91	-0,05
2015	2 299 288	3,51	916 585	12,26	47,94	-1,22	55,85	-3,15	2,02	0,01
Januari	723 039	-21,01	288 755	-15,35	47,08	-3,05	53,45	2,38	2,12	0,21
Februari	786 653	8,80	333 072	15,35	47,59	0,51	60,03	6,58	1,98	-0,04
Maret	789 596	0,37	294 758	-11,50	49,13	1,54	54,50	-5,53	1,96	-0,02

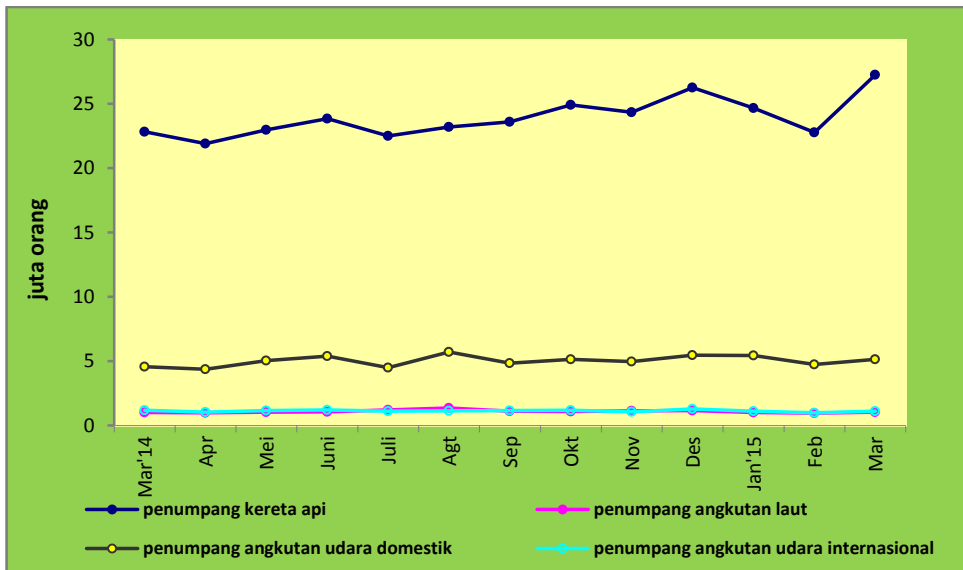
XV. TRANSPORTASI NASIONAL MARET 2015

A. Angkutan Udara

1. Jumlah penumpang angkutan udara tujuan dalam negeri (domestik) Maret 2015 mencapai 5,1 juta orang atau naik 8,35 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 12,26 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

Jumlah penumpang angkutan udara domestik Maret 2015 mencapai 5,1 juta orang, naik 12,26 persen

Grafik 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang Menurut Moda Transportasi
Maret 2014–Maret 2015



2. Jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional) Maret 2015 mencapai 1,1 juta orang atau naik 11,86 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun turun 5,55 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

B. Angkutan Laut Dalam Negeri

1. Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Maret 2015 mencapai 1,0 juta orang atau naik 6,41 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 2,57 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.
2. Jumlah barang yang diangkut pelayaran dalam negeri Maret 2015 mencapai 18,1 juta ton atau naik 8,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun turun 7,91 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

Jumlah penumpang pelayaran dalam negeri Maret 2015 mencapai 1,0 juta orang, naik 2,57 persen

C. Angkutan Kereta Api

1. Jumlah penumpang kereta api Maret 2015 mencapai 27,3 juta orang atau naik 19,64 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 19,40 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.
2. Jumlah barang yang diangkut kereta api Maret 2015 mencapai 2,5 juta ton atau naik 11,70 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 1,94 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2014.

Jumlah penumpang kereta api Maret 2015 mencapai 27,3 juta orang, naik 19,40 persen

Tabel 15.1
Perkembangan Jumlah Penumpang dan Barang Menurut Moda Transportasi
Maret 2014–Maret 2015

Tahun/ Bulan	Angkutan Udara				Angkutan Laut				Angkutan Kereta Api			
	Domestik		Internasional		Penumpang		Barang		Penumpang		Barang	
	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)	(000 org)	Perubahan (%)	(000 ton)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2014	58 919,3	-	13 684,2	-	13 088,8	-	225 517,3	-	277 503	-	33 463	-
Maret	4 571,9	13,10	1 174,6	14,28	996,3	1,09	19 693,1	12,36	22 836	14,20	2 472	8,71
April	4 361,3	-4,61	1 037,5	-11,67	984,9	-1,14	18 334,4	-6,90	21 907	-4,07	2 352	-4,85
Mei	5 042,1	15,61	1 148,2	10,67	1 022,8	3,85	19 100,8	4,18	22 987	4,93	3 188	35,54
Juni	5 388,9	6,88	1 218,2	6,10	1 052,0	2,85	19 749,4	3,40	23 840	3,71	3 479	9,13
Juli	4 496,1	-16,57	1 110,8	-8,82	1 200,5	14,12	19 586,6	-0,82	22 499	-5,63	2 468	-29,06
Agustus	5 702,0	26,82	1 132,7	1,97	1 353,7	12,76	18 748,1	-4,28	23 199	3,11	2 699	9,36
September	4 834,8	-15,21	1 169,7	3,27	1 100,8	-18,68	18 902,5	0,82	23 593	1,70	3 340	23,75
Oktober	5 136,5	6,24	1 193,1	2,00	1 078,3	-2,04	18 758,5	-0,76	24 923	5,64	2 956	-11,50
November	4 957,3	-3,49	1 054,4	-11,63	1 121,6	4,02	18 585,6	-0,92	24 356	-2,28	2 775	-6,12
Desember	5 469,7	10,34	1 290,0	22,34	1 154,7	2,95	17 791,4	-4,27	26 275	7,88	3 150	13,51
2015	15 298,9	-	3 211,7	-	2 987,4	-	54 586,6	-	74 733	-	7 485	-
Januari	5 430,2	-0,72	1 110,5	-13,91	1 005,2	-12,95	19 761,3	11,07	24 676	-6,09	2 709	-14,00
Februari	4 736,5	-12,77	991,8	-10,69	960,3	-4,47	16 689,3	-15,55	22 790	-7,64	2 256	-16,72
Maret	5 132,2	8,35	1 109,4	11,86	1 021,9	6,41	18 136	8,67	27 267	19,64	2 520	11,70

Catatan: Data penumpang kereta api Maret s.d Mei dan Juli 2014 direvisi.

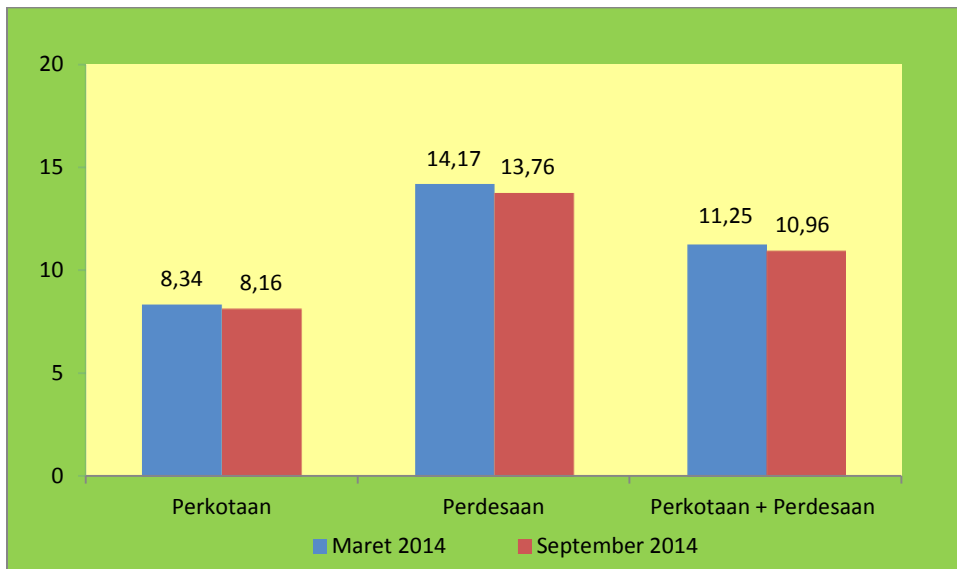
XVI. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN SEPTEMBER 2014

A. Perkembangan Kemiskinan Maret 2014–September 2014

- Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang (10,96 persen), berkurang 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebanyak 28,28 juta orang (11,25 persen). Perkembangan penduduk miskin menurut daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Grafik 16.1. dan Tabel 16.1.

**Jumlah penduduk miskin
pada September 2014
sebanyak 27,73 juta orang**

Grafik 16.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2014–September 2014



- Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang lebih banyak dibanding berkurangnya penduduk miskin di daerah perkotaan. Selama periode Maret 2014–September 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 150 ribu orang, sementara di daerah perdesaan berkurang sekitar 400 ribu orang.

3. Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan pada periode Maret 2014–September 2014 sedikit mengalami pergeseran. Pada September 2014, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,65 persen dari seluruh penduduk miskin, sementara pada Maret 2014 sebesar 62,85 persen.

Tabel 16.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2014–September 2014

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan (GKM)	Bukan Makanan (GKBM)	Total (GK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2014	223 091	95 423	318 514	10,51	8,34
September 2014	228 534	98 319	326 853	10,36	8,16
Perdesaan					
Maret 2014	221 379	64 718	286 097	17,77	14,17
September 2014	229 391	67 290	296 681	17,37	13,76
Perkotaan+Perdesaan					
Maret 2014	222 628	80 107	302 735	28,28	11,25
September 2014	229 469	82 859	312 328	27,73	10,96

Beberapa faktor terkait bertambahnya jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2014–September 2014 adalah:

- Laju inflasi umum periode Maret 2014–September 2014 cenderung rendah, yaitu sebesar 2,26 persen.
- Secara nominal, rata-rata upah buruh tani pada September 2014 naik sebesar 1,60 persen dibanding upah buruh tani Maret 2014, yaitu dari Rp44.125,00 menjadi Rp44.833,00. Selain itu rata-rata upah buruh bangunan pada September 2014 naik sebesar 1,36 persen dibanding upah buruh bangunan Maret 2014, yaitu dari Rp75.961,00 menjadi Rp76.991,00.
- Selama periode Maret 2014–September 2014, harga eceran beberapa komoditas bahan pokok mengalami penurunan seperti beras, gula pasir, cabe rawit serta cabe merah, yaitu masing-masing turun sebesar 1,13 persen; 2,63 persen; 50,13 persen dan 15,71 persen.
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang diukur berdasarkan kenaikan PDB atas dasar harga konstan pada triwulan III-2014 dibanding triwulan I-2014 mencapai 5,52 persen.

B. Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2014–September 2014

1. Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode Maret 2014–September 2014, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,17 persen, yaitu dari Rp302.735,- per kapita per bulan pada Maret 2014 menjadi Rp312.328,- per kapita per bulan pada September 2014. Garis Kemiskinan (GK), terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Peranan GKM terhadap GK sangat dominan, yaitu mencapai 73,47 persen pada September 2014.
2. Pada September 2014, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya sama, seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, dan gula pasir. Demikian juga untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan hampir antara daerah perkotaan dan perdesaan, seperti perumahan, listrik, pendidikan, dan bensin. Nama komoditi makanan dan bukan makanan beserta nilai kontribusinya terhadap Garis Kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 16.2.

Tabel 16.2
Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar terhadap
Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), September 2014

Komoditi (1)	Perkotaan (2)	Komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan			
Beras	23,39	Beras	31,61
Rokok kretek filter	11,18	Rokok kretek filter	9,39
Telur ayam ras	3,73	Gula pasir	3,27
Daging ayam ras	2,97	Telur ayam ras	3,03
Mie instan	2,62	Mie instan	2,41
Gula pasir	2,30	Tempe	2,04
Tempe	2,17	Bawang merah	1,79
Tahu	2,02	Tahu	1,68
Bawang merah	1,43	Kopi	1,53
Kopi	1,27	Tongkol/tuna/cakalang	1,51
Bukan Makanan			
Perumahan	8,05	Perumahan	6,34
Listrik	2,69	Bensin	1,99
Bensin	2,49	Pakaian jadi anak-anak	1,66
Pendidikan	2,37	Listrik	1,56
Pakaian jadi anak-anak	2,11	Pakaian jadi perempuan dewasa	1,30

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2014

C. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

1. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
2. Pada periode Maret 2014–September 2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) cenderung tidak mengalami perubahan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2014 adalah 1,75 dan pada September 2014 juga masih berada pada angka yang sama, demikian juga untuk Indeks Keparahan Kemiskinan dari Maret 2014–September 2014 masih berada pada angka yang sama (Tabel 16.3). Nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa pada periode Maret 2014–September 2014 rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung tidak mengalami perubahan jarak terhadap Garis Kemiskinan. Selain itu ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga relatif tidak berubah.

Tabel 16.3
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2014–September 2014

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2014	1,25	2,26	1,75
September 2014	1,25	2,25	1,75
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2014	0,31	0,57	0,44
September 2014	0,31	0,57	0,44

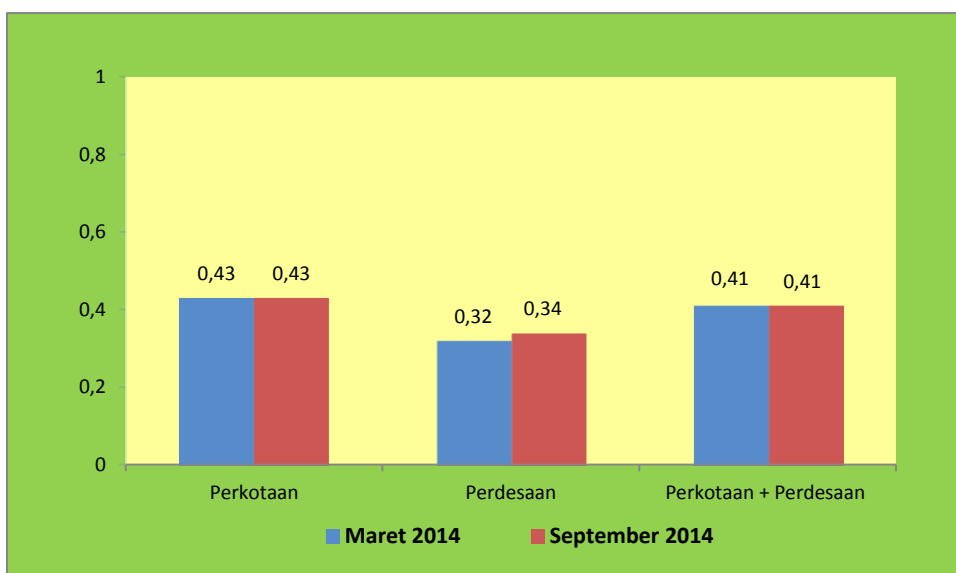
3. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perdesaan relatif lebih tinggi dibandingkan nilai indeks di daerah perkotaan. Pada September 2014, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di daerah perkotaan hanya 1,25 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,25. Untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di daerah perkotaan hanya 0,31 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,57.

D. Perkembangan Gini Rasio Maret 2014–September 2014

1. Tingkat ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya tingkat ketimpangan pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah Gini Rasio.

Gini Rasio pada September 2014 adalah sebesar 0,41
2. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Hal ini dilakukan mengingat data pendapatan sulit diperoleh.
3. Pada September 2014, nilai Gini Rasio adalah sebesar 0,41, angka ini relatif tidak berubah apabila dibandingkan dengan kondisi Maret 2014. Apabila dilihat menurut daerah, maka nilai Gini Rasio untuk daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan nilai Gini Rasio di daerah perdesaan. Pada September 2014 nilai Gini Rasio di daerah perdesaan adalah 0,34, sementara untuk daerah perkotaan mencapai 0,43.

Grafik 16.2
Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah,
Maret 2014–September 2014



4. Provinsi dengan nilai Gini Rasio paling tinggi pada September 2014 adalah Provinsi Papua dengan Gini Rasio sebesar 0,46, sedangkan Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi dengan nilai Gini Rasio paling rendah yaitu sebesar 0,30.

Tabel 16.4
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin, September 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Total	
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	396 939	158,04	11,36	369 232	679,38	19,19	837,42	16,98
Sumatera Utara	349 372	667,47	9,81	312 493	693,13	9,89	1 360,60	9,85
Sumatera Barat	390 862	108,53	5,41	349 824	246,21	7,84	354,74	6,89
Riau	386 606	159,53	6,53	374 466	338,75	8,93	498,28	7,99
Jambi	390 931	109,07	10,67	302 162	172,68	7,39	281,75	8,39
Sumatera Selatan	346 238	370,86	12,96	285 791	714,94	13,99	1 085,80	13,62
Bengkulu	378 881	99,59	17,19	346 395	216,91	17,04	316,5	17,09
Lampung	350 024	224,21	10,68	307 818	919,73	15,46	1 143,94	14,21
Bangka Belitung	458 055	20,27	3,04	481 226	46,96	6,84	67,23	4,97
Kepulauan Riau	431 127	91,27	5,61	399 063	32,9	10,54	124,17	6,40
DKI Jakarta	459 560	412,79	4,09	-	-	-	412,79	4,09
Jawa Barat	294 700	2 554,06	8,32	285 076	1 684,90	10,88	4 238,96	9,18
Jawa Tengah	286 014	1 771,53	11,50	277 802	2 790,29	15,35	4 561,82	13,58
DI Yogyakarta	333 561	324,43	13,36	296 429	208,15	16,88	532,58	14,55
Jawa Timur	293 391	1 531,89	8,30	286 798	3 216,53	15,92	4 748,42	12,28
Banten	324 902	381,18	4,74	296 241	268,01	7,18	649,19	5,51
Bali	316 235	109,20	4,35	279 140	86,76	5,39	195,96	4,76
Nusa Tenggara Barat	315 470	385,31	19,17	285 205	431,31	15,52	816,62	17,05
Nusa Tenggara Timur	340 459	105,70	10,68	251 040	886,18	21,78	991,88	19,60
Kalimantan Barat	307 789	78,53	5,47	294 044	303,38	9,20	381,91	8,07
Kalimantan Tengah	316 683	39,45	4,75	338 130	109,37	6,74	148,82	6,07
Kalimantan selatan	336 782	61,21	3,68	313 954	128,28	5,64	189,49	4,81
Kalimantan Timur	459 004	98,48	3,98	420 427	154,2	10,06	252,68	6,31
Sulawesi Utara	269 212	60,08	5,57	264 321	137,48	10,47	197,56	8,26
Sulawesi Tengah	349 978	71,65	10,35	321 009	315,41	14,66	387,06	13,61
Sulawesi Selatan	246 416	154,40	4,93	219 109	651,95	12,25	806,35	9,54
Sulawesi Tenggara	254 015	45,79	6,62	238 745	268,3	15,17	314,09	12,77
Gorontalo	250 157	23,88	6,24	246 290	171,22	23,21	195,1	17,41
Sulawesi Barat	245 959	29,87	9,99	246 695	124,82	12,67	154,69	12,05
Maluku	369 738	47,58	7,35	355 478	259,44	25,49	307,02	18,44
Maluku Utara	339 561	11,17	3,58	307 374	73,62	8,85	84,79	7,41
Papua Barat	440 241	14,06	5,52	423 701	211,4	35,01	225,46	26,26
Papua	408 419	35,61	4,46	340 846	828,5	35,87	864,11	27,80
INDONESIA	326 853	10 356,69	8,16	296 681	17 371,09	13,76	27 727,78	10,96

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2014

Tabel 16.5
Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah, Maret–September 2014

Provinsi	Maret			September		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,36	0,26	0,33	0,38	0,28	0,34
Sumatera Utara	0,35	0,27	0,32	0,33	0,28	0,31
Sumatera Barat	0,34	0,29	0,33	0,35	0,28	0,33
Riau	0,39	0,28	0,35	0,41	0,32	0,38
Jambi	0,31	0,32	0,33	0,35	0,32	0,34
Sumatera Selatan	0,44	0,32	0,40	0,40	0,32	0,38
Bengkulu	0,40	0,30	0,36	0,38	0,33	0,36
Lampung	0,40	0,29	0,35	0,38	0,28	0,33
Bangka Belitung	0,32	0,27	0,30	0,31	0,25	0,30
Kepulauan Riau	0,40	0,29	0,40	0,43	0,31	0,44
DKI Jakarta	0,43	–	0,43	0,44	–	0,44
Jawa Barat	0,43	0,30	0,41	0,41	0,29	0,40
Jawa Tengah	0,40	0,33	0,38	0,41	0,36	0,39
DI Yogyakarta	0,44	0,30	0,42	0,44	0,38	0,43
Jawa Timur	0,39	0,31	0,37	0,43	0,34	0,40
Banten	0,40	0,28	0,39	0,43	0,29	0,42
Bali	0,43	0,32	0,41	0,45	0,34	0,44
Nusa Tenggara Barat	0,43	0,31	0,38	0,45	0,31	0,39
Nusa Tenggara Timur	0,34	0,28	0,36	0,38	0,28	0,35
Kalimantan Barat	0,42	0,32	0,39	0,42	0,36	0,40
Kalimantan Tengah	0,42	0,29	0,35	0,40	0,33	0,36
Kalimantan selatan	0,39	0,30	0,36	0,35	0,29	0,33
Kalimantan Timur	0,34	0,29	0,35	0,36	0,30	0,36
Sulawesi Utara	0,46	0,35	0,42	0,45	0,37	0,44
Sulawesi Tengah	0,41	0,30	0,37	0,41	0,28	0,35
Sulawesi Selatan	0,44	0,37	0,42	0,43	0,43	0,45
Sulawesi Tenggara	0,45	0,34	0,41	0,44	0,36	0,40
Gorontalo	0,41	0,39	0,41	0,44	0,44	0,45
Sulawesi Barat	0,33	0,35	0,35	0,43	0,34	0,38
Maluku	0,34	0,31	0,35	0,31	0,29	0,33
Maluku Utara	0,33	0,26	0,32	0,35	0,26	0,32
Papua Barat	0,44	0,39	0,44	0,37	0,35	0,41
Papua	0,35	0,33	0,41	0,40	0,38	0,46
INDONESIA	0,43	0,32	0,41	0,43	0,34	0,41

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September 2014

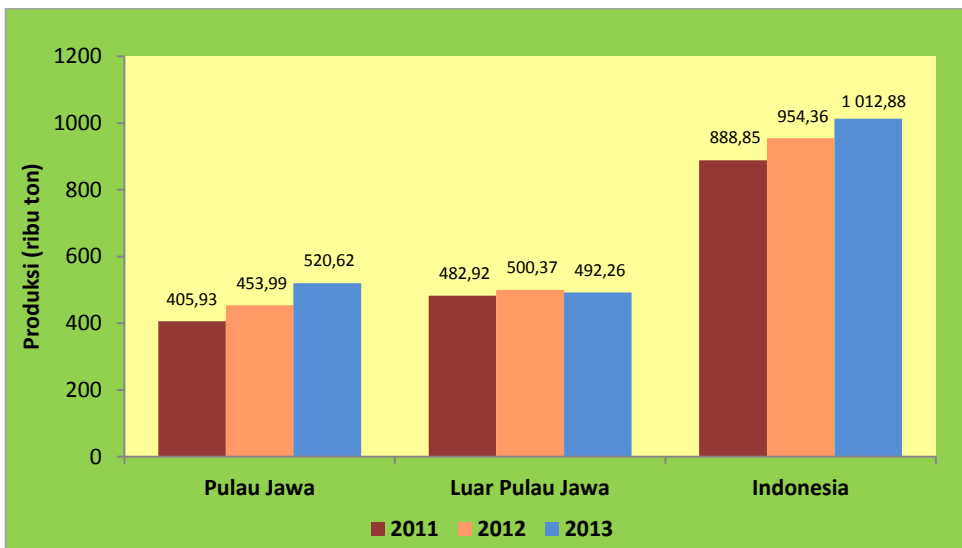
XVII. PRODUKSI HORTIKULTURA 2013

A. CABAI BESAR

1. Produksi cabai besar Indonesia tahun 2013 sebesar 1,013 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 58,52 ribu ton (6,13 persen) dibandingkan tahun 2012. Peningkatan produksi cabai besar tahun 2013 tersebut terjadi di Pulau Jawa sebesar 66,63 ribu ton, sedangkan di luar Pulau Jawa mengalami penurunan sebesar 8,11 ribu ton.

Produksi cabai besar tahun 2013 sebesar 1,013 juta ton

Grafik 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2011–2013



2. Tahun 2013, persentase produksi cabai besar menurut wilayah di Pulau Jawa sebesar 51,40 persen dan di luar Pulau Jawa sebesar 48,60 persen. Dalam periode 2011–2013, produksi tertinggi di Pulau Jawa terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 520,62 ribu ton, sedangkan produksi tertinggi di luar Pulau Jawa terjadi tahun 2012 sebesar 500,37 ribu ton.
3. Pada periode tahun 2012–2013, peningkatan terjadi pada setiap triwulan, yaitu triwulan I sebesar 559 ton (0,21 persen), pada triwulan II sebesar 31,79 ribu ton (12,45 persen), triwulan III sebesar 20,76 ribu ton (8,81 persen), dan triwulan IV sebesar 5,41 ribu ton (2,72 persen).

Tabel 17.1
Perkembangan Produksi Cabai Besar (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan Tahun 2011–2013

Uraian	2011	2012	2013	Perkembangan			
				2011–2012		2012–2013	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	405 929	453 990	520 616	48 061	11,84	66 626	14,68
Luar Pulau Jawa	482 923	500 373	492 263	17 450	3,61	-8 110	-1,62
Indonesia	888 852	954 363	1 012 879	65 511	7,37	58 516	6,13
Triwulan							
Triwulan I	215 714	264 887	265 446	49 173	22,80	559	0,21
Triwulan II	242 260	255 277	287 063	13 017	5,37	31 786	12,45
Triwulan III	237 328	235 559	256 319	-1 769	-0,75	20 760	8,81
Triwulan IV	193 550	198 640	204 051	5 090	2,63	5 411	2,72

Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai besar adalah buah segar dengan tangkai

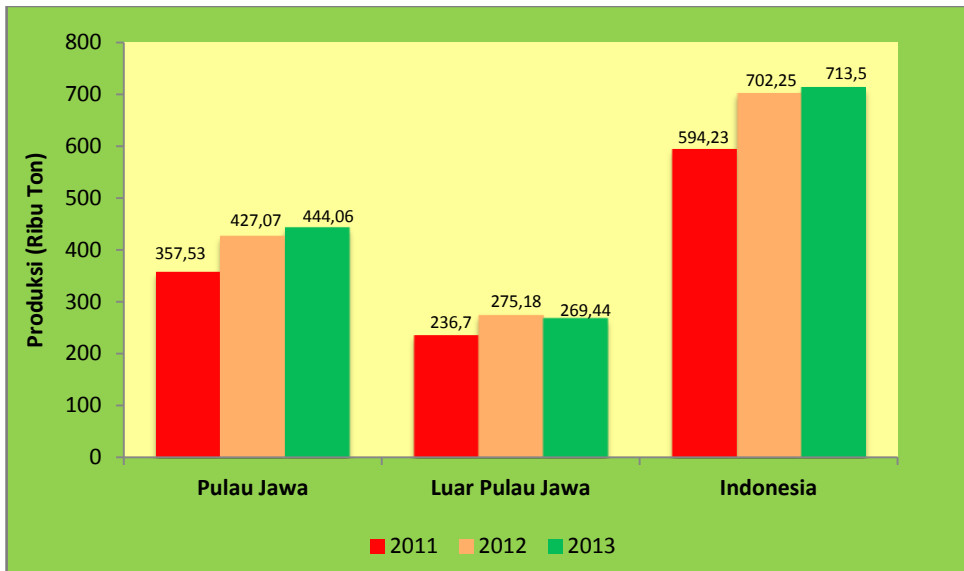
Cabai besar terdiri dari cabai merah besar, cabai hijau besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau keriting

B. CABAI RAWIT

- Produksi cabai rawit tahun 2013 sebesar 0,714 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 11,25 ribu ton (1,60 persen) dibandingkan tahun 2012. Kenaikan produksi cabai rawit dari tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi di Pulau Jawa sebesar 16,99 ribu ton (3,98 persen), sedangkan di luar Pulau Jawa mengalami penurunan sebesar 5,74 ribu ton (2,09 persen).

Produksi cabai rawit tahun 2013 sebesar 0,714 juta ton
- Persentase produksi cabai rawit tahun 2013 sebesar 62,24 persen di Pulau Jawa dan 37,76 persen di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2011–2013, Pulau Jawa masih menjadi sentra produksi cabai rawit Indonesia. Produksi cabai rawit tertinggi di Pulau Jawa terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 444,06 ribu ton, sedangkan produksi tertinggi di luar Pulau Jawa terjadi tahun 2012 sebesar 275,18 ribu ton.
- Pada periode tahun 2012–2013, penurunan terjadi pada triwulan I sebesar 1,93 ribu ton (1,27 persen) dan pada triwulan II sebesar 22,65 ribu ton (10,49 persen). Akan tetapi, pada triwulan III dan IV mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,21 ribu ton (1,18 persen) dan 33,62 ribu ton (22,74 persen).

Grafik 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2011–2013



Tabel 17.2
Perkembangan Produksi Cabai Rawit (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan Tahun 2011–2013

Uraian	2011	2012	2013	Perkembangan			
				2011–2012		2012–2013	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	357 525	427 068	444 062	69 543	19,45	16 994	3,98
Luar Pulau Jawa	236 702	275 184	269 440	38 482	16,26	- 5 744	-2,09
Indonesia	594 227	702 252	713 502	108 025	18,18	11 250	1,60
Triwulan							
Triwulan I	119 031	151 785	149 858	32 754	27,52	-1 927	-1,27
Triwulan II	164 852	215 936	193 289	51 084	30,99	-22 647	-10,49
Triwulan III	169 634	186 691	188 898	17 057	10,06	2 207	1,18
Triwulan IV	140 710	147 840	181 457	7 130	5,07	33 617	22,74

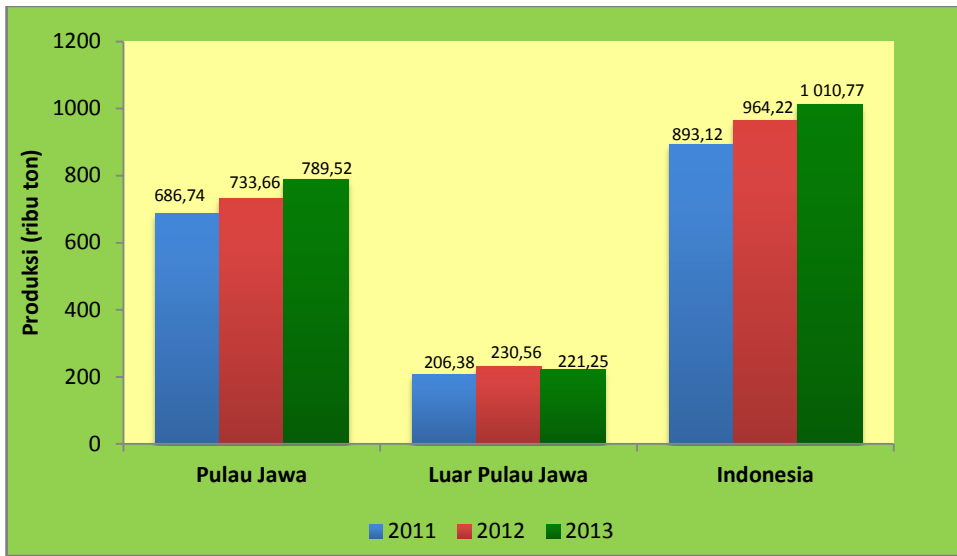
*Keterangan: Bentuk hasil produksi cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai
 Cabai rawit terdiri dari cabai rawit merah dan cabai rawit hijau*

C. BAWANG MERAH

1. Produksi bawang merah tahun 2013 sebesar 1,011 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 46,55 ribu ton (4,83 persen) dibandingkan pada tahun 2012. Peningkatan produksi tersebut disebabkan meningkatnya luas panen di Pulau Jawa sebesar 4,17 ribu hektar atau sebesar 5,88 persen sedangkan di luar Pulau Jawa mengalami penurunan sebesar 4,75 ribu hektar atau sebesar 16,62 persen.
2. Persentase produksi bawang merah Indonesia tahun 2013 menurut wilayah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing sebesar 78,11 persen dan 21,89 persen. Produksi dan luas panen tertinggi di Pulau Jawa dicapai pada tahun 2013, dimana produksi mencapai 789,52 ribu ton dan luas panen mencapai 75,10 ribu hektar. Sementara itu, produksi dan luas panen tertinggi di luar Pulau Jawa dicapai pada tahun 2012, dimana produksi mencapai 230,56 ribu ton dan luas panen mencapai 28,59 ribu hektar. Sementara produktivitas tertinggi untuk Pulau Jawa yaitu sebesar 10,51 ton per hektar, sedangkan luar Pulau Jawa sebesar 9,28 ton per hektar dicapai pada tahun 2013
3. Pada periode 2012–2013, peningkatan produksi terjadi pada triwulan I sebesar 15,37 ribu ton (6,75 persen), triwulan II sebesar 6,69 ribu ton (2,89 persen). dan triwulan IV sebesar 26,17 ribu ton (12,79 persen). Sementara penurunan produksi terjadi pada triwulan III sebesar 1,67 ribu ton (0,55 persen).

Produksi bawang merah tahun 2013 sebesar 1,011 juta ton

Grafik 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah Menurut Wilayah Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Tahun 2011–2013



Tabel 17.3
Perkembangan Produksi Bawang Merah (ton)
Menurut Wilayah dan Triwulan Tahun 2011–2013

Uraian	2011	2012	2013	Perkembangan			
				2011–2012		2012–2013	
				Absolut	%	Absolut	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Wilayah							
Pulau Jawa	686 745	733 657	789 520	46 912	6,83	55 863	7,61
Luar Pulau Jawa	206 379	230 564	221 253	24 185	11,72	-9 311	-4,04
Indonesia	893 124	964 221	1 010 773	71 097	7,96	46 552	4,83
Triwulan							
Triwulan I	135 647	227 560	242 929	91 913	67,76	15 369	6,75
Triwulan II	193 757	231 068	237 753	37 311	19,26	6 685	2,89
Triwulan III	314 433	300 968	299 299	-13 465	-4,28	-1 669	-0,55
Triwulan IV	249 287	204 625	230 792	-44 662	-17,92	26 167	12,79

Keterangan: Bentuk hasil produksi bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun

XVIII. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERTANIAN DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN, 2014

A. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN PADI, JAGUNG, DAN KEDELAI TAHUN 2014

A.1 PADI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi sawah sebesar Rp12,7 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi sawah yang terbesar adalah upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 48,23 persen dari total biaya atau sebesar Rp 6,1 juta (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp17,2 juta.

**Total biaya per musim tanam
untuk satu hektar luas panen
padi sawah sebesar Rp12,7 juta**

Tabel 18.1
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha
Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang (ribu rupiah), 2014

Uraian	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	17 174,66	-	10 249,76	-
B. Biaya Produksi	12 677,27	100,00	7 821,90	100,00
1. Bibit/Benih	406,97	3,21	282,23	3,61
2. Pupuk	1 318,60	10,40	607,27	7,76
3. Pesticida	233,96	1,85	135,33	1,73
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	6 114,71	48,23	4 877,45	62,36
5. Sewa Lahan	3 785,42	29,86	1 387,50	17,74
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	328,92	2,59	175,30	2,24
7. Bahan Bakar	86,48	0,68	70,99	0,91
8. Lainnya	402,22	3,17	285,82	3,65

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen padi ladang sebesar Rp7,8 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman padi ladang yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 62,36 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,9 juta. (Tabel 18.1). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp 10,2 juta.

**Total biaya per musim tanam
untuk satu hektar luas panen
padi ladang sebesar Rp 7,8 juta**

A.2 JAGUNG

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman jagung yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencapai 44,93 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta. (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp12,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen jagung sebesar Rp9,1 juta

Tabel 18.2
Nilai Produksi dan Biaya per Musim Tanam per Hektar Usaha
Tanaman Jagung dan Kedelai (ribu rupiah), 2014

Uraian	Jagung		Kedelai	
	Nilai	% biaya	Nilai	% biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	12 045,23	-	9 020,14	-
B. Biaya Produksi	9 140,12	100,00	9 136,50	100,00
1. Bibit/Benih	728,59	7,97	628,06	6,87
2. Pupuk	1 096,30	11,99	433,62	4,75
3. Pestisida	110,88	1,21	200,87	2,20
4. Upah Pekerja dan Jasa Pertanian	4 106,99	44,93	4 095,18	44,82
5. Sewa Lahan	2 532,35	27,71	3 255,84	35,64
6. Sewa Alat/Sarana Usaha	172,50	1,89	164,69	1,80
7. Bahan Bakar	79,83	0,87	72,62	0,79
8. Lainnya	312,68	3,42	285,62	3,13

A.3 KEDELAI

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta. Komponen biaya produksi usaha tanaman kedelai yang terbesar adalah pengeluaran untuk upah pekerja dan jasa pertanian, yakni mencakup 44,82 persen dari total biaya atau sebesar Rp4,1 juta (Tabel 18.2). Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp9,0 juta.

Total biaya per musim tanam untuk satu hektar luas panen kedelai sebesar Rp9,1 juta

B. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN CABAI MERAH, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH, DAN JERUK TAHUN 2014

B.1 CABAI MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman cabai merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp52,1 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 47,74 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,1 juta.
2. Biaya produksi tanaman cabai merah yang ditanam pada Musim Kemarau (MK) lebih tinggi dibandingkan dengan pada Musim Hujan (MH).

Tabel 18.3
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Merah per Hektar per Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	83 935,48	–	63 692,23	–
B. Biaya Produksi	54 135,84	100,00	48 051,34	100,00
1. Benih	2 048,61	3,78	2 030,19	4,23
2. Pupuk	9 274,20	17,14	8 264,54	17,19
3. Pestisida	2 928,23	5,41	2 949,24	6,14
4. Bahan bakar	705,01	1,30	206,31	0,43
5. Jaring pelindung	51,47	0,10	22,59	0,05
6. Mulsa	3 174,66	5,86	3 426,54	7,13
7. Upah pekerja	26 257,40	48,50	22 125,04	46,05
8. Sewa lahan	5 126,78	9,47	4 837,84	10,06
9. Pengeluaran lainnya	4 569,48	8,44	4 189,05	8,72

B.2 CABAI RAWIT

1. Total biaya produksi usaha tanaman cabai rawit per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp34,0 juta. Biaya produksi terbesar adalah upah pekerja sebesar 54,85 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp55,2 juta.
2. Biaya produksi tanaman cabai rawit yang ditanam pada MK sebesar Rp37,2 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan pada MH sebesar Rp28,3 juta.

Tabel 18.4
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Cabai Rawit per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	63 352,41	-	40 660,34	-
B. Biaya Produksi	37 247,92	100,00	28 288,78	100,00
1. Benih	1 744,94	4,68	1 522,83	5,38
2. Pupuk	4 887,27	13,11	4 288,91	15,16
3. Pestisida	958,42	2,57	660,67	2,34
4. Bahan bakar	298,10	0,80	106,89	0,38
5. Jaring pelindung	13,90	0,04	26,34	0,09
6. Mulsa	915,26	2,46	587,71	2,08
7. Upah pekerja	20 689,82	55,54	15 061,49	53,23
8. Sewa lahan	5 263,37	14,14	4 091,63	14,47
9. Pengeluaran lainnya	2 476,84	6,66	1 942,31	6,87

B.3 BAWANG MERAH

1. Total biaya produksi usaha tanaman bawang merah per satu hektar untuk sekali musim tanam yang dipanen sendiri tahun 2014 mencapai Rp67,2 juta. Biaya produksi terbesar adalah biaya untuk benih sebesar 38,58 persen terhadap total pengeluaran. Nilai produksi per hektar per musim tanam sebesar Rp77,2 juta.
2. Pada tahun 2014, biaya produksi tanaman bawang merah yang ditanam pada MK (Rp64,6 juta) lebih rendah dibandingkan pada MH (Rp72,2 juta).

Tabel 18.5
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Bawang Merah per Hektar Menurut Musim Tanam, 2014

Uraian	Musim Kemarau (MK)		Musim Hujan (MH)	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	86 575,83	-	59 833,57	-
B. Biaya Produksi	64 565,21	100,00	72 189,79	100,00
1. Benih	22 851,62	35,39	31 684,00	43,89
2. Pupuk	5 509,96	8,53	5 206,93	7,22
3. Pestisida	4 915,77	7,61	5 590,41	7,74
4. Bahan bakar	588,77	0,91	858,46	1,19
5. Jaring pelindung	27,93	0,04	23,01	0,03
6. Mulsa	571,09	0,89	599,50	0,83
7. Upah pekerja	20 185,58	31,27	20 697,02	28,68
8. Sewa lahan	6 830,34	10,58	5 180,37	7,18
9. Pengeluaran lainnya	3 084,15	4,78	2 350,09	3,24

B.4 JERUK

Total biaya produksi tanaman jeruk per 100 pohon selama setahun yang dipanen sendiri mencapai Rp5,4 juta dan yang ditekankan mencapai Rp5,7 juta.

Persentase biaya produksi terbesar tanaman jeruk yang dipanen sendiri adalah upah pekerja sebesar 32,07 persen (Rp1,7 juta) dan yang ditekankan adalah biaya untuk pupuk sebesar 28,41 persen (Rp1,6 juta). Nilai produksi usaha tanaman jeruk per 100 pohon yang dipanen sendiri dan ditekankan masing-masing sebesar Rp10,1 juta dan Rp13,0 juta.

Tabel 18.6
Struktur Ongkos Usaha Tanaman Jeruk per 100 Pohon yang Dipanen Sendiri dan Ditekankan 2014

Uraian	Dipanen Sendiri		Ditekankan	
	Nilai (ribu Rp)	% Biaya	Nilai (ribu Rp)	% Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	10 087,43	–	12 967,35	–
B. Biaya Produksi	5 441,21	100,00	5 666,30	100,00
1. Benih	195,35	3,59	119,65	2,11
2. Pupuk	1 078,92	19,82	1 609,97	28,41
3. Pestisida	402,93	7,41	558,95	9,86
4. Bahan bakar	52,91	0,97	117,02	2,07
5. Jaring pelindung	2,63	0,05	4,90	0,09
6. Mulsa	3,56	0,07	0,30	0,01
7. Upah pekerja	1 744,85	32,07	1 033,32	18,24
8. Sewa lahan	1 533,95	28,20	1 536,18	27,11
9. Pengeluaran lainnya	426,11	7,82	686,01	12,10

C. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN KELAPA SAWIT, KARET, DAN TEBU TAHUN 2014

Rata-rata biaya produksi usaha perkebunan tebu per hektar setahun mencapai 77,98 persen (Rp24,2 juta) dari nilai produksi. Sementara untuk komoditas karet mencapai 71,54 persen (Rp9,2 juta) dan kelapa sawit sebesar 57,05 persen (Rp9,7 juta). Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu.

Secara relatif kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha perkebunan karet atau tebu

Pada usaha perkebunan kelapa sawit sebagian besar biaya digunakan untuk membayar upah tenaga kerja sebesar 31,71 persen. Demikian pula untuk usaha perkebunan karet, pengeluaran terbesar untuk tenaga kerja sebesar 57,09 persen.

Pada usaha perkebunan tebu pengeluaran terbesar adalah untuk sewa lahan sebesar 32,37 persen dari seluruh total biaya. Pada komoditas tebu, rata-rata biaya untuk jasa pertanian relatif cukup besar yaitu mencapai 4,74 persen.

Tabel 18.7
Nilai Produksi Dan Biaya Per Hektar Usaha Kelapa Sawit, Karet, dan Tebu Tahun 2014

Subsektor	Komoditas					
	Kelapa Sawit		Karet		Tebu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. A. Nilai Produksi	17 026,01	-	12 877,97	-	31 044,66	-
B. B. Biaya Produksi	9 712,16	100,00	9 211,69	100,00	24 214,17	100,00
1. Benih/Penyisipan/Tanaman Pelindung	106,95	1,10	83,68	0,91	3 055,32	12,62
2. Pupuk	1 791,14	18,44	300,64	3,27	2 913,26	12,04
3. Stimulan	4,97	0,05	5,56	0,06	20,03	0,08
4. Pestisida	225,95	2,33	104,99	1,14	83,70	0,34
5. Tenaga Kerja	3 079,94	31,71	5 259,37	57,09	6 346,06	26,21
6. Sewa Lahan	3 008,30	30,97	2 244,74	24,37	7 838,92	32,37
7. Sewa Alat dan Sarana	231,72	2,38	183,12	1,99	259,86	1,07
8. Jasa Pertanian	156,35	1,61	48,31	0,52	1 147,87	4,74
9. Pengeluaran Lainnya	1 106,84	11,41	981,28	10,65	2 549,15	10,53

D. STRUKTUR ONGKOS USAHA SAPI POTONG, SAPI PERAH, AYAM RAS PETELUR, DAN AYAM RAS PEDAGING TAHUN 2014

D.1 SAPI POTONG

1. Total biaya produksi usaha sapi potong di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp3,6 juta. Sebagian besar biaya digunakan untuk pakan Rp2,1 juta per ekor per tahun (57,78 persen) dan biaya pekerja Rp1,2 juta per ekor per tahun (33,53 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp.71 ribu per ekor per tahun dan Rp123 ribu per ekor per tahun, sedangkan sisa biaya lainnya adalah untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi potong sebesar Rp3,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (57,78 persen) dan upah pekerja (33,53 persen)

2. Dengan nilai produksi sebesar Rp4,1 juta per ekor per tahun maka usaha peternakan sapi potong mendapat keuntungan Rp523 ribu per ekor per tahun. Pada umumnya sebagian kegiatan pengusahaan sapi potong dilakukan sendiri oleh peternak dan pakan ternak tidak membeli.

Tabel 18.8
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun Usaha Sapi Potong dan Sapi Perah 2014

Uraian	Sapi Potong		Sapi Perah	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	4 115	–	7 753	–
B. Biaya Produksi	3 592	100,00	5 596	100,00
1. Upah Pekerja	1 204	33,53	1 373	24,53
2. Pakan	2 075	57,78	3 723	66,52
Hijauan Pakan Ternak	1 662	46,27	2 007	35,86
Pakan Buatan Pabrik	45	1,24	904	16,16
Pakan Lainnya	369	10,27	812	14,50
3. Bahan Bakar Minyak	69	1,91	126	2,25
4. Listrik	18	0,50	22	0,39
5. Air	32	0,88	28	0,51
6. Pemeliharaan Kesehatan	71	1,97	77	1,37
7. Pengeluaran Lain-lain	123	3,43	248	4,43

D.2 SAPI PERAH

1. Total biaya produksi usaha sapi perah di rumah tangga untuk setiap ekor dalam setahun sebesar Rp5,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp3,7 juta per ekor per tahun (66,52 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp1,4 juta per ekor per tahun (24,53 persen). Biaya untuk pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp77 ribu per ekor per tahun (1,37 persen) dan Rp248 ribu per ekor per tahun (4,43 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

Total biaya produksi usaha sapi perah sebesar Rp5,6 juta per ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (66,52 persen) dan upah pekerja (24,53 persen)

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp7,8 juta per ekor per tahun, maka peternak sapi perah mendapat keuntungan Rp2,2 juta per ekor per tahun.

D.3 AYAM RAS PETELUR

1. Total biaya produksi usaha ayam ras petelur untuk 1.000 ekor dalam setahun membutuhkan Rp123,6 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu Rp103,3 juta per 1.000 ekor per tahun (83,58 persen) dan biaya pekerja yaitu sebesar Rp12,5 juta per 1.000 ekor per tahun (10,14 persen). Biaya pemeliharaan kesehatan dan biaya lain-lain masing-masing sebesar Rp3,1 juta per 1.000 ekor per tahun (2,47 persen) dan Rp2,7 juta per 1.000 ekor per tahun (2,15 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.
2. Dengan nilai produksi mencapai Rp146 juta per 1.000 ekor per tahun, maka peternak ayam ras petelur mendapat keuntungan Rp22,3 juta per 1.000 ekor per tahun. Produktivitas ayam ras petelur mencapai 703 butir per 1.000 ekor per hari. Dalam setahun, rata-rata periode produksi telur selama 261 hari, sedangkan rata-rata rontok bulu selama 43 hari.

Total biaya produksi usaha ayam ras petelur mencapai Rp123,6 juta per 1.000 ekor per tahun. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (83,58 persen) dan upah pekerja (10,14 persen)

D.4 AYAM RAS PEDAGING

1. Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging untuk 5.000 ekor membutuhkan Rp113,2 juta. Biaya tersebut sebagian besar untuk pakan yaitu sebesar Rp73,2 juta per 5.000 ekor (64,69 persen) dan pembelian *Day Old Chick* (DOC) sebesar Rp21,9 juta per 5.000 ekor (19,36 persen). Selain itu, biaya untuk pekerja sebesar Rp10,8

Total biaya produksi usaha ayam ras pedaging mencapai Rp113,2 juta per 5.000 ekor. Biaya terbesar digunakan untuk pakan (64,69 persen) dan upah pekerja (9,57 persen)

juta per 5.000 ekor (9,57 persen), pemeliharaan kesehatan sebesar Rp2 juta per 5.000 ekor (1,81 persen), dan biaya lain-lain Rp3,7 juta per 5.000 ekor (3,30 persen), sedangkan sisa biaya yang lainnya adalah untuk BBM, listrik, dan air.

2. Dengan nilai produksi mencapai Rp158 juta per 5.000 ekor, peternak ayam ras pedaging mendapat keuntungan Rp44,8 juta per 5.000 ekor. Rumah tangga usaha ayam ras pedaging rata-rata memelihara 5,11 siklus setahun, dengan rata-rata lama siklus 40 hari, dan rata-rata bobot ayam per ekor 1,69 kg.

Tabel 18.9
Nilai Produksi dan Biaya Produksi per Tahun Usaha Ayam Ras Petelur dan Ayam Ras Pedaging, 2014

Uraian	Ayam Ras Petelur		Ayam Ras Pedaging	
	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 1.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)	Nilai Produksi dan Biaya Produksi per 5.000 Ekor per Tahun (ribu Rp)	Struktur Biaya Produksi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Nilai Produksi	145 970	-	158 001	-
B. Biaya Produksi	123 640	100,00	113 239	100,00
1 Upah Pekerja	12 534	10,14	10 838	9,57
2 Pakan	103 336	83,58	73 248	64,69
- Biji-bijian	18 484	14,95	620	0,55
- Pakan Buatan Pabrik	53 027	42,89	69 079	61,00
- Pakan Lainnya	31 825	25,74	3 549	3,14
3 Bahan Bakar Minyak (BBM)	885	0,72	593	0,52
4 Listrik	727	0,59	488	0,43
5 Air	438	0,35	366	0,32
6 Pemeliharaan Kesehatan	3 055	2,47	2 050	1,81
7 Pengeluaran Lain-lain	2 665	2,15	3 735	3,30
8 Pembelian <i>Day Old Chick</i> (DOC)	-	-	21 921	19,36

E. STRUKTUR ONGKOS USAHA PERIKANAN TAHUN 2014

E.1 BUDIDAYA IKAN

1. Jumlah biaya per hektar dalam satu siklus usaha budidaya rumput laut, bandeng, dan udang windu masing-masing sebesar Rp7,3 juta (48,36 persen), Rp4,2 juta (71,91 persen), dan Rp3,2 juta (44,16 persen) terhadap nilai produksi. Keuntungan yang diperoleh sebesar masing-masing sebesar Rp7,8 juta (51,64 persen), Rp1,6 juta (28,09 persen), dan Rp4,1 juta (55,84 persen).
2. Biaya terbesar untuk budidaya rumput laut adalah benih/bibit yang mencapai Rp3 juta (41,33 persen), diikuti upah pekerja sebesar Rp2,5 juta (33,60 persen). Biaya terbesar usaha bandeng adalah untuk upah pekerja yang mencapai Rp965 ribu (23,21 persen) diikuti sewa lahan sebesar Rp960 ribu (23,08 persen). Sedangkan biaya terbesar usaha udang windu adalah upah pekerja yang mencapai Rp796 ribu (24,73 persen) diikuti oleh biaya sewa lahan sebesar Rp758 ribu (23,56 persen).

Tabel 18.10
Nilai Produksi dan Biaya per Hektar per Siklus
Usaha Budidaya Rumput Laut, Bandeng, dan Udang Windu, 2014

Uraian	Rumput Laut		Bandeng		Udang Windu	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Nilai Produksi	15 182,9	-	5 784,24	-	7 290,35	-
B. Biaya Produksi	7 342,8	100,00	4 159,74	100,00	3 219,76	100,00
- Benih/Bibit	3 034,7	41,30	480,28	11,54	553,68	17,20
- Pupuk dan Obat-obatan	2,9	0,04	482,71	11,61	286,01	8,89
- Pakan	0,1	0,00	716,37	17,22	331,86	10,31
- Upah Pekerja	2 467,4	33,60	965,31	23,21	795,98	24,73
- Sewa Lahan	361,5	4,92	960,23	23,08	758,43	23,56
- Alat/Sarana Usaha	304,4	4,15	83,85	2,02	78,95	2,45
- Lainnya	1 171,8	15,96	470,99	11,32	414,70	12,88

E.2 PENANGKAPAN IKAN

Jumlah biaya per trip usaha penangkapan ikan di laut menggunakan kapal motor sebesar Rp4,1 juta dan menggunakan perahu motor tempel sebesar Rp436 ribu. Biaya terbesar yang dikeluarkan adalah upah/gaji pekerja masing-masing mencapai Rp1,7 juta (40,94 persen) dan Rp177 ribu (40,47 persen) diikuti oleh

biaya BBM masing-masing sebesar Rp876 ribu (21,21 persen) dan Rp96 ribu (21,93 persen).

Tabel 18.11
Nilai Produksi dan Biaya per Trip Usaha Penangkapan Ikan di Laut
Menggunakan Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel, 2014

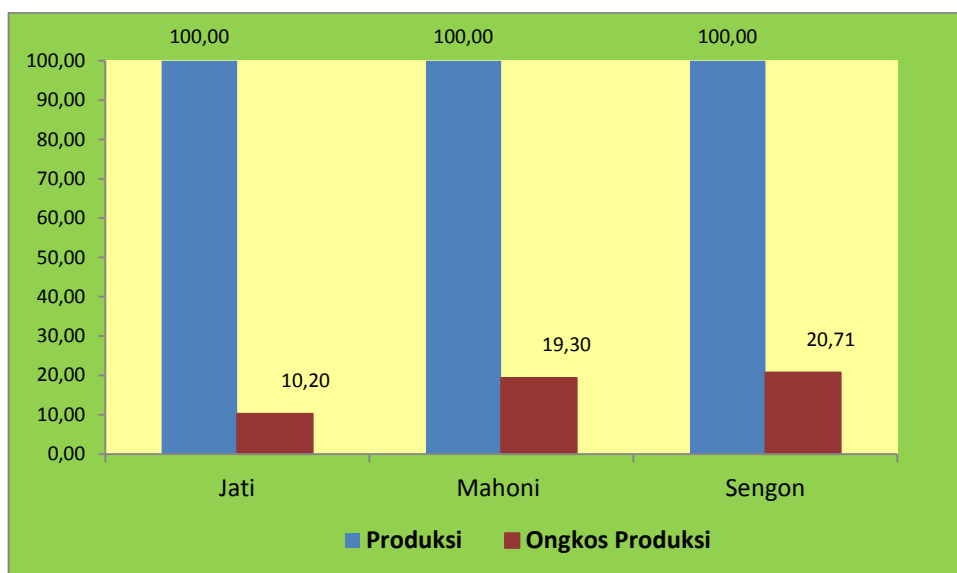
Uraian	Kapal Motor		Perahu Motor Tempel	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Produksi Hasil Penangkapan	6 211	-	813	-
B. Biaya Penangkapan	4 133	100,00	436	100,00
-Upah/gaji pekerja	1 692	40,94	177	40,47
-BBM	876	21,21	96	21,93
-Oli/Pelumas	72	1,73	13	2,93
-Garam/Es	181	4,37	15	3,55
-Perbekalan	661	15,99	64	14,58
-Sewa sarana/alat	213	5,16	19	4,28
-Pemeliharaan sarana/alat	140	3,40	14	3,15
-Penyusutan barang modal	151	3,66	16	3,74
-Biaya lainnya	146	3,53	23	5,37

F. STRUKTUR ONGKOS USAHA TANAMAN JATI, MAHONI, DAN SENGON TAHUN 2014

1. Persentase ongkos produksi terhadap nilai produksi per 100 pohon untuk masing-masing tanaman jati, mahoni, dan sengon sebesar 10,20 persen, 19,30 persen, dan 20,71 persen (Gambar 18.1).
2. Pengeluaran terbesar untuk usaha tanaman kehutanan adalah untuk upah pekerja. Upah pekerja untuk usaha tanaman jati, mahoni dan sengon masing-masing sebesar 63,99 persen, 63,00 persen, dan 59,00 persen dari total pengeluaran/ongkos produksi (Tabel 18.12).

Total pengeluaran/ ongkos produksi per 100 pohon untuk tanaman jati, mahoni, sengon lebih dari Rp 0,5 juta

Grafik 18.1
Persentase Ongkos Produksi Terhadap Nilai Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014



Tabel 18.12
Nilai Produksi dan Ongkos Produksi per 100 Pohon
Usaha Budidaya Tanaman Kehutanan, 2014

Uraian	Komoditas					
	Jati		Mahoni		Sengon	
	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%	Nilai (ribu Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Produksi	8 791,18	-	6 069,90	-	3 963,07	-
B. Ongkos Produksi	896,42	100,00	1 171,57	100,00	820,60	100,00
1. Pupuk	61,31	6,84	66,50	5,68	129,67	15,80
2. Pestisida	10,78	1,20	22,60	1,93	23,37	2,85
3. Upah Pekerja	573,63	63,99	738,13	63,00	484,17	59,00
a. Pemeliharaan/penyiangan	459,01	51,21	608,67	51,95	347,84	42,39
b. Pemupukan	35,55	3,97	50,53	4,31	76,41	9,31
c. Pengendalian OPT	7,22	0,81	21,40	1,83	15,30	1,86
d. Pemanenan/penebangan	71,84	8,01	57,53	4,91	44,61	5,44
4. Jasa Pertanian	55,58	6,20	83,09	7,09	35,33	4,31
5. Penyusutan Barang Modal	31,18	3,48	31,58	2,70	22,03	2,68
6. Sewa Alat Tanpa Operator	18,22	2,03	9,20	0,79	2,74	0,33
7. Sewa Lahan dan Bunga Modal	9,83	1,10	35,44	3,02	23,14	2,82
8. Pengeluaran Lainnya	135,90	15,16	185,04	15,79	100,15	12,20

G. KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2014

1. Jumlah rumah tangga yang tinggal di sekitar kawasan hutan pada tahun 2014 sebanyak 8.643.228 rumah tangga; 20,39 persen diantaranya menguasai lahan kawasan hutan. Dari yang menguasai lahan kawasan hutan tersebut, 2,81 persen diantaranya melakukan perladangan berpindah.

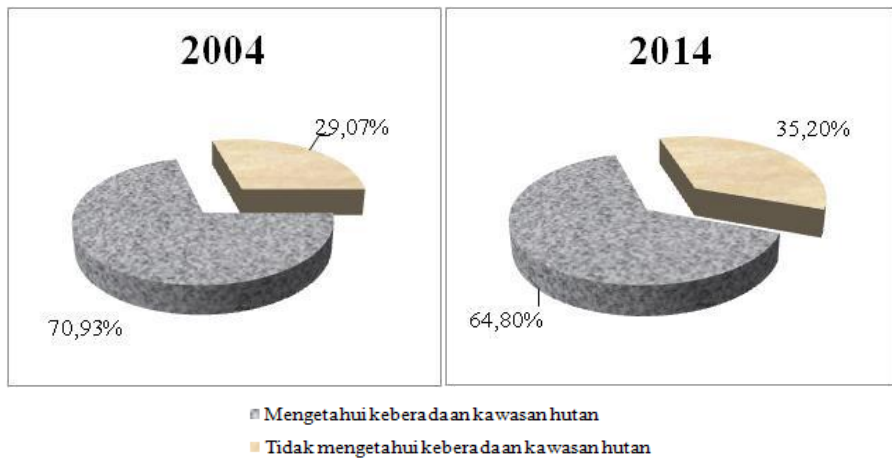
**Persentase rumah tangga
di sekitar kawasan hutan
yang menguasai lahan
kawasan hutan sebesar
20,39 persen**

2. Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengetahui keberadaan kawasan hutan sebesar 64,80 persen dan tidak mengetahui sebesar 35,20 persen. Terjadi penurunan dari tahun 2004, hal ini dapat disebabkan karena kawasan hutan tidak semuanya berupa hutan tegakan/tumbuhan yang ada kayunya namun ada yang berupa padang savana (padang rumput) (Grafik 18.2).

Tabel 18.13
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan
yang Melakukan Perladangan Berpindah, 2004 dan 2014

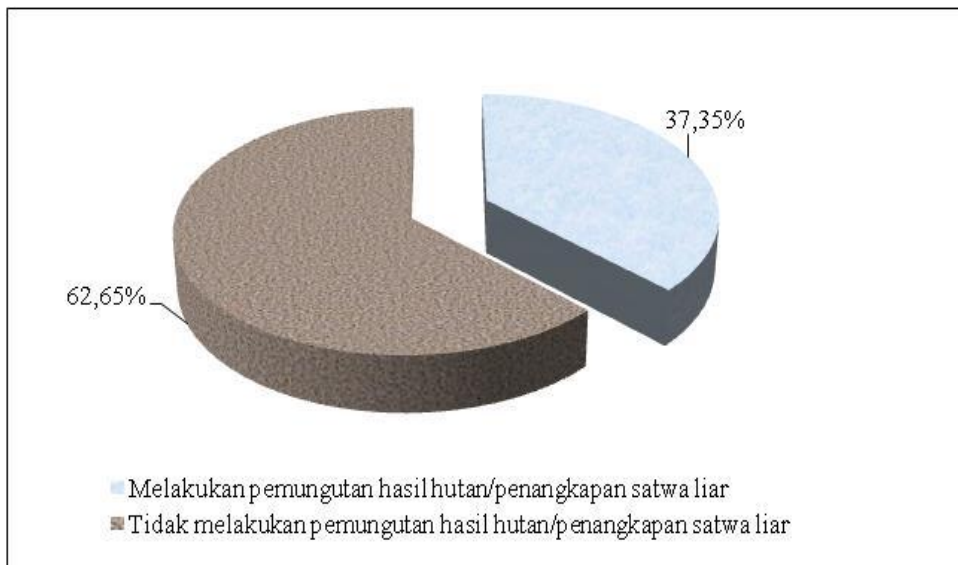
Uraian	Tahun	
	2004	2014
(1)	(2)	(3)
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan	7 804 970	8 643 228
Jumlah rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan berpindah	259 959	242 866
Persentase	3,33%	2,81%

Grafik 18.2
Persentase Rumah Tangga yang Mengetahui Keberadaan Kawasan Hutan, 2004 dan 2014



- Hutan merupakan sumber daya alam yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Dari hasil Survei Kehutanan 2014 (SKH 2014) rumah tangga di sekitar kawasan hutan yang melakukan pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar sebanyak 37,35 persen.

Grafik 18.3
Persentase Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Pemungutan Hasil Hutan/Penangkapan Satwa Liar, 2014



XIX. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2014

A. Indeks Perilaku Anti Korupsi 2014

1. Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun mulai 2012. Pada 2014, SPAK dilakukan pada November di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga. Analisis mengenai perilaku anti korupsi dalam survei ini hanya untuk representasi level nasional.
2. SPAK ditujukan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal perilaku anti korupsi. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).
3. Contoh pertanyaan mengenai penyuapan adalah pengalaman masyarakat membayar uang lebih (tanpa diminta) untuk mempercepat proses pengurusan layanan publik seperti KTP/KK. Mengenai pemerasan contohnya ialah pengalaman masyarakat diminta uang lebih oleh petugas dalam urusan layanan publik. Contoh nepotisme adalah pengalaman masyarakat ditawarkan bantuan oleh saudara/teman untuk dapat diterima menjadi pegawai negeri/swasta.
4. IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. IPAK Indonesia 2014 sebesar 3,61 dalam skala 0 sampai 5. Angka tersebut sedikit lebih rendah (0,02 poin) dibandingkan dengan 2013 yang besarnya 3,63, dapat dikatakan tidak berubah secara bermakna.
5. Capaian indeks selama ini termasuk dalam kategori "Anti Korupsi". Nilai IPAK dibagi ke dalam empat kategori yakni "Sangat Permisif Terhadap Korupsi" dengan nilai indeks 0 sampai 1,25, kategori "Permisif" terhadap korupsi dengan nilai indeks 1,26 sampai 2,50, kategori "Anti Korupsi" dengan nilai indeks 2,51 sampai 3,75, dan kategori "Sangat Anti Korupsi" dengan nilai indeks 3,76 sampai 5,00.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2014 sebesar 3,61 dari skala 0 sampai 5

6. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang berarti bahwa budaya *zero tolerance* terhadap korupsi semakin melekat dan mewujud dalam perilaku masyarakat. Sebaliknya, nilai IPAK yang semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Tabel 19.1
Nilai IPAK Tahun 2012–2014

Tahun	IPAK
(1)	(2)
2012	3,55
2013	3,63
2014	3,61

B. IPAK Menurut Sumber Keterangan

1. IPAK disusun berdasarkan tiga sumber keterangan utama yakni pertama pendapat/penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi di masyarakat, kedua pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu dan ketiga pengalaman praktek korupsi lainnya. Dari sumber keterangan Pendapat indeksinya cenderung meningkat dari kondisi 2013 ke 2014, sehingga terkesan bahwa di satu sisi masyarakat semakin idealis anti korupsi. Sementara dari sumber keterangan pengalaman (kedua dan ketiga) indeksinya cenderung menurun sehingga terkesan bahwa masyarakat semakin toleran terhadap tindakan korupsi.
2. Tabel 19.2 menunjukkan turunnya sedikit IPAK seiring dengan turunnya indeks pengalaman dan naiknya indeks pendapat. Indeks terhadap kebiasaan masyarakat menunjukkan naik dari tahun 2013 ke 2014, dari 3,66 menjadi 3,71. Indeks tersebut juga dalam skala 0 sampai 5. Sementara pada dua keterangan lainnya, indeks untuk pengalaman layanan publik tertentu turun dari 3,76 menjadi 3,64, dan indeks pengalaman layanan lainnya turun dari 3,25 menjadi 3,20.

Tabel 19.2
Indeks Menurut Sumber Keterangan, Tahun 2013–2014

Sumber Keterangan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Indeks Pendapat/Penilaian Terhadap Kebiasaan Masyarakat	3,66	3,71
Indeks Pengalaman Terkait Layanan Publik Tertentu	3,76	3,64
Indeks Pengalaman Lainnya	3,25	3,20
IPAK Indonesia	3,63	3,61

C. IPAK Berdasarkan Karakteristik Demografi

1. IPAK 2014 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding di wilayah perdesaan. Gambaran tersebut nampak pada 2013–2014, Tabel 19.3 berdasarkan klarifikasi wilayah perkotaan banding perdesaan berturut-turut 3,71 banding 3,55 dan 3,71 banding 3,51.

IPAK masyarakat di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi

Tabel 19.3
IPAK Menurut Wilayah, 2013–2014

Karakteristik Responden	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Klasifikasi Wilayah:		
Perkotaan	3,71	3,71
Perdesaan	3,55	3,51

2. IPAK lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan, meski perbedaannya tidak terlalu signifikan. IPAK 2014 di kalangan laki-laki sedikit lebih tinggi (3,64) dibanding di kalangan perempuan (3,59). Pada tahun 2013 sampai 2014 menunjukkan gambaran serupa.

IPAK lebih tinggi pada jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan

Tabel 19.4
IPAK Menurut Jenis Kelamin, 2013–2014

Karakteristik Responden	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Jenis Kelamin:		
Laki-laki	3,66	3,64
Perempuan	3,60	3,59

3. Gambaran pada 2013–2014 menunjukkan IPAK masyarakat dengan usia kurang dari 60 tahun lebih tinggi dibanding IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas. IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas sebesar 3,54, sedangkan usia kurang dari 60 tahun berkisar 3,63.

IPAK masyarakat dengan usia kurang dari 60 tahun lebih tinggi dibanding IPAK masyarakat usia 60 tahun ke atas

Tabel 19.5
IPAK Menurut Umur, 2013–2014

Karakteristik Responden	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Umur (Tahun):		
Kurang dari 40	3,63	3,63
40 sampai 59	3,65	3,64
60 atau lebih	3,55	3,54

4. Pendidikan kemungkinan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan diikuti semakin tinggi IPAK, atau semakin tinggi pendidikan semakin anti korupsi. IPAK 2014 untuk masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,52, SLTA sebesar 3,85 dan di atas SLTA sebesar 4,01.

Pendidikan Kemungkinan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi

Tabel 19.6
IPAK Menurut Pendidikan Tertinggi, 2013–2014

Karakteristik Responden	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pendidikan Tertinggi:		
SLTP ke bawah	3,55	3,52
SLTA	3,82	3,85
Di atas SLTA	3,94	4,01

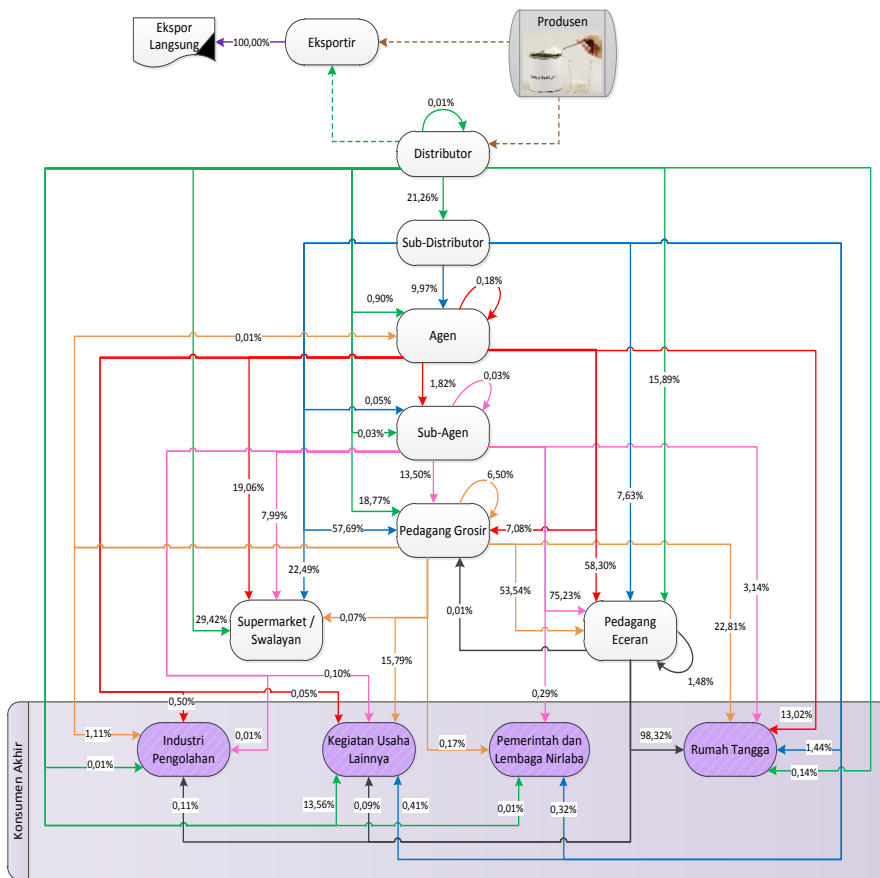
XX. PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS 2014

A. Pola Distribusi Perdagangan

1. Distribusi perdagangan minyak goreng, terigu, garam, dan susu bubuk dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan dua hingga delapan fungsi kelembagaan usaha perdagangan. Grafik 20.1 adalah pola distribusi perdagangan nasional untuk komoditi susu bubuk.

Distribusi perdagangan komoditi dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan antara 2 s.d. 8 fungsi kelembagaan usaha perdagangan

Grafik 20.1
Pola Distribusi Perdagangan Susu Bubuk di Indonesia



- Alur distribusi perdagangan terpanjang minyak goreng dan susu bubuk berada di Jawa Timur; terigu di DKI Jakarta; dan garam di Sumatera Barat. Sementara itu, alur distribusi perdagangan terpendek minyak goreng berada di Maluku; terigu dan garam di Kepulauan Riau; dan susu bubuk di Bali.

B. Peta Distribusi Perdagangan

- Papua merupakan provinsi penerima pasokan minyak goreng dan susu bubuk dari luar provinsi dengan persentase terbesar, yaitu masing-masing mencapai 99,91 persen. Sedangkan untuk terigu adalah Maluku 99,70 persen dan garam adalah Kalimantan Barat 99,30 persen.
- Sumatera Utara merupakan provinsi pemasok minyak goreng ke luar provinsi dengan persentase terbesar, yaitu mencapai 97,16 persen. Sedangkan untuk terigu adalah Banten 91,57 persen, garam adalah Sumatera Barat 55,15 persen, dan susu bubuk adalah Bengkulu 15,65 persen.
- Jaringan terluas perdagangan minyak goreng, terigu, garam, dan susu bubuk dilakukan oleh DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Jaringan terluas perdagangan minyak goreng, terigu, garam dan susu bubuk dilakukan oleh DKI Jakarta dan Jawa Timur.

C. Margin Perdagangan dan Pengangkutan

- Rata-rata rasio MPP minyak goreng secara nasional berdasarkan Survei Poldis 2014 sebesar 3,86 persen, terigu 5,92 persen, garam 23,82 persen, dan susu bubuk 13,02 persen.
- Pada komoditi minyak goreng dan terigu, rata-rata rasio MPP pedagang besar lebih rendah daripada pedagang eceran. Sebaliknya terjadi pada komoditi garam dan susu bubuk.

Rata-rata rasio MPP minyak goreng sebesar 3,86 persen, terigu 5,92 persen, garam 23,82 persen, dan susu bubuk 13,02 persen

Tabel 20.1
Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)
Menurut Komoditi dan Fungsi Kelembagaan 2014

No	Komoditi	Pedagang Besar	Pedagang Eceran	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Minyak Goreng	3,81	7,74	3,86
2	Terigu	5,84	9,06	5,92
3	Garam	23,90	17,20	23,82
4	Susu Bubuk	13,12	10,74	13,02

XXI. INDEKS KEBAHAGIAAN 2014

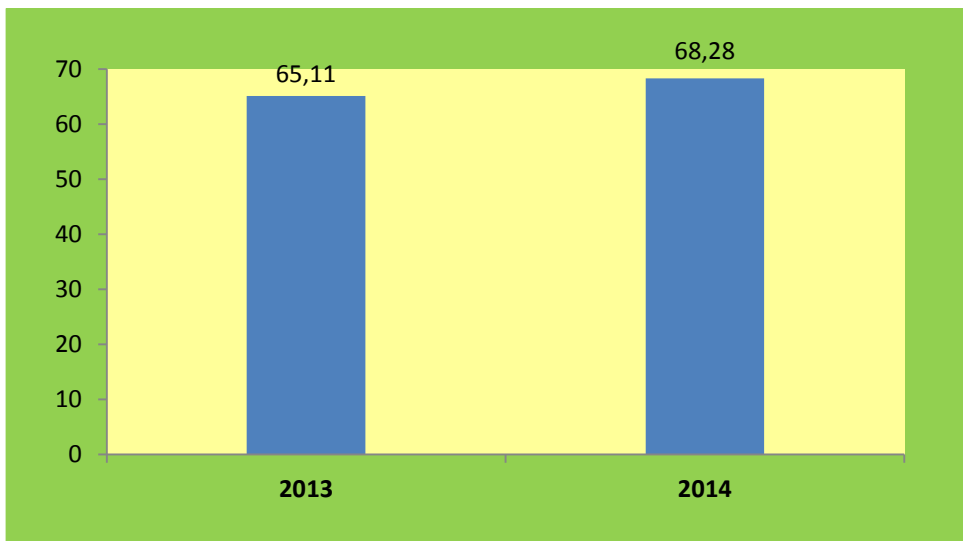
A. Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2014

1. Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 sebesar 68,28 pada skala 0–100. Terjadi peningkatan tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia tahun 2014 sebesar 3,17 poin dibandingkan tahun 2013 dengan indeks yang hanya sebesar 65,11.

Indeks Kebahagiaan Indonesia tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3,17 poin dibandingkan tahun 2013

Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia.

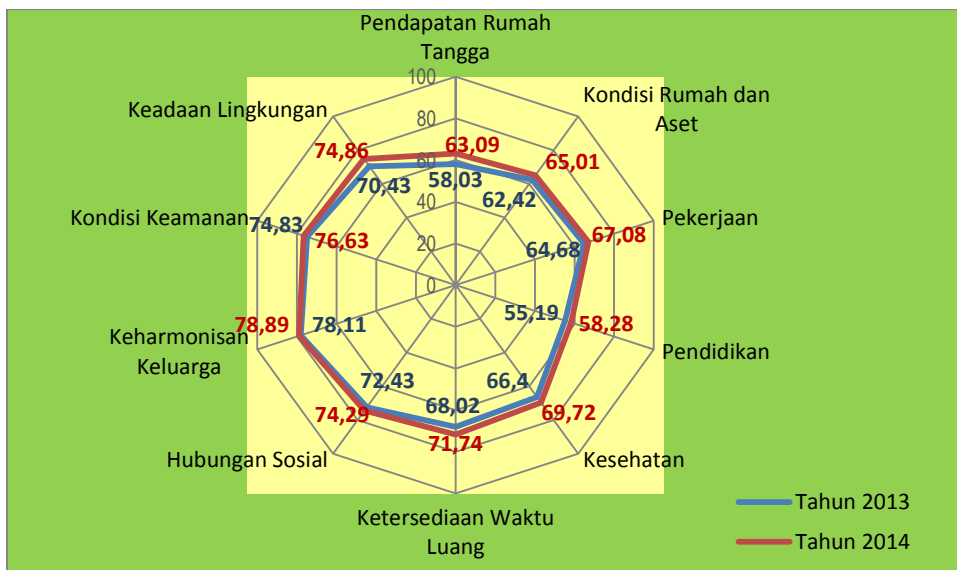
Grafik 21.1
Indeks Kebahagiaan Indonesia, 2013 dan 2014



2. Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

3. Setiap aspek kehidupan memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda terhadap indeks kebahagiaan. Hal ini terjadi karena perbedaan penilaian mengenai derajat pentingnya setiap aspek kehidupan terhadap tingkat kebahagiaan secara keseluruhan. Semakin besar kontribusi suatu aspek kehidupan, menunjukkan semakin penting aspek tersebut bagi indeks kebahagiaan. Tiga aspek kehidupan yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah pendapatan rumah tangga (14,64%), kondisi rumah dan asset (13,22%), serta pekerjaan (13,12%).
4. Tingkat kepuasan penduduk terhadap semua aspek kehidupan tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pendapatan rumah tangga, yaitu sebesar 5,06 poin, sementara aspek keharmonisan keluarga mengalami peningkatan paling rendah, yaitu sebesar 0,78 poin. Tingkat kepuasan terhadap keharmonisan keluarga adalah paling tinggi pada tahun 2014 maupun 2013, yaitu sebesar 78,89 dan 78,11. Sementara itu, tingkat kepuasan yang paling rendah terjadi pada aspek pendidikan pada tahun 2014 maupun 2013, yaitu sebesar 58,28 dan 55,19. Secara lengkap, tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan disajikan pada Grafik 21.2

Grafik 21.2
Tingkat Kepuasan Hidup Terhadap 10 Aspek Kehidupan, 2013 dan 2014



B. Indeks Kebahagiaan Menurut Karakteristik Demografi dan Ekonomi

Indeks kebahagiaan 2014 menurut karakteristik demografi dan ekonomi lebih tinggi dibanding tahun 2013. Secara umum, pola indeks kebahagiaan menurut

karakteristik demografi dan ekonomi tahun 2014 maupun 2013 relatif sama. Beberapa temuan menarik yang dihasilkan dari indeks kebahagiaan Indonesia 2014 berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi, yaitu:

- a. Indeks kebahagiaan di perkotaan relatif lebih tinggi dibanding di perdesaan (69,62 banding 66,95).
- b. Penduduk berstatus belum menikah dan menikah cenderung relatif sama indeks kebahagiaannya, yakni sekitar 68. Mereka yang berstatus cerai lebih rendah indeks kebahagiaannya, yakni sekitar 65.
- c. Penduduk usia produktif (25–40 tahun) mempunyai indeks kebahagiaan tertinggi (68,76), sebaliknya penduduk yang sudah berumur 65 tahun ke atas mempunyai indeks kebahagiaan yang paling rendah (66,24).
- d. Ada kecenderungan dengan makin banyak anggota rumah tangga, maka indeks kebahagiaan cenderung semakin tinggi. Namun hal ini hanya berlaku hingga anggota rumah tangga sebanyak 4 orang. Ketika jumlah anggota rumah tangga meningkat menjadi 5 atau lebih, maka indeks kebahagiaan cenderung menurun.
- e. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula indeks kebahagiaan. Penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mempunyai indeks kebahagiaan paling rendah (62,96), sementara indeks kebahagiaan tertinggi pada penduduk dengan tingkat pendidikan S2 atau S3 (79,47).
- f. Semakin tinggi rata-rata pendapatan rumah tangga, semakin tinggi pula indeks kebahagiaannya. Pada tingkat pendapatan lebih dari 7,2 juta rupiah per bulan, indeks kebahagiaannya mencapai 76,34, sementara pada tingkat pendapatan 1,8 juta rupiah ke bawah maka indeks kebahagiaannya hanya 64,58.

Tabel 21.1
Indeks Kebahagiaan Menurut Karakteristik Demografi dan Ekonomi
2013 dan 2014

Karakteristik Demografi dan Ekonomi	2013	2014	<i>p-value*</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Wilayah:			0,0000 ^{SS}
Perkotaan	65,92	69,62	Pr (> t)
Perdesaan	64,32	66,95	
Jenis Kelamin:			0,0061 ^{SS}
Laki-Laki	64,58	67,94	Pr (> t)
Perempuan	65,57	68,61	
Status Perkawinan:			0,0000 ^{SS}
Belum Menikah	64,99	68,77	

Karakteristik Demografi dan Ekonomi	2013	2014	<i>p-value*</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Menikah	65,31	68,74	
Cerai Hidup	60,55	65,04	Pr (> F)
Cerai Mati	63,49	65,80	
Kelompok Umur:			0,0000 ^{SS}
17–24 Tahun	65,31	68,73	
25–40 Tahun	65,28	68,76	Pr (> F)
41–64 Tahun	65,12	68,37	
65 Tahun Ke Atas	63,94	66,24	
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:			0,0000 ^{SS}
Kepala Rumah Tangga	64,38	67,57	Pr (> F)
Pasangan Kepala Rumah Tangga	65,97	69,45	
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:			0,0000 ^{SS}
1 Orang	62,32	65,59	
2 Orang	64,52	67,52	
3 Orang	65,66	68,44	
4 Orang	65,90	68,97	Pr (> F)
5 Orang	65,07	68,89	
6 Orang	64,06	68,19	
7 Orang Atau Lebih	63,78	67,85	
Pendidikan Tertinggi yang Damatkan:			0,0000 ^{SS}
Tidak/Belum Pernah Sekolah	61,69	62,96	
Tidak Tamat SD/MI/SDLB/Paket A	61,90	65,30	
SD/MI/SDLB/Paket A	63,93	67,03	
SMP/MTs/SMPLB/Paket B	65,56	68,48	Pr (> F)
SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	67,63	71,08	
Diploma I/II/III	70,12	73,86	
Diploma IV/S1	72,68	76,47	
S2 atau S3	75,58	79,47	
Pendapatan Rumah Tangga:			0,0000 ^{SS}
Hingga Rp1 800 000	61,80	64,58	
Rp1 800 001–Rp3 000 000	67,07	68,76	
Rp3 000 001–Rp4 800 000	70,34	71,86	Pr (> F)
Rp4 800 001–Rp7 200 000	72,37	74,64	
Lebih Dari Rp7 200 000	74,64	76,34	
Indonesia	65,11	68,28	

Keterangan: * Uji beda rata-rata antar 2 kategori menggunakan metode *T-test for Independent Sample* dan uji beda rata-rata lebih dari 2 kategori menggunakan metode *One-Way Anova*

^{SS} beda kelompok sangat signifikan pada taraf 1 persen

C. Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi

Bila dilihat menurut wilayah, Indeks Kebahagiaan 2014 pada masing-masing provinsi cukup bervariasi, dengan *range* sebesar 11,45 poin. Indeks Kebahagiaan terendah di Provinsi Papua sebesar 60,97, sementara Indeks Kebahagiaan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 72,42. Secara lengkap, hasil indeks kebahagiaan menurut provinsi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21.2
Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi, 2014

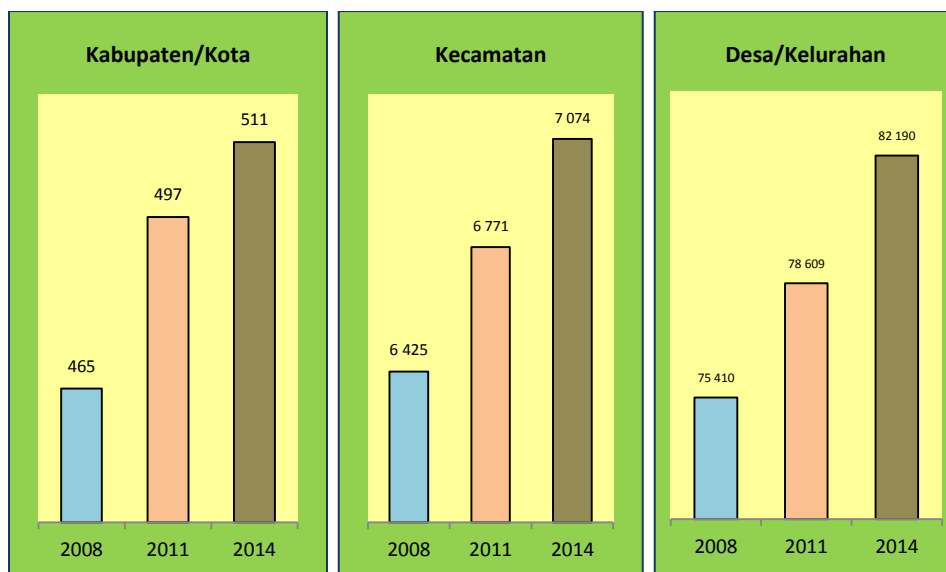
No.	Provinsi	Indeks
(1)	(2)	(3)
1.	Aceh	67,48
2.	Sumatera Utara	67,65
3.	Sumatera Barat	66,79
4.	Riau	68,85
5.	Jambi	71,10
6.	Sumatera Selatan	67,76
7.	Bengkulu	67,43
8.	Lampung	67,92
9.	Kepulauan Bangka Belitung	68,45
10.	Kepulauan Riau	72,42
11.	DKI Jakarta	69,21
12.	Jawa Barat	67,66
13.	Jawa Tengah	67,81
14.	Yogyakarta	70,77
15.	Jawa Timur	68,70
16.	Banten	68,24
17.	Bali	68,46
18.	Nusa Tenggara Barat	69,28
19.	Nusa Tenggara Timur	66,22
20.	Kalimantan Barat	67,97
21.	Kalimantan Tengah	70,01
22.	Kalimantan Selatan	70,11
23.	Kalimantan Timur	71,45
24.	Sulawesi Utara	70,79
25.	Sulawesi Tengah	67,92
26.	Sulawesi Selatan	69,80
27.	Sulawesi Tenggara	68,66
28.	Gorontalo	69,28
29.	Sulawesi Barat	67,86
30.	Maluku	72,12
31.	Maluku Utara	70,55
32.	Papua Barat	70,45
33.	Papua	60,97
Indonesia		68,28

XXII. TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014

A. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang didata harus memenuhi 3 syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) mempunyai penduduk, dan 3) mempunyai pemerintahan desa. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 82.190 wilayah setingkat desa yang terdiri dari 73.709 desa⁵, 8.412 kelurahan, dan 69 UPT. Selain itu, juga tercatat sebanyak 7.074 kecamatan dan 511 kabupaten/kota. Lihat Lampiran 1 dan Lampiran 2.

Grafik 22.1
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008–2014



B. Infrastruktur

B.1 Pendidikan

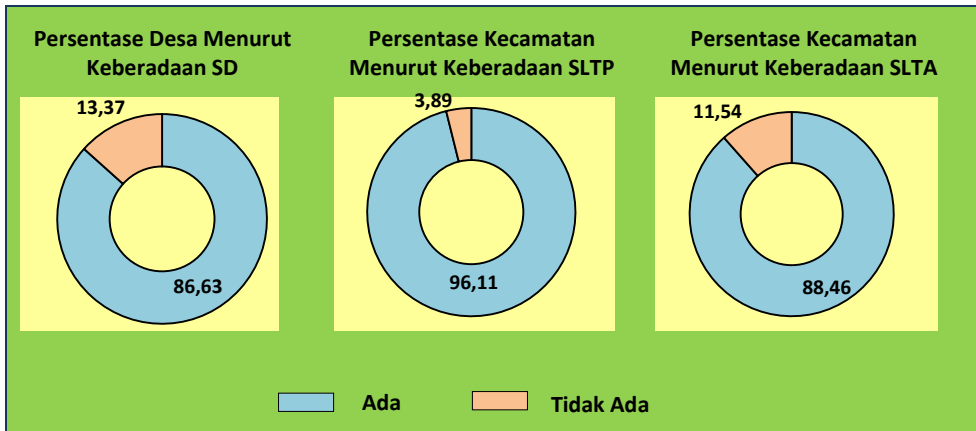
1. Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa 86,63 persen desa/kelurahan mempunyai sarana SD (termasuk Madrasah Ibtidaiyah). Hanya 10.985 desa/kelurahan (13,37

⁵ Termasuk 760 nagari, khusus di Sumatera Barat

persen) yang tidak mempunyai SD. Untuk desa/kelurahan tanpa SD, 2.438 desa/kelurahan (22,19 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SD terdekat lebih dari 3 km.

2. Sarana pendidikan SLTP telah ada di 6.799 kecamatan (96,11 persen). Sehingga, masih terdapat 275 kecamatan (3,89 persen) yang tidak ada SLTP. Untuk kecamatan tanpa SLTP, sebanyak 184 kecamatan (66,91 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTP terdekat lebih dari 6 km.
3. Sarana pendidikan SLTA telah ada di 88,46 persen kecamatan. Sehingga, masih terdapat 816 kecamatan (11,54 persen) yang tidak ada SLTA. Untuk kecamatan tanpa SLTA, sebanyak 508 kecamatan (62,33 persen) diantaranya, memiliki jarak tempuh ke SLTA terdekat lebih dari 6 km.

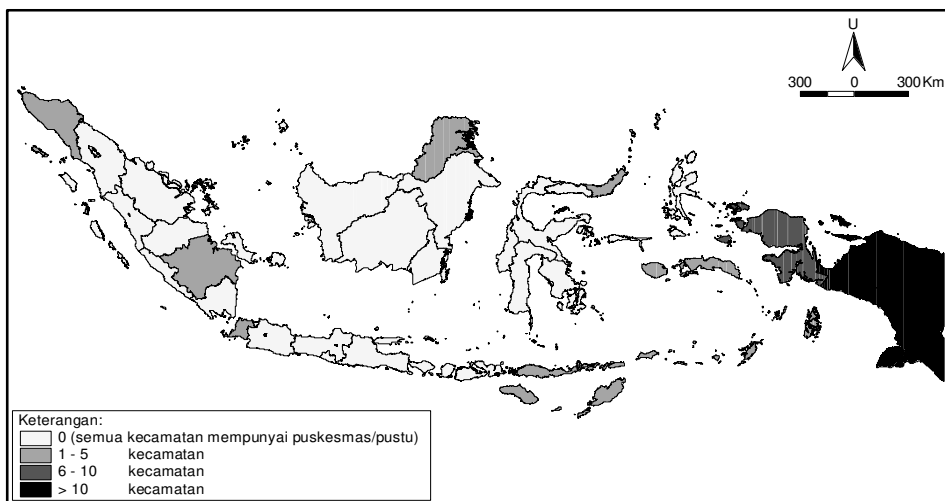
Grafik 22.2
Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014



B.2 Kesehatan

Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan hak masyarakat yang menjadi pelayanan publik pemerintah. Podes 2014 menunjukkan bahwa 6.957 kecamatan (98,35 persen) telah mempunyai Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 117 kecamatan yang belum mempunyai Puskesmas/Pustu tersebar di 9 provinsi, yaitu: Aceh, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Lihat Lampiran 5.

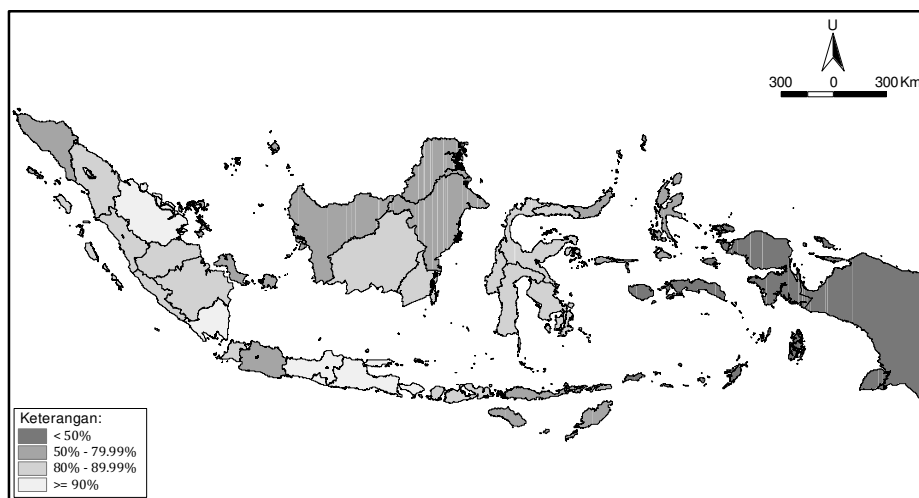
Grafik 22.3
Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014



B.3 Pasar dengan Bangunan

Tersedianya pasar di suatu wilayah menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian wilayah tersebut. Podes 2014 mencatat sebanyak 15.340 desa/kelurahan (18,66 persen) di 5.579 kecamatan, ternyata sudah ada pasar dengan bangunan (permanen atau semi permanen). Masih terdapat 1.495 kecamatan (21,13 persen) yang tidak ada pasar dengan bangunan. Lihat Lampiran 7.

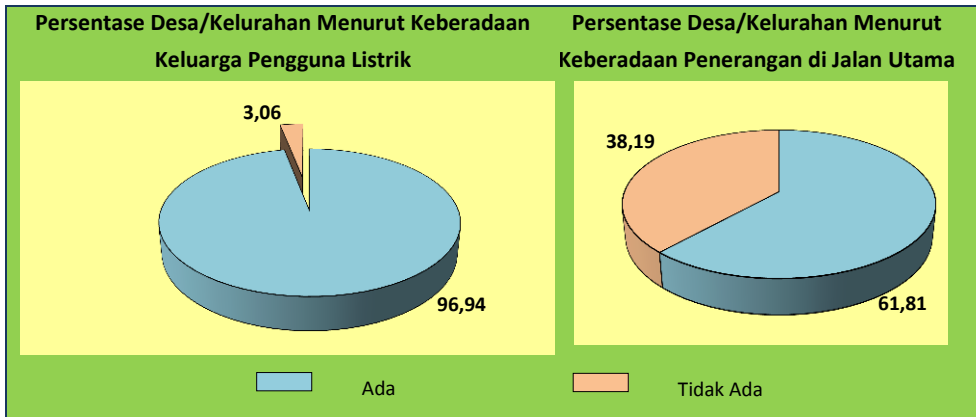
Grafik 22.4
Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014



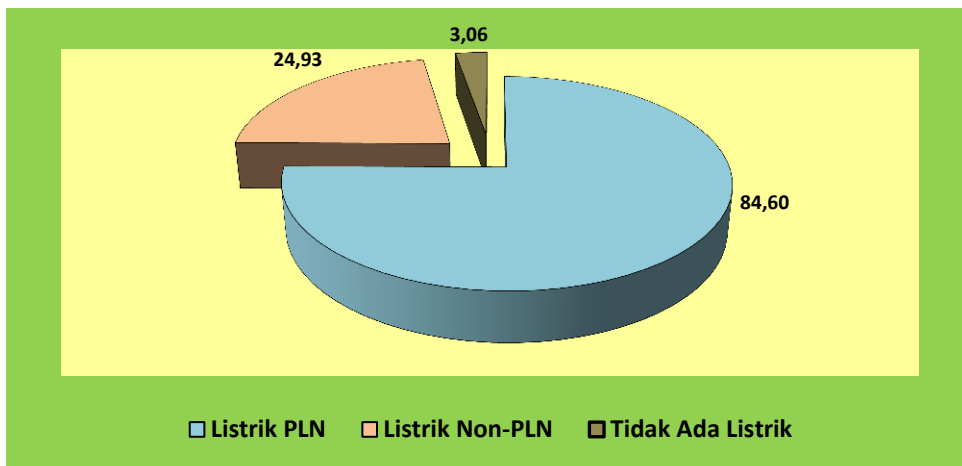
B.4 Listrik

1. Ketersediaan energi listrik sangat penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 69.531 desa/kelurahan (84,60 persen) telah ada keluarga pengguna listrik PLN. Selain itu, ada 4 provinsi yang seluruh desa/kelurahannya yang sudah ada keluarga pengguna listrik PLN. Keempat provinsi tersebut, yaitu: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, dan Bali. Lihat Lampiran 6.
2. Sebanyak 31.387 desa/kelurahan (38,19 persen) belum tersedia penerangan di jalan utama desa/kelurahan. Papua dan Nusa Tenggara Timur adalah dua provinsi dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang tidak ada penerangan di jalan utama (diatas 90 persen).

Grafik 22.5
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama



Grafik 22.6
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik

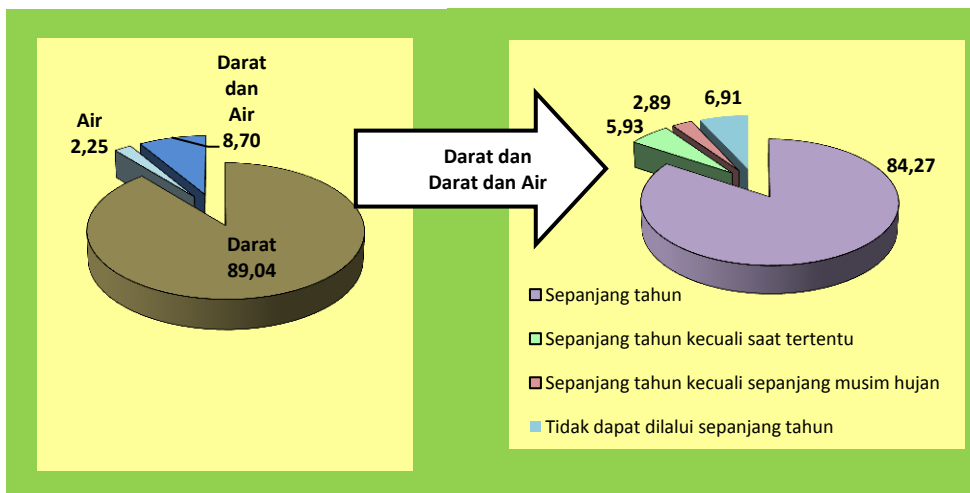


B.5 Jalan

Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan jalan akan meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 80.337 desa/kelurahan yang menggunakan sarana transportasi darat, dimana 67.701 desa/kelurahan (84,27 persen) diantaranya sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebaliknya, masih ada 12.636 desa/kelurahan (15,73 persen) yang lalu-lintasnya bergantung pada kondisi jalan dan musim. Lihat Lampiran 8.

Grafik 22.7

Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih



C. Desa/Kelurahan Terdepan

Desa/kelurahan terdepan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung darat dengan wilayah negara lain. Menurut Podes 2014, sebanyak 258 desa/kelurahan yang letaknya terdepan, berbatasan darat secara langsung dengan wilayah negara lain. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terdepan sebanyak 191.043 jiwa. Ke-256 desa/kelurahan tersebut berada di 67 kecamatan, 17 kabupaten, dan 5 provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua.

Tabel 22.1
Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Terdepan			
		Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	
				Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa Tenggara Timur	4	17	62	78 443
2	Kalimantan Barat	5	14	65	68 606
3	Kalimantan Timur	1	1	1	513
4	Kalimantan Utara	2	13	81	26 504
5	Papua	5	22	49	16 977
Indonesia		17	67	258	191 043

D. Desa/Kelurahan Terluar

Desa/kelurahan terluar adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya berada di pulau kecil terluar. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 mencantumkan sebanyak 92 pulau kecil terluar. Podes 2014 mencatat ada sebanyak 313 desa/kelurahan yang wilayahnya berada di dalam 77 pulau dari 92 pulau kecil terluar. Jumlah penduduk yang menghuni desa/kelurahan terluar sebanyak 375.883 jiwa. Sementara itu, ada 15 pulau kecil terluar yang bukan bagian dari wilayah suatu desa/kelurahan atau tanpa penduduk. Ke-15 pulau tersebut adalah Pulau Mega (Bengkulu); Pulau Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan (Jawa Timur); Pulau Manuk (Jawa Barat); Pulau Batek (Nusa Tenggara Timur); Pulau Gosong Makasar (Kalimantan Utara); Pulau Sambit (Kalimantan Timur); Pulau Batarkusu dan Pulau Meitimjarang (Maluku); Pulau Jiew (Maluku Utara); Pulau Budd, Pulau Fani, dan Pulau Mioosu (Papua Barat); dan Pulau Laag (Papua). Secara lengkap, berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan terluar menurut provinsi.

Tabel 22.2
Jumlah Penduduk dan Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar Menurut Provinsi, 2014

No	Provinsi	Jumlah Pulau Kecil Terluar		Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Pulau Kecil Terluar			
		Menurut PP No 78 Tahun 2005	Ada Wilayah Desa/Kelurahan (Podes 2014)	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	6	6	4	6	6	2 925
2	Sumatera Utara	3	3	3	3	8	4 077
3	Sumatera Barat	2	2	1	2	2	5 714
4	Riau	1	1	1	1	1	5 994
5	Bengkulu	2	1	1	1	6	3 001
6	Lampung	1	1	1	1	1	1 761
7	Kepulauan Riau	19	19	5	11	17	19 194
8	Jawa Barat	1	-	-	-	-	-
9	Jawa Tengah	1	1	1	2	2	21 831
10	Jawa Timur	3	-	-	-	-	-
11	Banten	1	1	1	1	1	6 194
12	Nusa Tenggara Barat	1	1	1	1	1	12 357
13	Nusa Tenggara Timur	5	4	4	14	123	150 027
14	Kalimantan Timur	2	1	1	1	4	3 677
15	Kalimantan Utara	2	1	1	5	19	37 734
16	Sulawesi Utara	11	11	5	7	18	8 484
17	Sulawesi Tengah	3	3	1	3	3	5 392
18	Maluku	18	16	3	15	72	71 134
19	Maluku Utara	1	-	-	-	-	-
20	Papua Barat	3	-	-	-	-	-
21	Papua	6	5	3	6	29	16 387
Indonesia		92	77	37	80	313	375 883

E. Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG)

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG. BPS

telah menyusun IKG untuk seluruh desa. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

2. Tabel 22.3. menyajikan IKG setiap provinsi. IKG terendah sebesar 6,83 di desa Sudagaran (Jawa Tengah) dan IKG tertinggi sebesar 97,89 di desa Dorera (Papua). Nilai tengah IKG desa secara nasional adalah sebesar 40,91.

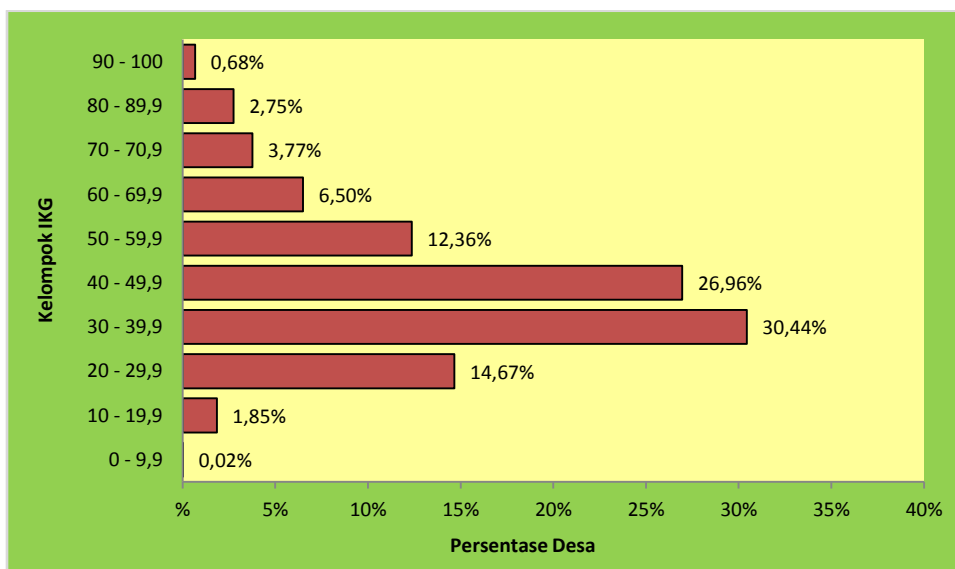
Tabel 22.3
IKG Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,10	44,65	79,90
Sumatera Utara	10,17	42,31	86,58
Sumatera Barat	12,51	33,19	87,49
Riau	14,38	40,24	77,64
Jambi	14,83	39,96	77,84
Sumatera Selatan	12,05	42,38	78,24
Bengkulu	16,66	42,65	80,55
Lampung	11,71	40,51	77,95
Kep. Bangka Belitung	15,95	34,17	70,04
Kepulauan Riau	18,28	45,60	77,64
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	9,42	32,58	82,37
Jawa Tengah	6,83	34,27	64,10
DI Yogyakarta	9,96	27,73	48,17
Jawa Timur	9,03	35,23	67,36
Banten	13,99	39,79	70,72
Bali	8,79	30,20	58,60
Nusa Tenggara Barat	16,41	35,69	67,96
Nusa Tenggara Timur	20,21	49,87	80,77
Kalimantan Barat	10,47	51,10	84,83
Kalimantan Tengah	16,42	46,94	90,52
Kalimantan Selatan	16,75	40,98	85,77
Kalimantan Timur	14,78	42,61	90,20
Kalimantan Utara	19,82	59,47	87,98
Sulawesi Utara	9,54	40,21	75,81
Sulawesi Tengah	16,93	42,70	84,79

Provinsi	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Sulawesi Selatan	14,44	36,95	80,11
Sulawesi Tenggara	19,09	48,52	79,59
Gorontalo	12,57	39,05	67,98
Sulawesi Barat	17,74	46,18	84,58
Maluku	15,11	51,91	88,24
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20
Papua Barat	18,42	65,43	96,02
Papua	17,05	76,33	97,89

3. Jika dibedakan berdasarkan 10 kelompok, maka lebih dari 50 persen (57,40 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG antara 30 sampai dengan 50. Sementara itu, kurang dari 10 persen (7,20 persen) desa termasuk dalam kelompok IKG di atas 70.

Grafik 22.8
Persentase Desa Menurut Kelompok IKG, 2014



Lampiran 1. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	23	289	6 512
Sumatera Utara	33	440	6 104
Sumatera Barat	19	179	1 145
Riau	12	164	1 835
Jambi	11	138	1 551
Sumatera Selatan	17	231	3 237
Bengkulu	10	127	1 532
Lampung	15	225	2 632
Kep Bangka Belitung	7	47	381
Kepulauan Riau	7	66	415
DKI Jakarta	6	44	267
Jawa Barat	27	626	5 962
Jawa Tengah	35	573	8 578
DI Yogyakarta	5	78	438
Jawa Timur	38	664	8 502
Banten	8	155	1 551
Bali	9	57	716
Nusa Tenggara Barat	10	116	1 141
Nusa Tenggara Timur	22	306	3 270
Kalimantan Barat	14	176	2 109
Kalimantan Tengah	14	136	1 569
Kalimantan Selatan	13	152	2 008
Kalimantan Timur	10	103	1 026
Kalimantan Utara	5	50	479
Sulawesi Utara	15	167	1 836
Sulawesi Tengah	13	172	1 986
Sulawesi Selatan	24	306	3 030
Sulawesi Tenggara	14	209	2 272
Gorontalo	6	77	736
Sulawesi Barat	6	69	648
Maluku	11	113	1 088
Maluku Utara	10	115	1 196
Papua Barat	13	175	1 567
Papua	29	529	4 871
INDONESIA	511	7 074	82 190

Lampiran 2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa	Kelurahan	UPT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	6 510	-	2	6 512
Sumatera Utara	5 406	695	3	6 104
Sumatera Barat	886	259	-	1 145
Riau	1 603	232	-	1 835
Jambi	1 389	162	-	1 551
Sumatera Selatan	2 851	385	1	3 237
Bengkulu	1 356	172	4	1 532
Lampung	2 423	206	3	2 632
Kep.Bangka Belitung	309	72	-	381
Kepulauan Riau	272	143	-	415
DKI Jakarta	-	267	-	267
Jawa Barat	5 321	641	-	5 962
Jawa Tengah	7 809	769	-	8 578
DI Yogyakarta	392	46	-	438
Jawa Timur	7 721	781	-	8 502
Banten	1 237	314	-	1 551
Bali	636	80	-	716
Nusa Tenggara Barat	995	142	4	1 141
Nusa Tenggara Timur	2 951	319	-	3 270
Kalimantan Barat	2 009	99	1	2 109
Kalimantan Tengah	1 427	138	4	1 569
Kalimantan Selatan	1 864	144	-	2 008
Kalimantan Timur	836	190	-	1 026
Kalimantan Utara	444	35	-	479
Sulawesi Utara	1 505	331	-	1 836
Sulawesi Tengah	1 809	174	3	1 986
Sulawesi Selatan	2 240	783	7	3 030
Sulawesi Tenggara	1 891	371	10	2 272
Gorontalo	657	72	7	736
Sulawesi Barat	575	71	2	648
Maluku	1 050	33	5	1 088
Maluku Utara	1 066	117	13	1 196
Papua Barat	1 492	75	-	1 567
Papua	4 777	94	-	4 871
INDONESIA	73 709	8 412	69	82 190

Lampiran 3. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD dan Kecamatan yang Ada SLTP dan SLTA Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Desa/Kelurahan yang Ada SD	Kecamatan yang Ada SLTP	Kecamatan yang Ada SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3 358	289	281
Sumatera Utara	4 957	439	414
Sumatera Barat	1 100	179	170
Riau	1 779	164	164
Jambi	1 457	137	133
Sumatera Selatan	2 938	231	225
Bengkulu	1 180	126	108
Lampung	2 499	225	218
Kep.Bangka Belitung	375	47	45
Kepulauan Riau	390	66	61
DKI Jakarta	264	44	44
Jawa Barat	5 949	626	606
Jawa Tengah	8 461	573	552
DI Yogyakarta	438	78	76
Jawa Timur	8 450	664	648
Banten	1 543	155	154
Bali	709	57	56
Nusa Tenggara Barat	1 130	116	114
Nusa Tenggara Timur	3 129	306	257
Kalimantan Barat	2 028	176	164
Kalimantan Tengah	1 540	136	131
Kalimantan Selatan	1 869	152	141
Kalimantan Timur	970	103	103
Kalimantan Utara	299	50	43
Sulawesi Utara	1 537	167	147
Sulawesi Tengah	1 882	171	153
Sulawesi Selatan	2 929	306	282
Sulawesi Tenggara	1 837	208	199
Gorontalo	658	76	67
Sulawesi Barat	627	69	68
Maluku	1 017	113	108
Maluku Utara	1 092	115	114
Papua Barat	835	144	72
Papua	1 979	291	140
INDONESIA	71 205	6 799	6 258

Lampiran 4. Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana Pendidikan Terdekat dan Provinsi, 2014

Provinsi	Jumlah Desa/ Kelurahan Tidak Ada SD	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Jarak ke SD > 3 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTP	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTP > 6 km	Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada SLTA	Jumlah Kecamatan yang Jarak ke SLTA > 6 km
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3 154	162	-	-	8	-
Sumatera Utara	1 147	132	1	-	26	9
Sumatera Barat	45	-	-	-	9	5
Riau	56	4	-	-	-	-
Jambi	94	5	1	-	5	3
Sumatera Selatan	299	19	-	-	6	-
Bengkulu	352	18	1	-	19	3
Lampung	133	9	-	-	7	2
Kep.Bangka Belitung	6	1	-	-	2	2
Kepulauan Riau	25	2	-	-	5	2
DKI Jakarta	3	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13	3	-	-	20	2
Jawa Tengah	117	2	-	-	21	2
DI Yogyakarta	-	-	-	-	2	-
Jawa Timur	52	-	-	-	16	5
Banten	8	-	-	-	1	1
Bali	7	-	-	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	11	-	-	-	2	2
Nusa Tenggara Timur	141	12	-	-	49	23
Kalimantan Barat	81	24	-	-	12	10
Kalimantan Tengah	29	13	-	-	5	4
Kalimantan Selatan	139	5	-	-	11	3
Kalimantan Timur	56	14	-	-	-	-
Kalimantan Utara	180	28	-	-	7	6
Sulawesi Utara	299	9	-	-	20	6
Sulawesi Tengah	104	11	1	-	19	9
Sulawesi Selatan	101	3	-	-	24	7
Sulawesi Tenggara	435	31	1	-	10	5
Gorontalo	78	3	1	-	10	3
Sulawesi Barat	21	2	-	-	1	1
Maluku	71	9	-	-	5	5
Maluku Utara	104	5	-	-	1	1
Papua Barat	732	233	31	20	103	81
Papua	2 892	1 679	238	164	389	306
INDONESIA	10 985	2 438	275	184	816	508

Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	288	99,65
Sumatera Utara	440	100,00
Sumatera Barat	179	100,00
Riau	164	100,00
Jambi	138	100,00
Sumatera Selatan	230	99,57
Bengkulu	127	100,00
Lampung	225	100,00
Kep.Bangka Belitung	47	100,00
Kepulauan Riau	66	100,00
DKI Jakarta	44	100,00
Jawa Barat	626	100,00
Jawa Tengah	573	100,00
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	664	100,00
Banten	154	99,35
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	116	100,00
Nusa Tenggara Timur	303	99,02
Kalimantan Barat	176	100,00
Kalimantan Tengah	136	100,00
Kalimantan Selatan	152	100,00
Kalimantan Timur	103	100,00
Kalimantan Utara	49	98,00
Sulawesi Utara	163	97,60
Sulawesi Tengah	172	100,00
Sulawesi Selatan	306	100,00
Sulawesi Tenggara	209	100,00
Gorontalo	77	100,00
Sulawesi Barat	69	100,00
Maluku	112	99,12
Maluku Utara	115	100,00
Papua Barat	166	94,86
Papua	433	81,85
INDONESIA	6 957	98,35

Lampiran 6. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik		Ada Penerangan Di Jalan Utama
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	6 427	296	3 663
Sumatera Utara	5 543	1 475	3 662
Sumatera Barat	1 099	350	862
Riau	1 301	1 194	1 036
Jambi	1 339	613	784
Sumatera Selatan	2 886	1 123	2 086
Bengkulu	1 470	244	693
Lampung	2 402	779	1 701
Kep. Bangka Belitung	377	153	307
Kepulauan Riau	294	293	257
DKI Jakarta	267	2	264
Jawa Barat	5 960	257	5 064
Jawa Tengah	8 566	115	8 330
DI Yogyakarta	438	9	428
Jawa Timur	8 457	291	8 055
Banten	1 551	34	950
Bali	716	20	700
Nusa Tenggara Barat	1 114	122	840
Nusa Tenggara Timur	2 624	1 694	298
Kalimantan Barat	1 380	1 239	521
Kalimantan Tengah	838	1 079	421
Kalimantan Selatan	1 903	401	1 634
Kalimantan Timur	647	662	462
Kalimantan Utara	180	380	133
Sulawesi Utara	1 789	258	1 132
Sulawesi Tengah	1 601	897	1 257
Sulawesi Selatan	2 777	734	2 165
Sulawesi Tenggara	1 786	896	785
Gorontalo	690	298	534
Sulawesi Barat	403	440	184
Maluku	654	540	366
Maluku Utara	785	598	453
Papua Barat	443	914	364
Papua	824	2 093	412
INDONESIA	69 531	20 493	50 803

Lampiran 7. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Kecamatan yang Ada Pasar Dengan Bangunan	
	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Aceh	227	78,55
Sumatera Utara	367	83,41
Sumatera Barat	161	89,94
Riau	157	95,73
Jambi	117	84,78
Sumatera Selatan	203	87,88
Bengkulu	109	85,83
Lampung	208	92,44
Kep. Bangka Belitung	37	78,72
Kepulauan Riau	37	56,06
DKI Jakarta	41	93,18
Jawa Barat	469	74,92
Jawa Tengah	560	97,73
DI Yogyakarta	78	100,00
Jawa Timur	639	96,23
Banten	124	80,00
Bali	57	100,00
Nusa Tenggara Barat	93	80,17
Nusa Tenggara Timur	244	79,74
Kalimantan Barat	104	59,09
Kalimantan Tengah	109	80,15
Kalimantan Selatan	133	87,50
Kalimantan Timur	78	75,73
Kalimantan Utara	25	50,00
Sulawesi Utara	109	65,27
Sulawesi Tengah	151	87,79
Sulawesi Selatan	271	88,56
Sulawesi Tenggara	188	89,95
Gorontalo	68	88,31
Sulawesi Barat	61	88,41
Maluku	54	47,79
Maluku Utara	58	50,43
Papua Barat	58	33,14
Papua	184	34,78
INDONESIA	5 579	78,87

Lampiran 8. Jumlah Desa/Kelurahan yang Sarana Transportasi dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat atau Darat dan Air Menurut Kondisi Jalan dan Provinsi, 2014

Provinsi	Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih				Total
	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu	Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan	Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	5 742	445	241	71	6 499
Sumatera Utara	5 004	344	307	422	6 077
Sumatera Barat	1 068	34	15	22	1 139
Riau	1 279	170	107	237	1 793
Jambi	1 311	114	49	73	1 547
Sumatera Selatan	2 652	288	168	98	3 206
Bengkulu	1 381	85	56	5	1 527
Lampung	2 261	239	89	40	2 629
Kep. Bangka Belitung	370	2	4	2	378
Kepulauan Riau	295	12	5	29	341
DKI Jakarta	259	2	-	2	263
Jawa Barat	5 761	118	77	6	5 962
Jawa Tengah	8 448	78	46	4	8 576
DI Yogyakarta	436	2	-	-	438
Jawa Timur	8 356	87	45	13	8 501
Banten	1 472	42	28	4	1 546
Bali	709	3	4	-	716
Nusa Tenggara Barat	1 073	47	13	6	1 139
Nusa Tenggara Timur	2 608	383	189	63	3 243
Kalimantan Barat	1 123	448	161	270	2 002
Kalimantan Tengah	804	314	123	158	1 399
Kalimantan Selatan	1 698	118	22	146	1 984
Kalimantan Timur	741	158	44	44	987
Kalimantan Utara	238	98	32	49	417
Sulawesi Utara	1 717	37	5	51	1 810
Sulawesi Tengah	1 674	86	30	144	1 934
Sulawesi Selatan	2 686	143	79	75	2 983
Sulawesi Tenggara	1 937	150	67	83	2 237
Gorontalo	669	37	12	17	735
Sulawesi Barat	468	67	45	65	645
Maluku	556	97	39	256	948
Maluku Utara	736	108	46	154	1 044
Papua Barat	867	98	49	285	1 299
Papua	1 302	309	124	2658	4 393
INDONESIA	67 701	4 763	2 321	5 552	80 337

XXIII. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR ECERAN RUPIAH MARET 2015

A. Dolar Amerika (USD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) rupiah terhadap dolar Amerika pada minggu terakhir Februari 2015 tertinggi tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebesar Rp12.935,00 sementara pada minggu terakhir Maret 2015 terjadi di Provinsi Kalimantan Utara yakni Rp13.217,00 per dolar AS. Sedangkan untuk harga terendah di minggu terakhir Februari 2015 terjadi di Provinsi Riau sebesar Rp12.682,08 per dolar AS, dan pada minggu terakhir Maret 2015 terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar Rp12.807,50 per dolar AS.
2. Memasuki Maret 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata di 34 provinsi melemah 89,03 poin atau 0,69 persen, dibanding minggu terakhir Februari 2015. Depresiasi tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 212,00 poin atau 1,66 persen. Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Utara menjadi satu-satunya provinsi yang terapresiasi sebesar 7,00 poin atau 0,05 persen.
3. Pada minggu terakhir Maret 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika secara rata-rata di 34 provinsi melemah 98,11 poin atau sekitar 0,76 persen, dibanding kurs pada minggu terakhir Februari 2015. Seluruh provinsi mengalami pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan rupiah tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Utara yang terdepresiasi sebesar 349,00 poin atau 2,71 persen. Sebaliknya, depresiasi terendah terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 25,00 poin atau 0,20 persen.

Rupiah terdepresiasi 98,11 poin atau 0,76 persen terhadap dolar Amerika di Maret 2015. Seluruh provinsi mengalami pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD

B. Dolar Australia (AUD)

1. Nilai tukar (kurs tengah) rupiah terhadap dolar Australia, pada minggu terakhir Februari 2015, tertinggi terjadi di Provinsi Riau sebesar Rp10.210,00. Sementara pada minggu

Rupiah terdepresiasi 35,10 poin atau 0,35 persen terhadap dolar Australia di Maret 2015

terakhir Maret 2015, kurs tengah tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp10.215,00 per dolar Australia. Di sisi lain, nilai tukar terhadap dolar Australia terendah pada minggu terakhir Februari 2015 tercatat di Provinsi Aceh, sebesar Rp9.750,00 per dolar Australia, dan pada minggu terakhir Maret 2015 nilai terendah tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar Rp9.675,00 per dolar Australia.

2. Kurs dolar Australia terjadi fluktuasi selama Maret 2015 jika dibanding dengan minggu terakhir Februari 2015. Adapun rata-rata kurs rupiah di 34 provinsi, terdepresiasi sebesar 33,28 poin di minggu pertama atau melemah sebesar 0,33 persen. Sebaliknya, apresiasi terjadi di minggu kedua dan ketiga, masing-masing sebesar 50,57 poin (0,50 persen) dan 67,59 poin (0,67 persen). Kemudian, terdepresiasi kembali sebesar 35,10 poin di minggu terakhir Maret 2015, atau melemah sebesar 0,35 persen dibanding minggu terakhir Februari 2015.
3. Pada minggu pertama Maret 2015, pelemahan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Aceh yaitu sebesar 399,00 poin atau terdepresiasi sebesar 4,09 persen dibanding minggu terakhir Februari 2015. Pada minggu terakhir Maret 2015, sebagian besar provinsi mencatat nilai tukar rupiah yang melemah terhadap AUD. Pelemahan rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada minggu terakhir Maret 2015, yaitu terdepresiasi sebesar 154,94 poin atau melemah sebesar 1,55 persen dibanding minggu terakhir Februari 2015. Sebaliknya, apresiasi rupiah yang terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 400,00 poin atau menguat sebesar 3,97 persen.

C. Yen Jepang (JPY)

1. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang yen Jepang, pada minggu terakhir Februari 2015 tertinggi tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp110,50 per yen Jepang dan terendah terjadi di Provinsi Aceh sebesar Rp102,50 per yen Jepang. Sedangkan pada minggu terakhir Maret 2015, harga tertinggi tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar Rp109,04 per yen Jepang dan harga terendahnya terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp106,25 per yen Jepang.
2. Nilai tukar rupiah terhadap yen Jepang pada minggu pertama Maret 2015 secara rata-rata di 34 provinsi melemah 0,14 poin atau 0,13 persen, begitu pula pada minggu terakhir Maret 2015 secara rata-rata tercatat melemah 0,19 poin atau

Rupiah terdepresiasi 0,19 poin atau 0,18 persen terhadap yen Jepang di Maret 2015

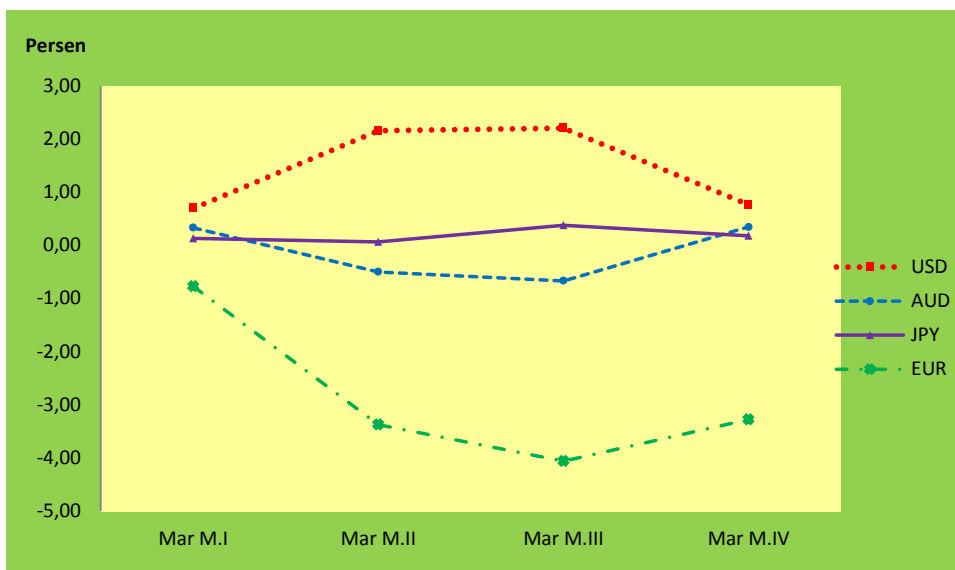
0,18 persen dibanding minggu terakhir Februari 2015. Pelemahan tertinggi pada minggu pertama Maret 2015 terjadi di Provinsi Aceh, yaitu 5,50 poin atau 5,37 persen. Sedangkan depresiasi terbesar yang terjadi pada minggu terakhir Maret 2015 tercatat di Provinsi Aceh, yakni 5,50 poin atau melemah 5,37 persen.

D. Euro (EUR)

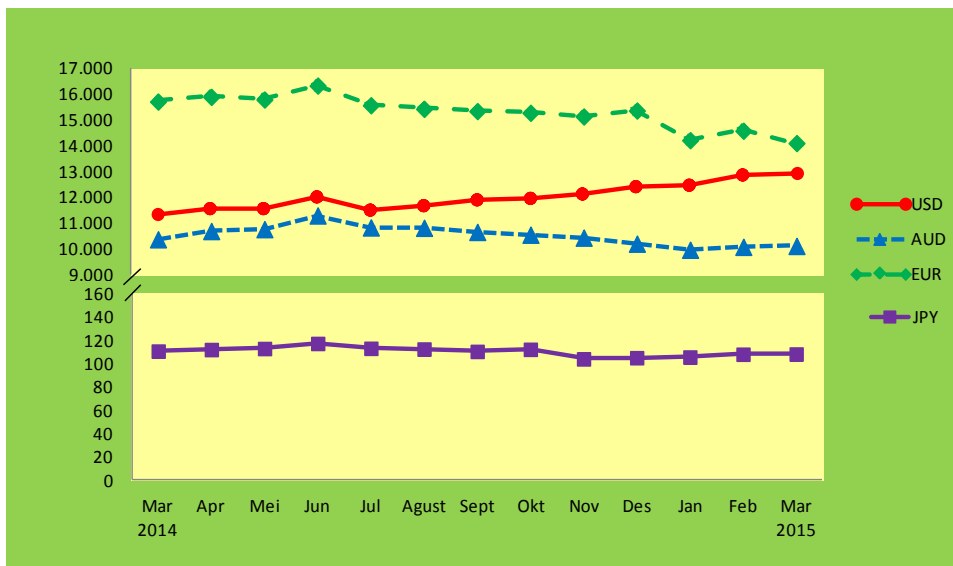
1. Nilai tukar rupiah terhadap euro (kurs tengah), pada minggu terakhir Februari 2015 dan minggu terakhir Maret 2015 tertinggi terjadi berturut-turut di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Riau yakni Rp14.770,94 dan Rp14.450,00 per euro. Sementara itu nilai tukar terhadap euro terendah tercatat di Provinsi Aceh sebesar Rp14.350,00 per euro pada minggu terakhir Februari 2015 dan di Provinsi Maluku sebesar Rp13.671,00 per euro pada minggu terakhir Maret 2015.
2. Selama Maret 2015 terjadi depresiasi kurs rupiah terhadap euro jika dibanding dengan minggu terakhir Februari 2015. Secara rata-rata di 34 provinsi, rupiah terapresiasi sebesar 112,52 poin di minggu pertama dan 477,84 poin di minggu terakhir atau menguat masing-masing sebesar 0,77 persen dan 3,28 persen dibanding minggu terakhir Februari 2015.
3. Pada minggu pertama Maret 2015, nilai tukar rupiah mengalami penguatan tertinggi di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 265,31 poin atau 1,80 persen. Pada minggu terakhir penguatan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku yang mencapai 953,00 poin atau 6,52 persen. Sedangkan penguatan terendah terjadi di Provinsi Riau sebesar 175,00 poin atau 1,20 persen.

Rupiah terapresiasi 477,84 poin atau 3,28 persen terhadap euro di Maret 2015

Grafik 23.1
Persentase Perkembangan Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR
 (Maret dibanding Februari M.IV)



Grafik 23.2
Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD, AUD, JPY, dan EUR



XXIV. SUPLEMEN: METODOLOGI

1. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan positif Indeks Harga Konsumen (IHK), Sebaliknya, perubahan negatif IHK disebut deflasi, IHK tersebut dihitung dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres*,

Bahan dasar penyusunan diagram timbang (bobot) IHK adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH) atau *Cost of Living Survey*, SBH diadakan 5 (lima) tahun sekali, SBH terakhir diadakan tahun 2012, mencakup 136,080 rumahtangga di Indonesia yang dipantau baik pengeluaran konsumsinya maupun jenis barang/jasa yang dikonsumsi selama setahun penuh,

Berdasarkan hasil SBH diperoleh paket komoditas yang representatif, dapat dipantau harganya, dan selalu tersedia di pasaran, Paket komoditas nasional sebanyak 859 barang/jasa, bertambah dari 774 barang/jasa pada paket komoditas tahun 2007, Hal ini sejalan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat, Bobot awal setiap barang/jasa merupakan persentase nilai konsumsi setiap barang/jasa terhadap total rata-rata nilai konsumsi per rumah tangga per bulan, berdasarkan hasil SBH, Sejak Januari 2014, penghitungan inflasi mulai menggunakan tahun dasar 2012 (sebelumnya menggunakan tahun dasar 2007) berdasarkan hasil SBH 2012, Cakupan kota bertambah dari 66 menjadi 82 kota,

Jumlah barang/jasa yang dicakup bervariasi antarkota, yang terkecil di Kota Singaraja sebanyak 225 barang/jasa, sedangkan yang terbanyak di Jakarta sebanyak 462 barang/jasa, Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam *Classification of Individual Consumption According to Purpose* (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga,

Inflasi umum (*headline inflation*)

Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi *administered prices*, dan inflasi *volatile goods*,

a. Inflasi inti (*core inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum, seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran, yang sifatnya cenderung permanen, *persistent*, dan bersifat umum, Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasa inti sebanyak 751, antara lain: kontrak rumah, upah buruh, mie, susu, mobil, sepeda motor, dan sebagainya,

b. Inflasi yang harganya diatur pemerintah (*administered prices inflation*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya secara umum diatur oleh pemerintah, Berdasarkan SBH 2012 jumlah barang/jasanya sebanyak 23, antara lain: bensin, tarif listrik, rokok, dan sebagainya,

c. Inflasi bergejolak (*volatile goods*)

Inflasi komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak, Berdasarkan tahun dasar 2012, inflasi *volatile goods* masih didominasi bahan makanan, sehingga sering disebut juga sebagai inflasi *volatile foods*, Jumlah komoditas sebanyak 85, antara lain : beras, minyak goreng, cabai, daging ayam ras, dan sebagainya,

Responden

Harga dari paket komoditas dikumpulkan/dicatat setiap hari, setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap bulan dari pedagang atau pemberi jasa eceran, Mereka termasuk yang berada di pasar tradisional, pasar modern, dan outlet mandiri (seperti toko eceran, praktek dokter, restoran siap saji, bengkel, rumah tangga yang mempunyai pembantu, dan sebagainya),

2. Produk Domestik Bruto

PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (produk) akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDB atas dasar harga berlaku (nominal PDB) dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDB adalah (1) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari proses produksi setiap lapangan usaha/aktivitas ekonomi, (2) pendekatan pendapatan, menghitung semua komponen nilai tambah, dan (3) pendekatan pengeluaran, menghitung semua komponen pengeluaran PDB. Secara teoritis, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan nilai PDB yang sama.

3. Ekspor-Impor

Data Nonmigas diperoleh dari KPPBC (Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai), data Migas dari KPPBC, Pertamina dan BP Migas, Sistem pencatatan statistik ekspor menggunakan *General Trade* (semua barang yang keluar dari Daerah Pabean Indonesia tanpa kecuali dicatat), sedangkan impor pada awalnya menggunakan *Special Trade* (dicatat dari Daerah Pabean Indonesia kecuali Kawasan Berikat yang dianggap sebagai “luar negeri”), namun sejak bulan Januari 2008 sistem pencatatan statistik impor juga menggunakan *General Trade*, Sistem pengolahan data menggunakan sistem *carry over* (dokumen ditunggu selama satu bulan setelah transaksi, apabila terlambat dimasukkan pada pengolahan bulan berikutnya),

Data ekspor-impor yang disajikan pada bulan terakhir merupakan angka sementara

4. Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi, Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Data dasar perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 adalah data penduduk hasil SP2010. Penghitungan proyeksi penduduk ini dilakukan dengan menggunakan program RUP (*Rural Urban Projection*).

Penghitungan proyeksi penduduk mempertimbangkan perapihan umur, dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan yang ada dalam data. Penentuan asumsi merupakan proses yang paling penting, mencakup asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Asumsi kelahiran dibuat berdasarkan tren tingkat kelahiran di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan berhubungan dengan tingkat kelahiran di masa mendatang. Asumsi tingkat kematian dibuat berdasarkan tren tingkat kematian di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang dilakukan terkait dengan kesehatan. Asumsi migrasi, untuk proyeksi nasional menyangkut migrasi internasional (melintasi batas negara) masih dianggap nol, yaitu seimbang antara yang keluar dan masuk. Sedangkan untuk proyeksi provinsi diperhitungkan migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas provinsi.

Proyeksi penduduk Indonesia dibangun dengan dasar kesepakatan dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga terkait, akademisi, dan pakar kependudukan.

Hasil proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan maupun evaluasi kinerja pemerintah.

5. Ketenagakerjaan

Data diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pengumpulan data berbasis sampel, dengan pendekatan rumah tangga. Estimasi ketenagakerjaan Februari 2014 menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk, sedangkan Februari–Agustus 2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk yang digunakan pada Februari 2014

Definisi yang digunakan antara lain:

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), Pekerja Tidak Penuh terdiri dari:

Setengah Penganggur (*Underemployment*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).

Pekerja Paruh Waktu (*Part time worker*) adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Pengangguran Terbuka (*Unemployment*), adalah mereka yang tidak bekerja tetapi berharap mendapatkan pekerjaan, yang terdiri dari mereka yang mencari

pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

6. Upah Buruh

Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh, Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan upah nominal buruh tani dan upah buruh industri menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa.

Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani, Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan, Sedangkan data upah buruh industri dikumpulkan melalui Survei Upah Buruh dengan responden perusahaan Industri besar dan sedang.

Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 32 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 66 kota, Sedangkan Survei Upah Buruh dilaksanakan di 33 provinsi.

7. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012=100

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Indeks harga yang diterima petani (I_t) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Indeks harga yang dibayar petani (I_b) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.

NTP dihitung dengan menggunakan formula:

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Formula atau rumus yang digunakan dalam penghitungan It dan Ib adalah formula Indeks Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres Indices*). Pengumpulan data harga untuk penghitungan NTP dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dan Survei Konsumen Perdesaan, dengan cakupan 33 provinsi di Indonesia yang meliputi lima sub sektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan. Responden Survei Harga Perdesaan adalah petani produsen, sedangkan responden Survei Harga Konsumen Perdesaan adalah pedagang di pasar perdesaan.

NTUP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari BPPBM. Dengan dikeluarkannya konsumsi rumah tangga dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya.

8. Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan

Harga di Tingkat Petani adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditemukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya, sebelum dikenakan ongkos angkut pasca panen.

Harga di Tingkat Penggilingan adalah harga di tingkat petani ditambah dengan besarnya biaya ke penggilingan terdekat.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga minimal yang harus dibayarkan pihak penggilingan kepada petani sesuai dengan kualitas gabah sebagaimana yang telah ditetapkan Pemerintah. Penetapan harga dilakukan secara kolektif antara Departemen Pertanian, Menko Bidang Perekonomian, dan Bulog.

Gabah Kering Panen (GKP) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 25,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 10,0 persen.

Gabah Kering Giling (GKG) adalah gabah yang mengandung kadar air maksimum sebesar 14,0 persen dan hampa/kotoran maksimum 3,0 persen.

Gabah Kualitas Rendah adalah gabah yang mengandung kadar air minimum dari 25,0 persen dan hampa/kotoran minimum 10,0 persen.

Survei Monitoring Harga Gabah dilaksanakan di 25 propinsi di Indonesia yang meliputi 158 kabupaten terpilih (sampel). Dari masing-masing kabupaten terpilih diambil tiga kecamatan tetap dan satu kecamatan tidak tetap. Responden adalah petani produsen yang melakukan transaksi penjualan gabah. Pencatatan harga dilaksanakan setiap bulan, tetapi saat panen raya (Maret s.d. Mei dan Agustus)

pencatatan harga dilakukan setiap minggu. Panen dengan sistem tebasan tidak termasuk dalam pencatatan ini.

Beras Kualitas Premium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) maksimum 10 persen.

Beras Kualitas Medium adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 10,1-20 persen.

Beras Kualitas Rendah adalah kualitas beras dengan kadar patah (*broken*) 20,1 - 25 persen.

Survei harga produsen beras di tingkat penggilingan dilakukan di 26 provinsi. Responden survei harga produsen beras di penggilingan adalah unit penggilingan di tingkat kecamatan yang memiliki kapasitas giling cukup besar dan dianggap representatif. Jumlah sampel survei tersebut sebanyak 478 penggilingan, dengan periode survei dilakukan setiap bulan.

9. A. Indeks Harga Produsen (IHP)

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga eceran. Selain itu dapat juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi (PDB/PDRB), distribusi barang, margin perdagangan, dan sebagainya.

Sesuai dengan *Manual Producer Price Index (PPI)*, penghitungan IHP yang ideal dirancang menurut tingkatan produksi-*Stage of Production (SoP)*, yakni *preliminary demand* (produk awal), *intermediate demand* (produk antara), dan *final demand* (produk akhir). Namun IHP (2010=100) yang disajikan BPS baru mencakup *final demand* (produk akhir).

IHP dihitung menggunakan formula *Laspeyres* yang dimodifikasi, dengan tahun dasar 2010=100. Hal ini berkaitan dengan sumber data yang digunakan untuk menyusun diagram timbang yaitu Tabel Input-Output 2010 Updating. Data IHP tersebut disajikan BPS secara triwulanan, dan baru sampai tingkat/level nasional dalam bentuk indeks gabungan, indeks sektor dan indeks subsektor.

Harga yang digunakan untuk menghitung IHP bersumber dari Survei Harga Produsen dan data sekunder. Pengumpulan harga dilakukan setiap bulan (tanggal 1-15). Pemilihan responden dilakukan secara *purposive*, sedangkan pemilihan komoditas menggunakan kriteria *cut off point*. Pengelompokan komoditas dalam IHP didasarkan pada Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI).

Mulai tahun 2014, pengumpulan data Survei Harga Produsen mengalami perluasan cakupan yaitu Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman. Pengumpulan data dilakukan setiap bulan, tanggal 1-15 di 18 provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua). Pada triwulan I-2015, penyajian data IHP (2010=100) selain terdiri dari IHP Gabungan yang meliputi Sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, dan Industri Pengolahan, juga disajikan IHP Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman.

B. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

IHPB adalah harga indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah, Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri ataupun yang diekspor dan komoditas yang berasal dari impor,

IHPB Konstruksi adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk keperluan perencanaan pembangunan yang dapat menggambarkan perkembangan statistik harga bahan bangunan/konstruksi dapat digunakan sebagai dasar untuk penghitungan eskalasi nilai kontrak sesuai dengan Keppres No,8 Tahun 2003, dan telah direkomendasikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No,105/PMK,06/2005 tanggal 9 November 2005, serta didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No,11/SE/M/2005 tanggal 16 Desember 2005, Diagram timbang yang digunakan dalam penghitungan IHPB Konstruksi diambil dari data *Bill of Quantity* (BoQ) kegiatan konstruksi,

Penghitungan IHPB tahun dasar 2010=100 mencakup 317, sedangkan perdagangan internasional masing-masing mencakup 93 kelompok Harmonized System (HS) untuk IHPB ekspor maupun impor, IHPB disajikan dalam 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, dan Sektor Industri, Data harga yang digunakan dalam penghitungan IHPB dikumpulkan dari 34 provinsi di Indonesia setiap bulannya, Formula yang digunakan untuk menghitung IHPB adalah formula Modified Laspeyres, Penimbang (*weight*) yang digunakan dalam penghitungan IHPB adalah nilai barang yang dipasarkan oleh pedagang grosir untuk setiap komoditas terpilih yang diolah dari Tabel Input-Output 2010 Updating,

10. Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Indeks Tendensi Bisnis (ITB) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh BPS

bekerja sama dengan Bank Indonesia, Survei ini dilakukan setiap triwulan di beberapa kota besar terpilih di seluruh provinsi di Indonesia, Jumlah sampel STB sebanyak 2,400 perusahaan besar dan sedang, dengan responden pimpinan perusahaan,

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan BPS melalui Survei Tendensi Konsumen (STK), Sebelum triwulan I-2011, BPS hanya melaksanakan STK di wilayah Jabodetabek, tetapi sejak triwulan I-2011 pelaksanaan STK diperluas di seluruh provinsi, Jumlah sampel pada triwulan I-2012 sebanyak 14,232 rumah tangga,

ITB dan ITK dihitung dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa variabel, Tujuan penghitungan ITB dan ITK adalah memberikan informasi dini tentang perkembangan perekonomian baik dari sisi pengusaha maupun sisi konsumen serta perkiraan kondisi bisnis dan kondisi konsumen triwulan mendatang,

11. Produksi Tanaman Pangan

Angka produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas (rata-rata hasil per hektar),

Angka Sementara (ASEM) 2013 diperoleh dari hasil perkalian antara realisasi luas panen dan produktivitas pada periode Januari–Desember 2013 tetapi masih belum final karena masih menunggu beberapa laporan yang belum masuk,

Data realisasi luas panen bersumber dari Survei Pertanian yang dikumpulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sedangkan realisasi produktivitas bersumber dari Survei Ubinan yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten/Kota bersama Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat

Perhitungan produksi ASEM 2013 dilakukan per-*subround* sebagai berikut:

1. **Produksi *subround* 1** (Januari–April) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 1 dengan realisasi produktivitas *subround* 1,
2. **Produksi *subround* 2** (Mei–Agustus) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 2 dengan realisasi produktivitas *subround* 2,
3. **Produksi *subround* 3** (September–Desember) merupakan hasil perkalian antara realisasi luas panen *subround* 3 dengan realisasi produktivitas *subround* 3,
4. **Produksi Januari–Desember** merupakan penjumlahan produksi *subround* 1, *subround* 2, dan *subround* 3,

5. **Luas panen Januari–Desember** merupakan penjumlahan luas panen *subround 1*, *subround 2*, dan *subround 3*,
6. **Produktivitas Januari–Desember** adalah hasil bagi antara produksi Januari–Desember dengan luas panen Januari–Desember,

12. Industri

Industri yang dimaksudkan adalah industri manufaktur (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro, Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang, perusahaan industri berskala kecil adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 orang, sedangkan perusahaan industri berskala mikro adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang, Indeks produksi industri besar dan sedang merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) yang dilakukan secara bulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala besar dan sedang, Banyaknya perusahaan IBS yang ditetapkan sebagai sampel adalah 1.703 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi bulanan menggunakan “Metode Divisia”, Indeks produksi industri mikro dan kecil merupakan hasil pengolahan data hasil dari Sampel Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang dilakukan secara triwulanan, dengan sampling unit perusahaan industri berskala mikro dan kecil, Banyaknya perusahaan IMK yang ditetapkan sebagai sampel adalah 24.000 perusahaan, Metode penghitungan indeks produksi IMK triwulanan menggunakan “Metode Paasche yang dimodifikasi”, Semua Indeks disajikan pada level 2-digit KBLI 2009 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009), Indeks produksi IBS dan IMK digunakan sebagai dasar penghitungan tingkat pertumbuhan produksi IBS dan IMK, yang disajikan dalam BRS Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur triwulanan,

13. Pariwisata

Data wisatawan mancanegara (wisman) diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia, Wisman yang masuk dirinci menurut WNI (berdasarkan jenis paspor) dan WNA (berdasarkan jenis visa), termasuk di dalamnya *Crew WNA*, baik laut maupun udara, Untuk data karakteristik wisman yang lebih detail diperoleh dari hasil pengolahan kartu kedatangan dan keberangkatan (*arrival/departure card*),

Data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel diperoleh dari hasil Survey Hotel yang dilakukan setiap bulan terhadap seluruh hotel bintang serta sebagian (sampel) hotel non bintang (hotel melati) di seluruh Indonesia, Data yang dikumpulkan meliputi jumlah kamar tersedia, jumlah kamar terpakai, jumlah tamu yang datang (menginap) maupun jumlah tamu yang keluar dari hotel setiap harinya,

Wisatawan mancanegara (wisman) ialah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun,

TPK Hotel adalah persentase banyaknya malam kamar yang dihuni terhadap banyaknya malam kamar yang tersedia,

Rata-rata lamanya tamu menginap adalah hasil bagi antara banyaknya malam tempat tidur yang terpakai dengan banyaknya tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya.

14. Transportasi Nasional

Data transportasi diperoleh setiap bulan dari PT (Persero) Angkasa Pura I dan II, Kantor Bandara yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara, PT (Persero) KAI (Kantor Pusat dan Divisi Jabodetabek), PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I s,d, IV, dan Kantor Pelabuhan yang dikelola Ditjen Perhubungan Laut, Data yang disajikan mencakup jumlah penumpang berangkat dan jumlah barang dimuat dalam negeri, Khusus untuk transportasi udara disajikan jumlah penumpang berangkat baik domestik maupun internasional.

15. Kemiskinan

- a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- b. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin

- adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
- c. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
 - d. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.
 - e. Gini Rasio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio bernilai 0 berarti pemerataan sempurna (seluruh penduduk mempunyai pendapatan yang sama). Sementara Gini Rasio bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Nilai Gini Rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
 - f. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan dan Gini Rasio September 2014 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Bulan September 2014, Jumlah sampel sebesar $\pm 75,000$ rumah tangga dimaksudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi, Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

16. Produksi Hortikultura

Pengumpulan data produksi dan luas panen hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Tingkat Kecamatan dengan metode perkiraan pengamatan lapang. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan daftar isian Statistik Pertanian Hortikultura (SPH). Daftar nama kecamatan yang digunakan keadaan pada bulan Desember 2012 dengan jumlah kecamatan sebanyak 6.622 kecamatan. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pencatatan dan pengolahan baik di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi maupun tingkat nasional.

17. Struktur Ongkos Usaha Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan 2014

Survei usaha rumah tangga pertanian menggunakan 2 jenis kerangka sampel yaitu kerangka sampel pemilihan blok sensus dan pemilihan rumah tangga. Untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 yang distratifikasi menurut jenis komoditas utama yang diurutkan menurut strata.

Blok sensus yang memenuhi syarat (*eligible*) adalah blok sensus yang memiliki jumlah *eligible* rumah tangga sebanyak 10 atau lebih. Sedangkan, kerangka sampel untuk pemilihan sampel rumah tangga, yaitu daftar nama kepala rumah tangga usaha tanaman pangan hasil pemutakhiran rumah tangga di setiap blok sensus terpilih yang diurutkan menurut komoditas utama dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, budidaya ikan dan penangkapan ikan, serta tanaman kehutanan siap tebang.

Komoditas yang dicakup dalam survei ini adalah komoditas yang menjadi prioritas pembangunan pertanian dan memiliki batas minimal usaha yang ditentukan kementerian terkait.

Batas Minimal Usaha dan Jumlah Sampel

Subsektor Pertanian	Komoditas	Batas Minimal Usaha	Jumlah Sampel		
			Musim Kemarau	Musim Hujan	Jumlah
Tanaman Pangan	Padi Sawah	1.700 m ²	55.964	61.291	117.255
	Padi Ladang	1.700 m ²	2.448	3.949	6.397
	Jagung	1.500 m ²			67.100
	Kedelai	2.000 m ²			9.382
Tanaman Hortikultura	Cabai Merah	200 m ²	13.542	6.090	19.632
	Cabai Rawit	200 m ²	24.067	10.265	34.332
	Bawang Merah	140 m ²	6.604	2.993	9.597
	Jeruk	25 pohon			7.300
Tanaman Perkebunan	Kelapa Sawit	15 pohon			27.726
	Karet	250 pohon			46.569
	Tebu	650 m ²			8.831
Peternakan	Sapi Perah				1.420
	Sapi Potong				59.537
	Ayam Ras Pedaging				897
	Ayam Ras Petelur				568
Budidaya Perikanan	Rumput Laut				8.011
	Bandeng				9.444
	Udang Windu				3.550
Penangkapan Ikan	Kapal Motor				6.733
	Perahu Motor Tempel				22.354
Budidaya Kehutanan	Jati				28.917
	Mahoni				9.880
	Sengon				26.203

Metode sampling yang digunakan adalah dua tahap. Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus, dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga usaha subsektor hasil pencacahan lengkap (ST2013-L). Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih sejumlah rumah tangga secara sistematis. Rumah tangga usaha pertanian terpilih diwawancarai oleh petugas yang telah dilatih.

Pengumpulan data biaya produksi berpedoman pada prinsip *opportunity cost*, yaitu dilakukan penilaian harga pasar untuk lahan milik sendiri, benih produksi sendiri, dan pekerja keluarga tidak dibayar.

Usaha pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga).

Rumah tangga usaha pertanian adalah rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Untuk tanaman pangan, termasuk juga yang bertujuan untuk konsumsi sendiri atau tidak dijual.

Nilai Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumahtangga dari usaha per satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam.
- Tanaman hortikultura: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan usaha per 100 pohon tanaman menghasilkan selama setahun yang lalu untuk tanaman tahunan (jeruk).
- Tanaman perkebunan: adalah total nilai produksi baik produksi utama maupun produksi ikutan dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha satu hektar komoditas tanaman perkebunan untuk tanaman semusim (tebu) dan tanaman tahunan (kelapa sawit dan karet) selama setahun yang lalu.
- Peternakan: adalah total nilai produksi yang bersumber dari penambahan bobot, produksi telur dan susu, produksi ikutan, dan jasa peternakan selama setahun dalam nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari usaha peternakan per ekor (sapi potong dan sapi perah) atau per 1.000

ekor (ayam ras petelur), atau per 5.000 ekor (ayam ras pedaging) yang cara pemeliharaan tenak dikandangkan.

- Budidaya ikan: adalah nilai produksi budidaya yang dihasilkan rumah tangga usaha budidaya ikan per siklus per satuan tertentu (rumput laut, bandeng dan udang windu dalam satuan hektar).
- Penangkapan ikan: adalah nilai dari produksi hasil tangkapan rumah tangga usaha penangkapan ikan dalam satu trip yang dihitung mulai dari berangkat melakukan penangkapan ikan sampai kembali ke tempat asal.
- Tanaman kehutanan: adalah nilai produksi (selisih nilai dari tanaman kehutanan pada saat pencacahan dengan nilai tanaman setahun yang lalu untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang) dan ongkos produksi untuk usaha budidaya tanaman kehutanan yang siap tebang dan atau ditebang selama setahun yang lalu per 100 pohon.

Ongkos/Biaya Produksi:

- Tanaman pangan: adalah total ongkos/biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk usaha satu hektar komoditas tanaman pangan per musim tanam yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (padi adalah gabah kering panen/GKP, jagung adalah pipilan kering, dan kedelai adalah biji kering) dan sudah memasukkan perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas bunga yang dihitung dengan cara imputasi sesuai harga pasar.
- Tanaman hortikultura: adalah rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk usaha satu hektar tanaman hortikultura per musim tanam untuk tanaman semusim (cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah) dan per 100 pohon untuk tanaman tahunan yang menghasilkan (jeruk) pada periode pencacahan yang mencakup kegiatan produksi hingga kualitas standar (cabai merah dan cabai rawit adalah buah segar dengan tangkai, bawang merah adalah umbi kering panen dengan daun, dan jeruk adalah buah segar) dan sudah memperkirakan/mengimputasi besarnya sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan bunga kredit model sendiri/bebas bunga.

- Tanaman perkebunan: adalah seluruh ongkos/biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu untuk seluruh bidang tanaman untuk tanaman semusim dan pada seluruh pengeluaran tanaman perkebunan semusim yang panen. Benih, tanaman pelindung, pupuk, stimulan, dan pestisida yang bukan pembelian diperkirakan nilai sesuai harga setempat.
- Peternakan: adalah biaya yang benar-benar telah digunakan (bukan jumlah yang dibeli/disimpan) selama setahun yang lalu oleh rumah tangga yang cara pemeliharaan ternak dikandangan. Biaya tersebut adalah biaya yang benar-benar dibayarkan oleh peternak ditambah dengan imputasi dari biaya yang tidak dibayarkan oleh peternak seperti biaya pakan yang tidak dibeli, biaya pengurusan ternak oleh pekerja tidak dibayar (peternak atau pekerja keluarga).
- Budidaya ikan: adalah biaya yang meliputi biaya benih/bibit, pupuk dan obat-obatan, pakan dihitung baik yang berasal dari pembelian maupun bukan pembelian (diperkirakan nilainya), upah pekerja baik pekerja dibayar maupun pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga (diperkirakan upahnya), dan biaya lainnya mencakup sewa lahan (termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri dan bebas sewa), alat/sarana usaha (termasuk perkiraan bebas sewa dan perbaikan kecil/pemeliharaan) dan lainnya (bunga kredit/pinjaman, penyusutan barang modal, pajak tak langsung, pengangkutan, jasa perikanan, dan sebagainya).
- Penangkapan ikan: adalah biaya yang meliputi upah pekerja dihitung untuk pekerja dibayar maupun perkiraan upah untuk pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga, bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah), oli/pelumas, garam/es, perbekalan baik yang berasal dari pembelian maupun perkiraan nilai dari bukan pembelian, biaya lainnya (sewa alat/sarana, penyusutan barang modal), dan lainnya (umpan, pajak tak langsung, jasa perikanan, wadah, dan sebagainya).
- Tanaman kehutanan: adalah seluruh ongkos/biaya yang dikeluarkan yang sudah termasuk perkiraan sewa lahan milik sendiri/bebas sewa, perkiraan sewa alat/sarana usaha milik sendiri/bebas sewa, perkiraan upah pekerja tidak dibayar/keluarga, dan perkiraan bunga kredit modal sendiri/bebas sewa selama setahun yang lalu per 100 pohon untuk tanaman yang sudah dipanen/ditebang dan atau tanaman siap panen/tebang (tanaman yang sudah cukup umur dan secara ekonomis sudah dapat dipanen/ditebang atau digunakan kayunya).

Periode tanam musim kemarau (MK) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Februari–September 2013 dan atau Februari–Mei 2014.

Periode tanam musim hujan (MH) adalah rumah tangga yang menanam tanaman pada periode Oktober 2013–Januari 2014.

Produktivitas ayam ras petelur adalah jumlah butir telur yang dihasilkan dari 1.000 ekor ayam ras petelur produktif per hari.

Survei Kehutanan 2014

Metode sampling yang digunakan adalah metode sampling dua tahap terstratifikasi. Pada tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus (blok sensus biasa dan blok sensus persiapan bermuatan cakupan ST2013 pada desa-desa yang terletak di kawasan hutan (yang di-*overlay* dengan peta kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan) dan diurutkan menurut strata), dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proportional to size* dengan *size* jumlah rumah tangga hasil ST2013-L. Tahap kedua, dari kerangka sampel rumah tangga dipilih 10 rumah tangga secara sistematis. Jumlah sampel untuk Survei Kehutanan sebanyak 99.993 rumah tangga.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Rumah tangga di sekitar kawasan hutan adalah rumah tangga yang bermukim di desa yang berada di dalam dan di tepi kawasan hutan.

Perladangan berpindah adalah suatu kegiatan usaha tani tanaman semusim/pangan secara tradisional/pindah-pindah di dalam maupun di luar kawasan hutan tanpa memperhatikan aspek pelestarian sumber daya hutan, tanah, dan air.

Pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar adalah kegiatan memungut/mengambil hasil hutan dan juga menangkap satwa-satwa liar di hutan seperti: memungut kayu, getah, kulit kayu, buah-buahan, rumput, rotan, tumbuhan obat, gaharu, serta menangkap ayam hutan, babi hutan, rusa, dan sebagainya.

18. Indeks Perilaku Anti Korupsi

- i. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2014 adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bappenas. SPAK 2014 merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga dilaksanakan November 2014 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga. SPAK 2014 mencakup tiga fenomena korupsi yaitu penyuapan

- (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. IPAK 2014 merupakan kelanjutan dari baseline IPAK 2012.
- ii. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2014 menggunakan *explanatory factor analysis*.
 - iii. IPAK disusun berdasarkan dua substansi utama yakni pendapat tentang kebiasaan terkait akar dan perilaku anti korupsi di masyarakat serta pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik.

19. Perdagangan Komoditas Strategis 2014

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi 2014 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup 133 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 99 kabupaten/kota. Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil baik sebagai distributor, subdistributor, agen, subagen, pedagang grosir, eksportir, importir, maupun pengecer. Komoditi yang dicakup dalam survei ini adalah sebanyak 4 komoditi, yaitu: minyak goreng, terigu, garam, dan susu bubuk. Produsen komoditi yang diteliti didekati melalui industri skala besar dan sedang. Kerangka sampel yang dibentuk ada dua, yaitu kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Banyaknya sampel perusahaan/usaha/pengusaha perdagangan menengah dan besar serta produsen secara keseluruhan sebanyak 3.500 perusahaan. Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditi utama yang diperdagangkan berdasarkan 4 komoditi terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditi. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

20. Indeks Kebahagiaan

Pengembangan indikator untuk mengukur tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Kebahagiaan Indonesia dirilis pertama kali pada tahun 2013 berdasarkan hasil studi dengan representasi estimasi tingkat nasional. Pada tahun 2014, BPS kembali melaksanakan pengukuran tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 2014 dengan cakupan sampel yang dapat digunakan untuk estimasi tingkat nasional maupun provinsi.

SPTK 2014 dilaksanakan untuk menghasilkan indikator kebahagiaan penduduk Indonesia dengan pendekatan kepuasan hidup. Responden SPTK 2014 adalah kepala rumah tangga atau pasangan kepala rumah tangga dengan jumlah sampel sebesar 70.631 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi. Menurut wilayah, komposisi responden di perkotaan lebih besar dibanding perdesaan, masing-masing 57,84 persen dan 42,16 persen. Sebanyak 64,34 persen responden adalah kepala rumah tangga, sedangkan lainnya adalah pasangan kepala rumah tangga (istri/suami). Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden cukup seimbang antara laki-laki (50,98 persen) dan perempuan (49,02 persen). Sebagian besar responden berpendidikan tamat SD/MI (27,60 persen) dan tamat SMA/SMK/MA (21,78 persen). Hanya sekitar 9,2 persen responden yang tamat perguruan tinggi.

Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek kehidupan tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan meliputi kepuasan terhadap: 1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan. Penilaian terhadap tingkat kepuasan hidup didasarkan pada evaluasi terhadap kondisi obyektif (faktual) yang dialami oleh responden.

Setiap aspek kehidupan memiliki besaran kontribusi yang berbeda-beda terhadap indeks kebahagiaan. Hal ini terjadi karena perbedaan penilaian mengenai derajat pentingnya setiap aspek kehidupan terhadap tingkat kebahagiaan secara keseluruhan. Semakin besar kontribusi suatu aspek kehidupan, menunjukkan semakin penting aspek tersebut bagi indeks kebahagiaan. Kontribusi setiap aspek kehidupan terhadap indeks kebahagiaan dihitung secara proporsional berdasarkan sebaran data dengan teknik Analisis Faktor (*Exploratory Factor Analysis*).

21. Pendataan Potensi Desa (Podes)

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu sepuluh tahun untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, ataupun Sensus Ekonomi. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Podes 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (yaitu: desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang

masih dibina oleh kementerian terkait). Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Salah satu tujuan podes adalah menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi wilayah, seperti perkotaan-perdesaan, wilayah tertinggal, wilayah pesisir dan sebagainya. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan klasifikasi wilayah desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, salah satu komponen yang digunakan untuk pengalokasian dana desa adalah IKG.

BPS telah menyusun IKG untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. IKG disusun melalui metode Analisis Faktor. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala 0–100 yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.

22. Nilai Tukar Eceran Rupiah

Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata uang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor, *swap*, *derivative*, dan lain-lain, dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia. Di sisi lain, transaksi eceran penukaran mata uang melalui *money changer* (tempat penukaran mata uang) yang tersebar di seluruh Indonesia menggambarkan tingkat retail *spot rate* suatu mata uang.

BPS melaporkan informasi nilai tukar eceran rupiah secara periodik. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan untuk melihat pengaruh nilai tukar transaksi besar terhadap nilai tukar transaksi eceran, perkembangan nilai tukar rupiah transaksi eceran, melengkapi informasi real-time yang beredar di internet, dan sebagainya.

Data nilai tukar eceran rupiah diperoleh dari Survei Monitoring Valas yang dilakukan di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan sampel sebanyak 137 perusahaan. Responden Survei Monitoring Valas adalah pedagang valuta asing (*money changer*) yang berlokasi di ibukota provinsi atau kabupaten/kota yang melakukan transaksi mata uang asing. Survei Monitoring Valas dilakukan pada hari Rabu setiap minggu. Data yang dikumpulkan adalah kurs beli dan kurs jual kemudian dihitung kurs

tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual. Data bulanan yang disajikan menunjukkan data minggu terakhir di bulan tersebut.

Pelaporan nilai tukar rupiah Maret 2015 mencakup 34 provinsi di Indonesia yang merupakan keseluruhan wilayah provinsi di Indonesia, termasuk provinsi baru yaitu Kalimantan Utara. Sementara itu mata uang asing yang dimonitor mencakup empat jenis, yaitu dolar Amerika (USD), dolar Australia (AUD), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR) dengan alasan merupakan mata uang yang hampir selalu diperdagangkan di 34 provinsi tersebut, sehingga dapat dimonitor transaksinya.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2087-930X



9 772087 930006